



Katalog: 4103021

PROFIL ANAK USIA DINI 2023

Volume 4, 2023



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 4103021

PROFIL ANAK USIA DINI 2023

Volume 4, 2023

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Profil Anak Usia Dini 2023

Volume 4, 2023

Katalog : 4103021
Nomor Publikasi: 04200.2224

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman: xxxii+199 halaman

Penyusun Naskah:
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penyunting:
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Pembuat Kover:
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penerbit:
© Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:
flaticon.com; freepik.com; canva.com; wepik.com;
pikart.web.bps.go.id

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun Profil Anak Usia Dini 2023

Pengarah:

Dr. Ateng Hartono SE, M.Si.

Penanggung Jawab:

Ahmad Avenzora, SE, MSE.

Penyunting:

Wachyu Winarsih, M.Si.
Ika Maylasari, SST., M.Si.
Yeni Rachmawati SST, M.Si.

Penulis dan Pengolah Data:

Mega Silviliyana, SST, M.E.K.K.
Karuniawati Dewi Ramadani S.Si, M.E.K.K.
Rini Sulistyowati, SST, M.E.K.K.
Nindya Riana Sari SST, M.Sc.
Ganish Anggraeni S.Tr.Stat.

Penata Letak:

Mega Silviliyana, SST, M.E.K.K.

KATA PENGANTAR

Usia dini merupakan fase emas dari masa pertumbuhan anak dimana kapasitas otak berkembang secara maksimal pada dimensi intelektual, emosi dan sosial anak. Pengembangan anak usia dini yang berkualitas telah diakui secara luas sebagai investasi utama terpenting dalam pengembangan manusia di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam membentuk generasi emas diperlukan suatu peta data yang akurat, komprehensif, dan terpercaya sebagai pijakan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan arah langkah pembangunan selanjutnya. Kehadiran data dan informasi mengenai anak usia dini yang dikemas dalam publikasi "Profil Anak Usia Dini 2023" diharapkan mampu menjadi barometer sebagai upaya dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi segala bentuk kebijakan maupun program yang telah diimplementasikan.

Publikasi ini memuat informasi anak usia dini yang dilihat dari berbagai aspek sesuai dengan sasaran PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan, yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021, dan data sekunder dari Kementerian/Lembaga.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya sehingga publikasi ini dapat diselesaikan. Semoga hasil karya ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang berkualitas.

Jakarta, Desember 2023
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti



RINGKASAN

Seribu hari pertama kehidupan merupakan fase penentu dalam kehidupan seorang anak. Pada periode tersebut, fondasi kesehatan serta pertumbuhan saraf yang optimal sepanjang hidup mulai dikembangkan. Selanjutnya, hingga 8 tahun pertama kehidupan, anak akan dihadapkan pada kondisi yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Fase tersebut menjadi jendela peluang yang krusial (*crucial window of opportunity*) untuk pendidikan. Ketika anak sehat, aman, dan memperoleh pembelajaran yang baik di tahun-tahun awal, mereka akan lebih mungkin mencapai potensi perkembangan secara penuh sebagai orang dewasa di masa mendatang.

Pengembangan anak usia dini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab bersama sebagai kolaborasi sektoral. Penetapan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan terkait secara simultan. Dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI 2020-2024 disebutkan bahwa tujuan PAUD HI yaitu terselenggaranya layanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

Data dan informasi terkait anak usia dini yang disajikan dalam publikasi Profil Anak Usia Dini 2023 diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pembangunan, sejak perencanaan hingga monitoring evaluasi kebijakan dan program yang diimplementasikan. Sebagian besar data dan informasi disajikan dalam publikasi ini dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 serta informasi lain yang bersumber dari Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021 dan data sekunder dari Kementerian/Lembaga.

Struktur penduduk pada tahun 2020 terlihat masih didominasi oleh penduduk usia produktif. Namun, dalam jangka panjang, perlahan tapi pasti Indonesia bergerak menuju *ageing population*. Jika di tahun 2020 proporsi

penduduk muda mendominasi komposisi penduduk, namun semakin lama penduduk yang lebih tua diproyeksikan semakin meningkat.

Hasil Susenas tahun 2023 mengestimasi sekitar 30,2 juta atau 10,91 persen dari total penduduk Indonesia merupakan anak usia dini berusia 0-6 tahun. Menurut jenis kelamin, persentase anak usia dini berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (51,02 persen berbanding 48,98 persen). Berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, persentase anak usia dini yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan (57,22 persen berbanding 42,78 persen). Jika dilihat berdasarkan kelompok umur tumbuh kembangnya, komposisi anak usia dini berada pada kelompok balita (1-4 tahun) sebesar 59,95 persen, disusul oleh anak prasekolah (5-6 tahun) 28,83 persen, dan bayi (<1 tahun) sebesar 11,22 persen. Berdasarkan wilayah, lebih dari separuh anak usia dini (52,24 persen) tinggal di Pulau Jawa, sementara separuh lainnya tersebar di pulau-pulau lain.

Hasil Susenas MSBP 2021 menunjukkan sebagian besar anak usia dini tinggal bersama dengan ayah dan ibu kandung, baik di perkotaan maupun perdesaan. Namun demikian, ternyata masih ada sekitar 7,48 persen anak usia dini tinggal bersama dengan orang tua tunggal dan 1,69 persen tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung.

Kebersamaan aktivitas anak usia dini dengan orang tua/wali dapat mempererat hubungan antara anak dengan orang tua/wali. Berdasarkan Susenas MSBP 2021, sekitar sembilan dari sepuluh anak usia dini melakukan aktivitas makan/belajar makan bersama orang tua/wali. Sekitar tujuh dari sepuluh anak usia dini melakukan aktivitas berbincang-bincang/mengobrol bersama dengan orang tua/wali. Namun demikian, ternyata persentase dibacakan buku cerita/dongeng dan belajar/membaca buku anak usia dini yang dilakukan bersama orang tua/wali masih sangat kecil, yaitu berturut-turut hanya sekitar 17,21 persen dan 11,12 persen. Padahal, kedua aktivitas ini sangat bagus untuk menambah literasi anak usia dini.

Peran aktif orang tua/wali dalam pengasuhan anak usia dini sangatlah diperlukan. Masih adanya sekitar 3,69 persen balita pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak perlu mendapat perhatian. Persentase balita yang pernah

mendapatkan pengasuhan tidak layak sedikit lebih besar terjadi pada perempuan daripada laki-laki, dan sedikit lebih besar terjadi di perdesaan daripada perkotaan. Dilihat menurut status bekerja ibu, persentase balita yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak pada ibu bekerja lebih besar daripada ibu yang tidak bekerja (5,88 persen berbanding 2,14 persen).

Kesehatan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kondisi badan yang sehat akan mendukung proses penerimaan stimulasi dan kegiatan fisik yang dilakukan anak. Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan sebesar 36,21 persen anak usia dini mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Pada tahun 2023, sedikitnya 17,27 persen anak usia dini mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-harinya (sakit). Sebagian besar anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan diobati, baik dengan mengobati sendiri maupun berobat ke fasilitas kesehatan atau tempat pengobatan lainnya. Sayangnya, sebesar 4,93 persen anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan tidak diobati.

Sementara itu, hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan pemanfaatan jaminan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap tidak sepenuhnya dilakukan oleh anak usia dini. Pada tahun 2023, sebesar 36,32 persen anak usia dini yang rawat jalan menggunakan jaminan kesehatan. Adapun untuk rawat inap, sebesar 67,12 persen anak usia dini yang pernah dirawat inap setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan.

Dilihat dari aspek nutrisi, hasil Susenas Maret tahun 2023 menunjukkan sebesar 73,97 persen anak usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI saja (asi eksklusif). Secara nasional, pemberian asi eksklusif sudah mencapai target yang ditetapkan Pemerintah melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 (target 60 persen). Dilihat dari status bekerja ibu, ibu yang tidak bekerja berkontribusi lebih besar terhadap capaian ASI eksklusif anak usia 0-5 bulan.

Selain asupan nutrisi, menjaga kesehatan untuk anak usia dini juga dilakukan dengan memberikan imunisasi sesuai jadwal. Pada tahun 2023, sedikitnya 6 dari 10 anak usia 12-23 bulan sudah mendapat imunisasi dasar

lengkap. Dilihat menurut tingkat pendidikan ibu, capaian imunisasi dasar lengkap meningkat seiring dengan peningkatan derajat pendidikan ibu.

Beralih ke aspek lingkungan, hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan sebesar 60,22 persen rumah tangga anak usia dini menempati rumah layak huni. Sebesar 91,15 persen rumah tangga anak usia dini memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, sedangkan 82,48 persen rumah tangga anak usia dini memiliki sanitasi layak. Di sisi lain, hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan sekitar 7 dari 10 anak usia dini (70,23 persen) tinggal bersama anggota rumah tangga yang perokok.

Pendidikan pada anak usia dini memegang peran yang sangat substansial dalam meningkatkan kualitas hidup anak di kemudian hari. Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa terdapat 27,38 persen anak usia dini yang pernah/sedang mengikuti pendidikan prasekolah. Sementara itu, jika dilihat pada indikator Angka Kesiapan Sekolah (AKS), capaiannya sekitar 76,54 persen, artinya sekitar 3 dari 4 peserta didik yang duduk di kelas 1 SD pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Selain pendidikan, pemanfaatan waktu luang untuk anak usia dini juga penting dilakukan untuk mengembangkan potensi anak secara optimal. Berdasarkan hasil Susenas MSBP 2021, terdapat 8,21 persen anak usia 5-6 tahun yang mengikuti kursus dalam setahun terakhir. Selain itu, terdapat 28,58 persen anak usia 5-6 tahun yang berolahraga dalam seminggu terakhir.

Pada era digital seperti sekarang ini, informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat diperoleh dengan mudah melalui berbagai media massa. Dari hasil Susenas MSBP 2021, terdapat 68,01 persen anak usia dini yang menonton televisi dalam seminggu terakhir. Dewasa ini, informasi tidak hanya didapatkan melalui televisi tetapi juga melalui gadget. Keberadaan gadget dan koneksi internet yang tentunya dapat mendukung berbagai bidang kehidupan manusia. Pada tahun 2023 terdapat 38,92 persen anak usia dini yang menggunakan *handphone* serta terdapat 32,17 persen anak usia dini yang mengakses internet.

Perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini menjadi salah satu fokus utama lainnya dalam pengembangan anak usia dini. Beberapa bentuk

perlindungan yang harus diberikan kepada anak seperti kepemilikan akta kelahiran, upaya kesehatan yang komprehensif, dan perlindungan khusus anak. Pada tahun 2023, sebanyak 86,33 persen anak usia dini (0-6 tahun) di Indonesia telah memiliki akta kelahiran. Namun, kesenjangan capaian antar provinsi masih lebar (capaian tertinggi DKI Jakarta 97,63 persen dan capaian terendah Papua 47,96 persen). Dalam bidang kesehatan, Susenas mencatat terdapat 14,80 persen rumah tangga dengan anak usia dini pernah menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain perlindungan dalam hal pemenuhan hak sipil dan kesehatan, anak usia dini juga memerlukan perlindungan khusus. Diantara 30 juta anak usia dini yang ada di Indonesia, sebanyak 0,04 persen pernah menjadi korban kejahatan dan sebanyak 12,92 persen hidup di bawah garis kemiskinan.

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Profil Anak Usia Dini 2023

Volume 4, 2023

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xxi
PENJELASAN TEKNIS	xxv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Kebijakan Terkait Anak Usia Dini	7
1.3 Data dan Informasi Anak Usia Dini untuk Pembangunan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 DEMOGRAFI	11
2.1 Komposisi Anak Usia Dini	13
2.2 Distribusi Anak Usia Dini	16
BAB 3 PENGASUHAN	25
3.1 Status Tinggal Bersama	27
3.2 Penggunaan Waktu Bersama Orang Tua/Wali	29
3.3 Pola Pengasuhan	30
3.4 Pengasuhan Alternatif	32

	Halaman
BAB 4 KESEHATAN DAN GIZI	41
4.1. Status Kesehatan.....	43
4.2. Penggunaan Jaminan Kesehatan	48
4.3. Nutrisi dan Imunisasi	49
4.4. Lingkungan Tempat Tinggal.....	53
BAB 5 PENDIDIKAN	89
5.1 Partisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini	91
5.2 Kegiatan Lainnya	96
5.3 Akses Media Massa.....	101
BAB 6 PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN	115
6.1 Kepemilikan Akta Kelahiran	117
6.2 Upaya Kesehatan Komprehensif	120
6.3 Perlindungan Khusus.....	122
BAB 7 PROGRAM ANAK USIA DINI	143
7.1 Pengasuhan	145
7.2 Kesehatan dan Gizi	146
7.3 Pendidikan.....	147
7.4 Perlindungan dan Kesejahteraan	149
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	163
METADATA	191

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Persentase Penduduk menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	20
Tabel 2.2	Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	21
Tabel 2.3	Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	22
Tabel 2.4	Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	23
Tabel 3.1	Persentase Anak Usia Dini menurut Karakteristik dan Status Tinggal Bersama Orangtua Kandung, 2021.....	34
Tabel 3.2	Persentase Anak Usia Dini menurut Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali dalam Seminggu Terakhir dan Karakteristik, 2021.....	35
Tabel 3.3	Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Karakteristik, 2021.....	36
Tabel 3.4	Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama Orangtua Kandung, 2021.....	37
Tabel 3.5	Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Provinsi, 2021.....	38
Tabel 3.6	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama Orang Tua Kandung, 2021.....	39
Tabel 3.7	<i>Sampling Error</i> Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Provinsi, 2021	40
Tabel 4.1	Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Anak Usia Dini menurut Karakteristik, 2023	56
Tabel 4.2	Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir menurut Tindakan Pengobatan dan Karakteristik, 2023	57

Tabel 4.3	Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Karakteristik, 2023	58
Tabel 4.4	Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Karakteristik, 2023	59
Tabel 4.5	Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Karakteristik, 2023	60
Tabel 4.6	Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap menurut Karakteristik, 2023	61
Tabel 4.7	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Memiliki Akses pada Rumah Layak Huni, Layanan Sumber Air Minum Layak, dan Sanitasi Layak menurut Karakteristik, 2023	62
Tabel 4.8	Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal dengan Anggota Rumah Tangga Perokok menurut Karakteristik, 2023	63
Tabel 4.9	Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	64
Tabel 4.10	Angka Kesakitan Anak Usia Dini menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023	65
Tabel 4.11	Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Tindakan Pengobatan, 2023	66
Tabel 4.12	Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	67
Tabel 4.13	Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	68
Tabel 4.14	Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	69

Tabel 4.15	Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	70
Tabel 4.16	Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	71
Tabel 4.17	Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap, 2023.....	72
Tabel 4.18	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	73
Tabel 4.19	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	74
Tabel 4.20	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak menurut Provinsi, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023.....	75
Tabel 4.21	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Tinggal dengan ART Perokok menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	76
Tabel 4.22	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	77
Tabel 4.23	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	78
Tabel 4.24	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Tindakan Pengobatan, 2023.....	79
Tabel 4.25	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	80

Tabel 4.26	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	81
Tabel 4.27	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	82
Tabel 4.28	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	83
Tabel 4.29	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023	84
Tabel 4.30	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia <6 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	85
Tabel 4.31	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia <6 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	86
Tabel 4.32	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	87
Tabel 5.1	Persentase Anak Usia Dini yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023	104
Tabel 5.2	Angka Kesiapan Sekolah menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	105
Tabel 5.3	Persentase Anak Usia Dini yang Menonton TV menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2021	106
Tabel 5.4	Persentase Anak Usia Dini yang Membaca menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2021	107

Tabel 5.5	Persentase Anak Usia Dini yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	108
Tabel 5.6	Persentase Anak Usia Dini yang Mengakses Internet menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	109
Tabel 5.7	<i>Sampling Error</i> Angka Kesiapan Sekolah menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	110
Tabel 5.8	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini yang Membaca menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2021.....	111
Tabel 5.9	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini yang Membaca menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021	112
Tabel 5.10	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Mengakses Internet menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	113
Tabel 6.1	Persentase Anak Usia Dini menurut Karakteristik dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2023.....	127
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini menurut Karakteristik dan Status Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH), 2023	128
Tabel 6.3	Persentase Balita menurut Karakteristik dan Status Ketelantaran, 2021	129
Tabel 6.4	Persentase Anak Usia Dini menurut Karakteristik dan Status Kemiskinan Moneter, 2023.....	130
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Menerima PKH menurut Karakteristik dan Status Kemiskinan Moneter, 2023	131
Tabel 6.6	Persentase Anak Usia Dini di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2023.....	132
Tabel 6.7	Persentase Anak Usia Dini di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2023.....	133
Tabel 6.8	Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2023.....	134

Tabel 6.9	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	135
Tabel 6.10	Persentase Balita menurut Provinsi dan Status Ketelantaran, 2021	136
Tabel 6.11	Persentase Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023...	137
Tabel 6.12	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini yang Tidak/Tidak Tahu Memiliki Akta Kelahiran menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	138
Tabel 6.13	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	139
Tabel 6.14	<i>Sampling Error</i> Persentase Balita menurut Provinsi dan Status Ketelantaran, 2021	140
Tabel 6.15	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	141

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur (Persen), 2020-2050.....	5
Gambar 2.1	Piramida Penduduk Indonesia, 2020-2050.....	14
Gambar 2.2	Komposisi Anak Usia Dini menurut Karakteristik, 2023	15
Gambar 2.3	Persebaran Anak Usia Dini menurut Pulau, 2023.....	17
Gambar 2.4	Persentase Anak Usia Dini dan Persentase Lansia menurut Provinsi, 2022.....	18
Gambar 3.1	Persentase Anak Usia Dini menurut Status Tinggal Bersama Orang Tua Kandung dan Klasifikasi Desa, 2021	28
Gambar 3.2	Persentase Anak Usia Dini menurut Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orang Tua/Wali dalam Seminggu Terakhir, 2021.....	29
Gambar 3.3	Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Klasifikasi Desa, 2021	31
Gambar 3.4	Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Status Bekerja Ibu, 2021	31
Gambar 3.5	Persentase Taman Penitipan Anak menurut Status Negeri/Swasta, Tahun 2021/2022	32
Gambar 4.1	Perkembangan Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Anak Usia Dini, 2020-2023.....	44
Gambar 4.2	Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Anak Usia Dini menurut Klasifikasi Desa, 2023.....	45

Gambar 4.3	Perkembangan Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir menurut Tindakan Pengobatan, 2020-2023	46
Gambar 4.4	Perkembangan Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2020-2023	47
Gambar 4.5	Perkembangan Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2021-2023	48
Gambar 4.6	Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Status Bekerja Ibu, 2023	50
Gambar 4.7	Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Provinsi, 2023	51
Gambar 4.8	Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap menurut Tingkat Pendidikan Ibu, 2023	52
Gambar 4.9	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Memiliki Akses pada Rumah Layak Huni, Layanan Sumber Air Minum Layak, dan Sanitasi Layak, 2023	53
Gambar 4.10	Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal dengan ART Perokok, 2023	55
Gambar 5.1	Persentase Anak Usia Dini yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Karakteristik, 2023	93
Gambar 5.2	Persentase Anak Usia Dini yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Jenis Pendidikan Prasekolah, 2023	94
Gambar 5.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) menurut Karakteristik, 2023	95
Gambar 5.4	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Mengikuti Kursus Setahun Terakhir menurut Karakteristik, 2021...	97
Gambar 5.5	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berolahraga Seminggu Terakhir menurut Karakteristik, 2021	99
Gambar 5.6	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni Selama Tiga Bulan Terakhir, 2021	100

Gambar 5.7	Persentase Anak Usia Dini yang Mengakses Media dalam Seminggu Terakhir (Menonton TV, Mendengarkan Radio, dan Membaca), 2021.....	101
Gambar 6.1	Persentase Anak Usia Dini yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Kelompok Umur dan Klasifikasi Desa, 2023.....	118
Gambar 6.2	Persentase Anak Usia Dini yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Distribusi Pengeluaran dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga, 2023.....	119
Gambar 6.3	Sebaran Persentase Anak Usia Dini yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Provinsi, 2023.....	120
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2023.....	121
Gambar 6.5	Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Status Pelaporan ke Polisi, 2023.....	122
Gambar 6.6	Persentase Balita Terlantar, 2021.....	123
Gambar 6.7	Persentase Balita Terlantar menurut Keberadaan Orangtua, 2021.....	124
Gambar 6.8	Persentase Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan menurut Provinsi, 2023.....	125
Gambar 6.9	Persentase Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan menurut Klasifikasi Desa dan Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2023.....	126

PENJELASAN TEKNIS

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Pelaksanaan Susenas mulai tahun 2015 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Susenas Maret tahun 2023 dengan jumlah sampel mencakup 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia untuk menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pencacahan bulan September dengan ukuran sampel kecil mencakup 75.000 rumah tangga sampel untuk menghasilkan data yang representatif untuk estimasi provinsi dan nasional. Akan tetapi, di tahun 2023, Susenas Modul Ketahanan Sosial tidak dilaksanakan.

Klasifikasi Desa menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (KRT, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau ART lainnya) yang sudah

tinggal satu tahun atau lebih, atau kurang dari satu tahun tetapi berniat untuk menetap.

Tidak Termasuk Anggota Rumah Tangga yakni orang yang telah bepergian selama satu tahun atau lebih, atau kurang dari satu tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama satu tahun atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah satu tahun atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari satu tahun tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran perkapita sebulan sama dengan pendapatannya. Distribusi pengeluaran rumah tangga digolongkan menjadi tiga kelompok pengeluaran yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun (Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif). Namun, dalam publikasi ini dibatasi sejak lahir sampai usia enam tahun (0-6 tahun).

Rumah Tangga Anak Usia Dini adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya anak usia dini (0-6 tahun).

Lanjut usia (lansia) adalah Penduduk berumur 60 tahun ke atas/lanjut usia (Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Orang tua/wali adalah bapak/ibu atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Melakukan aktivitas bersama orang tua/wali yaitu melakukan suatu aktivitas/kegiatan bersama orang tua/wali pada aktivitas/kegiatan yang sama dan dengan waktu yang sama.

Membantu menambah penghasilan yaitu melakukan suatu kegiatan/aktivitas bersama orang tua dengan tujuan membantu kegiatan orang tua untuk mendapatkan upah/gaji/penghasilan.

Pengasuhan Tidak Layak yaitu jika anak usia dini pernah dititipkan atau diasuh oleh anak usia <10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa selama >1 jam atau pernah ditinggalkan sendiri selama >1 jam dalam seminggu terakhir.

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Mengalami Keluhan Kesehatan yaitu keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti: panas, batuk, pilek, dsb. maupun karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan kesehatan lain baik fisik maupun psikis.

Sakit adalah kondisi seseorang yang menderita penyakit menahun (kronis) atau gangguan kesehatan yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatannya sehari-hari tidak terganggu dianggap tidak sakit.

ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak lahir sampai berumur 5 bulan dan tidak diberi makanan atau minuman lain (termasuk air putih), kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes.

Imunisasi Dasar Lengkap adalah imunisasi awal yang diberikan kepada bayi sebelum berusia satu tahun agar sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR.

Rawat Jalan yaitu upaya seseorang yang mengalami keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.

Rawat Inap yaitu upaya penyembuhan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional.

Jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan yang tercakup dalam Susenas Maret 2022 meliputi BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri, Jamkesda, Asuransi Swasta, dan Perusahaan/kantor.

Stunting atau kerdil adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Angka Kesiapan Sekolah (AKS) adalah persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD.

Menonton siaran televisi adalah apabila seseorang mengarahkan perhatian pada tayangan siaran televisi atau meluangkan waktu untuk menonton tayangan siaran televisi, sehingga ia dapat mengerti atau menikmati acara yang ditayangkan.

Mendengarkan siaran radio adalah apabila seseorang mengarahkan pendengarannya pada materi yang disiarkan di radio atau meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran radio, sehingga ia dapat mengikuti, mengerti, atau menikmatinya.

Mengunjungi perpustakaan adalah apabila seseorang berkunjung ke perpustakaan fisik atau digital dengan tujuan untuk meminjam, mengembalikan, maupun memperoleh informasi atau mencari literatur/bahan pustaka dari koleksi (buku dan bahan terbitan lainnya) yang dimiliki oleh perpustakaan.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah sarana atau lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan berupa: buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multimedia lain yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan literasi lainnya, dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator.

Menonton Pertunjukan/Pameran Seni adalah apabila seseorang meluangkan waktu (baik berniat maupun tidak) untuk menonton pertunjukan/pameran seni secara langsung, baik dengan membayar ataupun tidak, baik di tempat khusus pertunjukan ataupun tidak, seperti menonton pertunjukan seni di pusat perbelanjaan atau di tempat resepsi pernikahan. Tidak termasuk menonton jika menontonnya hanya sambil lewat atau atraksi yang berkeliling dari rumah ke rumah, seperti pertunjukan topeng monyet keliling.

Menggunakan internet adalah apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, *e-mail*, *chatting*, *media sosial*, *games online*, dll. Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (*log in* dan *log out*) internet. Siapa saja dimasukkan menggunakan internet meskipun hanya tinggal melanjutkan. Seorang anak yang menggunakan internet, tetapi *log in* (membuka internet) dibukakan oleh orang tuanya/orang lain dianggap menggunakan internet.

Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Berdasarkan pendekatan kebutuhan minimum baik kebutuhan

jasmani, rohani, dan sosial ditetapkan tujuh kriteria untuk menentukan derajat ketelantaran balita (Kemensos & BPS, 2015). Ketujuh kriteria ketelantaran Balita tersebut adalah:

1. Tidak pernah diberi Air Susu Ibu (ASI);
2. Tidak mempunyai bapak/ibu kandung;
3. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu;
4. Makan lauk pauk berprotein tinggi, protein nabati kurang dari empat kali dan protein hewani kurang dari tiga kali dalam seminggu;
5. Ibu yang bertanggung jawab terhadap anak bekerja selama seminggu terakhir;
6. Bila anak sakit tidak diobati; dan
7. Anak ditinggal atau diasuh oleh orang lain (tetangga, lainnya atau ditinggal sendiri) selama seminggu terakhir.

Seorang balita disebut telantar jika memenuhi 3 (tiga) atau lebih kriteria ketelantaran di atas. Jika hanya ada dua kriteria yang terpenuhi maka balita tersebut dikategorikan hampir telantar, dan apabila hanya satu atau tidak ada dikategorikan sebagai tidak telantar.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun beberapa kriteria yang menjadi prasyarat rumah layak huni sebagai berikut:

- Kecukupan luas lantai per kapita: Luas lantai $\geq 7,2$ m² per kapita
- Kelayakan atap: atap terbuat dari beton, genteng, seng, kayu/sirap

- Kelayakan dinding: terbuat dari tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, batang kayu
- Kelayakan lantai: terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah
- Kelayakan sanitasi: memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) atau MCK komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika tempat tinggalnya di perdesaan.
- Kelayakan sumber air minum: sumber air minum utama berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan. Termasuk juga rumah tangga yang sumber air minum utamanya berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang dengan sumber air utama untuk mandi/cuci/dll berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan.

Relative Standard Error. Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas Maret 2023 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *non sampling error* dan *sampling error*. *Non sampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan maupun pengolahan data. Sedangkan *sampling error* adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik *sampling* tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2023 ditunjukkan oleh nilai *standard error* (galat baku) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *relative standard error* (RSE), yaitu perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. *Standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah/atas sebesar nilai estimasi dikurangi/ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik. Kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil penghitungan RSE tersebut. Kesalahan *sampling* dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi begitu juga sebaliknya. Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25$ persen dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan $RSE > 25$ persen tetapi ≤ 50 persen perlu hati-hati jika ingin digunakan. Sementara itu,

estimasi dengan $RSE > 50$ persen dianggap sangat tidak akurat sehingga estimasinya tidak dapat ditampilkan, yang disimbolkan dengan NA (*Not Applicable*). Penghitungan tingkat *sampling error* menggunakan paket pemrograman dengan desain yang mengikuti desain sampling Susenas. Tidak semua variabel hasil pendataan dihitung RSE-nya. Hanya beberapa variabel penting saja yang dihitung RSE-nya.

<https://www.bps.go.id>



BAB 1

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

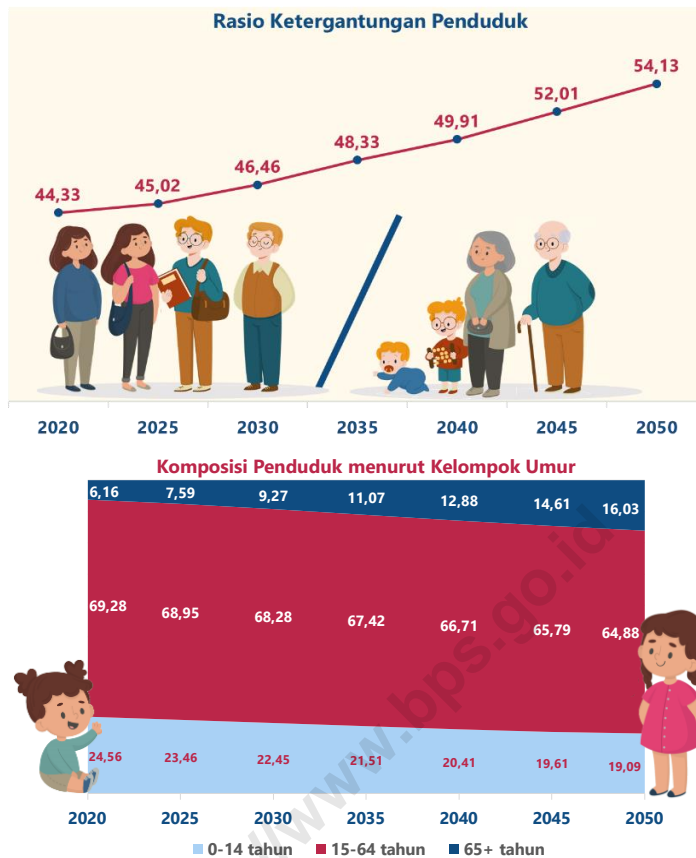
Periode emas yang juga dikenal sebagai periode 1000 hari pertama kehidupan merupakan fase penentu dalam kehidupan seorang anak. Hal ini dikarenakan, kemampuan seorang anak dapat dioptimalisasi secara maksimal pada periode ini tergantung seberapa baik kondisi ibu sejak hamil dan calon anak sejak dalam kandungan (Likhar dan Patil 2022). Pada masa tersebut, fondasi kesehatan serta pertumbuhan saraf yang optimal sepanjang hidup mulai berkembang. Begitu pula pemenuhan nutrisi yang diperoleh anak pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak masa konsepsi hingga berusia 2 tahun turut memiliki konsekuensi kesehatan seorang individu secara langsung dalam jangka panjang (Cusick dan Georgieff 2013; Saavedra dan Dattilo 2022). Selanjutnya, hingga 8 tahun pertama kehidupan, anak akan dihadapkan pada kondisi yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Fase tersebut menjadi jendela peluang yang krusial (*crucial window of opportunity*) untuk pendidikan. Ketika anak sehat, aman, dan memperoleh pembelajaran yang baik di tahun-tahun awal, mereka akan lebih mungkin mencapai potensi perkembangan secara penuh sebagai orang dewasa di masa mendatang (The United Nations Educational Scientific dan Cultural Organization 2023). Melihat pentingnya perkembangan anak usia dini, pemerintah turut mendukung dengan penetapan strategi nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

1.1 Latar Belakang

Pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, anak usia dini didefinisikan sebagai anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan berusia 6 (enam) tahun. Periode ini berada pada periode emas (*the golden period*) pertumbuhan anak yang dapat digunakan untuk optimalisasi perkembangan

kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik, maupun moral berdasarkan pengalaman dan interaksi yang diperoleh anak. Rangkaian proses tersebut turut berdampak pada perkembangan konstruksi otak yang menjadi landasan bagi semua pembelajaran, perilaku, hingga kesehatan di masa mendatang. Proses ini kemudian menjadi fondasi kuat sebagai dasar anak mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi orang dewasa yang dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya (NC Department of Health dan Human Services 2019; Walden University 2023). Hal tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Meriem et al. (2020) bahwa periode anak usia dini menjadi hal yang krusial terkait dengan perkembangan anak secara keseluruhan, karena apa yang diterima anak selama periode tersebut akan menentukan tingkat/level perkembangan masing-masing anak dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, untuk menjamin perkembangan anak yang optimal diperlukan perhatian dari sekitar anak, terutama orang tua dan keluarga sebagai lingkungan terdekat anak.

Selama tiga puluh tahun ke depan, diproyeksikan komposisi penduduk produktif yang berusia 15-64 tahun semakin menurun, sebaliknya komposisi penduduk nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan rasio ketergantungan penduduk diproyeksikan semakin tinggi dari tahun ke tahun (Gambar 1.1). Artinya, di masa yang akan datang, beban penduduk usia produktif yang akan menanggung penduduk usia nonproduktif semakin meningkat. Hal itu tentu tidak akan menjadi masalah jika penduduk usia produktif tersebut teroptimalisasi dalam perekonomian, kesejahteraan masyarakat terpenuhi dengan baik, serta kondisi penduduk lansia yang sehat dan mandiri secara finansial. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut adalah dengan berinvestasi sebaik-baiknya pada anak usia dini untuk meningkatkan kualitas hidupnya kelak.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

Gambar 1.1 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur (Persen), 2020-2050

Anak usia dini merupakan bagian dari Generasi Alfa yaitu penduduk yang terlahir antara tahun 2010-2024, dari orang tua yang merupakan generasi milenial (McCrindle dan Fell 2020, 4). Generasi ini dinamakan dengan huruf pertama dari alfabet Yunani, Alfa. Sementara itu, generasi sebelumnya yaitu generasi Z ditandai oleh huruf terakhir dari alfabet Latin dari rangkaian nama generasi. Hal ini menunjukkan generasi Alpha bukan kelanjutan dari generasi yang lama, melainkan merupakan awal dari generasi yang baru (Jha 2020, 2; McCrindle dan Fell 2020, 5). Generasi Alfa menjadi spesial karena mereka lahir saat teknologi semakin canggih. Tidak heran bahwa generasi ini menjadi yang paling dekat dengan teknologi digital serta diklaim sebagai generasi yang paling cerdas di antara generasi sebelumnya (Fadlurrohim et al. 2020, 183).

Terlalu banyak informasi yang diperoleh pada era digital ini membuat orang tua harus ekstra memberi arahan dan bimbingan pada anak, dengan cara yang menyesuaikan dengan era generasi Alpha. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan memastikan anak memperoleh pendidikan karakter dan peningkatan kualitas SDM sejak dini. Investasi pada anak usia dini memberikan manfaat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi tersebut memberikan manfaat berupa penghematan biaya serta peningkatan efisiensi di berbagai sektor, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini dikarenakan anak yang mendapatkan layanan pengembangan anak usia dini yang baik akan lebih sehat dan lebih siap belajar ketika memasuki jenjang SD/ sederajat. Selain itu, dalam jangka panjang, investasi pada anak usia dini juga turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan membantu memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Sehingga, di masa yang akan datang diharapkan akan tercapainya upah pekerja yang lebih tinggi, ketergantungan terhadap program bantuan sosial yang lebih rendah, akumulasi aset yang lebih besar, serta kondisi keluarga yang lebih sehat (Naudeau et al. 2011, xiii-xiv).

Di samping itu, penting untuk menjaga anak usia dini untuk tetap sehat dan terpenuhi asupan gizinya. Pada tahun 2022, secara global terdapat 148,1 juta (22,3 persen) anak usia di bawah 5 tahun mengalami *stunting*, 45 juta (6,8 persen) *wasting*, dan 37 juta (5,6 persen) *overweight* (FAO 2023). Hal ini bukan hanya menyebabkan kegagalan dalam mencapai potensi genetik seseorang, melainkan menimbulkan hambatan untuk berbagai perkembangan lain seperti gangguan kognitif, menurunkan peluang ekonomi di masa depan, termasuk menghambat kemampuan suatu negara untuk mengakumulasi potensi SDM yang optimal nya di masa mendatang (The World Bank 2023).

Pentingnya menyikapi permasalahan anak usia dini juga ditunjukkan dalam agenda internasional *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB). Agenda TPB turut mengangkat isu anak sebagai target pembangunan global di tahun 2030, khususnya Tujuan 4 Target 4.2 yaitu pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka

siap untuk menempuh pendidikan dasar (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2020, 164). Lebih lanjut, perkembangan anak usia dini juga memiliki kaitan dengan tujuh Tujuan lainnya yaitu tujuan 1, 2, 3, 5, 10, 16, dan 17 (Early Childhood Peace Consortium 2023).

1.2 Kebijakan Terkait Anak Usia Dini

Sejak beberapa dekade yang lalu, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya terhadap isu anak dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Regulasi tersebut lahir atas pertimbangan bahwa anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa sehingga anak perlu tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Demikian juga kebijakan dan program terkait pengembangan Anak Usia Dini telah lama dipraktikkan dalam pembangunan diantaranya pelaksanaan dukungan antenatal dan persalinan yang aman, pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk anak baru lahir hingga 2 tahun, dan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA)

Pemerintah menyadari pentingnya tumbuh kembang anak sejak dini sebagai *window of opportunity*. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah menyusun regulasi turunan terkait anak usia dini melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Penetapan PAUD HI ditujukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi guna mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

Berangkat dari Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI, pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI 2020-2024. Dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI 2020-2024 disebutkan bahwa tujuan PAUD HI yaitu terselenggaranya layanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Demi terwujudnya kebutuhan anak usia dini tersebut, diperlukan integrasi program antara lembaga yang mengedepankan aspek pendidikan, kesejahteraan dan perlindungan, kesehatan, gizi, dan perawatan,

serta pengasuhan. Sukses pelaksanaan pengembangan anak usia dini ditentukan oleh kolaborasi bersama antara pemerintah, swasta, dan yang paling utama adalah peran orang tua, keluarga, dan juga masyarakat

Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pemerintah kembali menetapkan salah satu target pembangunan berupa Indeks Perlindungan Anak (IPA). Melalui target IPA ini, pemerintah ingin memastikan kembali bahwa setiap anak, termasuk anak usia dini mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan tahapan usia dan kebutuhannya. Terdapat lima aspek yang dipantau dalam IPA yaitu (i) Hak Sipil dan Kebebasan; (ii) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (iii) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (iv) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan (v) Perlindungan Khusus.

1.3 Data dan Informasi Anak Usia Dini untuk Pembangunan

Perencanaan pembangunan penduduk usia dini harus dilaksanakan secara strategis, mengingat persentase penduduk usia dini cenderung menurun dari waktu ke waktu, dan di sisi lain perannya sangat penting di masa mendatang yaitu sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan berikutnya. Untuk itu ketersediaan data dan informasi penduduk anak usia dini menjadi sangat dibutuhkan, agar dapat diketahui gambaran situasi terkini penduduk usia dini di Indonesia. Berpijak pada data dan informasi tersebut, selanjutnya akan disusun berbagai kebijakan dan program pengembangan anak usia dini di Indonesia.

Hal ini senada dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam acara Penganangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Beliau menyampaikan: "Data sekarang ini adalah jenis kekayaan baru, *new oil*, bahkan lebih, bahkan lebih berharga daripada minyak." Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa data yang valid menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan pembangunan sebuah negara, karena keakuratan data akan sangat berguna dalam perencanaan yang benar, membuat keputusan tepat, serta mengeksekusi program yang tepat sasaran (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2020).

Publikasi ini disusun sebagai salah satu upaya dalam penyediaan data yang komprehensif terkait anak usia dini di Indonesia. Dengan adanya publikasi Profil Anak Usia Dini 2023 diharapkan mampu menjadi barometer dalam pembangunan, sejak perencanaan hingga monitoring evaluasi kebijakan dan program yang diimplementasikan. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021, serta data sekunder dari Kementerian/Lembaga.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi Profil Anak Usia Dini 2023 disajikan mengacu pada sasaran yang ingin dicapai pada PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan. Selain itu, di dalam publikasi ini juga terdapat satu bab khusus yang membahas mengenai program-program terkait PAUD. Sehingga, dapat dituliskan tujuh bab penyusun publikasi ini yaitu sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, kebijakan terkait anak usia dini di Indonesia, data dan informasi terkait dengan anak usia dini untuk pembangunan, serta sistematika penulisan publikasi.
- Bab 2 Demografi, menyajikan data komposisi dan distribusi anak usia dini.
- Bab 3 Pengasuhan, menyajikan data dan informasi terkait status tinggal bersama, penggunaan waktu bersama orang tua/wali, pola pengasuhan, dan pengasuhan alternatif.
- Bab 4 Kesehatan dan gizi, menggambarkan status kesehatan, penggunaan jaminan kesehatan, nutrisi dan imunisasi, serta lingkungan tempat tinggal anak usia dini.
- Bab 5 Pendidikan, memaparkan partisipasi anak usia dini dalam pendidikan, kegiatan lainnya, dan akses media massa.
- Bab 6 Perlindungan dan kesejahteraan, menjelaskan kepemilikan akta kelahiran, bantuan sosial, dan perlindungan khusus, serta anak usia dini yang masuk dalam kondisi rentan (*vulnerable*).

Bab 7 Program Anak Usia Dini, memuat program-program terkait anak usia dini yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Selanjutnya, keseluruhan temuan dari setiap bab akan disajikan secara singkat pada abstraksi. Pada akhir bab (bab 2-6) akan disajikan tabel indikator menurut karakteristik dan provinsi. Selain itu, untuk melihat seberapa besar tingkat kesalahan yang ditimbulkan oleh teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam survei yang disajikan dalam publikasi ini, maka hasil penghitungan *sampling error* dari hasil estimasi beberapa indikator terkait anak usia dini juga turut ditampilkan pada bagian akhir setiap bab. Selain itu, di bagian awal publikasi, juga disajikan penjelasan teknis untuk menjembatani dan menambah pemahaman pembaca mengenai istilah serta konsep definisi yang digunakan.



BAB 2

DEMOGRAFI

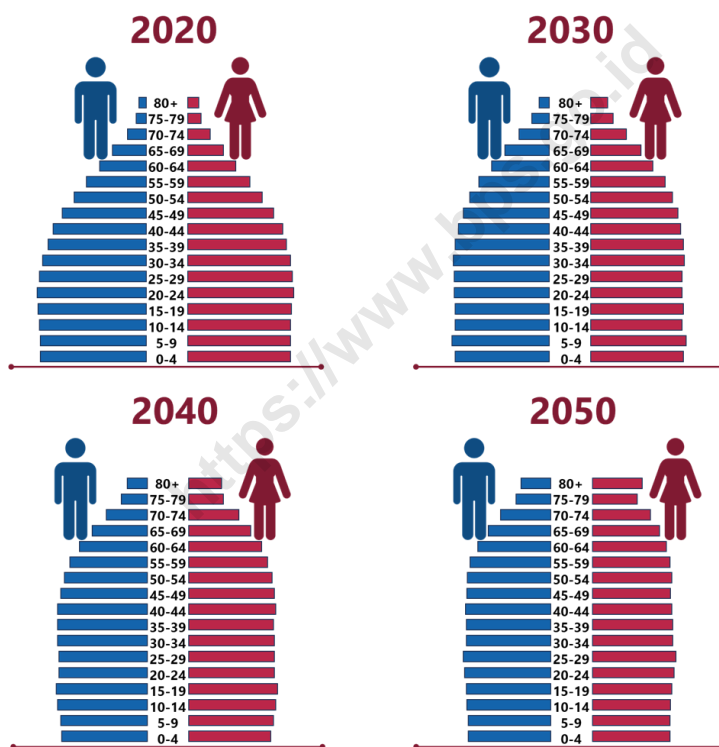
Periode anak usia dini memiliki peran yang sangat krusial karena akan menentukan kesejahteraan dan kualitas individu di masa yang akan datang. Terdapat empat manfaat besar yang diperoleh dari investasi terhadap pengembangan anak usia dini, di antaranya dapat mencegah kesenjangan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan pendapatan, serta membawa kesejahteraan di masa yang akan datang (Heckman 2015,1). Sungguh sangat disayangkan jika masa keemasan ini tidak teroptimalisasi dengan baik, karena dapat berdampak pada terhambatnya perkembangan anak pada tahap berikutnya hingga dewasa. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Salah satu upaya nyata yaitu memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas anak usia dini melalui RAN PAUD HI sesuai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Untuk melihat capaian serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kualitas anak usia dini, maka terlebih dahulu perlu diketahui aspek demografis anak usia dini di Indonesia.

2.1 Komposisi Anak Usia Dini

Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa atau hampir tiga kali jumlah penduduk hasil sensus tahun 1961 yang baru mencapai 97 juta jiwa (Badan Pusat Statistik 2020,11; Biro Pusat Statistik dan Kabinet Menteri Pertama 1962,3). Meskipun dari sisi kuantitas semakin meningkat, namun pertumbuhan penduduk semakin menurun seiring berjalannya waktu. Pelambatan pertumbuhan penduduk tersebut dapat disebabkan beberapa hal di antaranya keberhasilan pembangunan pemerintah dalam menekan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, melalui program Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan kesehatan.

Perubahan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut mengakibatkan pergeseran bentuk piramida penduduk. Struktur penduduk pada

tahun 2020 terlihat masih didominasi oleh penduduk usia produktif, dalam jangka panjang, perlahan tapi pasti Indonesia bergerak menuju *ageing population*. Hal ini terlihat dari perubahan bentuk piramida penduduk tahun 2020 hingga tahun 2050 berdasarkan data proyeksi yang dihasilkan BPS, dimana puncak piramida semakin panjang dan dasar piramida semakin pendek grafik batangnya (Gambar 2.1). Ini memberi makna bahwa kebijakan pembangunan harus mampu mengawal pembangunan penduduk usia dini dengan baik, sehingga ia akan bertumbuh menjadi penduduk usia produktif yang berkualitas, hingga akhirnya menjadi lansia yang sehat, produktif dan mandiri.

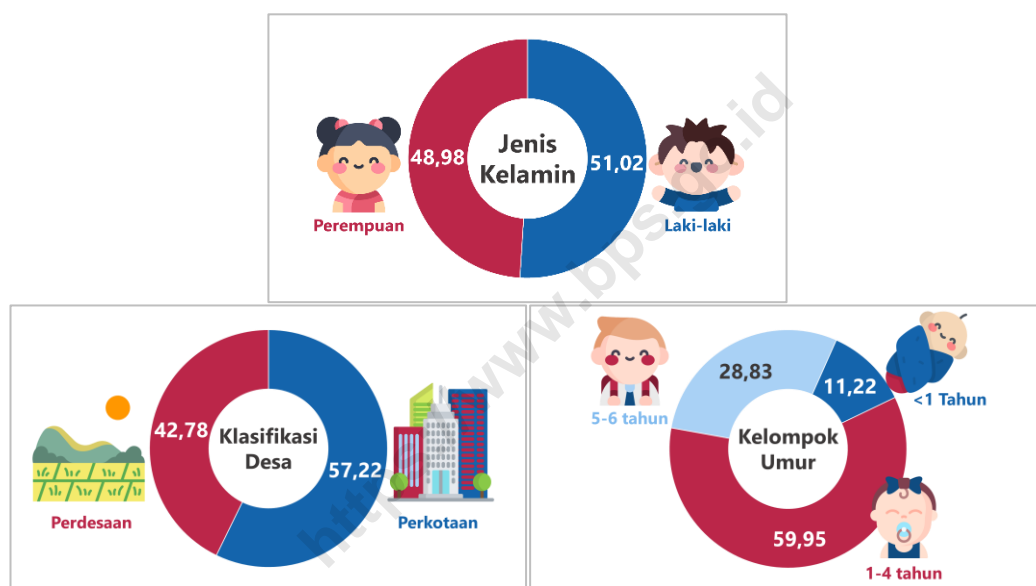


Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia, 2020-2050

Hasil Susenas tahun 2023 mengestimasi bahwa terdapat sekitar 30,2 juta jiwa atau 10,91 persen dari total penduduk Indonesia merupakan anak usia dini yang berusia 0-6 tahun. Lebih dari separuh anak usia dini berjenis kelamin laki-laki, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) anak usia dini pada tahun 2023 sebesar 104,16. Rasio jenis kelamin yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa persentase

anak usia dini laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa berdasarkan distribusinya, persentase anak usia dini laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (51,02 persen berbanding 48,98 persen). Dengan melihat komposisi tersebut, dalam penyusunan program dan kebijakan terkait anak usia dini dapat diarahkan dengan pengarusutamaan gender. Hal tersebut sejalan dengan tujuan kelima TPB yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2020, 187).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.2 Komposisi Anak Usia Dini menurut Karakteristik, 2023

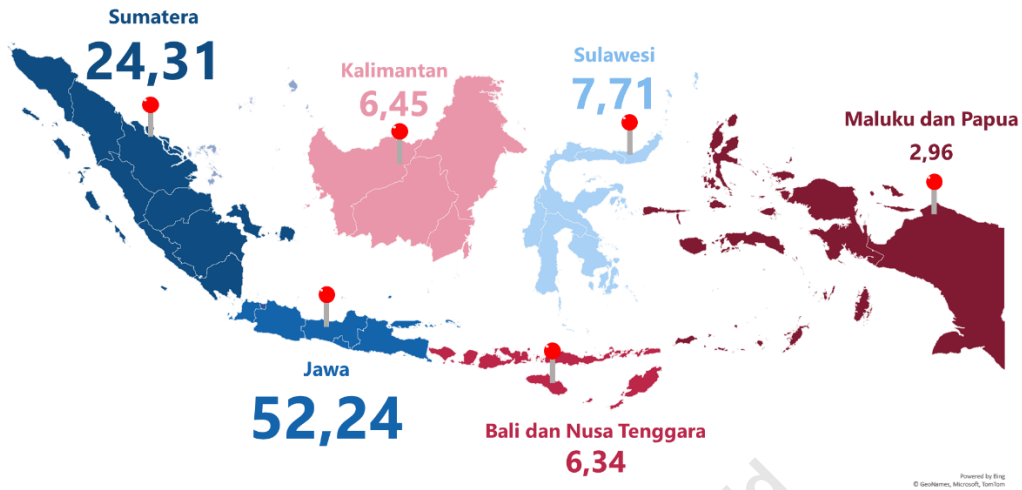
Jika dilihat menurut klasifikasi wilayah tempat tinggalnya, persentase anak usia dini yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan (57,22 persen berbanding 42,78 persen). Tingginya jumlah penduduk di wilayah perkotaan salah satunya dapat disebabkan oleh migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa migrasi yang dilakukan orang tua dari perdesaan ke perkotaan membawa perbaikan ekonomi bagi keluarga, termasuk memberikan peningkatan pendidikan bagi anak yang turut bermigrasi, mulai dari fasilitas belajar hingga transportasi yang lebih baik untuk anak bersekolah (Pujiatun 2013, 14).

Berdasarkan kelompok umur tumbuh kembangnya, anak usia dini dibagi menjadi 3 kelompok yaitu bayi (umur <1 tahun), balita (1-4 tahun), dan prasekolah (5-6 tahun). Setiap kelompok umur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebutuhan dan risiko setiap periode juga berbeda berdasarkan tahap tumbuh kembang anak. Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa, komposisi anak usia dini paling banyak berada pada kelompok balita (59,95 persen), disusul oleh anak prasekolah (28,83 persen), dan bayi (11,22 persen).

2.2 Distribusi Anak Usia Dini

Karakteristik suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh perubahan struktur umur penduduk yang terbagi atas struktur penduduk muda, dewasa, atau struktur penduduk tua. Hal ini sejalan dengan tiga komponen pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan populasi dan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi (Todaro dan Smith 2015, 149). Oleh karena itu, perbedaan faktor produksi (salah satunya adalah penduduk) juga akan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan wilayah, terlihat bahwa lebih dari separuh anak usia dini tinggal di Pulau Jawa (52,24 persen), sementara separuh sisanya tersebar di pulau-pulau lain (Gambar 2.3). Meskipun saat ini pembangunan sudah difokuskan ke wilayah luar Pulau Jawa, namun Jawa-sentris masih terlihat cukup menonjol dari sisi ekonomi dan pembangunan yang masih sangat mengunggulkan Pulau Jawa dibandingkan pulau lainnya. Tidak heran jika penduduk (termasuk anak usia dini) masih terkonsentrasi di Pulau Jawa jika dibandingkan pulau lainnya. Banyak faktor yang dicurigai memengaruhi sebaran penduduk di Indonesia masih didominasi Pulau Jawa, diantaranya banyak tersedianya pabrik besar yang dapat menjadi lapangan pekerjaan serta sarana pendidikan yang berkualitas di Pulau Jawa (Kompas 2023).

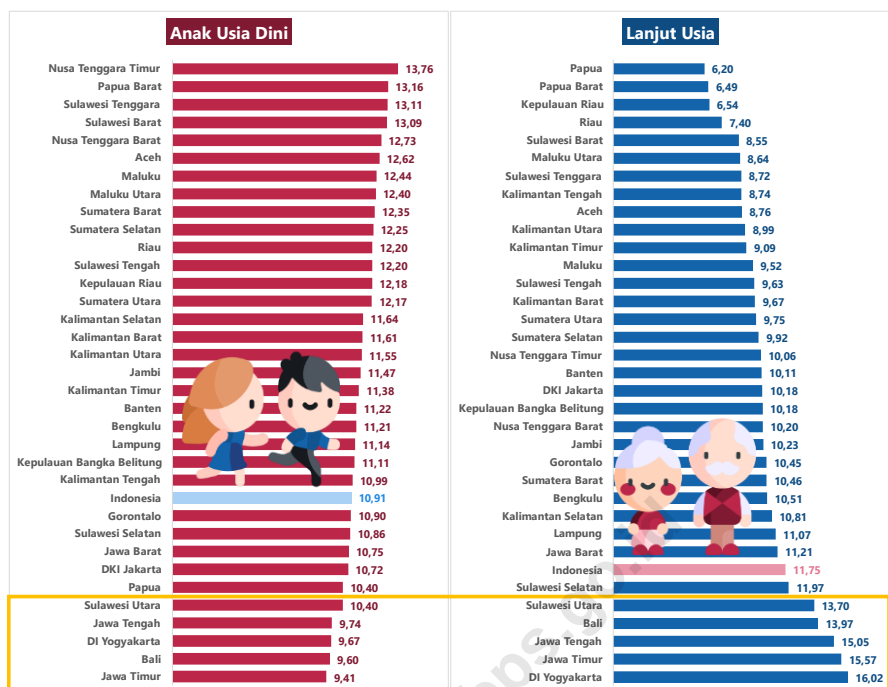


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.3 Persebaran Anak Usia Dini menurut Pulau, 2023

Desentralisasi pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2000, idealnya ditindaklanjuti dengan penyediaan data anak usia dini sampai dengan level kabupaten kota, agar setiap kabupaten/kota mengetahui gambaran anak usia dini di wilayahnya sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang relevan dengan situasi masing-masing wilayah. Namun sayangnya kebutuhan data anak usia dini level kabupaten/kota saat ini belum dapat terpenuhi dari data Susenas Maret 2023. Dengan pertimbangan jumlah sampel, agregasi data anak usia dini baru tersaji hingga level provinsi saja.

Gambar 2.4 menampilkan persentase anak usia dini dan persentase lansia di tiap-tiap provinsi. Terlihat bahwa lima provinsi dengan persentase anak usia dini tertinggi terletak di kawasan timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur (13,76 persen), Papua Barat (13,16 persen), Sulawesi Tenggara (13,11 persen), Sulawesi Barat (13,09 persen), dan Nusa Tenggara Barat (12,73 persen). Sementara itu, provinsi dengan persentase anak usia dini terendah adalah Jawa Timur (9,41 persen), Bali (9,60 persen), dan DI Yogyakarta (9,67 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.4 Persentase Anak Usia Dini dan Persentase Lansia menurut Provinsi, 2022

Menariknya, jika melihat persentase penduduk lanjut usia (lansia) antar provinsi, provinsi-provinsi yang memiliki persentase anak usia dini terendah juga merupakan provinsi dengan penduduk lansia tertinggi serta memiliki struktur penduduk tua (persentase penduduk lansia di atas 10 persen). Penuaan penduduk (*ageing population*) pada negara-negara maju juga memiliki pola yang demikian sebagai dampak dari angka kelahiran dan angka kematian anak yang lebih rendah, namun persentase lansia yang semakin tinggi. Hal tersebut mencerminkan standar hidup yang lebih baik berarti “*last longer*” atau bertahan hidup lebih lama (Duarte 2019).

Selain itu, hal lain yang harus menjadi fokus adalah provinsi yang dihadapkan pada tingginya persentase anak usia dini sekaligus penduduk lanjut usianya, seperti yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai provinsi dengan persentase anak usia dini tertinggi, Nusa Tenggara Timur juga sedang memasuki struktur penduduk tua pada tahun 2023 dengan persentase lansia mencapai 10,06 persen. Hal ini menjadikan provinsi ini menghadapi kondisi

beban ganda (*double burden*) yaitu tingginya jumlah anak usia dini sekaligus tingginya penduduk lansia. Kekhawatiran ini sejalan dengan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki prevalensi balita *stunting* tertinggi (35,3 persen) di antara 34 provinsi di Indonesia.

<https://www.bps.go.id>

Tabel 2.1 Persentase Penduduk menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		Jumlah
	0-6 Tahun	> 6 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	12,62	87,38	100,00
Sumatera Utara	12,17	87,83	100,00
Sumatera Barat	12,35	87,65	100,00
Riau	12,20	87,80	100,00
Jambi	11,47	88,53	100,00
Sumatera Selatan	12,25	87,75	100,00
Bengkulu	11,21	88,79	100,00
Lampung	11,14	88,86	100,00
Kep. Bangka Belitung	11,11	88,89	100,00
Kepulauan Riau	12,18	87,82	100,00
DKI Jakarta	10,72	89,28	100,00
Jawa Barat	10,75	89,25	100,00
Jawa Tengah	9,74	90,26	100,00
DI Yogyakarta	9,67	90,33	100,00
Jawa Timur	9,41	90,59	100,00
Banten	11,22	88,78	100,00
Bali	9,60	90,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,73	87,27	100,00
Nusa Tenggara Timur	13,76	86,24	100,00
Kalimantan Barat	11,61	88,39	100,00
Kalimantan Tengah	10,99	89,01	100,00
Kalimantan Selatan	11,64	88,36	100,00
Kalimantan Timur	11,38	88,62	100,00
Kalimantan Utara	11,55	88,45	100,00
Sulawesi Utara	10,40	89,60	100,00
Sulawesi Tengah	12,20	87,80	100,00
Sulawesi Selatan	10,86	89,14	100,00
Sulawesi Tenggara	13,11	86,89	100,00
Gorontalo	10,90	89,10	100,00
Sulawesi Barat	13,09	86,91	100,00
Maluku	12,44	87,56	100,00
Maluku Utara	12,40	87,60	100,00
Papua Barat	13,16	86,84	100,00
Papua	10,40	89,60	100,00
Indonesia	10,91	89,09	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.2 **Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023**

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	Bayi (<1 Tahun)	Anak Balita (1-4 Tahun)	Anak Prasekolah (5-6 Tahun)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	11,38	59,93	28,70	100,00
Sumatera Utara	11,79	59,89	28,32	100,00
Sumatera Barat	12,40	58,45	29,15	100,00
Riau	10,67	60,17	29,16	100,00
Jambi	10,72	59,15	30,13	100,00
Sumatera Selatan	13,31	58,46	28,23	100,00
Bengkulu	13,88	58,43	27,69	100,00
Lampung	10,95	60,34	28,71	100,00
Kep. Bangka	13,96	58,03	28,00	100,00
Kepulauan Riau	12,37	61,60	26,03	100,00
DKI Jakarta	8,84	63,66	27,50	100,00
Jawa Barat	10,19	61,08	28,73	100,00
Jawa Tengah	11,71	58,86	29,43	100,00
DI Yogyakarta	8,35	63,25	28,40	100,00
Jawa Timur	11,47	60,30	28,23	100,00
Banten	9,93	60,04	30,03	100,00
Bali	10,99	59,73	29,28	100,00
Nusa Tenggara	10,68	59,44	29,88	100,00
Nusa Tenggara	12,46	58,77	28,77	100,00
Kalimantan Barat	12,48	59,18	28,34	100,00
Kalimantan	11,58	60,35	28,07	100,00
Kalimantan	12,34	58,02	29,65	100,00
Kalimantan Timur	10,47	59,06	30,47	100,00
Kalimantan Utara	13,07	60,94	26,00	100,00
Sulawesi Utara	10,41	59,43	30,15	100,00
Sulawesi Tengah	13,59	57,03	29,37	100,00
Sulawesi Selatan	13,21	58,05	28,74	100,00
Sulawesi	12,88	58,21	28,91	100,00
Gorontalo	13,78	57,52	28,70	100,00
Sulawesi Barat	11,57	59,11	29,33	100,00
Maluku	11,23	61,45	27,32	100,00
Maluku Utara	12,13	59,16	28,71	100,00
Papua Barat	12,87	58,98	28,15	100,00
Papua	6,32	61,27	32,41	100,00
Indonesia	11,22	59,95	28,83	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.3 Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi (1)	Klasifikasi Desa		Jumlah (4)
	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	
Aceh	34,11	65,89	100,00
Sumatera Utara	53,11	46,89	100,00
Sumatera Barat	48,43	51,57	100,00
Riau	39,76	60,24	100,00
Jambi	32,79	67,21	100,00
Sumatera Selatan	36,47	63,53	100,00
Bengkulu	32,20	67,80	100,00
Lampung	32,75	67,25	100,00
Kep. Bangka Belitung	56,36	43,64	100,00
Kepulauan Riau	90,46	9,54	100,00
DKI Jakarta	100,00	-	100,00
Jawa Barat	80,36	19,64	100,00
Jawa Tengah	52,84	47,16	100,00
DI Yogyakarta	76,41	23,59	100,00
Jawa Timur	57,04	42,96	100,00
Banten	76,37	23,63	100,00
Bali	73,55	26,45	100,00
Nusa Tenggara Barat	50,74	49,26	100,00
Nusa Tenggara Timur	23,21	76,79	100,00
Kalimantan Barat	35,62	64,38	100,00
Kalimantan Tengah	42,29	57,71	100,00
Kalimantan Selatan	49,01	50,99	100,00
Kalimantan Timur	68,39	31,61	100,00
Kalimantan Utara	64,50	35,50	100,00
Sulawesi Utara	52,10	47,90	100,00
Sulawesi Tengah	31,64	68,36	100,00
Sulawesi Selatan	46,60	53,40	100,00
Sulawesi Tenggara	36,99	63,01	100,00
Gorontalo	42,25	57,75	100,00
Sulawesi Barat	20,13	79,87	100,00
Maluku	39,71	60,29	100,00
Maluku Utara	26,96	73,04	100,00
Papua Barat	38,91	61,09	100,00
Papua	33,67	66,33	100,00
Indonesia	57,22	42,78	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.4 Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	50,50	49,50	100,00	102,03
Sumatera Utara	50,72	49,28	100,00	102,91
Sumatera Barat	51,05	48,95	100,00	104,31
Riau	51,43	48,57	100,00	105,90
Jambi	51,18	48,82	100,00	104,83
Sumatera Selatan	51,68	48,32	100,00	106,94
Bengkulu	50,32	49,68	100,00	101,29
Lampung	50,44	49,56	100,00	101,78
Kep. Bangka	51,60	48,40	100,00	106,63
Kepulauan Riau	51,14	48,86	100,00	104,68
DKI Jakarta	50,78	49,22	100,00	103,16
Jawa Barat	51,28	48,72	100,00	105,24
Jawa Tengah	51,04	48,96	100,00	104,23
DI Yogyakarta	52,19	47,81	100,00	109,15
Jawa Timur	50,95	49,05	100,00	103,89
Banten	51,05	48,95	100,00	104,28
Bali	49,79	50,21	100,00	99,17
Nusa Tenggara	51,01	48,99	100,00	104,11
Nusa Tenggara	51,32	48,68	100,00	105,41
Kalimantan Barat	50,58	49,42	100,00	102,36
Kalimantan Tengah	51,80	48,20	100,00	107,47
Kalimantan Selatan	50,63	49,37	100,00	102,55
Kalimantan Timur	50,56	49,44	100,00	102,26
Kalimantan Utara	49,42	50,58	100,00	97,73
Sulawesi Utara	51,01	48,99	100,00	104,11
Sulawesi Tengah	51,31	48,69	100,00	105,38
Sulawesi Selatan	50,95	49,05	100,00	103,88
Sulawesi Tenggara	50,47	49,53	100,00	101,90
Gorontalo	50,21	49,79	100,00	100,85
Sulawesi Barat	50,93	49,07	100,00	103,79
Maluku	51,36	48,64	100,00	105,59
Maluku Utara	50,00	50,00	100,00	99,98
Papua Barat	50,76	49,24	100,00	103,10
Papua	51,38	48,62	100,00	105,66
Indonesia	51,02	48,98	100,00	104,16

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



BAB 3

PENGASUHAN

<http://www.wbps.go.id>



Dalam Permensos RI Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan lembaga untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak).

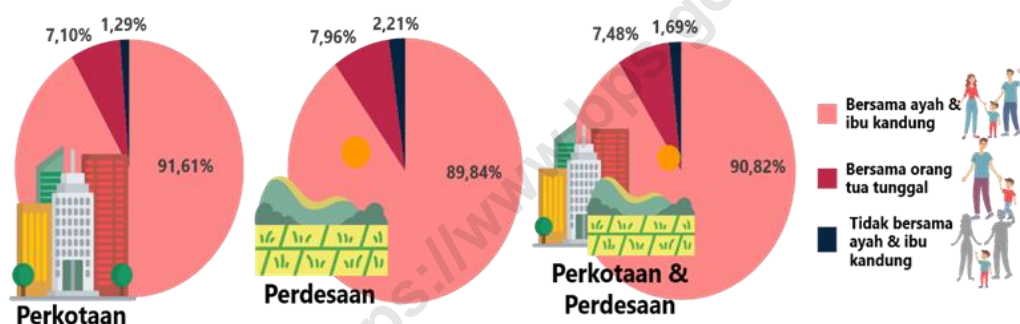
Keluarga merupakan tempat pertama dan terpenting bagi anak usia dini untuk berkembang secara mental dan membentuk kepribadiannya (Handayani 2021, 9). Pengasuhan positif perlu dilakukan oleh setiap orang tua karena beberapa hal, diantaranya: kualitas interaksi antara anak dengan orang tua dapat meningkat, tumbuh kembang anak menjadi optimal, pencegahan perilaku menyimpang pada anak, dan kelainan tumbuh kembang anak dapat dideteksi sedini mungkin (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020, 2). Pengasuhan positif tidak hanya dilakukan oleh orang tua kandung, namun dapat juga dilakukan oleh anggota rumah tangga lain yang tinggal bersama dengan anak tersebut. Bahkan, lingkungan sekolah dan masyarakat juga berperan dalam melakukan pengasuhan positif terhadap anak usia dini (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020, 12).

3.1 Status Tinggal Bersama

Anak usia dini dikatakan tinggal bersama dengan kedua orang tua jika dalam kehidupan sehari-hari anak tinggal bersama ayah dan ibu kandung dalam satu rumah tangga. Anak usia dini dikatakan tinggal bersama orang tua tunggal jika dalam satu rumah tangga tersebut hanya terdapat satu orang tua kandung, baik ayah maupun ibu kandung saja. Kondisi ini mungkin terjadi ketika ayah atau

ibu kandung tidak tercatat sebagai anggota rumah tangga dikarenakan meninggal dunia, bercerai/berpisah, atau bekerja di luar kota/negeri yang tidak rutin setahun sekali pulang ke rumah. Lebih lanjut, informasi ini tidak menutup kemungkinan adanya anggota rumah tangga lain di luar ayah/ibu kandung, seperti kakek, nenek, saudara, atau asisten rumah tangga yang menginap/tinggal di rumah tersebut.

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia dini tinggal bersama dengan ayah dan ibu kandung, baik di perkotaan maupun perdesaan. Namun, jika diperhatikan lebih lanjut, ternyata masih ada sekitar 7,48 persen anak usia dini tinggal bersama dengan orang tua tunggal. Bahkan, sekitar 1,69 persen anak usia dini tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Gambar 3.1 Persentase Anak Usia Dini menurut Status Tinggal Bersama Orang Tua Kandung dan Klasifikasi Desa, 2021

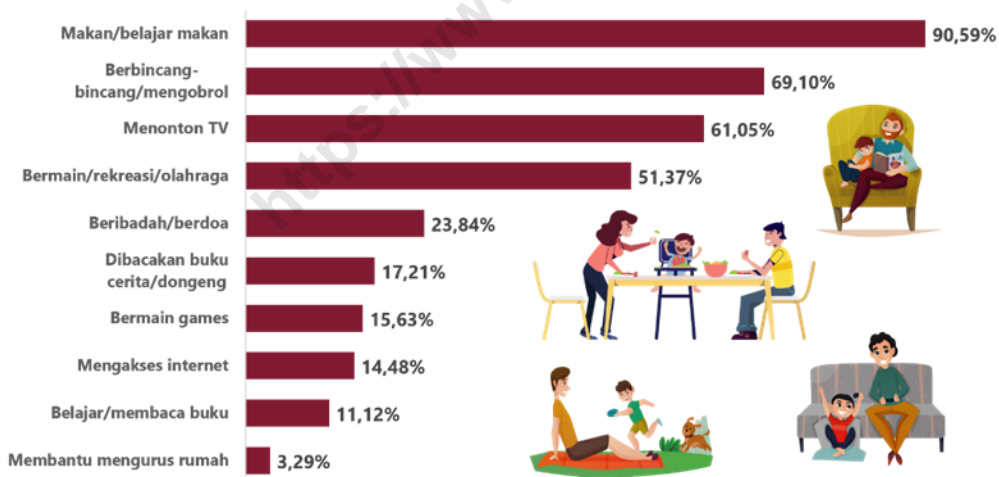
Persentase anak usia dini yang tinggal bersama ayah dan ibu kandung sedikit lebih besar di perkotaan daripada perdesaan. Di lain pihak, persentase anak usia dini baik yang tinggal bersama orang tua tunggal maupun tidak bersama ayah dan ibu kandung sedikit lebih besar terjadi di perdesaan daripada perkotaan. Hal ini perlu menjadi perhatian, meskipun tidak semua orang tua tunggal memberikan pola asuh yang kurang baik.

Masih adanya anak usia dini yang tinggal bersama orang tua tunggal dan tinggal tidak bersama ayah dan ibu kandung belum tentu mengindikasikan mereka memang sudah tidak memiliki ayah atau ibu kandung. Hal ini karena bisa

jadi ayah atau ibu kandung tidak tinggal satu rumah dengan anak tersebut (bukan anggota rumah tangga). Di sisi lain, meskipun persentase anak usia dini yang tinggal bersama dengan ayah dan ibu kandung cukup besar, belum tentu dalam menjalani aktivitas kesehariannya anak tersebut selalu didampingi oleh orang tuanya.

3.2 Penggunaan Waktu Bersama Orang Tua/Wali

Berbagai kebersamaan aktivitas anak usia dini dengan orang tua/wali merupakan strategi pengasuhan positif sehingga anak tumbuh dengan pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020, 2020, 1). Hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO yakni menggalakkan kegiatan pembelajaran dini bagi anak usia dini dengan orang tua/wali. Orang tua/wali harus terlibat dalam aktivitas pembelajaran bersama dengan anak usia dini (World Health Organization 2020, 2020, ix).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Gambar 3.2 Persentase Anak Usia Dini menurut Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orang Tua/Wali dalam Seminggu Terakhir, 2021

Berdasarkan Gambar 3.2 terlihat bahwa sekitar sembilan dari sepuluh anak usia dini melakukan aktivitas makan/belajar makan bersama orang tua/wali dalam seminggu terakhir. Sekitar tujuh dari sepuluh anak usia dini melakukan

aktivitas berbincang-bincang/mengobrol bersama dengan orang tua/wali dalam seminggu terakhir. Selanjutnya, sekitar enam dari sepuluh anak usia dini melakukan aktivitas menonton TV bersama dengan orang tua/wali dalam seminggu terakhir.

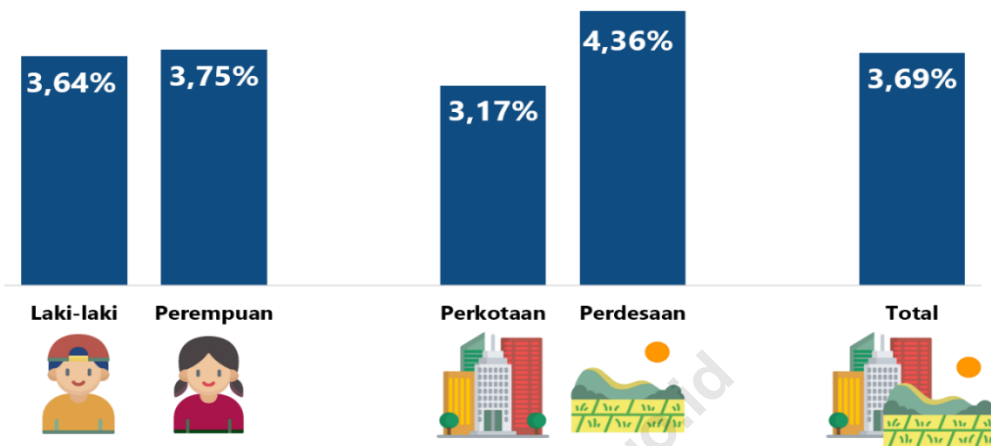
Sayangnya, persentase dibacakan buku cerita/dongeng dan belajar/membaca buku anak usia dini yang dilakukan bersama orang tua/wali masih sangat kecil, yaitu berturut-turut hanya sekitar 17,21 persen dan 11,12 persen. Padahal, kedua aktivitas ini sangat bagus untuk menambah literasi anak usia dini. Anak usia dini hingga menginjak usia 8 tahun memiliki otak yang sangat plastis dan responsif terhadap perubahan melalui interaksi genetika, lingkungan dan pengalaman (The United Nations Children's Fund 2022). Optimalisasi perkembangan otak didukung oleh stimulasi lingkungan, salah satunya melalui interaksi sosial dengan orang tua/wali.

3.3 Pola Pengasuhan

Perkembangan anak usia dini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dimulai dari individu anak itu sendiri, orang tua/wali, dan lingkungan tempat tinggalnya (Irwin et al., 2007 dalam Adioetomo et al, 2018, 87). Jadi jelaslah bahwa peran aktif orang tua/wali dalam pengasuhan anak usia dini sangatlah diperlukan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat orang tua yang belum tepat dalam menerapkan pola asuh kepada anaknya. Anak usia dini dikatakan mendapatkan pengasuhan tidak layak jika dalam seminggu terakhir pernah ditinggalkan atau diasuh oleh anak usia <10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa selama >1 jam atau pernah ditinggalkan sendiri selama >1 jam.

Berdasarkan Gambar 3.3 terlihat bahwa sekitar 3,69 persen balita pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak. Persentase balita yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak sedikit lebih besar terjadi pada perempuan daripada laki-laki, dan sedikit lebih besar terjadi di perdesaan daripada perkotaan. Data ini bersesuaian dengan data sebelumnya yang menemukan bahwa persentase anak usia dini baik yang tinggal bersama orang tua tunggal maupun tidak bersama ayah dan ibu kandung sedikit lebih besar

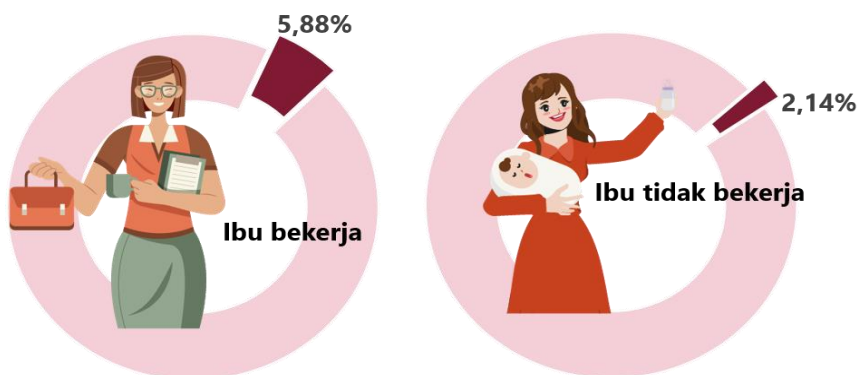
terjadi di perdesaan daripada perkotaan. Apakah status tinggal anak usia dini berhubungan dengan pengasuhan tidak layak? Hal ini perlu penelitian lebih lanjut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Gambar 3.3 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Klasifikasi Desa, 2021

Pola pengasuhan anak usia dini sangatlah penting. Menurut penelitian, terdapat hubungan pengasuhan orang tua terhadap perkembangan anak usia dini (Wulandari 2016, 14; Herminaju & Kholidati 2019, 122; Ilmiah et al. 2019, 66). Semakin baik pengasuhan orang tua maka semakin baik pula perkembangan anaknya.



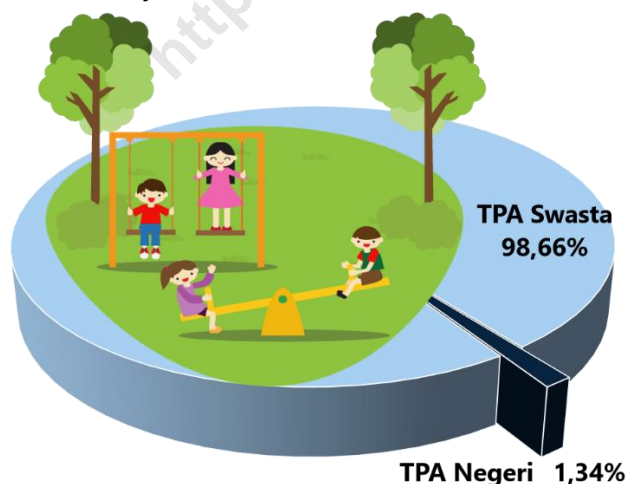
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Gambar 3.4 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Status Bekerja Ibu, 2021

Dilihat menurut status bekerja ibu, ternyata persentase balita yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak pada ibu bekerja lebih besar daripada ibu yang tidak bekerja (Gambar 3.4). Perlu adanya manajemen waktu, keluarga, pekerjaan, dan pengasuhan anak usia dini pada ibu yang bekerja (Putrihapsari & Fauziah 2020, 130-133). Dengan melakukan keempat manajemen tersebut menjadikan ibu bekerja dapat melakukan tanggung jawab di keluarga dan pekerjaan dengan efektif, yang pada akhirnya perkembangan anak usia dini dapat berkembang dengan maksimal.

3.4 Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau Lembaga Sosial Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang dilaksanakan oleh pihak di luar keluarga inti. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan melalui sistem orang tua asuh, wali, pengangkatan anak, atau pengasuhan berbasis residential, yakni LKSA (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak). Pengasuhan alternatif merupakan salah satu alternatif pengasuhan anak usia dini pada *dual-career family*.



Gambar 3.5 Persentase Taman Penitipan Anak menurut Status Negeri/Swasta, Tahun 2021/2022

Salah satu pengasuhan alternatif adalah didirikannya Taman Penitipan Anak (TPA). TPA dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2015, 4). Namun, berdasarkan Gambar 3.5 menunjukkan bahwa TPA di Indonesia didominasi oleh TPA swasta, yaitu sebesar 98,66 persen. Terlepas dari jenis TPA (negeri dan swasta), penelitian menemukan bahwa TPA berperan sebagai pengganti orang tua sementara waktu. Dengan adanya TPA diharapkan dapat membantu orang tua untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dan perkembangan anaknya (Syamsulanjari, Muarifah, & Mujidin 2019, 224).

<https://www.bps.go.id>

Tabel 3.1 **Persentase Anak Usia Dini menurut Karakteristik dan Status Tinggal Bersama Orangtua Kandung, 2021**

Karakteristik	Keberadaan Orangtua Kandung		
	Tinggal Bersama Ayah dan Ibu Kandung ¹	Tinggal Bersama Orangtua Tunggal ²	Tidak Tinggal Bersama Ayah dan Ibu Kandung ³
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	90,82	7,48	1,69
Jenis Kelamin			
Laki-laki	90,73	7,46	1,81
Perempuan	90,92	7,50	1,58
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	91,61	7,10	1,29
Perdesaan	89,84	7,96	2,21

Catatan:

¹ Tinggal bersama ayah dan ibu kandung: ayah kandung dan ibu kandung merupakan ART

² Tinggal bersama orangtua tunggal: (i) ayah kandung merupakan ART dan ibu kandung selain ART; atau (ii) ibu kandung merupakan ART dan ayah kandung selain ART

³ Tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung: ayah dan ibu kandung bukan ART

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 3.2 Persentase Anak Usia Dini menurut Aktivitas yang Dilakukan Bersama Orangtua/Wali dalam Seminggu Terakhir dan Karakteristik, 2021

Karakteristik	Jenis Kelamin		Klasifikasi Desa		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makan/belajar makan	90,48	90,70	91,13	89,90	90,59
Menonton TV	60,81	61,32	63,56	57,89	61,05
Belajar/membaca buku	10,71	11,54	12,05	9,94	11,12
Dibacakan buku cerita/dongeng	16,59	17,86	21,16	12,21	17,21
Beribadah/berdoa	23,19	24,53	24,61	22,88	23,84
Berbincang-bincang/ mengobrol	68,68	69,55	71,01	66,69	69,10
Bermain/rekreasi/berolahraga	50,89	51,86	56,10	45,37	51,37
Bermain <i>games</i>	16,63	14,58	18,94	11,44	15,63
Mengakses internet	14,27	14,70	17,96	10,07	14,48
Membantu mengurus rumah	2,62	4,00	3,04	3,61	3,29
Membantu menambah penghasilan	0,09	0,09	0,05	0,14	0,09
Tidak ada	0,26	0,25	0,19	0,34	0,26
Tidak relevan ¹	1,66	2,03	1,60	2,14	1,84

Catatan:

¹ Tidak relevan, jika tidak tinggal bersama orangtua/wali, seperti pembantu, anak kost, dan lain-lain

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 3.3 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik (1)	Mendapat Pengasuhan Tidak Layak	
	Pernah (2)	Tidak Pernah (3)
Indonesia	3,69	96,31
Jenis Kelamin		
Laki-laki	3,64	96,36
Perempuan	3,75	96,25
Status Bekerja Ibu		
Bekerja	5,88	94,12
Tidak Bekerja	2,14	97,86
Tidak Relevan ¹	3,91	96,09
Jumlah ART		
2 orang	12,24	87,76
3-4 orang	3,11	96,89
>4 orang	4,27	95,73
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	3,17	96,83
Perdesaan	4,36	95,64

Catatan:

¹ Tidak Relevan jika Ibu bukan merupakan anggota rumah tangga (ART)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 3.4 Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama Orangtua Kandung, 2021

Provinsi	Status Tinggal Bersama Orang Tua Kandung			Jumlah
	Tinggal Bersama Ayah dan Ibu Kandung	Tinggal Bersama Orang Tua Tunggal	Tidak Tinggal Bersama Ayah dan Ibu Kandung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	94,75	4,77	0,48	100,00
Sumatera Utara	92,62	5,51	1,88	100,00
Sumatera Barat	92,28	6,86	0,87	100,00
Riau	94,41	4,49	1,10	100,00
Jambi	93,78	5,07	1,15	100,00
Sumatera Selatan	94,73	4,21	1,05	100,00
Bengkulu	95,72	3,70	NA	100,00
Lampung	92,92	5,70	1,38	100,00
Kep. Bangka Belitung	93,81	4,00	2,19	100,00
Kepulauan Riau	97,54	1,76	NA	100,00
DKI Jakarta	92,90	6,08	1,02	100,00
Jawa Barat	91,99	7,06	0,95	100,00
Jawa Tengah	87,00	10,90	2,10	100,00
DI Yogyakarta	92,38	7,31	NA	100,00
Jawa Timur	88,19	9,33	2,48	100,00
Banten	92,09	6,67	1,24	100,00
Bali	95,06	3,71	1,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	82,69	14,04	3,27	100,00
Nusa Tenggara Timur	87,40	8,57	4,02	100,00
Kalimantan Barat	91,28	7,76	0,95	100,00
Kalimantan Tengah	94,82	4,58	0,60	100,00
Kalimantan Selatan	91,19	7,34	1,47	100,00
Kalimantan Timur	94,19	4,51	1,30	100,00
Kalimantan Utara	91,21	8,74	NA	100,00
Sulawesi Utara	88,09	8,32	3,58	100,00
Sulawesi Tengah	91,36	6,59	2,05	100,00
Sulawesi Selatan	89,89	7,96	2,14	100,00
Sulawesi Tenggara	86,14	11,47	2,40	100,00
Gorontalo	89,59	8,44	NA	100,00
Sulawesi Barat	88,30	8,76	2,94	100,00
Maluku	87,32	7,37	5,31	100,00
Maluku Utara	86,96	10,75	2,29	100,00
Papua Barat	85,69	7,48	6,83	100,00
Papua	89,69	7,54	2,77	100,00
Indonesia	90,82	7,48	1,69	100,00

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 3.5 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak	Tidak Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,77	94,23	100,00
Sumatera Utara	5,21	94,79	100,00
Sumatera Barat	1,85	98,15	100,00
Riau	3,58	96,42	100,00
Jambi	2,80	97,20	100,00
Sumatera Selatan	2,47	97,53	100,00
Bengkulu	2,79	97,21	100,00
Lampung	4,56	95,44	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,33	95,67	100,00
Kepulauan Riau	NA	96,52	100,00
DKI Jakarta	2,36	97,64	100,00
Jawa Barat	1,82	98,18	100,00
Jawa Tengah	4,32	95,68	100,00
DI Yogyakarta	3,36	96,64	100,00
Jawa Timur	3,42	96,58	100,00
Banten	4,10	95,90	100,00
Bali	5,26	94,74	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,13	95,87	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,49	92,51	100,00
Kalimantan Barat	3,68	96,32	100,00
Kalimantan Tengah	5,48	94,52	100,00
Kalimantan Selatan	3,20	96,80	100,00
Kalimantan Timur	2,24	97,76	100,00
Kalimantan Utara	NA	93,49	100,00
Sulawesi Utara	4,09	95,91	100,00
Sulawesi Tengah	6,70	93,30	100,00
Sulawesi Selatan	5,43	94,57	100,00
Sulawesi Tenggara	4,02	95,98	100,00
Gorontalo	8,72	91,28	100,00
Sulawesi Barat	5,15	94,85	100,00
Maluku	4,55	95,45	100,00
Maluku Utara	3,35	96,65	100,00
Papua Barat	4,02	95,98	100,00
Papua	4,24	95,76	100,00
Indonesia	3,69	96,31	100,00

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 3.6 *Sampling Error* Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama Orang Tua Kandung, 2021

Provinsi	Tinggal bersama ayah dan ibu kandung				Tinggal bersama orang tua tunggal				Tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	94,75	93,30	96,20	0,78	4,77	3,39	6,15	14,79	0,48	0,02	0,94	48,87
Sumatera Utara	92,62	91,10	94,14	0,84	5,51	4,13	6,88	12,71	1,88	1,21	2,55	18,16
Sumatera Barat	92,28	89,93	94,63	1,30	6,86	4,61	9,10	16,69	0,87	0,36	1,38	29,90
Riau	94,41	92,54	96,29	1,01	4,49	2,71	6,26	20,19	1,10	0,39	1,82	33,12
Jambi	93,78	91,65	95,90	1,16	5,07	3,26	6,89	18,29	1,15	0,13	2,16	45,34
Sumatera Selatan	94,73	93,34	96,13	0,75	4,21	2,93	5,50	15,58	1,05	0,49	1,61	27,13
Bengkulu	95,72	93,83	97,62	1,01	3,70	1,89	5,50	24,89	NA	NA	NA	50,30
Lampung	92,92	91,09	94,74	1,00	5,70	3,99	7,41	15,32	1,38	0,69	2,07	25,43
Kep. Bangka Belitung	93,81	91,27	96,34	1,38	4,00	2,29	5,72	21,89	2,19	0,24	4,14	45,48
Kepulauan Riau	97,54	96,09	98,99	0,76	1,76	0,48	3,05	37,25	NA	NA	NA	61,49
DKI Jakarta	92,90	90,43	95,38	1,36	6,08	3,65	8,50	20,35	1,02	0,13	1,91	44,72
Jawa Barat	91,99	90,64	93,35	0,75	7,06	5,81	8,30	9,00	0,95	0,47	1,44	25,85
Jawa Tengah	87,00	85,31	88,69	0,99	10,90	9,35	12,44	7,23	2,10	1,49	2,71	14,92
DI Yogyakarta	92,38	89,16	95,60	1,78	7,31	4,13	10,50	22,21	NA	NA	NA	100,64
Jawa Timur	88,19	86,70	89,67	0,86	9,33	8,03	10,63	7,11	2,48	1,87	3,10	12,67
Banten	92,09	89,50	94,68	1,44	6,67	4,24	9,10	18,60	1,24	0,18	2,30	43,73
Bali	95,06	92,85	97,28	1,19	3,71	1,63	5,80	28,64	1,22	0,38	2,07	35,14
Nusa Tenggara Barat	82,69	78,01	87,36	2,89	14,04	10,08	18,01	14,40	3,27	1,41	5,13	29,07
Nusa Tenggara Timur	87,40	85,61	89,20	1,05	8,57	7,02	10,13	9,25	4,02	2,85	5,19	14,82
Kalimantan Barat	91,28	88,48	94,09	1,57	7,76	5,18	10,35	16,96	0,95	0,29	1,62	35,76
Kalimantan Tengah	94,82	92,74	96,91	1,12	4,58	2,56	6,60	22,54	0,60	0,10	1,09	42,10
Kalimantan Selatan	91,19	88,63	93,74	1,43	7,34	5,05	9,63	15,93	1,47	0,37	2,58	38,24
Kalimantan Timur	94,19	91,50	96,88	1,46	4,51	1,95	7,07	28,93	1,30	0,34	2,25	37,57
Kalimantan Utara	91,21	85,99	96,44	2,92	8,74	3,52	13,95	30,46	NA	NA	NA	80,59
Sulawesi Utara	88,09	85,20	90,99	1,68	8,32	5,89	10,75	14,89	3,58	1,92	5,25	23,70
Sulawesi Tengah	91,36	88,88	93,84	1,38	6,59	4,13	9,05	19,04	2,05	0,83	3,27	30,28
Sulawesi Selatan	89,89	88,29	91,50	0,91	7,96	6,42	9,51	9,90	2,14	1,35	2,94	18,88
Sulawesi Tenggara	86,14	83,01	89,26	1,85	11,47	8,41	14,53	13,61	2,40	1,35	3,44	22,19
Gorontalo	89,59	84,24	94,94	3,05	8,44	4,62	12,26	23,09	NA	NA	NA	62,20
Sulawesi Barat	88,30	83,95	92,64	2,51	8,76	4,27	13,25	26,13	2,94	1,06	4,82	32,66
Maluku	87,32	83,85	90,79	2,03	7,37	5,20	9,54	15,02	5,31	2,27	8,35	29,21
Maluku Utara	86,96	82,37	91,55	2,69	10,75	5,99	15,52	22,60	2,29	0,87	3,71	31,62
Papua Barat	85,69	81,37	90,01	2,57	7,48	4,49	10,46	20,35	6,83	4,03	9,63	20,92
Papua	89,69	85,41	93,98	2,44	7,54	3,82	11,25	25,18	2,77	1,42	4,12	24,91
Indonesia	90,82	90,35	91,30	0,26	7,48	7,05	7,91	2,93	1,69	1,51	1,88	5,46

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Warna merah (■) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 3.7 *Sampling Error* Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Pernah				Tidak Pernah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	5,77	3,84	7,70	17,08	94,23	92,30	96,16	1,05
Sumatera Utara	5,21	3,58	6,84	15,94	94,79	93,16	96,42	0,88
Sumatera Barat	1,85	0,76	2,94	30,06	98,15	97,06	99,24	0,57
Riau	3,58	1,36	5,80	31,59	96,42	94,20	98,64	1,17
Jambi	2,80	1,24	4,36	28,39	97,20	95,64	98,76	0,82
Sumatera Selatan	2,47	1,31	3,63	23,95	97,53	96,37	98,69	0,61
Bengkulu	2,79	0,68	4,89	38,58	97,21	95,11	99,32	1,11
Lampung	4,56	2,48	6,65	23,29	95,44	93,35	97,52	1,11
Kep. Bangka Belitung	4,33	1,23	7,43	36,50	95,67	92,57	98,77	1,65
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	56,89	96,52	92,65	100,40	2,05
DKI Jakarta	2,36	0,52	4,21	39,85	97,64	95,79	99,48	0,96
Jawa Barat	1,82	0,92	2,73	25,25	98,18	97,27	99,08	0,47
Jawa Tengah	4,32	3,05	5,60	15,07	95,68	94,40	96,95	0,68
DI Yogyakarta	3,36	0,36	6,36	45,54	96,64	93,64	99,64	1,58
Jawa Timur	3,42	2,26	4,58	17,32	96,58	95,42	97,74	0,61
Banten	4,10	1,65	6,55	30,49	95,90	93,45	98,35	1,30
Bali	5,26	2,68	7,84	24,99	94,74	92,16	97,32	1,39
Nusa Tenggara Barat	4,13	2,01	6,24	26,14	95,87	93,76	97,99	1,13
Nusa Tenggara Timur	7,49	4,57	10,41	19,91	92,51	89,59	95,43	1,61
Kalimantan Barat	3,68	1,92	5,44	24,37	96,32	94,56	98,08	0,93
Kalimantan Tengah	5,48	2,00	8,97	32,42	94,52	91,03	98,00	1,88
Kalimantan Selatan	3,20	1,69	4,71	24,12	96,80	95,29	98,31	0,80
Kalimantan Timur	2,24	0,42	4,07	41,44	97,76	95,93	99,58	0,95
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	59,72	93,49	85,88	101,11	4,16
Sulawesi Utara	4,09	1,35	6,83	34,20	95,91	93,17	98,65	1,46
Sulawesi Tengah	6,70	4,34	9,07	18,02	93,30	90,93	95,66	1,29
Sulawesi Selatan	5,43	3,72	7,15	16,09	94,57	92,85	96,28	0,92
Sulawesi Tenggara	4,02	1,72	6,32	29,15	95,98	93,68	98,28	1,22
Gorontalo	8,72	3,30	14,13	31,69	91,28	85,87	96,70	3,03
Sulawesi Barat	5,15	0,79	9,52	43,21	94,85	90,48	99,21	2,35
Maluku	4,55	2,07	7,03	27,79	95,45	92,97	97,93	1,33
Maluku Utara	3,35	1,60	5,11	26,63	96,65	94,89	98,40	0,92
Papua Barat	4,02	1,65	6,39	30,02	95,98	93,61	98,35	1,26
Papua	4,24	2,30	6,19	23,38	95,76	93,81	97,70	1,04
Indonesia	3,69	3,32	4,07	5,16	96,31	95,93	96,68	0,20

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Warna merah (■) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021



BAB 4
KESEHATAN
DAN GIZI

Kesehatan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang sehat akan lebih mudah menerima rangsangan yang mendukung perkembangan motorik, intelektual, dan emosional. Sebaliknya, penurunan kondisi kesehatan anak akan menyulitkan mereka dalam menerima stimulus perkembangan. Selain itu, anak yang sakit juga dapat mengganggu aktivitas orang tua sehingga rutinitas rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, pekerjaan rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara optimal, orang tua tidak dapat bekerja/mencari penghasilan, atau bahkan anggota keluarga yang lain turut terganggu kesehatannya karena harus mengurus anak yang sakit.

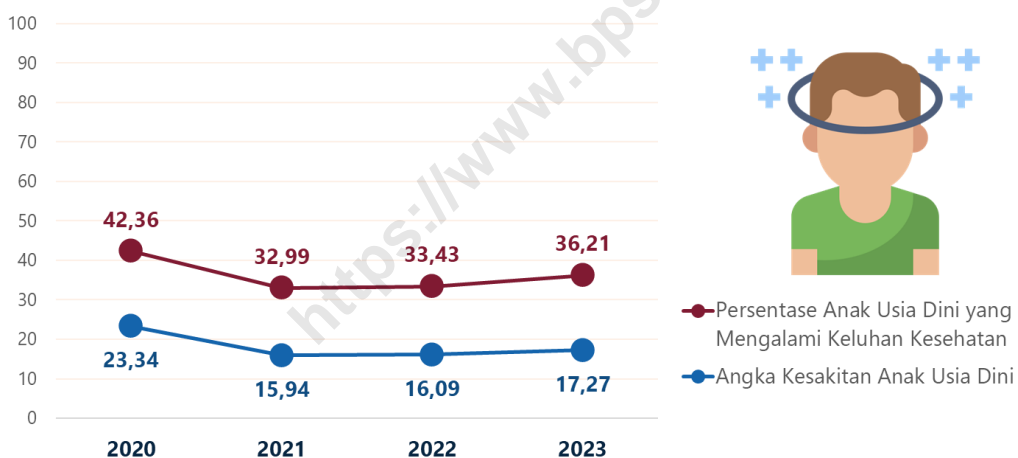
Untuk menjaga anak tetap sehat diperlukan asupan gizi yang cukup. Gizi yang baik juga dapat mempercepat kesembuhan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, khususnya tumbuh kembang fisik, sangat dipengaruhi oleh nutrisi dari makanan dan minuman sehari-hari. Anak dengan asupan gizi yang baik tentunya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik juga.

4.1. Status Kesehatan

Aboud dan Yousafzai (2015) menyoroti risiko kesehatan dan nutrisi pada anak usia kurang dari 24 bulan. Dalam tulisannya, infeksi dan kesakitan merupakan salah satu penghambat tumbuh kembang anak. Anak-anak yang mengalami infeksi berulang, dengan disertai hilangnya nafsu makan, mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan (Aboud dan Yousafzai 2015, 436-437). Gangguan pertumbuhan akibat infeksi dapat terjadi karena nutrisi yang

seharusnya diserap untuk penambahan berat badan atau tinggi badan dialihkan untuk melawan infeksi yang berulang (Aboud dan Yousafzai 2015, 436-437).

Di samping itu, selama periode lima tahun pertama, anak memerlukan kegiatan fisik dan rangkaian stimulasi untuk membantu perkembangan otak dan keterampilan sosial anak (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia/Kemkes RI 2023). Kegiatan fisik yang tepat dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan otot serta tulang pada anak, adapun stimulasi pada anak, seperti membaca cerita dan bermain, dapat membantu meningkatkan keterampilan bahasa, sosial, dan kognitif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia/Kemkes RI 2023). Agar anak-anak tetap aktif, kesehatan mereka perlu diperhatikan. Kondisi badan yang sehat akan mendukung proses penerimaan stimulasi dan kegiatan fisik yang dilakukan anak.

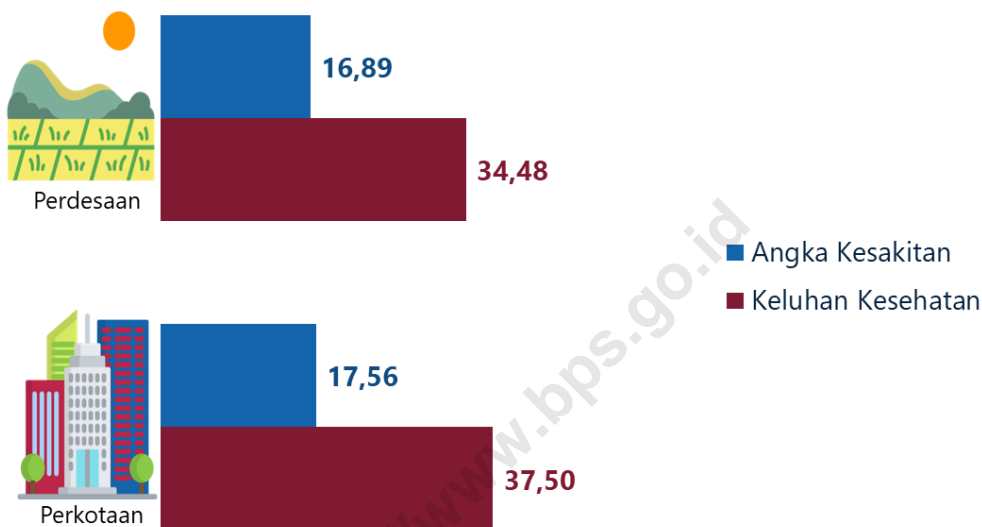


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2023

Gambar 4.1 Perkembangan Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Anak Usia Dini, 2020-2023

Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan sebesar 36,21 persen anak usia dini mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Dibandingkan dengan tahun 2020, persentase anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan menurun sekitar 6 persen poin. Akan tetapi, sejak tahun 2021 persentase anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan meningkat setiap tahun.

Pola yang sama juga ditunjukkan angka kesakitan anak usia dini. Dibandingkan tahun 2020, angka kesakitan anak usia dini menurun, namun cenderung meningkat sepanjang tahun 2021-2023. Pada tahun 2023, sedikitnya 17 dari 100 anak usia dini mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-harinya (sakit) selama sebulan terakhir.



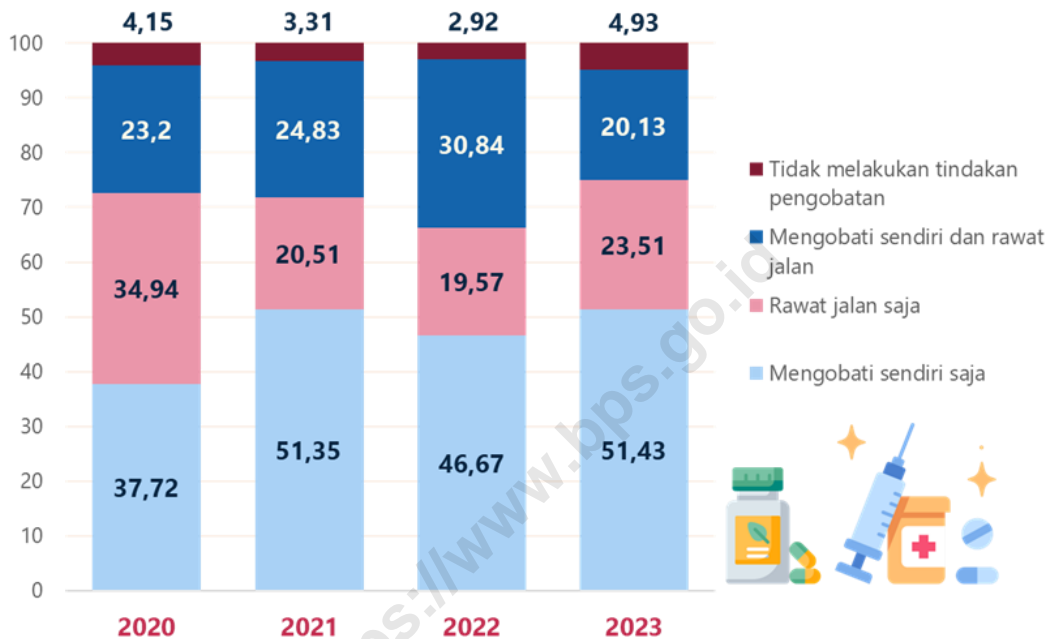
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.2 Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Anak Usia Dini menurut Klasifikasi Desa, 2023

Penelitian yang menyoroti hubungan antara klasifikasi desa tempat tinggal dan kesehatan anak menunjukkan keberagaman simpulan. Salah satu penelitian di China menemukan adanya perbedaan kondisi kesehatan anak antara perkotaan dan perdesaan. Di China, anak-anak yang tinggal di perkotaan memiliki status kesehatan dan nutrisi yang lebih baik dibandingkan anak-anak di perdesaan (Hong Liu, Hai Fang, Zhong Zhao 2013). Di sisi lain, penelitian di Bangladesh, Kenya, dan Mesir menunjukkan daerah perkotaan yang kumuh memiliki angka kesakitan dan malnutrisi yang lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (Blessing, dkk 2016).

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Pada tahun 2023, persentase anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan di perkotaan lebih besar

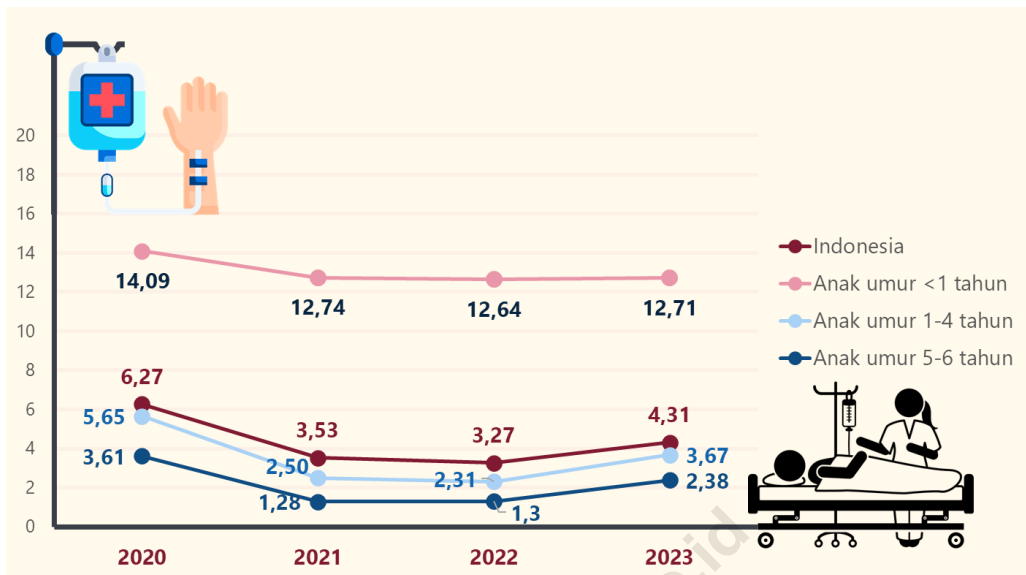
dibandingkan di perdesaan (37,50 persen berbanding 34,48 persen). Sejalan dengan itu, angka kesakitan anak usia dini di perkotaan sedikit lebih besar dibandingkan angka kesakitan anak usia dini di perdesaan (17,56 persen berbanding 16,89 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2023

Gambar 4.3 Perkembangan Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir menurut Tindakan Pengobatan, 2020-2023

Tidak berhenti sampai angka kesakitan, BPS melalui Susenas juga mengumpulkan data mengenai tindakan pengobatan bagi responden yang mengalami keluhan kesehatan. Secara konsisten, data Susenas setiap tahun menunjukkan sebagian besar anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan diobati, baik dengan mengobati sendiri maupun berobat ke fasilitas kesehatan atau tempat pengobatan lainnya. Sayangnya, pada tahun 2023, tampak adanya kenaikan persentase keluhan kesehatan pada anak usia dini diikuti dengan kenaikan persentase anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak melakukan tindak pengobatan. Sebesar 4,93 persen anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan tidak diobati.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2023

Gambar 4.4 Perkembangan Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2020-2023

Selanjutnya, Susenas juga menangkap informasi mengenai pengalaman rawat inap anak usia dini. Data ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran mengenai derajat kesakitan pada anak. Anak yang pernah dirawat inap mengindikasikan pengalaman keluhan kesehatan yang serius. Pertanyaan mengenai rawat inap menggunakan referensi waktu setahun terakhir.

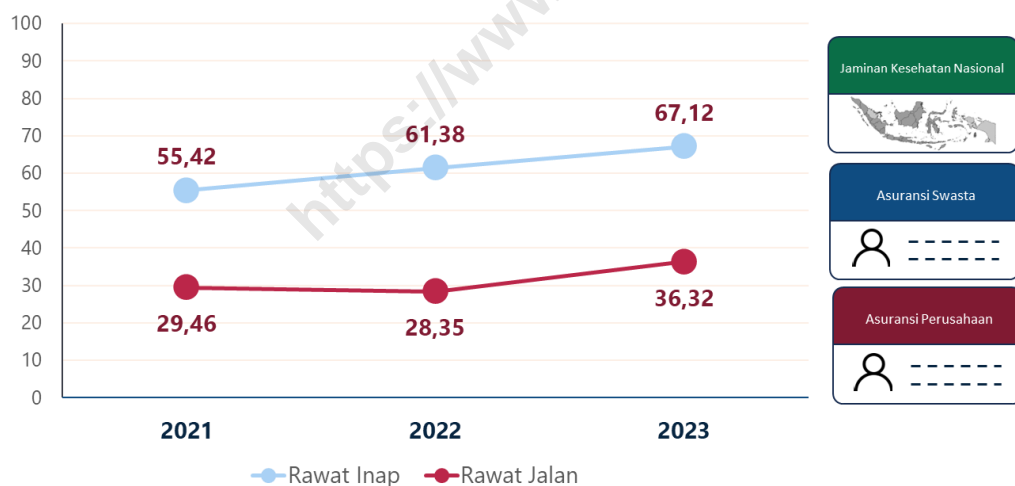
Secara umum, persentase anak usia dini yang pernah dirawat inap cenderung meningkat sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, sekitar empat dari 100 anak usia dini pernah dirawat inap setidaknya satu kali selama setahun terakhir. Meskipun informasi rawat inap memuat referensi waktu yang lebih lama dari keluhan kesehatan, persentase anak usia dini yang rawat inap meningkat sebagaimana kenaikan angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan pada tahun 2023.

Sementara itu, dilihat dari kelompok umur, semakin muda usia anak semakin besar persentase anak yang dirawat inap setahun terakhir. Persentase anak usia kurang dari satu tahun (bayi) yang dirawat inap berkontribusi paling besar terhadap total angka rawat inap anak usia dini. Sekitar 12 persen bayi pernah dirawat inap dalam setahun terakhir, sedangkan 3,67 persen anak usia 1-

4 tahun dirawat inap dalam setahun terakhir. Di sisi lain, sebesar 2,38 persen anak usia 5-6 tahun pernah dirawat inap setahun terakhir.

4.2. Penggunaan Jaminan Kesehatan

Telah disampaikan sebelumnya, sebesar 36,21 persen anak usia dini mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Sedikitnya dua dari lima anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan melakukan rawat jalan (Gambar 4.3). Kepemilikan jaminan kesehatan dapat membantu menekan biaya *out of pocket* (OOP) untuk mengobati keluhan kesehatan pada anak usia dini. Dengan menekan OOP kesehatan, stabilitas keuangan rumah tangga tidak terganggu. Beberapa jaminan kesehatan yang dicakup di Susenas Maret antara lain BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), BPJS non-PBI, Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), asuransi swasta, dan jaminan kesehatan yang difasilitasi dari perusahaan/kantor.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2023

Gambar 4.5 Perkembangan Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2021-2023

Hasil Susenas Maret menunjukkan bahwa tidak semua anak usia dini yang kesehatannya terganggu memanfaatkan jaminan kesehatan, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Pada tahun 2023, sekitar sepertiga anak usia dini yang rawat jalan menggunakan jaminan kesehatan. Adapun untuk rawat inap,

sebesar 67,12 persen anak usia dini yang pernah dirawat inap setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan.

Meskipun pemanfaatan jaminan kesehatan untuk pengobatan anak usia dini tidak terlalu besar, selama tahun 2021-2023, persentase anak usia dini yang rawat jalan dan rawat inap dengan memanfaatkan jaminan kesehatan menunjukkan peningkatan. Dibandingkan tahun 2021, kenaikan persentase anak usia dini yang rawat inap dengan menggunakan jaminan kesehatan hampir mencapai 12 persen poin pada tahun 2023. Sementara itu, persentase anak usia dini yang rawat jalan dengan menggunakan jaminan kesehatan meningkat sekitar 7 persen poin selama 2021-2023.

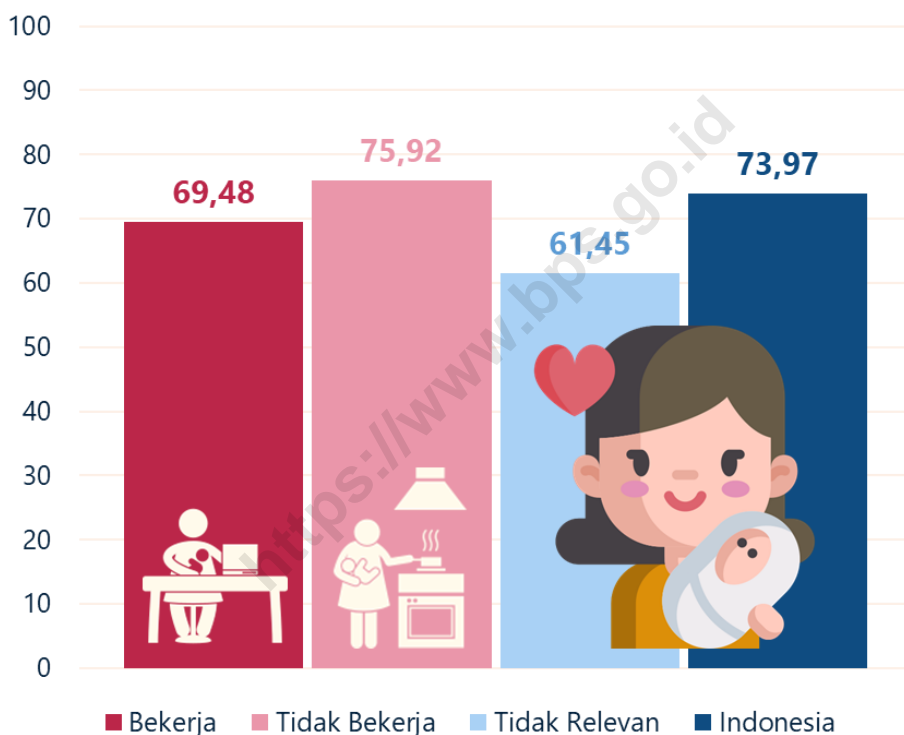
Di sisi lain, pemanfaatan jaminan kesehatan pada anak usia dini yang rawat inap dan rawat jalan tampak sedikit berbeda. Persentase anak usia dini yang rawat inap dengan menggunakan jaminan kesehatan lebih besar dibandingkan persentase anak usia dini yang rawat jalan dengan memanfaatkan jaminan kesehatan. Tingginya biaya rawat inap menyebabkan para orang tua dari anak usia dini cenderung memilih untuk menggunakan jaminan kesehatan.

4.3. Nutrisi dan Imunisasi

Asupan makro dan mikro nutrien yang cukup sangat penting pada anak usia dini karena pada usia tersebut pertumbuhan dan perkembangan sistem tubuh terjadi sangat pesat (Mistry dkk. 2012, 1691). Asupan nutrisi anak usia dini yang disajikan dalam publikasi ini hanya mencakup pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi usia 0-5 bulan. Bayi dikatakan mendapat ASI eksklusif jika pada usia 0-5 bulan hanya diberikan ASI saja sebagai makanan/minuman sehari-hari.

Pemberian ASI eksklusif memiliki beberapa keunggulan, antara lain ASI melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi, bermanfaat untuk perkembangan otak dan mata bayi, dapat mencegah Penyakit Tidak Menular saat dewasa (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia/Kemkes RI 2023). Selain itu, pemberian ASI bermanfaat tidak hanya untuk bayi melainkan juga untuk ibu. Pemberian ASI menurunkan risiko terkena obesitas, penyakit hipertensi, kanker payudara, dan kanker rahim (Schwarz dan Nothnagle 2015, 603).

Negara juga turut merasakan manfaat jangka panjang pemberian ASI. Dengan pemberian ASI, maka negara dapat menghemat 16,9 triliun rupiah per tahun karena peningkatan IQ dan pendapatan per tahun (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI 2017, 86-87). Negara juga menghemat lebih dari 3 triliun rupiah dengan mengurangi pengeluaran untuk perawatan diare dan pneumonia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI 2017, 86-87).



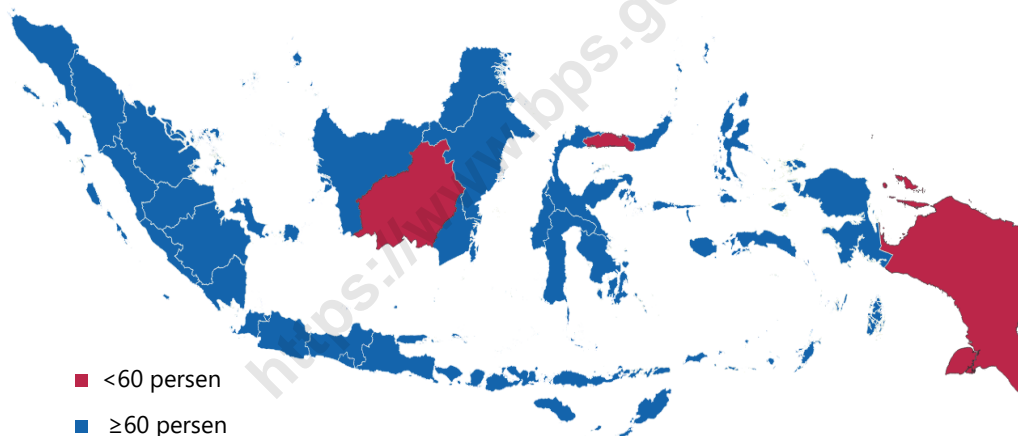
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.6 Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Status Bekerja Ibu, 2023

Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu indikator yang mengukur tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* Tujuan kedua "Tanpa Kelaparan". Hasil Susenas Maret tahun 2023 menunjukkan sebesar 73,97 persen anak usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI saja. Dilihat dari status bekerja ibu, ibu yang tidak bekerja berkontribusi lebih besar terhadap capaian ASI eksklusif anak usia 0-5 bulan. Bayi yang ditinggal

ibunya bekerja setelah cuti melahirkan berakhir menjadi salah satu penyebab penurunan praktik ASI eksklusif pada bayi usia 0-5 bulan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia/Kemkes RI 2023).

Demi meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat, pemerintah melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menargetkan persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60 persen (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia/Kemkes RI 2020, 80). Secara nasional, target tersebut sudah tercapai. Akan tetapi, beberapa provinsi di Indonesia masih dibawah dari target tersebut. Provinsi yang perlu mendapat perhatian lebih jauh adalah Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Papua (Gambar 4.7).

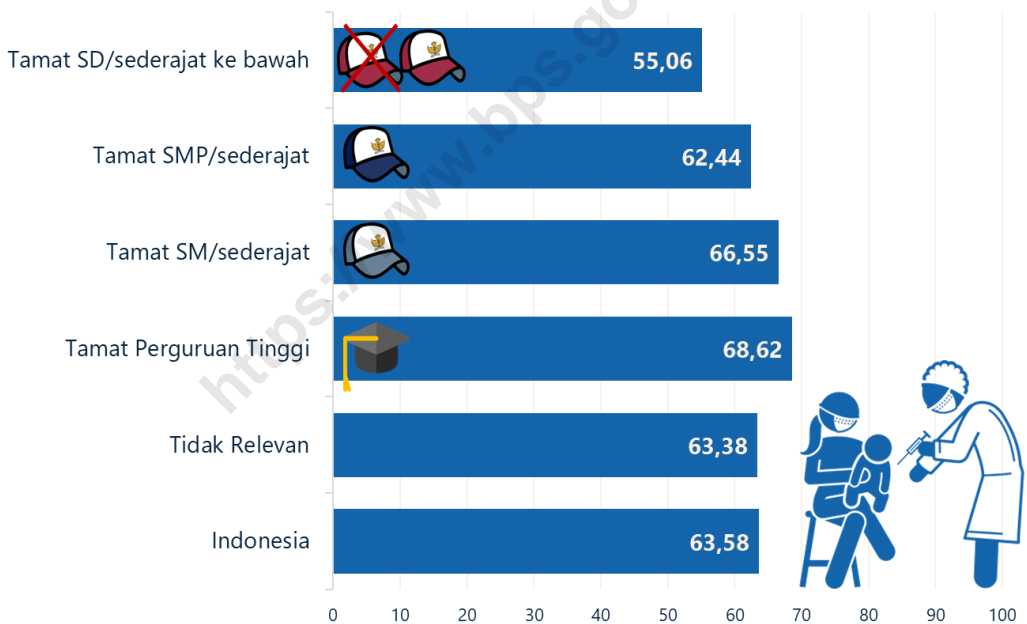


Gambar 4.7 Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Provinsi, 2023

Selain asupan nutrisi, menjaga kesehatan untuk anak usia dini juga dilakukan dengan memberikan imunisasi sesuai jadwal. Imunisasi merupakan upaya pencegahan penyakit sehingga anak tidak mudah terjangkit atau menurunkan risiko yang ditimbulkan ketika tertular penyakit. Pemerintah memfasilitasi imunisasi anak usia dini sejak lahir. Keseriusan pemerintah semakin terlihat dengan menambah jenis imunisasi yang diberikan secara gratis sejak tahun 2022. Imunisasi baru yang difasilitasi pemerintah di layanan kesehatan seluruh Indonesia yaitu pemberian vaksin Rotavirus dan PCV (Rokom Kemkes RI

2022 dan 2023). Imunisasi PCV secara gratis diberikan pada bayi usia 2, 3, dan 12 bulan, sedangkan imunisasi rotavirus diberikan sebanyak tiga dosis pada bayi usia 2 bulan dengan jarak minimal empat minggu antardosis.

Imunisasi dasar yang dicakup dalam Susenas Maret 2023 belum mencakup imunisasi baru (rotavirus dan PCV). Pertanyaan mengenai imunisasi ditujukan untuk anak usia 12-23 bulan. Imunisasi Dasar Lengkap adalah imunisasi awal yang diberikan kepada bayi sebelum berusia satu tahun agar sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HBHiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

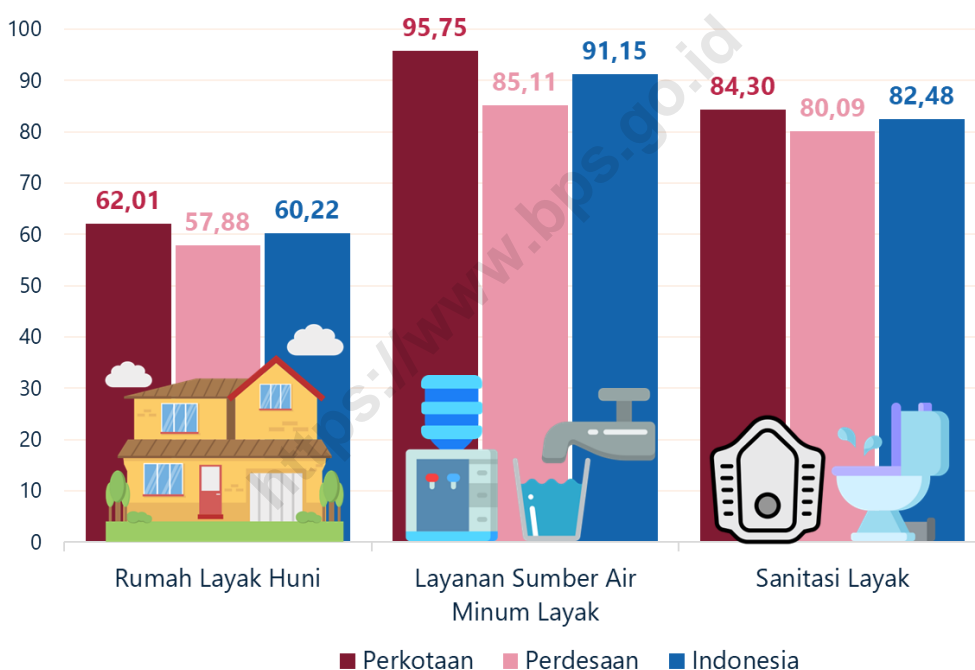
Gambar 4.8 Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap menurut Tingkat Pendidikan Ibu, 2023

Pada tahun 2023, sedikitnya 6 dari 10 anak usia 12-23 bulan sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Dilihat menurut tingkat pendidikan ibu, capaian imunisasi dasar lengkap meningkat seiring dengan peningkatan derajat pendidikan ibu. Persentase anak usia 12-23 bulan dengan ibu yang berpendidikan tamat SD ke bawah yang mendapat imunisasi dasar lengkap

kurang dari 60 persen. Di sisi lain, persentase anak usia 12-23 bulan dengan ibu yang berpendidikan tamat perguruan tinggi yang mendapat imunisasi dasar lengkap mencapai 68,62 persen.

4.4. Lingkungan Tempat Tinggal

Pola hidup sehat juga mencakup kebersihan tempat tinggal anak. Kebersihan lingkungan tempat tinggal menciptakan kondisi yang memadai untuk anak beraktivitas dengan nyaman dan aman. Anak yang terjamin kebersihan lingkungan tempat tinggalnya membantu anak untuk tetap sehat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.9 Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Memiliki Akses pada Rumah Layak Huni, Layanan Sumber Air Minum Layak, dan Sanitasi Layak, 2023

Rumah yang layak huni digambarkan sebagai rumah yang telah memenuhi kecukupan luas lantai perkapita, dengan ketahanan bangunan (baik atap, dinding, maupun lantai), serta kelayakan pada sanitasi dan air minum. Dengan kata lain, anak yang tinggal di rumah layak huni sudah pasti mendapat layanan sumber air minum layak dan sanitasi layak. Sebaliknya, anak yang

memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak atau sanitasi layak belum tentu menempati rumah layak huni.

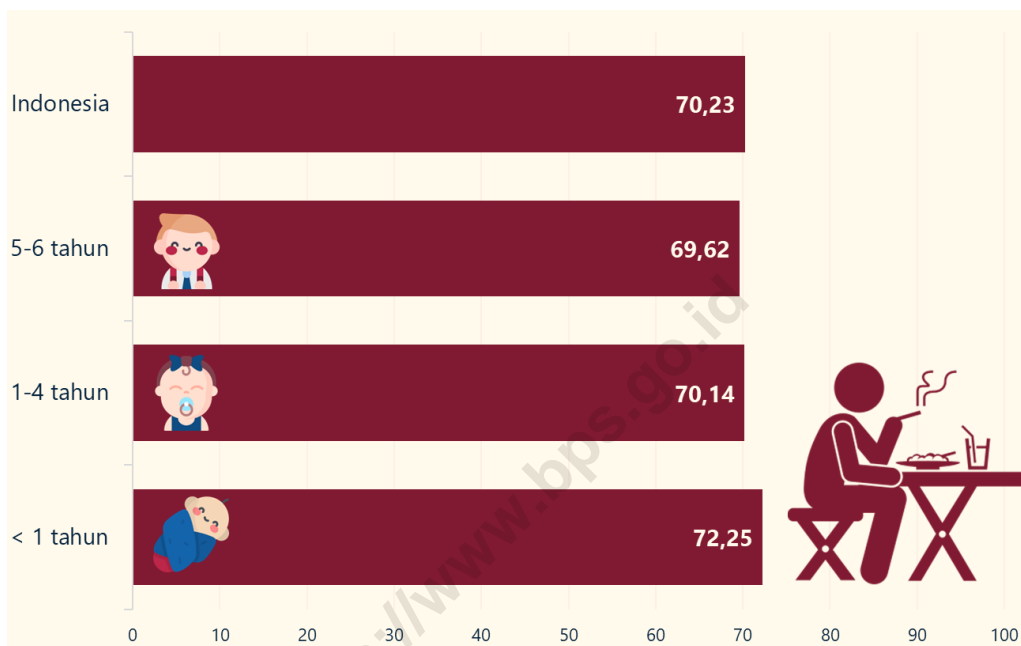
Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan sebesar 60,22 persen rumah tangga anak usia dini menempati rumah layak huni. Dilihat dari klasifikasi desa, persentase rumah tangga anak usia dini yang tinggal di rumah layak huni di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Rumah tangga anak usia dini adalah rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga usia 0-6 tahun.

Layanan sumber air minum layak dan sanitasi layak merupakan komponen penyusun indikator rumah layak huni. Sumber air minum dikatakan layak apabila sumber air minum utama berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan. Selain itu, rumah tangga yang sumber air minum utamanya berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan, dikatakan mendapat akses terhadap layanan sumber air minum layak. Adapun yang dimaksud dengan sanitasi layak adalah rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) atau MCK komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika tempat tinggalnya di perdesaan.

Sejalan dengan pola yang terlihat pada rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni, persentase rumah tangga anak usia dini yang memiliki akses pada layanan sanitasi layak di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan (84,30 persen berbanding 80,09 persen). Sementara itu, persentase rumah tangga anak usia dini yang memiliki akses pada layanan sumber air minum layak di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan (95,75 persen berbanding 85,11 persen). Hal ini menyiratkan adanya kesenjangan yang cukup tinggi pada layanan sumber air minum layak antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat pengelolaan infrastruktur air minum layak menjadi hal yang krusial.

Selain melihat bagaimana kondisi tempat tinggal anak usia dini, perilaku anggota rumah tangga (ART) yang tinggal bersama anak usia dini juga

memengaruhi derajat kesehatan anak. Susenas memberikan gambaran perilaku merokok anggota rumah tangga yang tinggal bersama anak. Anak yang tinggal dengan perokok lebih berisiko terpapar asap rokok yang membahayakan kesehatan anak khususnya gangguan saluran pernapasan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.10 Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal dengan ART Perokok, 2023

Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan sekitar 7 dari 10 anak usia dini tinggal bersama anggota rumah tangga yang perokok. Dilihat dari kelompok umur, semakin muda anak usia dini semakin besar persentase anak usia dini yang tinggal bersama ART perokok. Sebesar 72,25 persen bayi tinggal bersama ART perokok, sedangkan 69,62 persen anak usia 5-6 tahun tinggal dengan ART perokok.

Tabel 4.1 Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Anak Usia Dini menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik (1)	Mengalami Keluhan Kesehatan (2)	Angka Kesakitan (3)
Indonesia	36,21	17,27
Jenis Kelamin		
Laki-laki	36,70	17,38
Perempuan	35,70	17,16
Kelompok Umur		
<1 tahun	27,19	13,81
1-4 tahun	39,31	18,24
5-6 tahun	33,25	16,60
Distribusi Pengeluaran		
40% terbawah	34,57	16,30
40% menengah	37,60	18,11
20% teratas	37,92	18,27
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	37,50	17,56
Perdesaan	34,48	16,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.2 Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir menurut Tindakan Pengobatan dan Karakteristik, 2023

Karakteristik	Tindakan Pengobatan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan				Jumlah
	Mengobati Sendiri	Rawat Jalan	Mengobati Sendiri dan Rawat Jalan	Tidak Melakukan Tindakan Pengobatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indonesia	51,43	23,51	20,13	4,93	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki	50,98	23,35	20,85	4,83	100,00
Perempuan	51,90	23,69	19,36	5,04	100,00
Kelompok Umur					
<1 tahun	40,20	34,61	19,27	5,92	100,00
1-4 tahun	50,83	23,26	20,83	5,08	100,00
5-6 tahun	56,47	20,59	18,69	4,25	100,00
Distribusi Pengeluaran					
40% terbawah	53,91	22,52	18,87	4,70	100,00
40% menengah	50,07	23,65	21,17	5,10	100,00
20% teratas	47,58	26,02	21,21	5,18	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	50,25	24,68	20,77	4,31	100,00
Perdesaan	53,14	21,82	19,21	5,84	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.3 Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik	Rawat Inap dalam Setahun Terakhir		Jumlah
	Pernah	Tidak Pernah	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	4,31	95,69	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	4,58	95,42	100,00
Perempuan	4,03	95,97	100,00
Kelompok Umur			
<1 tahun	12,71	87,29	100,00
1-4 tahun	3,67	96,33	100,00
5-6 tahun	2,38	97,62	100,00
Distribusi Pengeluaran			
40% terbawah	2,94	97,06	100,00
40% menengah	4,88	95,12	100,00
20% teratas	7,27	92,73	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	5,03	94,97	100,00
Perdesaan	3,35	96,65	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.4 Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik	Memanfaatkan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan	Memanfaatkan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap
(1)	(2)	(3)
Indonesia	36,32	67,12
Jenis Kelamin		
Laki-laki	35,36	66,72
Perempuan	37,38	67,59
Kelompok Umur		
<1 tahun	33,37	64,78
1-4 tahun	36,04	67,10
5-6 tahun	38,40	72,01
Distribusi Pengeluaran		
40% terbawah	28,17	59,50
40% menengah	39,13	67,70
20% teratas	50,43	75,92
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	44,20	73,37
Perdesaan	23,62	54,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.5 Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik	Memperoleh ASI Eksklusif		Jumlah
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	73,97	26,03	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	72,99	27,01	100,00
Perempuan	75,02	24,98	100,00
Kelompok Umur Ibu			
<20 tahun	78,00	22,00	100,00
20-29 tahun	74,50	25,50	100,00
30-39 tahun	73,97	26,03	100,00
≥40 tahun	69,97	30,03	100,00
Tidak Relevan	61,45	38,55	100,00
Jenjang Pendidikan Ibu			
Tamat SD/ sederajat ke bawah	73,15	26,85	100,00
Tamat SMP/ sederajat	74,78	25,22	100,00
Tamat SM/ sederajat	74,57	25,43	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	73,61	26,39	100,00
Tidak Relevan	61,45	38,55	100,00
Status Bekerja Ibu			
Bekerja	69,48	30,52	100,00
Tidak Bekerja	75,92	24,08	100,00
Tidak Relevan	61,45	38,55	100,00
Distribusi Pengeluaran			
40% terbawah	77,03	22,97	100,00
40% menengah	71,16	28,84	100,00
20% teratas	70,59	29,41	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	73,42	26,58	100,00
Perdesaan	74,61	25,39	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.6 Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik	Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap		Jumlah
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	63,58	36,42	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	63,43	36,57	100,00
Perempuan	63,75	36,25	100,00
Jenjang Pendidikan Ibu			
Tamat SD/ sederajat ke bawah	55,06	44,94	100,00
Tamat SMP/ sederajat	62,44	37,56	100,00
Tamat SM/ sederajat	66,55	33,45	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	68,62	31,38	100,00
Tidak Relevan	63,38	36,62	100,00
Status Bekerja Ibu			
Bekerja	64,40	35,60	100,00
Tidak Bekerja	63,10	36,90	100,00
Tidak Relevan	63,38	36,62	100,00
Distribusi Pengeluaran			
40% terbawah	60,60	39,40	100,00
40% menengah	64,30	35,70	100,00
20% teratas	72,39	27,61	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	65,92	34,08	100,00
Perdesaan	60,47	39,53	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.7 Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Memiliki Akses pada Rumah Layak Huni, Layanan Sumber Air Minum Layak, dan Sanitasi Layak menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik	Rumah Layak Huni	Layanan Sumber Air Minum Layak	Sanitasi Layak
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	60,22	91,15	82,48
Jenis Kelamin			
Laki-laki	60,15	91,08	82,45
Perempuan	61,38	92,30	82,88
Distribusi Pengeluaran			
40% terbawah	52,79	89,25	76,49
40% menengah	63,49	91,81	85,97
20% teratas	74,61	95,25	91,95
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	62,01	95,75	84,30
Perdesaan	57,88	85,11	80,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.8 Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal dengan Anggota Rumah Tangga Perokok menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik	Anggota Rumah Tangga Perokok		Jumlah
	Ada	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	70,23	29,77	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	70,38	29,62	100,00
Perempuan	70,08	29,92	100,00
Kelompok Umur			
<1 tahun	72,25	27,75	100,00
1-4 tahun	70,14	29,86	100,00
5-6 tahun	69,62	30,38	100,00
Distribusi Pengeluaran			
40% terbawah	73,07	26,93	100,00
40% menengah	71,48	28,52	100,00
20% teratas	58,10	41,90	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	65,97	34,03	100,00
Perdesaan	75,93	24,07	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.9 Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	40,81	38,92	38,72	40,43	39,57
Sumatera Utara	32,04	33,37	32,93	32,39	32,66
Sumatera Barat	42,30	35,69	37,82	40,01	38,89
Riau	39,32	30,35	32,22	35,72	33,92
Jambi	32,80	32,27	32,41	32,49	32,45
Sumatera Selatan	36,38	29,76	33,47	30,79	32,17
Bengkulu	44,65	35,77	39,20	38,04	38,63
Lampung	38,69	34,96	36,68	35,66	36,18
Kep. Bangka Belitung	41,62	37,06	37,12	42,31	39,63
Kepulauan Riau	42,72	35,48	37,66	46,60	42,03
DKI Jakarta	34,39	-	32,85	35,98	34,39
Jawa Barat	36,28	36,05	37,55	34,84	36,23
Jawa Tengah	44,27	41,17	44,11	41,46	42,81
DI Yogyakarta	40,45	42,89	39,09	43,14	41,03
Jawa Timur	39,23	37,37	39,58	37,22	38,43
Banten	39,25	37,57	42,07	35,50	38,85
Bali	33,18	35,41	33,82	33,73	33,77
Nusa Tenggara Barat	44,57	43,63	44,14	44,08	44,11
Nusa Tenggara Timur	38,95	33,91	34,56	35,63	35,08
Kalimantan Barat	34,98	34,01	33,47	35,26	34,35
Kalimantan Tengah	33,40	31,07	31,74	32,39	32,05
Kalimantan Selatan	33,20	38,12	36,67	34,72	35,71
Kalimantan Timur	39,43	27,75	34,56	36,94	35,74
Kalimantan Utara	36,34	28,53	35,11	32,06	33,57
Sulawesi Utara	31,65	32,99	31,78	32,82	32,29
Sulawesi Tengah	32,30	23,28	25,18	27,14	26,13
Sulawesi Selatan	32,21	28,83	30,92	29,87	30,40
Sulawesi Tenggara	22,71	26,60	24,07	26,27	25,16
Gorontalo	49,93	38,71	42,05	44,87	43,45
Sulawesi Barat	31,30	30,91	29,65	32,38	30,99
Maluku	33,44	23,06	27,22	27,14	27,18
Maluku Utara	15,84	22,26	19,14	21,91	20,53
Papua Barat	28,92	20,46	23,93	23,56	23,75
Papua	22,71	14,39	18,16	16,17	17,19
Indonesia	37,50	34,48	36,70	35,70	36,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.10 Angka Kesakitan Anak Usia Dini menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	24,41	21,82	22,44	22,96	22,70
Sumatera Utara	14,67	14,41	15,26	13,81	14,55
Sumatera Barat	16,95	18,00	17,06	17,94	17,49
Riau	19,75	11,25	14,22	15,06	14,63
Jambi	12,19	15,29	14,30	14,25	14,28
Sumatera Selatan	12,16	11,40	12,30	11,00	11,67
Bengkulu	21,19	18,00	19,28	18,76	19,02
Lampung	20,40	15,29	17,13	16,80	16,97
Kep. Bangka Belitung	13,93	16,02	13,58	16,19	14,84
Kepulauan Riau	12,88	12,07	10,66	15,05	12,80
DKI Jakarta	16,21	-	13,88	18,61	16,21
Jawa Barat	18,10	19,38	18,95	17,71	18,35
Jawa Tengah	20,37	19,90	20,66	19,62	20,15
DI Yogyakarta	17,48	22,98	19,41	18,08	18,78
Jawa Timur	18,52	18,41	17,99	18,97	18,47
Banten	15,50	15,26	16,54	14,31	15,45
Bali	19,09	21,93	20,05	19,63	19,84
Nusa Tenggara Barat	23,58	27,43	26,42	24,50	25,48
Nusa Tenggara Timur	18,80	17,22	17,25	17,93	17,58
Kalimantan Barat	17,75	17,84	17,59	18,02	17,81
Kalimantan Tengah	11,00	13,33	11,99	12,73	12,35
Kalimantan Selatan	13,95	15,57	16,26	13,26	14,78
Kalimantan Timur	14,94	14,72	13,93	15,83	14,87
Kalimantan Utara	18,27	15,03	17,52	16,73	17,12
Sulawesi Utara	15,95	21,77	18,87	18,60	18,74
Sulawesi Tengah	16,46	14,20	13,73	16,16	14,92
Sulawesi Selatan	17,37	14,91	16,68	15,41	16,05
Sulawesi Tenggara	11,79	14,68	12,78	14,46	13,61
Gorontalo	28,51	21,99	23,40	26,11	24,75
Sulawesi Barat	14,96	16,01	15,74	15,87	15,80
Maluku	19,34	12,27	15,05	15,11	15,08
Maluku Utara	8,25	12,34	10,95	11,53	11,24
Papua Barat	10,66	9,61	10,33	9,69	10,02
Papua	11,95	6,65	8,76	8,09	8,43
Indonesia	17,56	16,89	17,38	17,16	17,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.11 Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Tindakan Pengobatan, 2023

Provinsi	Tindakan Pengobatan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan				Jumlah
	Mengobati Sendiri	Rawat Jalan	Mengobati Sendiri dan Rawat Jalan	Tidak Melakukan Tindakan Pengobatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	47,11	23,55	24,20	5,14	100,00
Sumatera Utara	57,70	20,00	17,48	4,83	100,00
Sumatera Barat	41,85	32,95	17,81	7,39	100,00
Riau	58,74	17,34	16,21	7,71	100,00
Jambi	57,96	17,28	16,56	8,20	100,00
Sumatera Selatan	56,83	17,98	20,00	5,19	100,00
Bengkulu	53,13	21,64	16,20	9,03	100,00
Lampung	49,86	23,69	20,49	5,96	100,00
Kep. Bangka Belitung	49,21	29,92	16,99	3,87	100,00
Kepulauan Riau	55,74	19,65	15,93	8,67	100,00
DKI Jakarta	45,31	26,88	22,62	5,20	100,00
Jawa Barat	46,64	24,54	25,47	3,35	100,00
Jawa Tengah	48,95	26,65	19,51	4,90	100,00
DI Yogyakarta	53,87	20,80	18,76	6,57	100,00
Jawa Timur	50,13	26,01	20,26	3,61	100,00
Banten	56,45	14,10	23,28	6,17	100,00
Bali	29,74	47,11	20,38	2,77	100,00
Nusa Tenggara Barat	50,63	23,01	22,92	3,44	100,00
Nusa Tenggara Timur	54,61	24,53	15,93	4,93	100,00
Kalimantan Barat	58,32	17,42	17,22	7,04	100,00
Kalimantan Tengah	69,69	12,57	12,75	4,99	100,00
Kalimantan Selatan	69,97	10,67	16,61	2,75	100,00
Kalimantan Timur	56,15	23,13	15,67	5,05	100,00
Kalimantan Utara	52,94	21,23	17,09	8,74	100,00
Sulawesi Utara	44,87	35,62	16,37	3,14	100,00
Sulawesi Tengah	63,67	19,37	11,54	5,42	100,00
Sulawesi Selatan	56,11	22,29	13,24	8,36	100,00
Sulawesi Tenggara	66,62	14,28	12,41	6,70	100,00
Gorontalo	50,74	27,91	18,47	2,89	100,00
Sulawesi Barat	59,32	18,95	12,82	8,92	100,00
Maluku	62,78	22,34	9,85	5,02	100,00
Maluku Utara	59,74	23,40	12,28	4,59	100,00
Papua Barat	43,55	36,82	12,72	6,91	100,00
Papua	47,03	25,05	19,49	8,42	100,00
Indonesia	51,43	23,51	20,13	4,93	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.12 Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	44,06	49,75	47,09	48,39	47,75
Sumatera Utara	40,61	34,06	38,56	36,33	37,47
Sumatera Barat	51,68	49,74	52,97	48,58	50,76
Riau	39,12	28,79	37,46	29,82	33,55
Jambi	36,61	32,47	35,13	32,50	33,84
Sumatera Selatan	47,79	31,09	37,23	38,86	37,98
Bengkulu	36,04	38,90	39,10	36,52	37,84
Lampung	48,95	41,61	43,06	45,36	44,18
Kep. Bangka Belitung	42,81	52,88	47,65	46,23	46,92
Kepulauan Riau	35,29	38,93	37,37	34,08	35,59
DKI Jakarta	49,50	-	49,50	49,49	49,50
Jawa Barat	51,95	42,02	51,36	48,49	50,01
Jawa Tengah	44,59	48,04	47,28	44,90	46,15
DI Yogyakarta	36,84	47,86	40,50	38,64	39,56
Jawa Timur	45,33	47,57	45,68	46,92	46,27
Banten	39,96	28,68	36,74	38,18	37,39
Bali	64,98	74,03	69,08	65,91	67,49
Nusa Tenggara Barat	44,83	47,10	46,54	45,30	45,93
Nusa Tenggara Timur	41,80	40,00	41,35	39,56	40,47
Kalimantan Barat	36,48	33,59	34,13	35,13	34,64
Kalimantan Tengah	24,69	25,81	23,07	27,69	25,32
Kalimantan Selatan	26,05	28,31	25,53	29,18	27,28
Kalimantan Timur	40,24	34,35	39,90	37,73	38,79
Kalimantan Utara	37,45	40,34	36,56	40,21	38,32
Sulawesi Utara	47,68	56,49	55,82	48,13	51,99
Sulawesi Tengah	31,06	30,82	29,25	32,54	30,91
Sulawesi Selatan	38,41	32,71	37,26	33,67	35,53
Sulawesi Tenggara	25,99	27,03	23,28	29,86	26,68
Gorontalo	51,87	41,19	45,22	47,47	46,38
Sulawesi Barat	37,47	30,31	32,63	30,94	31,77
Maluku	33,61	30,84	31,02	33,44	32,19
Maluku Utara	37,50	35,19	37,37	34,18	35,67
Papua Barat	41,72	56,58	48,84	50,27	49,54
Papua	40,58	47,72	41,80	47,81	44,54
Indonesia	45,44	41,02	44,19	43,05	43,64

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.13 Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4,02	2,98	3,34	3,33	3,34
Sumatera Utara	3,64	1,72	2,72	2,76	2,74
Sumatera Barat	4,32	2,77	3,83	3,19	3,52
Riau	5,11	2,32	3,98	2,85	3,43
Jambi	3,97	2,61	3,28	2,82	3,06
Sumatera Selatan	2,18	1,92	2,02	2,01	2,01
Bengkulu	7,08	2,88	5,13	3,33	4,23
Lampung	4,88	2,83	3,21	3,80	3,50
Kep. Bangka Belitung	4,07	4,21	5,06	3,14	4,13
Kepulauan Riau	5,18	2,70	3,64	6,30	4,94
DKI Jakarta	5,52	-	6,23	4,79	5,52
Jawa Barat	4,16	3,74	4,69	3,44	4,08
Jawa Tengah	6,23	5,29	5,98	5,58	5,79
DI Yogyakarta	10,18	4,63	10,01	7,62	8,87
Jawa Timur	6,81	4,12	5,59	5,72	5,66
Banten	4,17	1,56	4,12	2,96	3,55
Bali	4,80	3,89	5,01	4,12	4,56
Nusa Tenggara Barat	4,41	6,10	5,80	4,67	5,24
Nusa Tenggara Timur	4,01	2,74	3,29	2,77	3,03
Kalimantan Barat	3,65	2,60	3,43	2,50	2,97
Kalimantan Tengah	3,89	1,27	2,53	2,21	2,38
Kalimantan Selatan	4,68	3,84	4,29	4,21	4,25
Kalimantan Timur	7,04	3,39	5,63	6,15	5,88
Kalimantan Utara	7,75	6,17	7,30	7,07	7,19
Sulawesi Utara	4,84	4,28	4,75	4,38	4,57
Sulawesi Tengah	10,47	2,70	5,97	4,31	5,16
Sulawesi Selatan	4,43	5,32	5,05	4,76	4,91
Sulawesi Tenggara	3,95	1,94	3,34	2,02	2,69
Gorontalo	7,65	3,60	6,52	4,09	5,31
Sulawesi Barat	4,62	3,02	3,45	3,23	3,34
Maluku	2,97	1,16	1,42	2,35	1,88
Maluku Utara	2,99	2,06	2,21	2,41	2,31
Papua Barat	4,69	2,56	3,41	3,37	3,39
Papua	4,71	0,76	1,90	2,29	2,09
Indonesia	5,03	3,35	4,58	4,03	4,31

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.14 Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	56,90	56,92	56,46	57,35	56,92
Sumatera Utara	29,69	10,96	21,38	21,70	21,53
Sumatera Barat	48,85	20,36	36,04	35,22	35,64
Riau	55,17	29,81	45,02	41,54	43,44
Jambi	46,84	16,47	22,94	32,36	27,36
Sumatera Selatan	45,08	18,60	35,30	29,05	32,34
Bengkulu	47,94	15,62	24,40	30,08	27,08
Lampung	31,07	14,49	15,84	25,98	20,93
Kep. Bangka Belitung	45,15	19,45	38,00	28,82	33,33
Kepulauan Riau	63,28	NA	67,54	54,79	60,93
DKI Jakarta	68,66	-	63,14	73,87	68,66
Jawa Barat	37,67	10,89	30,79	36,26	33,27
Jawa Tengah	42,03	17,58	29,93	31,14	30,49
DI Yogyakarta	43,64	30,72	48,89	30,35	39,78
Jawa Timur	37,36	15,69	27,04	29,15	28,05
Banten	54,22	16,88	47,13	48,32	47,67
Bali	39,05	24,00	36,94	31,90	34,47
Nusa Tenggara Barat	37,29	16,66	27,25	26,70	26,98
Nusa Tenggara Timur	51,41	37,79	41,68	41,13	41,41
Kalimantan Barat	50,31	24,80	37,29	31,95	34,54
Kalimantan Tengah	33,14	34,52	26,22	40,69	33,93
Kalimantan Selatan	54,82	44,44	53,30	44,84	48,96
Kalimantan Timur	71,50	49,91	68,85	64,74	66,81
Kalimantan Utara	36,75	66,93	46,04	46,62	46,33
Sulawesi Utara	52,22	27,03	42,10	34,99	38,82
Sulawesi Tengah	66,87	43,00	50,15	54,34	52,38
Sulawesi Selatan	60,64	49,59	55,37	55,62	55,49
Sulawesi Tenggara	63,31	43,30	49,91	49,73	49,81
Gorontalo	47,34	39,00	39,10	47,51	43,53
Sulawesi Barat	56,13	56,59	60,24	52,71	56,48
Maluku	27,02	29,62	30,07	26,55	28,30
Maluku Utara	63,62	56,11	57,78	57,72	57,75
Papua Barat	39,10	65,10	50,97	58,55	54,72
Papua	55,42	68,77	64,33	62,35	63,36
Indonesia	44,20	23,62	35,36	37,38	36,32

Catatan: NA: Data tidak ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.15 Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	93,81	88,36	87,17	94,11	90,60
Sumatera Utara	61,65	42,14	60,10	51,68	55,91
Sumatera Barat	84,13	49,69	73,56	65,93	70,17
Riau	75,13	54,73	67,12	66,38	66,82
Jambi	62,21	42,35	50,81	50,81	50,81
Sumatera Selatan	78,15	45,00	49,70	67,09	58,07
Bengkulu	84,05	61,72	69,61	80,22	73,75
Lampung	52,29	48,47	55,91	45,30	50,21
Kep. Bangka Belitung	73,97	73,98	66,96	86,05	73,98
Kepulauan Riau	84,97	97,78	92,99	81,18	85,64
DKI Jakarta	89,97	-	88,29	92,23	89,97
Jawa Barat	77,87	35,59	68,58	72,66	70,26
Jawa Tengah	63,31	50,26	60,11	54,98	57,69
DI Yogyakarta	84,94	82,99	80,87	90,19	84,70
Jawa Timur	68,58	52,26	62,15	64,82	63,47
Banten	71,83	50,14	65,53	75,45	69,58
Bali	61,54	93,88	68,20	69,58	68,83
Nusa Tenggara Barat	42,29	29,12	30,82	39,82	34,74
Nusa Tenggara Timur	79,41	54,20	65,42	57,57	61,93
Kalimantan Barat	71,79	63,93	60,57	76,91	67,37
Kalimantan Tengah	59,03	73,46	62,79	64,34	63,49
Kalimantan Selatan	64,82	83,43	68,48	78,51	73,38
Kalimantan Timur	92,55	81,60	92,28	88,95	90,56
Kalimantan Utara	78,77	89,26	82,73	81,19	81,97
Sulawesi Utara	81,51	69,01	75,76	76,06	75,90
Sulawesi Tengah	80,63	80,17	74,33	89,40	80,46
Sulawesi Selatan	75,71	70,60	74,09	71,27	72,75
Sulawesi Tenggara	76,90	67,39	79,19	61,43	72,57
Gorontalo	82,94	67,62	75,65	79,03	76,94
Sulawesi Barat	80,54	86,09	73,87	96,37	84,54
Maluku	80,59	25,37	83,28	45,21	60,05
Maluku Utara	52,10	66,75	73,81	50,45	61,63
Papua Barat	66,15	38,61	53,30	53,60	53,45
Papua	70,49	54,88	62,96	70,06	66,75
Indonesia	73,37	54,56	66,72	67,59	67,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.16 Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	83,15	60,81	63,06	72,41	67,05
Sumatera Utara	59,02	66,08	62,61	61,33	61,98
Sumatera Barat	77,92	74,17	72,25	80,42	75,84
Riau	75,41	68,92	70,81	71,50	71,14
Jambi	79,32	71,88	81,86	64,57	74,14
Sumatera Selatan	74,71	76,08	79,92	71,37	75,59
Bengkulu	63,26	76,26	71,87	73,10	72,44
Lampung	76,90	75,89	75,14	77,34	76,20
Kep. Bangka Belitung	68,24	57,69	46,48	77,29	63,30
Kepulauan Riau	64,31	43,45	48,09	84,14	62,88
DKI Jakarta	76,39	-	69,29	84,84	76,39
Jawa Barat	80,50	78,52	79,79	80,44	80,08
Jawa Tengah	72,46	88,39	78,14	82,13	80,20
DI Yogyakarta	76,10	88,01	82,20	75,76	78,25
Jawa Timur	72,77	72,57	68,84	76,89	72,68
Banten	78,10	64,84	78,28	69,35	74,62
Bali	68,68	70,01	72,19	67,00	69,01
Nusa Tenggara Barat	83,83	81,04	80,58	84,41	82,45
Nusa Tenggara Timur	61,98	82,77	76,73	80,78	78,74
Kalimantan Barat	62,43	78,92	68,49	77,38	72,97
Kalimantan Tengah	53,14	58,12	53,71	57,76	55,78
Kalimantan Selatan	67,17	64,32	75,25	58,05	65,69
Kalimantan Timur	79,58	74,41	89,02	70,46	77,70
Kalimantan Utara	72,63	86,51	78,46	77,20	77,81
Sulawesi Utara	52,07	76,72	58,38	70,90	64,40
Sulawesi Tengah	60,80	69,03	68,46	65,07	66,70
Sulawesi Selatan	76,69	77,60	75,29	79,48	77,20
Sulawesi Tenggara	58,10	65,70	65,25	60,17	62,99
Gorontalo	55,68	54,57	41,58	68,57	55,11
Sulawesi Barat	70,05	75,93	68,94	81,90	75,04
Maluku	66,82	58,42	65,20	56,85	61,52
Maluku Utara	83,15	64,59	72,80	65,79	69,66
Papua Barat	62,18	63,51	58,77	67,18	62,92
Papua	45,30	70,54	63,77	46,72	55,41
Indonesia	73,42	74,61	72,99	75,02	73,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.17 Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	31,50	20,82	25,90	23,61	24,79
Sumatera Utara	43,17	38,68	40,91	41,16	41,04
Sumatera Barat	37,13	40,87	40,12	38,17	39,12
Riau	58,07	37,76	44,38	45,59	45,03
Jambi	52,38	53,24	54,51	51,69	52,99
Sumatera Selatan	44,93	58,84	54,23	54,38	54,30
Bengkulu	57,09	80,11	68,51	74,12	71,41
Lampung	73,82	73,73	72,38	75,32	73,76
Kep. Bangka Belitung	72,86	72,14	74,53	70,63	72,51
Kepulauan Riau	70,30	77,94	72,64	68,85	70,75
DKI Jakarta	65,76	-	66,17	65,18	65,76
Jawa Barat	66,44	56,30	61,82	66,68	64,45
Jawa Tengah	72,54	77,45	73,47	76,44	74,83
DI Yogyakarta	83,68	87,12	86,04	82,70	84,50
Jawa Timur	78,54	71,19	76,55	74,23	75,41
Banten	55,48	38,47	52,49	49,04	50,82
Bali	83,66	76,27	82,66	80,59	81,65
Nusa Tenggara Barat	74,11	67,29	73,37	68,41	70,74
Nusa Tenggara Timur	75,90	71,07	70,91	73,41	72,12
Kalimantan Barat	53,17	54,16	51,08	56,25	53,78
Kalimantan Tengah	62,81	51,10	60,33	52,30	56,36
Kalimantan Selatan	72,86	66,67	74,34	64,30	69,60
Kalimantan Timur	70,53	67,66	64,57	73,99	69,51
Kalimantan Utara	69,95	70,13	65,03	75,11	70,01
Sulawesi Utara	66,35	69,50	67,93	67,68	67,80
Sulawesi Tengah	61,36	60,48	54,31	67,87	60,82
Sulawesi Selatan	70,32	65,53	68,25	67,40	67,85
Sulawesi Tenggara	73,95	70,62	75,00	68,76	71,81
Gorontalo	77,17	64,97	72,08	69,44	70,56
Sulawesi Barat	47,93	60,89	58,30	58,57	58,44
Maluku	64,61	57,12	60,13	60,10	60,12
Maluku Utara	58,47	50,28	53,86	51,06	52,55
Papua Barat	56,06	51,73	55,20	51,09	53,24
Papua	55,89	44,88	48,25	52,70	50,37
Indonesia	65,92	60,47	63,43	63,75	63,58

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.18 Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	74,00	55,88	61,46	69,60	61,98
Sumatera Utara	74,61	56,19	66,24	67,78	66,31
Sumatera Barat	65,80	48,30	55,92	68,14	56,60
Riau	79,66	62,93	69,25	74,11	69,46
Jambi	73,06	55,70	61,42	53,22	61,08
Sumatera Selatan	61,46	57,35	58,79	58,04	58,76
Bengkulu	49,10	53,45	52,02	54,41	52,11
Lampung	57,22	62,48	61,06	55,23	60,84
Kep. Bangka Belitung	30,19	22,36	27,03	18,07	26,72
Kepulauan Riau	57,49	13,54	52,58	65,28	52,99
DKI Jakarta	32,44	-	32,26	35,96	32,44
Jawa Barat	50,34	51,64	50,66	49,46	50,61
Jawa Tengah	70,06	64,29	67,25	67,65	67,27
DI Yogyakarta	80,93	90,15	83,26	83,28	83,26
Jawa Timur	72,39	69,42	71,09	70,74	71,07
Banten	64,26	52,47	61,56	58,41	61,40
Bali	78,68	80,21	79,00	82,96	79,10
Nusa Tenggara Barat	67,80	61,36	64,48	65,81	64,63
Nusa Tenggara Timur	45,14	36,03	38,07	39,28	38,17
Kalimantan Barat	68,33	57,37	60,87	66,38	61,15
Kalimantan Tengah	64,72	44,62	53,16	48,16	53,06
Kalimantan Selatan	63,95	45,77	54,20	61,49	54,52
Kalimantan Timur	77,82	56,87	71,29	64,14	71,02
Kalimantan Utara	70,65	62,24	68,89	46,93	67,66
Sulawesi Utara	72,83	61,73	67,04	76,06	67,49
Sulawesi Tengah	68,32	48,50	54,88	50,63	54,66
Sulawesi Selatan	74,60	66,82	70,35	70,57	70,37
Sulawesi Tenggara	74,22	68,42	70,44	71,52	70,53
Gorontalo	74,20	53,76	62,93	50,01	62,27
Sulawesi Barat	68,49	52,07	55,14	57,26	55,27
Maluku	65,36	52,79	57,98	55,60	57,82
Maluku Utara	84,26	55,07	62,07	78,91	62,72
Papua Barat	59,97	45,28	51,74	38,63	51,12
Papua	62,10	15,06	31,07	24,75	30,74
Indonesia	62,01	57,88	60,15	61,38	60,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.19 Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	94,61	86,56	89,20	90,24	89,27
Sumatera Utara	95,87	85,31	91,01	93,26	91,11
Sumatera Barat	91,55	76,67	83,34	90,41	83,73
Riau	96,69	86,12	90,14	92,46	90,25
Jambi	91,27	73,06	78,67	79,30	78,70
Sumatera Selatan	91,71	83,38	86,16	87,76	86,23
Bengkulu	75,20	71,79	72,65	77,36	72,83
Lampung	90,28	78,32	82,31	75,66	82,05
Kep. Bangka Belitung	83,02	74,49	79,14	82,03	79,24
Kepulauan Riau	94,86	62,71	91,51	93,06	91,56
DKI Jakarta	99,59	-	99,58	99,94	99,59
Jawa Barat	96,19	84,53	93,73	95,25	93,80
Jawa Tengah	96,42	90,52	93,60	93,02	93,57
DI Yogyakarta	96,09	96,00	95,97	97,84	96,07
Jawa Timur	97,70	94,39	96,26	95,73	96,23
Banten	96,19	82,03	92,61	95,58	92,76
Bali	99,13	95,00	98,10	93,50	97,99
Nusa Tenggara Barat	97,22	95,69	96,56	95,71	96,47
Nusa Tenggara Timur	95,58	84,58	86,77	91,44	87,17
Kalimantan Barat	87,77	77,51	80,96	82,60	81,04
Kalimantan Tengah	87,07	69,55	76,95	75,01	76,91
Kalimantan Selatan	86,21	65,51	75,22	80,91	75,47
Kalimantan Timur	94,30	70,24	86,44	87,79	86,49
Kalimantan Utara	97,05	78,56	90,56	89,07	90,48
Sulawesi Utara	94,80	93,37	93,92	97,76	94,11
Sulawesi Tengah	91,45	83,51	86,27	80,68	85,98
Sulawesi Selatan	96,64	89,11	92,51	92,95	92,54
Sulawesi Tenggara	97,11	94,61	95,45	96,27	95,52
Gorontalo	99,33	92,57	95,65	90,34	95,38
Sulawesi Barat	93,43	75,99	79,82	72,74	79,39
Maluku	97,97	88,75	92,25	95,05	92,44
Maluku Utara	96,26	84,57	87,47	91,57	87,63
Papua Barat	91,37	75,49	82,25	72,86	81,80
Papua	89,77	57,65	68,19	71,27	68,35
Indonesia	95,75	85,11	91,08	92,30	91,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.20 Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak menurut Provinsi, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	86,93	72,52	76,91	84,08	77,38
Sumatera Utara	89,67	75,67	83,37	83,19	83,36
Sumatera Barat	76,41	65,46	70,07	80,67	70,66
Riau	91,04	83,21	86,30	85,56	86,26
Jambi	83,93	81,72	82,70	75,60	82,40
Sumatera Selatan	89,58	76,30	80,60	86,01	80,85
Bengkulu	68,19	84,88	79,80	78,92	79,77
Lampung	76,14	88,13	84,20	88,98	84,39
Kep. Bangka Belitung	92,02	91,38	91,99	84,81	91,74
Kepulauan Riau	96,92	49,34	92,39	81,51	92,04
DKI Jakarta	93,25	0,00	93,17	94,97	93,25
Jawa Barat	73,97	79,51	75,24	72,12	75,11
Jawa Tengah	84,27	85,31	84,69	86,16	84,77
DI Yogyakarta	94,57	99,44	95,61	99,20	95,80
Jawa Timur	87,52	82,73	85,39	85,28	85,39
Banten	89,73	77,09	86,91	82,13	86,67
Bali	97,93	93,64	96,79	94,81	96,74
Nusa Tenggara Barat	86,93	85,42	86,54	83,33	86,18
Nusa Tenggara Timur	80,51	72,42	74,06	77,11	74,32
Kalimantan Barat	81,18	79,22	79,78	82,03	79,89
Kalimantan Tengah	81,42	72,16	76,03	76,98	76,05
Kalimantan Selatan	83,88	82,73	83,24	84,16	83,28
Kalimantan Timur	94,84	85,43	91,76	92,50	91,79
Kalimantan Utara	79,99	87,38	83,69	64,72	82,62
Sulawesi Utara	88,01	81,86	84,85	88,76	85,05
Sulawesi Tengah	84,02	72,13	75,83	75,88	75,83
Sulawesi Selatan	93,37	94,27	93,92	93,19	93,86
Sulawesi Tenggara	92,59	85,62	87,68	93,29	88,16
Gorontalo	90,59	74,08	81,15	77,33	80,95
Sulawesi Barat	83,39	76,96	77,99	81,64	78,21
Maluku	86,69	70,42	76,77	79,20	76,93
Maluku Utara	93,58	72,14	77,28	89,55	77,76
Papua Barat	79,41	69,28	73,88	61,89	73,31
Papua	88,65	32,18	51,15	48,14	50,99
Indonesia	84,30	80,09	82,45	82,88	82,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.21 Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Tinggal dengan ART Perokok menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	69,65	78,16	75,89	74,61	75,26
Sumatera Utara	64,37	74,85	70,44	68,10	69,28
Sumatera Barat	70,98	82,90	76,72	77,55	77,12
Riau	65,80	72,46	71,04	68,52	69,81
Jambi	62,54	73,88	70,28	70,03	70,16
Sumatera Selatan	64,59	80,48	75,14	74,20	74,68
Bengkulu	63,31	79,29	76,26	72,00	74,14
Lampung	68,80	81,95	79,26	76,00	77,64
Kep. Bangka Belitung	65,76	73,64	68,83	69,59	69,20
Kepulauan Riau	62,23	75,57	63,62	63,39	63,51
DKI Jakarta	59,23	0,00	59,99	58,44	59,23
Jawa Barat	72,44	85,21	74,00	75,93	74,94
Jawa Tengah	64,54	76,02	70,33	69,57	69,96
DI Yogyakarta	58,86	70,22	61,16	61,95	61,54
Jawa Timur	66,69	76,96	71,12	71,08	71,10
Banten	65,63	84,05	69,74	70,24	69,98
Bali	53,03	55,77	54,82	52,69	53,75
Nusa Tenggara Barat	67,50	74,00	71,18	70,21	70,71
Nusa Tenggara Timur	63,77	74,50	71,14	72,93	72,01
Kalimantan Barat	60,56	68,92	66,66	65,21	65,94
Kalimantan Tengah	58,11	70,14	64,30	65,86	65,05
Kalimantan Selatan	55,18	62,58	58,31	59,60	58,95
Kalimantan Timur	51,96	67,44	58,22	55,46	56,86
Kalimantan Utara	56,19	71,46	62,55	60,69	61,61
Sulawesi Utara	67,89	73,00	71,58	69,05	70,34
Sulawesi Tengah	64,95	75,68	70,14	74,55	72,29
Sulawesi Selatan	62,56	70,73	67,51	66,32	66,93
Sulawesi Tenggara	58,26	69,38	67,05	63,46	65,27
Gorontalo	68,05	81,46	77,70	73,88	75,80
Sulawesi Barat	60,04	66,53	66,14	64,28	65,22
Maluku	70,69	78,76	75,42	75,70	75,56
Maluku Utara	67,05	80,51	77,21	76,56	76,88
Papua Barat	59,22	67,17	64,77	63,35	64,07
Papua	60,20	59,78	59,18	60,71	59,92
Indonesia	65,97	75,93	70,38	70,08	70,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.22 *Sampling Error* Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	40,81	36,61	45,01	5,25	38,92	35,96	41,89	3,88	39,57	37,15	41,99	3,12
Sumatera Utara	32,04	28,68	35,40	5,35	33,37	30,77	35,97	3,98	32,66	30,50	34,82	3,37
Sumatera Barat	42,30	37,87	46,73	5,34	35,69	32,70	38,68	4,27	38,89	36,25	41,54	3,47
Riau	39,32	34,51	44,14	6,25	30,35	26,95	33,75	5,72	33,92	31,11	36,72	4,22
Jambi	32,80	26,99	38,61	9,04	32,27	28,67	35,88	5,70	32,45	29,37	35,53	4,84
Sumatera Selatan	36,38	31,46	41,30	6,91	29,76	27,06	32,46	4,63	32,17	29,70	34,65	3,92
Bengkulu	44,65	38,55	50,74	6,97	35,77	31,59	39,95	5,96	38,63	35,18	42,08	4,56
Lampung	38,69	33,85	43,52	6,38	34,96	32,00	37,91	4,32	36,18	33,63	38,73	3,60
Kep. Bangka Belitung	41,62	35,46	47,78	7,55	37,06	31,93	42,19	7,06	39,63	35,46	43,80	5,37
Kepulauan Riau	42,72	36,10	49,34	7,90	35,48	14,17	56,78	30,64	42,03	35,72	48,34	7,66
DKI Jakarta	34,39	30,29	38,49	6,08	-	-	-	-	34,39	30,29	38,49	6,08
Jawa Barat	36,28	34,21	38,34	2,90	36,05	33,24	38,85	3,97	36,23	34,49	37,98	2,46
Jawa Tengah	44,27	42,13	46,42	2,47	41,17	39,05	43,29	2,63	42,81	41,30	44,32	1,80
DI Yogyakarta	40,45	34,79	46,11	7,14	42,89	35,90	49,88	8,31	41,03	36,39	45,66	5,76
Jawa Timur	39,23	36,96	41,49	2,95	37,37	35,19	39,54	2,97	38,43	36,83	40,02	2,12
Banten	39,25	35,06	43,44	5,44	37,57	32,10	43,05	7,43	38,85	35,41	42,30	4,53
Bali	33,18	28,63	37,74	7,00	35,41	29,99	40,82	7,80	33,77	30,13	37,41	5,50
Nusa Tenggara Barat	44,57	40,58	48,57	4,57	43,63	39,49	47,77	4,84	44,11	41,24	46,98	3,32
Nusa Tenggara Timur	38,95	33,64	44,26	6,95	33,91	31,50	36,32	3,62	35,08	32,86	37,31	3,24
Kalimantan Barat	34,98	30,40	39,56	6,68	34,01	30,98	37,04	4,54	34,35	31,81	36,89	3,77
Kalimantan Tengah	33,40	28,31	38,50	7,78	31,07	26,92	35,22	6,81	32,05	28,83	35,27	5,13
Kalimantan Selatan	33,20	28,82	37,58	6,73	38,12	34,27	41,96	5,15	35,71	32,80	38,61	4,15
Kalimantan Timur	39,43	34,64	44,22	6,20	27,75	22,01	33,49	10,55	35,74	31,92	39,56	5,45
Kalimantan Utara	36,34	29,45	43,24	9,68	28,53	22,23	34,83	11,27	33,57	28,52	38,62	7,67
Sulawesi Utara	31,65	27,21	36,08	7,15	32,99	28,86	37,13	6,40	32,29	29,24	35,34	4,82
Sulawesi Tengah	32,30	26,26	38,34	9,54	23,28	20,48	26,07	6,12	26,13	23,41	28,86	5,32
Sulawesi Selatan	32,21	27,72	36,70	7,11	28,83	26,29	31,36	4,49	30,40	27,91	32,90	4,19
Sulawesi Tenggara	22,71	17,66	27,75	11,33	26,60	24,08	29,11	4,82	25,16	22,71	27,60	4,96
Gorontalo	49,93	42,02	57,84	8,08	38,71	32,46	44,96	8,23	43,45	38,48	48,42	5,83
Sulawesi Barat	31,30	23,57	39,04	12,61	30,91	26,81	35,01	6,77	30,99	27,36	34,62	5,97
Maluku	33,44	27,09	39,78	9,69	23,06	19,44	26,68	8,01	27,18	23,77	30,59	6,39
Maluku Utara	15,84	10,22	21,46	18,11	22,26	18,55	25,97	8,51	20,53	17,38	23,67	7,81
Papua Barat	28,92	22,37	35,48	11,56	20,46	17,94	22,98	6,28	23,75	20,75	26,75	6,44
Papua	22,71	18,71	26,71	8,98	14,39	12,37	16,41	7,18	17,19	15,28	19,10	5,66
Indonesia	37,50	36,65	38,35	1,15	34,48	33,82	35,13	0,97	36,21	35,65	36,77	0,79

Catatan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.23 *Sampling Error Angka Kesakitan Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023*

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	24,41	20,68	28,13	7,79	21,82	19,51	24,13	5,40	22,70	20,71	24,69	4,46
Sumatera Utara	14,67	11,95	17,38	9,45	14,41	12,27	16,55	7,58	14,55	12,79	16,30	6,17
Sumatera Barat	16,95	13,66	20,25	9,93	18,00	15,74	20,25	6,40	17,49	15,51	19,47	5,77
Riau	19,75	16,09	23,41	9,46	11,25	9,28	13,22	8,93	14,63	12,74	16,52	6,58
Jambi	12,19	8,04	16,35	17,38	15,29	12,26	18,33	10,13	14,28	11,81	16,74	8,81
Sumatera Selatan	12,16	9,15	15,16	12,60	11,40	9,72	13,07	7,50	11,67	10,14	13,20	6,68
Bengkulu	21,19	16,74	25,63	10,71	18,00	14,59	21,40	9,66	19,02	16,31	21,74	7,29
Lampung	20,40	16,47	24,33	9,83	15,29	13,01	17,58	7,64	16,97	14,96	18,97	6,03
Kep. Bangka Belitung	13,93	10,42	17,45	12,87	16,02	12,03	20,00	12,69	14,84	12,20	17,48	9,07
Kepulauan Riau	12,88	8,88	16,88	15,85	12,07	3,96	20,17	34,26	12,80	9,10	16,50	14,75
DKI Jakarta	16,21	12,61	19,81	11,32	-	-	-	-	16,21	12,61	19,81	11,32
Jawa Barat	18,10	16,36	19,83	4,89	19,38	17,13	21,63	5,92	18,35	16,89	19,81	4,06
Jawa Tengah	20,37	18,63	22,12	4,37	19,90	18,16	21,65	4,47	20,15	18,91	21,39	3,13
DI Yogyakarta	17,48	13,32	21,63	12,13	22,98	15,68	30,28	16,21	18,78	15,16	22,39	9,84
Jawa Timur	18,52	16,75	20,28	4,87	18,41	16,66	20,16	4,85	18,47	17,22	19,73	3,47
Banten	15,50	12,67	18,34	9,33	15,26	11,91	18,62	11,20	15,45	13,14	17,75	7,62
Bali	19,09	15,47	22,71	9,67	21,93	16,94	26,92	11,61	19,84	16,87	22,81	7,64
Nusa Tenggara Barat	23,58	20,24	26,92	7,23	27,43	23,45	31,41	7,40	25,48	22,87	28,08	5,22
Nusa Tenggara Timur	18,80	14,33	23,26	12,12	17,22	15,34	19,09	5,56	17,58	15,81	19,36	5,15
Kalimantan Barat	17,75	14,09	21,42	10,54	17,84	15,38	20,29	7,02	17,81	15,76	19,86	5,87
Kalimantan Tengah	11,00	7,63	14,38	15,64	13,33	10,23	16,44	11,88	12,35	10,06	14,64	9,48
Kalimantan Selatan	13,95	10,94	16,95	10,99	15,57	12,97	18,18	8,54	14,78	12,79	16,76	6,86
Kalimantan Timur	14,94	10,99	18,89	13,49	14,72	9,80	19,65	17,07	14,87	11,75	17,99	10,70
Kalimantan Utara	18,27	12,95	23,60	14,86	15,03	10,42	19,63	15,65	17,12	13,30	20,94	11,38
Sulawesi Utara	15,95	12,36	19,53	11,47	21,77	18,05	25,50	8,73	18,74	16,13	21,35	7,10
Sulawesi Tengah	16,46	12,23	20,69	13,11	14,20	11,95	16,46	8,11	14,92	12,87	16,96	6,99
Sulawesi Selatan	17,37	14,03	20,71	9,82	14,91	12,88	16,93	6,94	16,05	14,15	17,96	6,04
Sulawesi Tenggara	11,79	8,30	15,28	15,12	14,68	12,51	16,85	7,55	13,61	11,73	15,49	7,05
Gorontalo	28,51	20,98	36,05	13,49	21,99	16,77	27,21	12,12	24,75	20,35	29,14	9,06
Sulawesi Barat	14,96	9,49	20,44	18,67	16,01	12,89	19,13	9,94	15,80	13,08	18,52	8,79
Maluku	19,34	13,65	25,02	15,00	12,27	9,34	15,20	12,18	15,08	12,17	17,99	9,85
Maluku Utara	8,25	4,55	11,94	22,86	12,34	9,64	15,04	11,17	11,24	9,00	13,47	10,16
Papua Barat	10,66	7,54	13,77	14,91	9,61	7,71	11,51	10,09	10,02	8,34	11,70	8,57
Papua	11,95	9,03	14,87	12,47	6,65	5,24	8,05	10,76	8,43	7,07	9,79	8,23
Indonesia	17,56	16,88	18,24	1,98	16,89	16,38	17,40	1,55	17,27	16,82	17,72	1,32

Catatan : Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.24 *Sampling Error* Persentase Anak Usia Dini yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Tindakan Pengobatan, 2023

Provinsi	Mengobati Sendiri				Rawat Jalan				Mengobati Sendiri dan Rawat Jalan				Tidak Melakukan Pengobatan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	47,11	42,92	51,31	4,54	23,55	19,59	27,51	8,57	24,20	20,68	27,71	7,42	5,14	3,61	6,67	15,15
Sumatera Utara	57,70	53,91	61,49	3,35	20,00	17,00	22,99	7,64	17,48	14,64	20,32	8,29	4,83	3,53	6,12	13,69
Sumatera Barat	41,85	37,79	45,90	4,94	32,95	28,76	37,15	6,49	17,81	14,32	21,30	10,00	7,39	5,38	9,41	13,91
Riau	58,74	54,26	63,22	3,89	17,34	13,79	20,89	10,45	16,21	12,58	19,84	11,43	7,71	5,28	10,14	16,08
Jambi	57,96	52,71	63,21	4,62	17,28	13,23	21,33	11,95	16,56	12,31	20,81	13,10	8,20	4,80	11,59	21,15
Sumatera Selatan	56,83	52,30	61,37	4,07	17,98	14,49	21,48	9,91	20,00	16,44	23,55	9,07	5,19	3,38	6,99	17,81
Bengkulu	53,13	48,17	58,09	4,76	21,64	17,22	26,05	10,42	16,20	12,08	20,33	12,99	9,03	5,85	12,22	18,00
Lampung	49,86	45,42	54,30	4,54	23,69	19,75	27,64	8,50	20,49	17,05	23,94	8,57	5,96	4,14	7,77	15,52
Kep. Bangka Belitung	49,21	43,11	55,31	6,32	29,92	23,65	36,20	10,70	16,99	12,59	21,40	13,23	3,87	0,99	6,74	37,91
Kepulauan Riau	55,74	45,77	65,71	9,13	19,65	10,98	28,33	22,52	15,93	8,74	23,13	23,04	8,67	2,76	14,59	34,80
DKI Jakarta	45,31	38,05	52,56	8,17	26,88	20,33	33,42	12,42	22,62	17,63	27,61	11,25	5,20	2,35	8,04	27,96
Jawa Barat	46,64	43,76	49,52	3,15	24,54	21,80	27,28	5,70	25,47	22,79	28,16	5,38	3,35	2,43	4,26	13,90
Jawa Tengah	48,95	46,65	51,24	2,39	26,65	24,61	28,68	3,89	19,51	17,73	21,28	4,64	4,90	3,92	5,87	10,14
DI Yogyakarta	53,87	46,89	60,85	6,61	20,80	15,93	25,67	11,95	18,76	13,21	24,32	15,10	6,57	3,02	10,13	27,60
Jawa Timur	50,13	47,62	52,64	2,55	26,01	23,86	28,16	4,22	20,26	18,29	22,22	4,95	3,61	2,74	4,47	12,21
Banten	56,45	51,13	61,76	4,80	14,10	10,95	17,26	11,41	23,28	18,66	27,90	10,12	6,17	4,10	8,24	17,11
Bali	29,74	23,57	35,91	10,59	47,11	40,54	53,67	7,11	20,38	15,30	25,46	12,71	2,77	1,13	4,41	30,26
Nusa Tenggara Barat	50,63	46,41	54,85	4,25	23,01	19,25	26,77	8,34	22,92	19,76	26,08	7,04	3,44	1,87	5,00	23,21
Nusa Tenggara Timur	54,61	50,83	58,38	3,53	24,53	21,32	27,75	6,69	15,93	13,17	18,70	8,84	4,93	3,59	6,27	13,90
Kalimantan Barat	58,32	53,92	62,72	3,85	17,42	14,12	20,71	9,64	17,22	14,24	20,20	8,82	7,04	4,48	9,60	18,54
Kalimantan Tengah	69,69	64,01	75,37	4,16	12,57	8,99	16,16	14,55	12,75	8,85	16,64	15,59	4,99	2,76	7,21	22,77
Kalimantan Selatan	69,97	65,86	74,08	3,00	10,67	8,11	13,24	12,27	16,61	13,45	19,77	9,71	2,75	1,59	3,90	21,50
Kalimantan Timur	56,15	50,47	61,84	5,17	23,13	18,13	28,12	11,02	15,67	10,35	20,99	17,33	5,05	2,60	7,50	24,74
Kalimantan Utara	52,94	44,47	61,40	8,16	21,23	14,43	28,03	16,33	17,09	10,86	23,32	18,59	8,74	4,46	13,02	25,00
Sulawesi Utara	44,87	39,74	49,99	5,83	35,62	30,35	40,88	7,55	16,37	12,59	20,16	11,78	3,14	1,63	4,66	24,60
Sulawesi Tengah	63,67	58,63	68,71	4,04	19,37	14,92	23,82	11,72	11,54	8,05	15,03	15,42	5,42	2,94	7,90	23,34
Sulawesi Selatan	56,11	51,85	60,36	3,87	22,29	18,95	25,62	7,64	13,24	10,47	16,01	10,68	8,36	5,76	10,97	15,90
Sulawesi Tenggara	66,62	61,92	71,31	3,60	14,28	11,14	17,41	11,19	12,41	9,18	15,64	13,29	6,70	4,36	9,04	17,79
Gorontalo	50,74	43,50	57,97	7,28	27,91	21,81	34,01	11,15	18,47	13,12	23,82	14,78	2,89	1,29	4,48	28,15
Sulawesi Barat	59,32	52,54	66,10	5,83	18,95	13,68	24,23	14,20	12,82	8,05	17,58	18,97	8,92	5,39	12,44	20,19
Maluku	62,78	56,29	69,28	5,28	22,34	15,78	28,90	14,98	9,85	6,48	13,22	17,44	5,02	2,46	7,59	26,02
Maluku Utara	59,74	52,47	67,01	6,21	23,40	17,26	29,53	13,38	12,28	7,55	17,00	19,62	4,59	1,43	7,75	35,15
Papua Barat	43,55	36,79	50,31	7,92	36,82	30,51	43,14	8,75	12,72	8,61	16,83	16,49	6,91	3,94	9,88	21,94
Papua	47,03	41,44	52,63	6,07	25,05	20,13	29,98	10,03	19,49	14,42	24,56	13,27	8,42	5,33	11,52	18,74
Indonesia	51,43	50,49	52,36	0,93	23,51	22,70	24,32	1,76	20,13	19,36	20,91	1,96	4,93	4,57	5,29	3,70

Catatan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.25 *Sampling Error* Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	4,02	2,62	5,42	17,75	2,98	2,25	3,71	12,49	3,34	2,66	4,01	10,36
Sumatera Utara	3,64	2,70	4,58	13,18	1,72	1,15	2,28	16,87	2,74	2,18	3,30	10,49
Sumatera Barat	4,32	2,77	5,87	18,27	2,77	1,91	3,62	15,78	3,52	2,65	4,40	12,68
Riau	5,11	3,41	6,82	17,01	2,32	1,56	3,08	16,76	3,43	2,60	4,26	12,30
Jambi	3,97	2,36	5,58	20,71	2,61	1,71	3,50	17,51	3,06	2,25	3,86	13,42
Sumatera Selatan	2,18	1,06	3,29	26,08	1,92	1,25	2,59	17,77	2,01	1,43	2,60	14,86
Bengkulu	7,08	3,77	10,40	23,88	2,88	1,57	4,18	23,11	4,23	2,84	5,63	16,80
Lampung	4,88	3,05	6,72	19,16	2,83	1,90	3,77	16,84	3,50	2,63	4,38	12,68
Kep. Bangka Belitung	4,07	2,39	5,75	21,03	4,21	2,35	6,07	22,55	4,13	2,88	5,38	15,40
Kepulauan Riau	5,18	2,56	7,79	25,76	2,70	0,51	4,89	41,46	4,94	2,57	7,32	24,53
DKI Jakarta	5,52	4,20	6,84	12,18	-	-	-	-	5,52	4,20	6,84	12,18
Jawa Barat	4,16	3,37	4,96	9,73	3,74	2,71	4,78	14,14	4,08	3,41	4,75	8,37
Jawa Tengah	6,23	5,39	7,07	6,91	5,29	4,50	6,08	7,61	5,79	5,20	6,37	5,13
DI Yogyakarta	10,18	7,38	12,97	14,00	4,63	2,39	6,87	24,66	8,87	6,67	11,07	12,66
Jawa Timur	6,81	5,87	7,76	7,05	4,12	3,39	4,85	9,05	5,66	5,03	6,28	5,62
Banten	4,17	2,95	5,39	14,91	1,56	0,47	2,64	35,70	3,55	2,59	4,51	13,83
Bali	4,80	3,25	6,36	16,51	3,89	2,18	5,60	22,43	4,56	3,33	5,79	13,75
Nusa Tenggara Barat	4,41	2,91	5,91	17,36	6,10	4,58	7,62	12,71	5,24	4,17	6,31	10,41
Nusa Tenggara Timur	4,01	2,42	5,59	20,18	2,74	2,16	3,32	10,83	3,03	2,46	3,61	9,68
Kalimantan Barat	3,65	2,13	5,16	21,21	2,60	1,81	3,38	15,46	2,97	2,23	3,71	12,75
Kalimantan Tengah	3,89	2,07	5,70	23,80	1,27	0,64	1,91	25,51	2,38	1,53	3,23	18,22
Kalimantan Selatan	4,68	3,07	6,30	17,58	3,84	2,49	5,18	17,87	4,25	3,20	5,30	12,57
Kalimantan Timur	7,04	4,56	9,51	17,93	3,39	1,74	5,04	24,86	5,88	4,09	7,68	15,59
Kalimantan Utara	7,75	4,67	10,83	20,26	6,17	2,57	9,77	29,79	7,19	4,83	9,55	16,74
Sulawesi Utara	4,84	3,20	6,48	17,32	4,28	2,93	5,64	16,14	4,57	3,50	5,64	11,98
Sulawesi Tengah	10,47	6,93	14,02	17,26	2,70	1,78	3,62	17,35	5,16	3,85	6,47	12,95
Sulawesi Selatan	4,43	3,31	5,56	12,96	5,32	4,25	6,40	10,31	4,91	4,13	5,69	8,12
Sulawesi Tenggara	3,95	2,03	5,88	24,84	1,94	1,28	2,61	17,39	2,69	1,87	3,51	15,59
Gorontalo	7,65	4,91	10,39	18,26	3,60	1,97	5,23	23,13	5,31	3,82	6,80	14,33
Sulawesi Barat	4,62	1,88	7,37	30,30	3,02	1,59	4,45	24,18	3,34	2,08	4,61	19,34
Maluku	2,97	0,90	5,03	35,48	1,16	0,45	1,86	31,01	1,88	0,94	2,81	25,46
Maluku Utara	2,99	1,23	4,76	30,10	2,06	1,21	2,91	20,99	2,31	1,53	3,09	17,22
Papua Barat	4,69	2,65	6,73	22,19	2,56	1,34	3,78	24,30	3,39	2,29	4,48	16,48
Papua	4,71	2,98	6,45	18,78	0,76	0,44	1,07	21,29	2,09	1,46	2,72	15,35
Indonesia	5,03	4,72	5,34	3,15	3,35	3,15	3,56	3,15	4,31	4,12	4,51	2,35

Catatan : Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.26 *Sampling Error* Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	3,34	2,55	4,14	12,10	3,33	2,34	4,32	15,14	3,34	2,66	4,01	10,36
Sumatera Utara	2,72	1,99	3,44	13,55	2,76	1,95	3,58	15,06	2,74	2,18	3,30	10,49
Sumatera Barat	3,83	2,64	5,03	15,95	3,19	2,20	4,19	15,92	3,52	2,65	4,40	12,68
Riau	3,98	2,74	5,22	15,92	2,85	1,89	3,81	17,25	3,43	2,60	4,26	12,30
Jambi	3,28	2,13	4,43	17,90	2,82	1,74	3,90	19,52	3,06	2,25	3,86	13,42
Sumatera Selatan	2,02	1,24	2,81	19,81	2,01	1,21	2,81	20,35	2,01	1,43	2,60	14,86
Bengkulu	5,13	3,15	7,10	19,62	3,33	1,76	4,90	24,07	4,23	2,84	5,63	16,80
Lampung	3,21	2,13	4,30	17,26	3,80	2,45	5,15	18,06	3,50	2,63	4,38	12,68
Kep. Bangka Belitung	5,06	3,17	6,95	19,05	3,14	1,39	4,88	28,33	4,13	2,88	5,38	15,40
Kepulauan Riau	3,64	0,34	6,95	46,28	6,30	2,73	9,87	28,92	4,94	2,57	7,32	24,53
DKI Jakarta	6,23	4,28	8,18	15,97	4,79	3,05	6,53	18,52	5,52	4,20	6,84	12,18
Jawa Barat	4,69	3,73	5,65	10,44	3,44	2,67	4,22	11,53	4,08	3,41	4,75	8,37
Jawa Tengah	5,98	5,17	6,79	6,91	5,58	4,82	6,35	6,97	5,79	5,20	6,37	5,13
DI Yogyakarta	10,01	6,47	13,56	18,05	7,62	4,94	10,29	17,91	8,87	6,67	11,07	12,66
Jawa Timur	5,59	4,75	6,43	7,66	5,72	4,86	6,59	7,71	5,66	5,03	6,28	5,62
Banten	4,12	2,61	5,63	18,74	2,96	1,83	4,09	19,54	3,55	2,59	4,51	13,83
Bali	5,01	3,27	6,75	17,75	4,12	2,28	5,96	22,78	4,56	3,33	5,79	13,75
Nusa Tenggara Barat	5,80	4,21	7,39	13,99	4,67	3,29	6,04	15,07	5,24	4,17	6,31	10,41
Nusa Tenggara Timur	3,29	2,50	4,07	12,16	2,77	2,04	3,49	13,33	3,03	2,46	3,61	9,68
Kalimantan Barat	3,43	2,33	4,53	16,38	2,50	1,52	3,47	19,89	2,97	2,23	3,71	12,75
Kalimantan Tengah	2,53	1,43	3,63	22,15	2,21	1,17	3,25	24,03	2,38	1,53	3,23	18,22
Kalimantan Selatan	4,29	2,93	5,65	16,13	4,21	2,71	5,71	18,14	4,25	3,20	5,30	12,57
Kalimantan Timur	5,63	3,85	7,41	16,15	6,15	2,89	9,40	27,06	5,88	4,09	7,68	15,59
Kalimantan Utara	7,30	3,60	11,01	25,90	7,07	3,92	10,23	22,75	7,19	4,83	9,55	16,74
Sulawesi Utara	4,75	3,35	6,15	15,06	4,38	2,79	5,98	18,54	4,57	3,50	5,64	11,98
Sulawesi Tengah	5,97	4,06	7,87	16,26	4,31	2,73	5,90	18,76	5,16	3,85	6,47	12,95
Sulawesi Selatan	5,05	4,00	6,10	10,60	4,76	3,62	5,90	12,21	4,91	4,13	5,69	8,12
Sulawesi Tenggara	3,34	1,92	4,75	21,63	2,02	1,25	2,80	19,51	2,69	1,87	3,51	15,59
Gorontalo	6,52	4,08	8,96	19,12	4,09	2,41	5,77	20,93	5,31	3,82	6,80	14,33
Sulawesi Barat	3,45	1,77	5,13	24,87	3,23	1,56	4,91	26,45	3,34	2,08	4,61	19,34
Maluku	1,42	0,50	2,35	33,08	2,35	1,04	3,67	28,52	1,88	0,94	2,81	25,46
Maluku Utara	2,21	1,28	3,15	21,52	2,41	1,14	3,68	26,86	2,31	1,53	3,09	17,22
Papua Barat	3,41	1,84	4,98	23,53	3,37	1,97	4,76	21,22	3,39	2,29	4,48	16,48
Papua	1,90	1,05	2,75	22,86	2,29	1,33	3,25	21,39	2,09	1,46	2,72	15,35
Indonesia	4,58	4,30	4,86	3,13	4,03	3,78	4,29	3,23	4,31	4,12	4,51	2,35

Catatan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.27 *Sampling Error* Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	56,90	45,35	68,46	10,36	56,92	50,96	62,89	5,35	56,92	51,41	62,42	4,93
Sumatera Utara	29,69	21,33	38,05	14,36	10,96	6,95	14,97	18,67	21,53	16,46	26,61	12,02
Sumatera Barat	48,85	39,77	57,93	9,48	20,36	15,08	25,65	13,25	35,64	29,71	41,57	8,49
Riau	55,17	45,36	64,97	9,07	29,81	19,50	40,12	17,64	43,44	36,12	50,76	8,60
Jambi	46,84	32,36	61,31	15,76	16,47	8,24	24,70	25,49	27,36	19,90	34,82	13,91
Sumatera Selatan	45,08	34,33	55,82	12,16	18,60	11,81	25,39	18,61	32,34	25,93	38,75	10,11
Bengkulu	47,94	34,08	61,79	14,75	15,62	9,58	21,66	19,73	27,08	20,47	33,69	12,46
Lampung	31,07	21,41	40,74	15,86	14,49	9,39	19,59	17,97	20,93	16,01	25,84	11,98
Kep. Bangka Belitung	45,15	31,85	58,45	15,03	19,45	9,68	29,22	25,63	33,33	24,66	41,99	13,26
Kepulauan Riau	63,28	50,15	76,40	10,58	NA	NA	NA	51,37	60,93	48,67	73,18	10,26
DKI Jakarta	68,66	60,06	77,27	6,39	-	-	-	-	68,66	60,06	77,27	6,39
Jawa Barat	37,67	33,08	42,26	6,22	10,89	6,65	15,14	19,87	33,27	29,36	37,19	6,00
Jawa Tengah	42,03	37,86	46,21	5,07	17,58	14,33	20,84	9,44	30,49	27,68	33,31	4,71
DI Yogyakarta	43,64	32,01	55,27	13,60	30,72	13,69	47,74	28,27	39,78	30,26	49,31	12,22
Jawa Timur	37,36	32,93	41,80	6,06	15,69	12,44	18,93	10,55	28,05	25,13	30,98	5,32
Banten	54,22	44,36	64,07	9,27	16,88	1,72	32,05	45,81	47,67	39,04	56,31	9,24
Bali	39,05	30,09	48,01	11,70	24,00	16,47	31,52	16,00	34,47	27,76	41,18	9,93
Nusa Tenggara Barat	37,29	29,27	45,31	10,97	16,66	11,66	21,66	15,32	26,98	22,18	31,78	9,08
Nusa Tenggara Timur	51,41	37,67	65,15	13,64	37,79	32,39	43,18	7,29	41,41	36,02	46,80	6,64
Kalimantan Barat	50,31	39,11	61,52	11,36	24,80	18,71	30,88	12,52	34,54	28,66	40,43	8,69
Kalimantan Tengah	33,14	14,22	52,07	29,13	34,52	17,00	52,05	25,90	33,93	21,04	46,82	19,39
Kalimantan Selatan	54,82	40,90	68,75	12,96	44,44	34,91	53,98	10,94	48,96	40,88	57,04	8,42
Kalimantan Timur	71,50	62,40	80,60	6,49	49,91	36,00	63,83	14,22	66,81	58,78	74,84	6,13
Kalimantan Utara	36,75	21,06	52,44	21,78	66,93	45,54	88,33	16,30	46,33	33,12	59,55	14,55
Sulawesi Utara	52,22	39,79	64,64	12,14	27,03	20,05	34,02	13,19	38,82	31,67	45,98	9,40
Sulawesi Tengah	66,87	56,17	77,57	8,16	43,00	32,08	53,91	12,95	52,38	44,33	60,43	7,84
Sulawesi Selatan	60,64	51,17	70,11	7,97	49,59	41,62	57,56	8,20	55,49	49,28	61,69	5,70
Sulawesi Tenggara	63,31	52,19	74,43	8,96	43,30	33,99	52,62	10,97	49,81	42,30	57,31	7,69
Gorontalo	47,34	36,22	58,45	11,98	39,00	26,59	51,41	16,24	43,53	35,29	51,76	9,65
Sulawesi Barat	56,13	32,19	80,06	21,75	56,59	44,59	68,59	10,82	56,48	45,71	67,25	9,73
Maluku	27,02	13,66	40,38	25,22	29,62	18,91	40,34	18,45	28,30	19,68	36,91	15,53
Maluku Utara	63,62	44,18	83,06	15,59	56,11	46,55	65,67	8,69	57,75	49,18	66,32	7,57
Papua Barat	39,10	25,05	53,15	18,34	65,10	57,03	73,16	6,32	54,72	47,47	61,98	6,77
Papua	55,42	42,40	68,44	11,99	68,77	59,18	78,35	7,11	63,36	55,51	71,20	6,32
Indonesia	44,20	42,25	46,16	2,26	23,62	22,31	24,94	2,84	36,32	35,00	37,65	1,86

Catatan : Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah (■) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.28 *Sampling Error* Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	93,81	85,97	101,64	4,26	88,36	81,83	94,89	3,77	90,60	85,56	95,63	2,84
Sumatera Utara	61,65	49,85	73,45	9,76	42,14	30,83	53,46	13,69	55,91	46,94	64,89	8,19
Sumatera Barat	84,13	76,54	91,73	4,60	49,69	36,53	62,85	13,51	70,17	62,68	77,66	5,44
Riau	75,13	61,95	88,31	8,95	54,73	39,61	69,84	14,09	66,82	56,94	76,70	7,54
Jambi	62,21	42,39	82,03	16,25	42,35	27,13	57,57	18,33	50,81	38,24	63,38	12,62
Sumatera Selatan	78,15	61,27	95,03	11,02	45,00	31,47	58,53	15,33	58,07	46,20	69,95	10,43
Bengkulu	84,05	67,04	101,06	10,32	61,72	43,17	80,26	15,33	73,75	60,56	86,95	9,12
Lampung	52,29	39,27	65,31	12,70	48,47	32,20	64,74	17,12	50,21	39,52	60,90	10,86
Kep. Bangka Belitung	73,97	54,42	93,52	13,48	73,98	50,70	97,27	16,05	73,98	58,97	88,98	10,34
Kepulauan Riau	84,97	68,76	101,18	9,73	97,78	93,42	102,14	2,28	85,64	70,29	100,98	9,14
DKI Jakarta	89,97	83,00	96,94	3,95	-	-	-	-	89,97	83,00	96,94	3,95
Jawa Barat	77,87	71,08	84,67	4,45	35,59	23,48	47,69	17,35	70,26	63,91	76,60	4,60
Jawa Tengah	63,31	57,09	69,52	5,00	50,26	42,65	57,88	7,73	57,69	52,86	62,51	4,27
DI Yogyakarta	84,94	74,05	95,82	6,53	82,99	62,70	103,28	12,47	84,70	74,83	94,57	5,94
Jawa Timur	68,58	62,19	74,96	4,75	52,26	43,68	60,83	8,37	63,47	58,31	68,63	4,14
Banten	71,83	59,49	84,16	8,76	50,14	24,87	75,41	25,70	69,58	58,18	80,98	8,35
Bali	61,54	44,49	78,59	14,13	93,88	86,25	101,52	4,15	68,83	55,62	82,04	9,79
Nusa Tenggara Barat	42,29	27,00	57,57	18,44	29,12	17,25	40,99	20,79	34,74	25,28	44,20	13,89
Nusa Tenggara Timur	79,41	65,43	93,39	8,98	54,20	45,64	62,76	8,06	61,93	54,24	69,62	6,34
Kalimantan Barat	71,79	52,08	91,50	14,01	63,93	50,82	77,03	10,46	67,37	56,08	78,65	8,55
Kalimantan Tengah	59,03	32,83	85,23	22,64	73,46	55,80	91,12	12,26	63,49	44,06	82,91	15,60
Kalimantan Selatan	64,82	43,74	85,90	16,59	83,43	73,75	93,11	5,92	73,38	60,52	86,24	8,94
Kalimantan Timur	92,55	85,90	99,20	3,66	81,60	67,15	96,05	9,03	90,56	84,35	96,78	3,50
Kalimantan Utara	78,77	60,67	96,87	11,72	89,26	77,29	101,23	6,84	81,97	68,80	95,13	8,19
Sulawesi Utara	81,51	66,59	96,44	9,34	69,01	57,02	80,99	8,86	75,90	65,90	85,91	6,72
Sulawesi Tengah	80,63	66,51	94,74	8,93	80,17	67,95	92,39	7,77	80,46	70,41	90,52	6,37
Sulawesi Selatan	75,71	64,08	87,33	7,83	70,60	61,87	79,32	6,30	72,75	65,72	79,78	4,93
Sulawesi Tenggara	76,90	63,43	90,38	8,93	67,39	52,13	82,64	11,55	72,57	62,32	82,81	7,20
Gorontalo	82,94	70,00	95,87	7,95	67,62	47,43	87,81	15,23	76,94	65,66	88,22	7,48
Sulawesi Barat	80,54	49,36	111,72	19,74	86,09	77,89	94,29	4,86	84,54	73,74	95,35	6,52
Maluku	80,59	64,09	97,10	10,45	25,37	6,45	44,28	38,02	60,05	41,33	78,77	15,90
Maluku Utara	52,10	26,15	78,05	25,41	66,75	51,63	81,88	11,55	61,63	47,74	75,53	11,50
Papua Barat	66,15	40,02	92,28	20,14	38,61	24,65	52,57	18,45	53,45	38,74	68,15	14,04
Papua	70,49	54,22	86,76	11,77	54,88	35,22	74,53	18,27	66,75	53,48	80,01	10,14
Indonesia	73,37	70,92	75,83	1,71	54,56	51,68	57,43	2,69	67,12	65,18	69,05	1,47

Catatan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.29 *Sampling Error* Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	87,17	79,15	95,19	4,69	94,11	88,01	100,20	3,30	90,60	85,56	95,63	2,84
Sumatera Utara	60,10	48,89	71,30	9,51	51,68	37,46	65,89	14,03	55,91	46,94	64,89	8,19
Sumatera Barat	73,56	61,81	85,31	8,15	65,93	55,60	76,25	7,98	70,17	62,68	77,66	5,44
Riau	67,12	52,89	81,34	10,81	66,38	50,17	82,59	12,45	66,82	56,94	76,70	7,54
Jambi	50,81	32,43	69,19	18,45	50,81	33,75	67,87	17,12	50,81	38,24	63,38	12,62
Sumatera Selatan	49,70	34,40	65,01	15,71	67,09	50,48	83,70	12,62	58,07	46,20	69,95	10,43
Bengkulu	69,61	52,06	87,16	12,86	80,22	63,38	97,06	10,70	73,75	60,56	86,95	9,12
Lampung	55,91	41,80	70,03	12,88	45,30	29,66	60,95	17,62	50,21	39,52	60,90	10,86
Kep. Bangka Belitung	66,96	46,22	87,71	15,80	86,05	66,46	105,64	11,61	73,98	58,97	88,98	10,34
Kepulauan Riau	92,99	83,14	102,84	5,40	81,18	59,28	103,09	13,76	85,64	70,29	100,98	9,14
DKI Jakarta	88,29	77,78	98,79	6,07	92,23	83,79	100,66	4,67	89,97	83,00	96,94	3,95
Jawa Barat	68,58	60,43	76,72	6,06	72,66	63,60	81,72	6,36	70,26	63,91	76,60	4,60
Jawa Tengah	60,11	53,13	67,08	5,92	54,98	47,85	62,12	6,62	57,69	52,86	62,51	4,27
DI Yogyakarta	80,87	65,78	95,95	9,51	90,19	80,20	100,19	5,65	84,70	74,83	94,57	5,94
Jawa Timur	62,15	54,21	70,08	6,52	64,82	57,76	71,88	5,55	63,47	58,31	68,63	4,14
Banten	65,53	51,28	79,78	11,09	75,45	60,99	89,92	9,78	69,58	58,18	80,98	8,35
Bali	68,20	51,54	84,87	12,46	69,58	48,49	90,67	15,46	68,83	55,62	82,04	9,79
Nusa Tenggara Barat	30,82	19,43	42,20	18,84	39,82	24,20	55,43	20,00	34,74	25,28	44,20	13,89
Nusa Tenggara Timur	65,42	54,70	76,13	8,35	57,57	45,87	69,26	10,36	61,93	54,24	69,62	6,34
Kalimantan Barat	60,57	44,95	76,19	13,15	76,91	61,51	92,31	10,21	67,37	56,08	78,65	8,55
Kalimantan Tengah	62,79	40,45	85,13	18,14	64,34	40,58	88,10	18,84	63,49	44,06	82,91	15,60
Kalimantan Selatan	68,48	50,26	86,69	13,57	78,51	61,15	95,86	11,28	73,38	60,52	86,24	8,94
Kalimantan Timur	92,28	85,97	98,59	3,49	88,95	78,64	99,27	5,91	90,56	84,35	96,78	3,50
Kalimantan Utara	82,73	68,31	97,16	8,89	81,19	59,26	103,13	13,78	81,97	68,80	95,13	8,19
Sulawesi Utara	75,76	61,62	89,90	9,52	76,06	62,47	89,66	9,12	75,90	65,90	85,91	6,72
Sulawesi Tengah	74,33	59,49	89,18	10,19	89,40	81,18	97,61	4,69	80,46	70,41	90,52	6,37
Sulawesi Selatan	74,09	64,20	83,98	6,81	71,27	61,33	81,20	7,11	72,75	65,72	79,78	4,93
Sulawesi Tenggara	79,19	70,65	87,73	5,50	61,43	42,95	79,90	15,34	72,57	62,32	82,81	7,20
Gorontalo	75,65	59,51	91,78	10,88	79,03	61,63	96,42	11,22	76,94	65,66	88,22	7,48
Sulawesi Barat	73,87	52,80	94,93	14,54	96,37	89,03	103,72	3,89	84,54	73,74	95,35	6,52
Maluku	83,28	68,41	98,16	9,11	45,21	20,25	70,18	28,17	60,05	41,33	78,77	15,90
Maluku Utara	73,81	56,90	90,72	11,68	50,45	30,31	70,60	20,36	61,63	47,74	75,53	11,50
Papua Barat	53,30	29,15	77,45	23,11	53,60	32,65	74,55	19,94	53,45	38,74	68,15	14,04
Papua	62,96	44,28	81,65	15,13	70,06	51,35	88,77	13,62	66,75	53,48	80,01	10,14
Indonesia	66,72	64,02	69,42	2,07	67,59	64,81	70,37	2,10	67,12	65,18	69,05	1,47

Catatan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.30 *Sampling Error* Persentase Anak Usia <6 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	83,15	70,96	95,34	7,48	60,81	50,61	71,02	8,56	67,05	58,69	75,41	6,36
Sumatera Utara	59,02	47,88	70,17	9,63	66,08	57,58	74,57	6,56	61,98	54,63	69,34	6,05
Sumatera Barat	77,92	65,55	90,29	8,10	74,17	65,85	82,49	5,72	75,84	68,67	83,01	4,82
Riau	75,41	61,28	89,54	9,56	68,92	56,81	81,02	8,96	71,14	61,94	80,34	6,60
Jambi	79,32	64,34	94,30	9,63	71,88	59,30	84,47	8,93	74,14	64,16	84,12	6,87
Sumatera Selatan	74,71	60,47	88,94	9,72	76,08	67,18	84,98	5,97	75,59	67,95	83,22	5,15
Bengkulu	63,26	45,51	81,02	14,31	76,26	67,31	85,22	5,99	72,44	63,87	81,01	6,03
Lampung	76,90	59,54	94,25	11,51	75,89	67,21	84,56	5,83	76,20	68,14	84,27	5,40
Kep. Bangka Belitung	68,24	52,14	84,35	12,04	57,69	40,27	75,10	15,40	63,30	51,20	75,40	9,75
Kepulauan Riau	64,31	41,23	87,39	18,31	43,45	11,87	75,03	37,08	62,88	41,24	84,52	17,55
DKI Jakarta	76,39	63,50	89,27	8,60	-	-	-	-	76,39	63,50	89,27	8,60
Jawa Barat	80,50	74,63	86,38	3,72	78,52	71,08	85,97	4,84	80,08	75,19	84,96	3,11
Jawa Tengah	72,46	64,53	80,39	5,58	88,39	84,44	92,34	2,28	80,20	75,53	84,88	2,97
DI Yogyakarta	76,10	59,03	93,18	11,45	88,01	65,07	110,95	13,30	78,25	63,87	92,63	9,37
Jawa Timur	72,77	65,24	80,30	5,28	72,57	65,84	79,31	4,73	72,68	67,61	77,74	3,56
Banten	78,10	67,72	88,47	6,78	64,84	48,82	80,86	12,60	74,62	65,79	83,44	6,03
Bali	68,68	52,36	85,01	12,12	70,01	52,29	87,73	12,91	69,01	55,91	82,10	9,68
Nusa Tenggara Barat	83,83	72,98	94,68	6,60	81,04	71,84	90,25	5,79	82,45	75,33	89,56	4,40
Nusa Tenggara Timur	61,98	39,08	84,89	18,85	82,77	76,97	88,57	3,57	78,74	72,04	85,45	4,35
Kalimantan Barat	62,43	46,11	78,75	13,33	78,92	69,15	88,69	6,31	72,97	64,30	81,64	6,06
Kalimantan Tengah	53,14	36,40	69,87	16,07	58,12	43,83	72,41	12,54	55,78	44,82	66,75	10,03
Kalimantan Selatan	67,17	53,28	81,07	10,55	64,32	52,49	76,15	9,38	65,69	56,66	74,72	7,01
Kalimantan Timur	79,58	66,75	92,40	8,22	74,41	51,13	97,69	15,96	77,70	65,89	89,51	7,75
Kalimantan Utara	72,63	50,69	94,58	15,41	86,51	62,05	110,97	14,42	77,81	60,98	94,63	11,03
Sulawesi Utara	52,07	34,96	69,19	16,76	76,72	66,24	87,20	6,97	64,40	54,39	74,42	7,93
Sulawesi Tengah	60,80	40,55	81,06	16,99	69,03	58,62	79,45	7,70	66,70	57,19	76,20	7,27
Sulawesi Selatan	76,69	67,24	86,13	6,28	77,60	70,20	85,01	4,87	77,20	71,32	83,08	3,88
Sulawesi Tenggara	58,10	39,30	76,90	16,51	65,70	56,01	75,38	7,52	62,99	53,82	72,15	7,42
Gorontalo	55,68	28,79	82,57	24,63	54,57	36,56	72,57	16,83	55,11	39,07	71,16	14,85
Sulawesi Barat	70,05	45,23	94,87	18,07	75,93	65,32	86,54	7,13	75,04	65,32	84,75	6,60
Maluku	66,82	48,66	84,98	13,86	58,42	47,83	69,00	9,25	61,52	51,99	71,05	7,90
Maluku Utara	83,15	62,25	104,04	12,82	64,59	53,32	75,86	8,90	69,66	59,62	79,70	7,35
Papua Barat	62,18	42,29	82,07	16,32	63,51	47,52	79,51	12,85	62,92	50,40	75,45	10,15
Papua	45,30	30,15	60,45	17,06	70,54	55,09	85,98	11,17	55,41	44,39	66,43	10,14
Indonesia	73,42	70,89	75,95	1,76	74,61	72,72	76,50	1,29	73,97	72,35	75,59	1,12

Catatan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.31 *Sampling Error* Persentase Anak Usia <6 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	63,06	52,07	74,04	8,88	72,41	61,58	83,25	7,63	67,05	58,69	75,41	6,36
Sumatera Utara	62,61	52,70	72,52	8,07	61,33	50,55	72,11	8,97	61,98	54,63	69,34	6,05
Sumatera Barat	72,25	62,03	82,47	7,22	80,42	71,39	89,46	5,73	75,84	68,67	83,01	4,82
Riau	70,81	57,74	83,88	9,41	71,50	59,98	83,01	8,21	71,14	61,94	80,34	6,60
Jambi	81,86	71,69	92,02	6,34	64,57	47,76	81,39	13,28	74,14	64,16	84,12	6,87
Sumatera Selatan	79,92	70,76	89,07	5,84	71,37	59,68	83,06	8,36	75,59	67,95	83,22	5,15
Bengkulu	71,87	58,30	85,44	9,63	73,10	59,85	86,35	9,25	72,44	63,87	81,01	6,03
Lampung	75,14	63,12	87,16	8,16	77,34	66,43	88,24	7,19	76,20	68,14	84,27	5,40
Kep. Bangka Belitung	46,48	28,36	64,60	19,88	77,29	62,71	91,87	9,62	63,30	51,20	75,40	9,75
Kepulauan Riau	48,09	20,59	75,59	29,17	84,14	70,98	97,29	7,97	62,88	41,24	84,52	17,55
DKI Jakarta	69,29	49,98	88,60	14,22	84,84	71,86	97,82	7,80	76,39	63,50	89,27	8,60
Jawa Barat	79,79	72,78	86,79	4,48	80,44	73,65	87,22	4,30	80,08	75,19	84,96	3,11
Jawa Tengah	78,14	70,60	85,68	4,92	82,13	76,89	87,37	3,25	80,20	75,53	84,88	2,97
DI Yogyakarta	82,20	56,92	107,47	15,69	75,76	57,26	94,26	12,46	78,25	63,87	92,63	9,37
Jawa Timur	68,84	61,54	76,14	5,41	76,89	70,27	83,51	4,39	72,68	67,61	77,74	3,56
Banten	78,28	67,60	88,96	6,96	69,35	54,20	84,50	11,14	74,62	65,79	83,44	6,03
Bali	72,19	54,22	90,16	12,70	67,00	49,70	84,30	13,17	69,01	55,91	82,10	9,68
Nusa Tenggara Barat	80,58	70,18	90,98	6,58	84,41	74,18	94,64	6,18	82,45	75,33	89,56	4,40
Nusa Tenggara Timur	76,73	66,87	86,58	6,55	80,78	72,78	88,79	5,05	78,74	72,04	85,45	4,35
Kalimantan Barat	68,49	57,33	79,66	8,32	77,38	64,72	90,04	8,35	72,97	64,30	81,64	6,06
Kalimantan Tengah	53,71	36,84	70,57	16,02	57,76	44,47	71,06	11,74	55,78	44,82	66,75	10,03
Kalimantan Selatan	75,25	64,98	85,52	6,96	58,05	45,87	70,22	10,70	65,69	56,66	74,72	7,01
Kalimantan Timur	89,02	79,72	98,33	5,33	70,46	52,94	87,97	12,68	77,70	65,89	89,51	7,75
Kalimantan Utara	78,46	52,08	104,84	17,15	77,20	56,94	97,45	13,38	77,81	60,98	94,63	11,03
Sulawesi Utara	58,38	44,18	72,58	12,41	70,90	55,77	86,03	10,89	64,40	54,39	74,42	7,93
Sulawesi Tengah	68,46	54,73	82,19	10,23	65,07	51,88	78,25	10,34	66,70	57,19	76,20	7,27
Sulawesi Selatan	75,29	66,89	83,68	5,69	79,48	70,81	88,15	5,56	77,20	71,32	83,08	3,88
Sulawesi Tenggara	65,25	54,38	76,11	8,50	60,17	46,82	73,52	11,32	62,99	53,82	72,15	7,42
Gorontalo	41,58	17,16	66,00	29,96	68,57	51,17	85,98	12,94	55,11	39,07	71,16	14,85
Sulawesi Barat	68,94	54,63	83,25	10,59	81,90	71,08	92,72	6,74	75,04	65,32	84,75	6,60
Maluku	65,20	52,57	77,82	9,88	56,85	40,56	73,13	14,61	61,52	51,99	71,05	7,90
Maluku Utara	72,80	60,50	85,10	8,62	65,79	50,21	81,38	12,08	69,66	59,62	79,70	7,35
Papua Barat	58,77	42,08	75,47	14,49	67,18	51,56	82,81	11,86	62,92	50,40	75,45	10,15
Papua	63,77	49,04	78,50	11,78	46,72	32,21	61,22	15,84	55,41	44,39	66,43	10,14
Indonesia	72,99	70,65	75,34	1,64	75,02	72,83	77,21	1,49	73,97	72,35	75,59	1,12

Catatan : Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.32 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	61,46	59,29	63,63	1,80	69,60	61,12	78,07	6,21	61,98	59,86	64,11	1,75
Sumatera Utara	66,24	64,22	68,26	1,55	67,78	60,70	74,85	5,33	66,31	64,33	68,29	1,52
Sumatera Barat	55,92	53,12	58,73	2,56	68,14	59,07	77,21	6,79	56,60	53,81	59,40	2,52
Riau	69,25	66,66	71,84	1,91	74,11	64,01	84,21	6,95	69,46	66,88	72,04	1,89
Jambi	61,42	58,30	64,54	2,59	53,22	40,07	66,36	12,61	61,08	57,99	64,17	2,58
Sumatera Selatan	58,79	56,25	61,34	2,21	58,04	47,71	68,37	9,08	58,76	56,23	61,28	2,19
Bengkulu	52,02	48,72	55,32	3,24	54,41	40,64	68,19	12,91	52,11	48,92	55,31	3,13
Lampung	61,06	58,43	63,69	2,20	55,23	42,77	67,69	11,51	60,84	58,21	63,47	2,21
Kep. Bangka Belitung	27,03	23,38	30,69	6,90	18,07	5,77	30,36	34,73	26,72	23,13	30,32	6,86
Kepulauan Riau	52,58	45,29	59,86	7,07	65,28	40,49	90,06	19,37	52,99	45,92	60,06	6,81
DKI Jakarta	32,26	28,39	36,13	6,12	35,96	20,90	51,02	21,37	32,44	28,53	36,34	6,14
Jawa Barat	50,66	48,73	52,59	1,94	49,46	40,87	58,04	8,86	50,61	48,70	52,52	1,93
Jawa Tengah	67,25	65,71	68,78	1,17	67,65	62,30	73,00	4,03	67,27	65,76	68,78	1,14
DI Yogyakarta	83,26	80,05	86,47	1,97	83,28	72,07	94,49	6,87	83,26	80,13	86,39	1,92
Jawa Timur	71,09	69,48	72,70	1,15	70,74	66,07	75,42	3,37	71,07	69,53	72,61	1,11
Banten	61,56	58,43	64,70	2,60	58,41	45,91	70,90	10,92	61,40	58,32	64,48	2,56
Bali	79,00	75,54	82,46	2,23	82,96	71,48	94,45	7,06	79,10	75,68	82,52	2,21
Nusa Tenggara Barat	64,48	61,43	67,53	2,41	65,81	57,97	73,65	6,08	64,63	61,71	67,55	2,30
Nusa Tenggara Timur	38,07	35,86	40,28	2,96	39,28	32,80	45,76	8,41	38,17	36,05	40,30	2,84
Kalimantan Barat	60,87	57,84	63,90	2,54	66,38	57,12	75,64	7,12	61,15	58,19	64,11	2,47
Kalimantan Tengah	53,16	49,64	56,68	3,38	48,16	30,62	65,69	18,58	53,06	49,55	56,56	3,37
Kalimantan Selatan	54,20	50,99	57,42	3,03	61,49	50,22	72,77	9,35	54,52	51,35	57,69	2,97
Kalimantan Timur	71,29	67,74	74,84	2,54	64,14	48,99	79,28	12,05	71,02	67,46	74,58	2,56
Kalimantan Utara	68,89	63,05	74,72	4,32	46,93	25,39	68,47	23,41	67,66	61,75	73,56	4,45
Sulawesi Utara	67,04	63,90	70,17	2,38	76,06	61,97	90,16	9,45	67,49	64,49	70,49	2,27
Sulawesi Tengah	54,88	51,72	58,04	2,94	50,63	38,55	62,71	12,17	54,66	51,57	57,74	2,88
Sulawesi Selatan	70,35	68,27	72,43	1,51	70,57	63,23	77,92	5,31	70,37	68,34	72,40	1,47
Sulawesi Tenggara	70,44	67,82	73,05	1,89	71,52	63,98	79,05	5,38	70,53	68,04	73,01	1,80
Gorontalo	62,93	59,15	66,71	3,06	50,01	32,08	67,94	18,29	62,27	58,42	66,12	3,15
Sulawesi Barat	55,14	51,17	59,11	3,67	57,26	42,56	71,96	13,10	55,27	51,38	59,16	3,59
Maluku	57,98	54,50	61,46	3,06	55,60	43,21	67,98	11,37	57,82	54,47	61,17	2,96
Maluku Utara	62,07	58,72	65,41	2,75	78,91	67,65	90,17	7,28	62,72	59,40	66,04	2,70
Papua Barat	51,74	47,36	56,13	4,32	38,63	26,73	50,53	15,71	51,12	46,87	55,37	4,24
Papua	31,07	28,17	33,98	4,77	24,75	16,94	32,56	16,10	30,74	27,89	33,58	4,73
Indonesia	60,15	59,56	60,75	0,50	61,38	59,22	63,54	1,80	60,22	59,64	60,80	0,49

Catatan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023




BAB 5
PENDIDIKAN

Anak memiliki potensi, kemampuan, dan bakat yang berbeda. Potensi, kemampuan, dan bakat tersebut terus berkembang mengikuti siklus kehidupan sedari lahir sampai dewasa. Dalam proses perkembangan tersebut, masa usia dini merupakan fase terpenting bagi perkembangan kecerdasan anak. Untuk itu, pendidikan anak usia dini memegang peran yang sangat substansial dalam pengembangan kebutuhan sosial, emosional, kognitif, dan fisik anak. Selain itu, pendidikan anak usia dini juga memiliki kapasitas sebagai tonggak pertama dan utama bagi penyelenggaraan pendidikan selanjutnya. Di samping mengenyam pendidikan dan pengajaran, anak juga memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang antara lain bergaul dengan anak yang sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Kebutuhan tersebut sesuai dengan salah satu klaster pada Indeks Perlindungan Anak yaitu Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Pada akhirnya, dengan pemenuhan hak anak yang dibarengi dengan perlindungan anak secara optimal diharapkan dapat berpengaruh pada kualitas hidup mereka di kemudian hari.

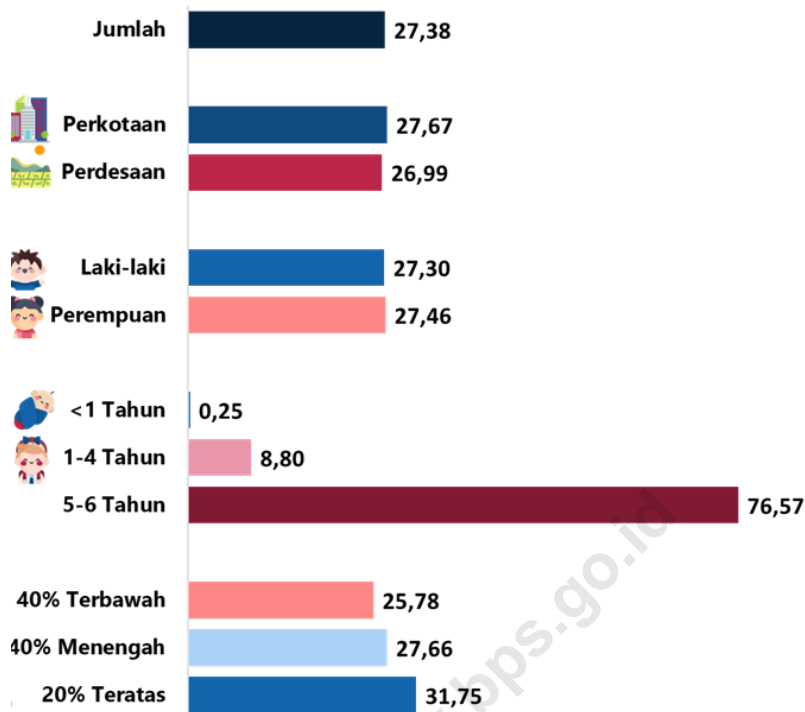
5.1 Partisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini

Fase anak usia dini sering disebut sebagai "*golden age*" pada kehidupan anak. Dalam fase ini, anak berada dalam periode dimana mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan terbaik sepanjang hidup. Benyamin S. Bloom dalam Charlesworth (2009) menyampaikan bahwa perkembangan intelektual anak berlangsung dan terakselerasi dengan sangat pesat pada tahun awal kehidupan anak. Pesatnya perkembangan anak tersebut membuat rentang waktu ini sebagai periode yang paling tepat untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki anak, salah satunya melalui pendidikan. Dalam kerangka yang lebih luas, pendidikan merupakan bentuk investasi dalam



pembangunan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Schultz 1961). Oleh karena itu, pendidikan terutama yang diberikan kepada anak usia dini menjadi hal yang mutlak untuk diberikan untuk dapat memaksimalkan potensi dan perkembangan anak.

Pendidikan usia dini (PAUD) juga berperan sebagai pondasi bagi anak dalam memperoleh kemampuan dasar yang diperlukan dalam pendidikan di masa yang akan datang. Pemerintah menyadari urgensi dari PAUD tersebut dan memberikan dukungan terhadap pendidikan prasekolah melalui program wajib PAUD dengan tujuan untuk menciptakan pendidikan yang berlandaskan keilmuan, yuridis, sosial, budaya dan pedagogis baik secara teoritis maupun empiris (Kemendikbud 2017). Hal tersebut semakin diperkuat dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

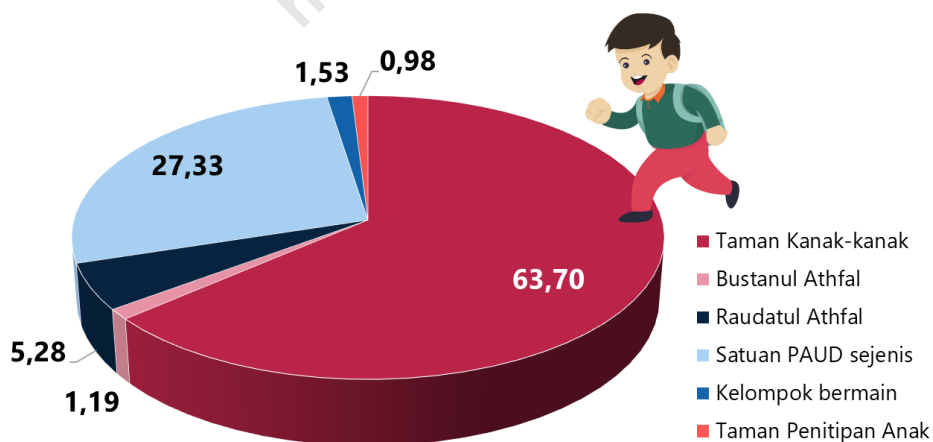
Gambar 5.1 Persentase Anak Usia Dini yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Karakteristik, 2023

Berdasarkan Gambar 5.1 terlihat bahwa pada tahun 2023, persentase anak usia dini yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebesar 27,38 persen. Jika dilihat lebih detail dari kategori tempat tinggal, tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan maupun perdesaan mengingat selisih persentase capaian perkotaan dengan perdesaan yang hanya sebesar 0,68 persen. Kondisi tersebut menandakan telah terjadi peningkatan aksesibilitas, sarana dan prasarana serta keterjangkauan pendidikan prasekolah baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Selain itu, tampak bahwa capaian persentase anak perempuan yang pernah/sedang mengikuti pendidikan prasekolah berdasarkan jenis kelamin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki (27,46 persen berbanding 27,30 persen). Dengan kata lain, dalam penyelenggaraan pendidikan, telah terdapat kesetaraan perlakuan dan akses terutama untuk memperoleh pendidikan prasekolah antara laki-laki dan perempuan. Keadaan tersebut telah

sesuai dengan prinsip fundamental pengarusutamaan gender yang telah lama dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam tujuan ke-5 *Sustainable Development Goals 2030*. Selanjutnya, jika dilihat dari kelompok umur, pertambahan usia anak sejalan dengan peningkatan tingkat partisipasi pendidikan prasekolah. Terlihat bahwa kelompok usia anak yang paling tua (5-6 tahun) memiliki persentase tertinggi yang telah mengikuti pendidikan prasekolah yakni sebesar 76,57 persen. Di sisi lain, faktor ekonomi masih menjadi halangan dalam menempuh pendidikan termasuk pendidikan prasekolah. Terlihat dari Gambar 5.1, berdasarkan distribusi pengeluaran rumah tangga terdapat kesenjangan yang cukup signifikan pada partisipasi pendidikan prasekolah terutama antara anak usia dini yang berasal dari rumah tangga 20 persen teratas dan 40 persen terbawah (31,75 persen berbanding 25,78 persen).

Secara umum, berdasarkan Gambar 5.2, sebagian besar orang tua masih mempercayakan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai jenis pendidikan prasekolah yang paling banyak diminati dibandingkan jenis lainnya dengan persentase mencapai 63,70 persen, diikuti oleh satuan PAUD sejenis (PAUD/PAUD terintegrasi BKB/Posyandu) dengan persentase sebesar 27,33 persen, dan Raudatul Athfal sebesar 5,28 persen.

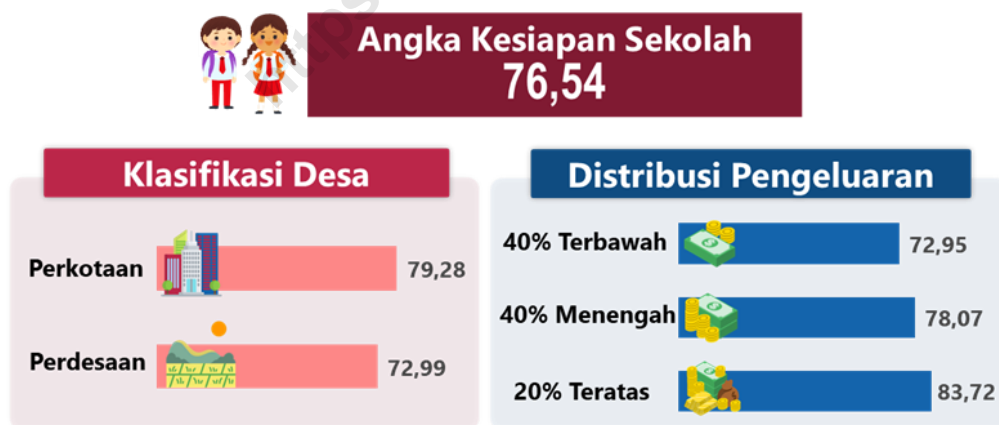


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.2 Persentase Anak Usia Dini yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Jenis Pendidikan Prasekolah, 2023

Pemerintah telah memberikan jaminan/kepastian usia anak untuk masuk dalam pendidikan anak usia dini yakni usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga menjadi kewajiban orang tua untuk mempersiapkan masa depan anak dari berbagai segi seperti perkembangan psikologis, kognitif, sosial emosional, fisik, motorik, serta bahasa. Kepastian dan konsistensi pelaksanaan kebijakan PAUD secara merata di seluruh Indonesia sangat diperlukan. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang didukung dengan kesediaan daerah untuk memperkuat program tersebut dari sisi regulasi kewajiban untuk mengikuti PAUD 1 tahun sebelum SD.

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana anak mempersiapkan dirinya menuju jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat) adalah Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Indikator AKS merupakan proporsi siswa yang duduk di kelas 1 SD/ sederajat yang pada tahun ajaran sebelumnya pernah mengikuti PAUD terhadap seluruh anak yang duduk di kelas 1 SD/ sederajat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.3 Angka Kesiapan Sekolah (AKS) menurut Karakteristik, 2023

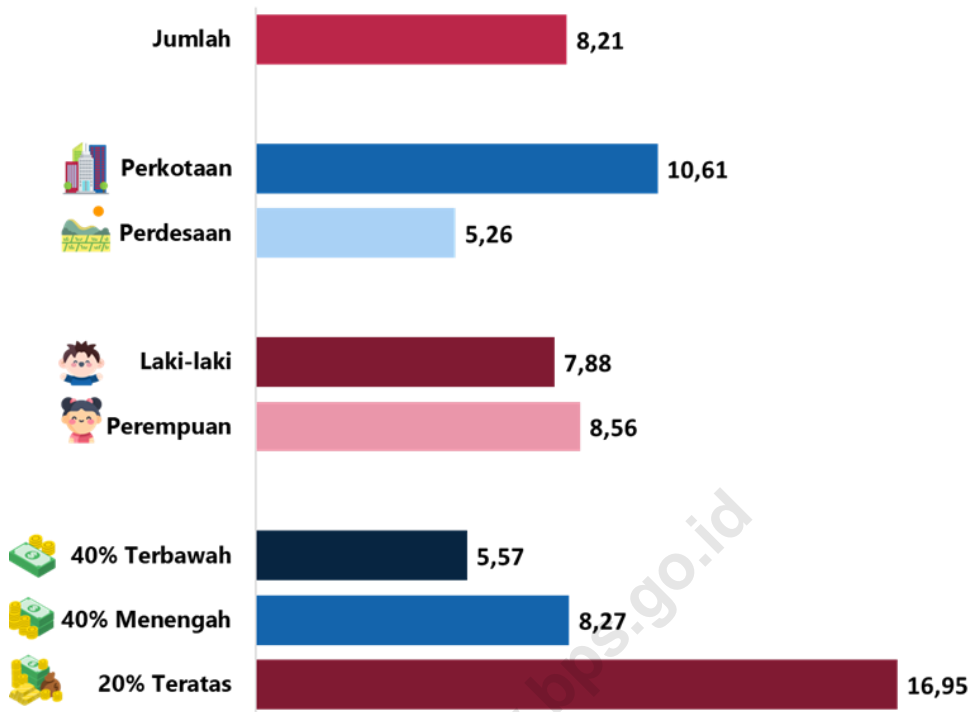
Sebagaimana ditunjukkan Gambar 5.3, capaian AKS pada tahun 2023 sebesar 76,54 persen. Berdasarkan klasifikasi desa, masih terdapat kesenjangan dimana capaian di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan (79,28 persen

berbanding 72,99 persen). Sedangkan jika dilihat berdasarkan distribusi pengeluaran rumah tangga, juga terdapat kesenjangan dimana semakin tinggi distribusi pengeluaran rumah tangga, maka semakin tinggi pula capaian AKSnya terutama antara siswa yang berasal dari rumah tangga 20 persen teratas dan 40 persen terbawah (83,72 persen berbanding 72,95 persen). Berdasarkan kedua hal tersebut hal, tampak masih adanya ketidakmerataan akses pendidikan prasekolah untuk anak-anak sebelum mengenyam pendidikan ke jenjang sekolah dasar.

5.2 Kegiatan Lainnya

Pembelajaran anak pada periode anak usia dini merupakan pembelajaran yang komprehensif untuk menstimulasi dan mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, emosional, dan sosial anak. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pembelajaran secara holistik menjadi metode penting mengingat pada pembelajaran ini aktivitas dipusatkan kepada anak serta penerapan belajar sambil bermain yang diharapkan nantinya potensi anak dapat berkembang secara optimal (Suarta dan Rahayu 2018).

Untuk mengembangkan kemampuan dan bakat anak, beberapa orang tua memilih untuk memasukkan anak dalam kegiatan kursus. Kursus sendiri merupakan penyelenggaraan pendidikan nonformal yang mempunyai kurikulum tertentu pada jangka waktu tertentu dan tempat tertentu yang dikelola oleh suatu lembaga atau yayasan. Kursus dapat berperan sebagai katalis dalam perkembangan anak yang juga menjadi salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh orang tua.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

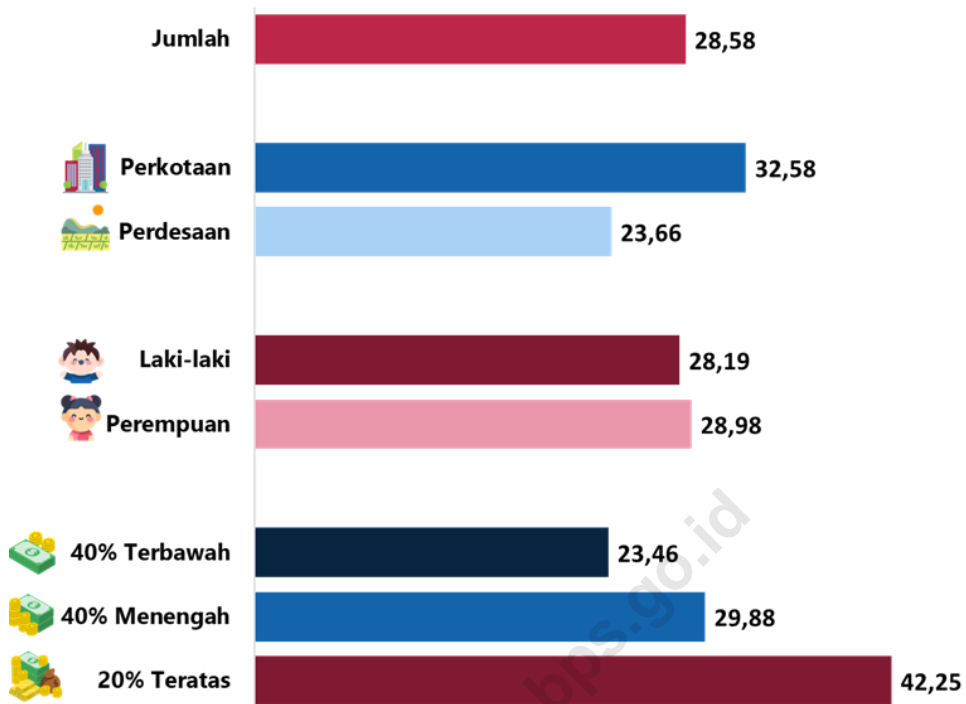
Gambar 5.4 Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Mengikuti Kursus Setahun Terakhir menurut Karakteristik, 2021

Pada Susenas MSBP 2021, pertanyaan mengenai keikutsertaan kursus ditanyakan kepada seluruh penduduk berusia 5 tahun ke atas sehingga bisa diperoleh informasi seberapa besar keikutsertaan kursus untuk anak usia 5-6 tahun. Berdasarkan Gambar 5.4 terlihat bahwa terdapat sebanyak 8,21 persen anak usia 5-6 tahun ikut serta dalam kegiatan kursus. Adapun berdasarkan gender, tidak terdapat kesenjangan dalam keikutsertaan kursus anak laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, keikutsertaan anak perempuan dalam kursus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki (8,56 persen berbanding 7,88 persen). Selain ketertarikan/minat individu, keikutsertaan dalam kegiatan kursus juga bergantung pada ketersediaan akses. Perbedaan fasilitas dan akses antara perkotaan dan perdesaan terlihat dari persentase anak di perkotaan yang mengikuti kursus dua kali lipat lebih besar dibandingkan di perdesaan (10,61 persen berbanding 5,26 persen). Lebih lanjut, faktor ekonomi masih menjadi

kendala mengingat berdasarkan distribusi pengeluaran rumah tangga juga terdapat kesenjangan dimana semakin tinggi distribusi pengeluaran rumah tangga, maka semakin tinggi pula anak yang mengikuti kursus.

Proses pembelajaran dalam pendidikan formal tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu hal yang penting bagi anak usia dini. Namun demikian, dalam pembelajaran terdapat aspek lain yang tidak kalah penting dan menjadi kebutuhan mendasar dalam mengakselerasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, yakni bermain dan waktu santai. Proses bermain dapat melatih anak berkonsentrasi, melatih ketekunan dan kegigihan, serta belajar mengambil risiko. Melalui bermain, anak juga dapat meningkatkan kemampuan bercerita, menambah kosa kata, dan belajar berkolaborasi secara aktif dengan orang lain. Bagi anak usia dini, permainan dapat dikemas salah satunya dalam bentuk olahraga (Paiman 2009). Olahraga bagi anak usia dini berperan penting dalam mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Selain itu, olahraga juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kecerdasan, mengajarkan kerja sama dan sportivitas, dan menjadi sarana untuk bersosialisasi.

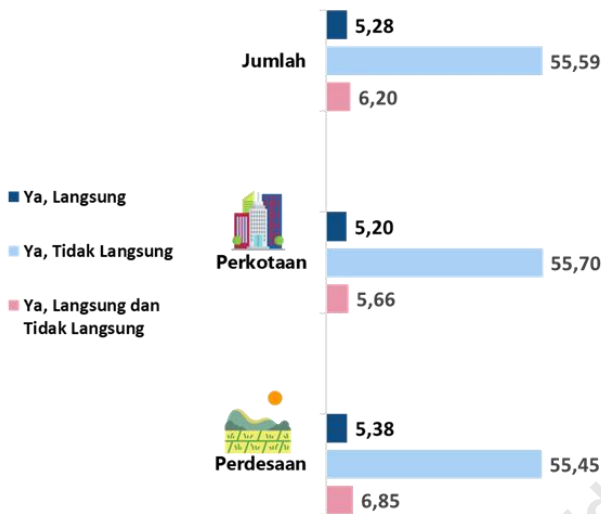
Sebagaimana terlihat pada Gambar 5.5, bahwa terdapat 28,58 persen anak usia dini yang berolahraga dalam seminggu terakhir. Dari klasifikasi tempat tinggalnya, anak yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang berolahraga dibandingkan anak yang tinggal di perdesaan (32,58 persen berbanding 23,66 persen). Keadaan tersebut wajar mengingat kondisi dan ketersediaan fasilitas olahraga di kawasan perkotaan cenderung lebih baik sehingga membuat anak-anak di daerah perkotaan lebih berkesempatan untuk menikmati berbagai jenis olahraga dibandingkan dengan anak-anak di perdesaan (Wargadinata dan Rusman 2019). Kondisi berbeda juga tampak dari distribusi pengeluaran rumah tangga yakni semakin tinggi distribusi pengeluaran rumah tangga, maka semakin tinggi pula anak yang berolahraga seminggu terakhir. Sementara itu, dari sisi gender tidak terdapat ketimpangan yang berarti, dimana anak perempuan yang berolahraga sedikit lebih banyak dibandingkan anak laki-laki (28,98 persen berbanding 28,19 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Gambar 5.5 Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berolahraga Seminggu Terakhir menurut Karakteristik, 2021

Selain olahraga, aktivitas di bidang seni seperti menonton pertunjukan/pameran seni juga menjadi salah satu pilihan anak usia dini untuk bermain dan mengisi waktu luang. Pertunjukan/pameran seni dalam Susenas MSBP 2021 dapat berupa film, seni musik/suara, seni rupa, seni sastra, seni tari, seni teater, dan pertunjukan lain. Dengan menonton pertunjukan/pameran seni, anak mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi bakat dan minatnya. Selain itu, aktifitas menonton pertunjukan juga berpotensi memancing kreativitas anak, belajar bersosialisasi, dan mengembangkan imajinasi dan menunjukkan ekspresi.



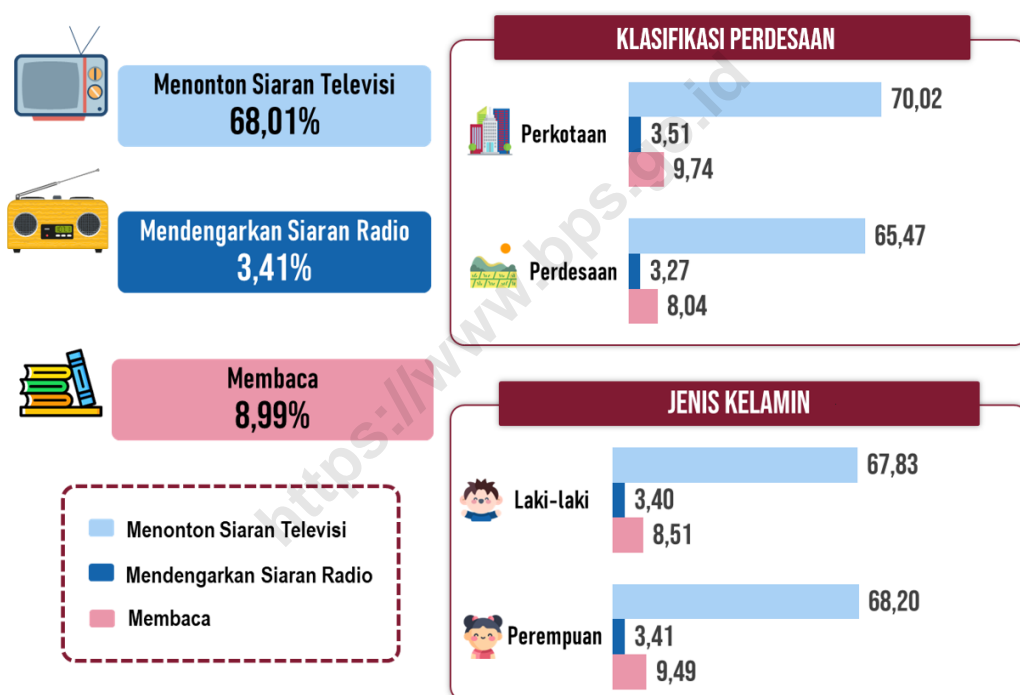
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Gambar 5.6 Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni Selama Tiga Bulan Terakhir, 2021

Menonton pertunjukan/pameran seni tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga secara tidak langsung melalui berbagai media misalnya televisi, radio, dan media online/streaming platform (youtube, facebook, dan sebagainya). Banyaknya variasi dan pilihan media yang tersedia secara tidak langsung mempermudah kegiatan menonton pertunjukan/pameran seni terutama bagi anak. Berdasarkan Gambar 5.6, terlihat bahwa terdapat 67,07 persen anak usia 5-6 tahun yang menonton pertunjukan/pameran seni, dimana 55,59 persen menonton secara tidak langsung, menonton secara langsung dan tidak langsung sebanyak 6,20 persen, dan hanya 5,28 persen yang menonton secara langsung. Kondisi tersebut disinyalir karena pada tahun 2021 masih dalam situasi pandemi sehingga belum memungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan seni/pertunjukan secara langsung. Sementara itu, berdasarkan klasifikasi desa terlihat bahwa persentase anak usia 5-6 tahun yang menonton pertunjukan/pameran seni baik secara langsung, tidak langsung, maupun keduanya di perdesaan sedikit lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (67,68 persen berbanding 66,56 persen).

5.3 Akses Media Massa

Pada era digital seperti sekarang ini, informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat diperoleh dengan mudah melalui bermacam media massa. Selain sebagai sumber informasi, media massa juga berfungsi sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan hiburan. Berdasarkan tipenya, media massa dapat diklasifikasikan atas media cetak dan media penyiaran. Media cetak dapat dibagi lebih lanjut menjadi surat kabar, majalah, dan tabloid. Sementara itu media penyiaran meliputi radio dan televisi (Niryawan 2007).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Gambar 5.7 Persentase Anak Usia Dini yang Mengakses Media dalam Seminggu Terakhir (Menonton TV, Mendengarkan Radio, dan Membaca), 2021

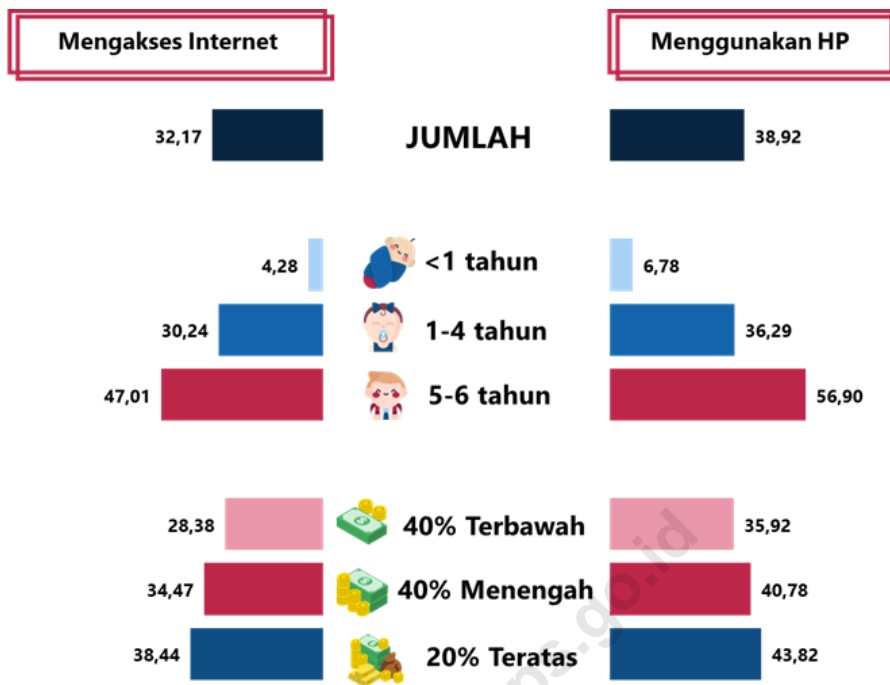
Berdasarkan Gambar 5.7, tampak bahwa persentase media massa yang paling banyak diakses oleh anak usia dini adalah televisi, dengan 68,01 persen anak usia dini menonton televisi dalam seminggu terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa televisi masih menjadi salah satu sarana hiburan yang digemari oleh anak usia dini karena mampu memberikan informasi, mendidik, menghibur dan

memengaruhi individu terutama anak usia dini. Pada saat anak menonton acara yang menghibur hatinya, anak akan dapat menghasilkan respon antara lain tertawa sendiri dan bicara sendiri dalam hatinya (intrapersonal), tertawa dan bergurau dengan sesama teman sebayanya atau dengan anggota keluarga yang ada di sekitar anak tersebut (komunikasi interpersonal), dan melakukan relaksasi pikiran (Makarim 2015). Untuk itu, kegiatan menonton televisi dapat melahirkan dampak positif bagi anak selama dilakukan dengan pendampingan orang tua.

Berkaitan dengan media radio, persentase anak umur 5-6 tahun yang mendengarkan radio cukup kecil yakni hanya sebesar 3,41 persen. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sifat siaran radio sendiri yang kurang menarik bagi anak karena hanya berupa audio dan tidak banyak program di radio yang dikhususkan untuk anak.

Selain media penyiaran, media lain yang juga dapat digunakan untuk menambah informasi adalah media cetak. Media cetak yang menjadi cakupan pertanyaan Susenas MSBP 2021 yakni koran/surat kabar, majalah/tabloid, buku cerita, buku pelajaran, buku pengetahuan dan lainnya. Pada Gambar 5.7 terlihat bahwa terdapat 8,99 persen anak usia dini yang membaca dalam seminggu terakhir. Di wilayah perkotaan, persentase anak yang membaca lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (9,74 persen berbanding 8,04 persen). Sementara itu, persentase anak perempuan yang membaca buku lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (9,49 persen berbanding 8,51 persen).

Dewasa ini, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi memungkinkan berbagai informasi dapat diakses dengan mudah tanpa mengenal batasan tempat dan waktu. Salah satu bentuk perkembangan teknologi adalah keberadaan gawai dan koneksi internet yang tentunya dapat mendukung berbagai bidang kehidupan manusia. Penggunaannya pun beragam, semua orang dari berbagai kalangan, dari anak usia dini sampai kelompok lanjut usia tidak asing lagi dengan gawai dan internet.



Gambar 5. 8 Persentase Anak Usia Dini yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dan Mengakses Internet, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.9 Persentase Anak Usia Dini yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dan Mengakses Internet, 2023

Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa terdapat 32,17 persen anak usia dini yang mengakses internet dan 38,92 persen anak usia dini yang menggunakan telepon seluler (HP). Berdasarkan karakteristik menurut kelompok umur, bertambahnya usia anak diikuti dengan peningkatan persentase anak usia dini yang mengakses internet maupun menggunakan HP. Hal ini sejalan dengan batasan yang dianjurkan dalam penggunaan gawai untuk balita dimana untuk balita sebaiknya tidak diberikan akses gawai sama sekali atau jika benar-benar diperlukan dibatasi hanya kurang dari 1 jam per hari (Fadli 2021). Sementara itu jika dilihat berdasarkan distribusi pengeluaran rumah tangga, baik untuk persentase anak usia dini yang menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel maupun mengakses internet persentasenya semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya distribusi pengeluaran rumah tangga.

Tabel 5.1 Persentase Anak Usia Dini yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Aceh	27,07	25,92	25,87	26,76	26,31
Sumatera Utara	20,75	20,73	20,60	20,88	20,74
Sumatera Barat	23,03	21,40	21,99	22,39	22,19
Riau	20,02	22,13	20,26	22,38	21,29
Jambi	25,42	26,95	27,50	25,35	26,45
Sumatera Selatan	20,37	23,52	23,55	21,12	22,37
Bengkulu	23,30	20,86	21,22	22,09	21,65
Lampung	26,32	22,92	23,76	24,30	24,03
Kep. Bangka Belitung	25,80	24,43	26,01	24,35	25,21
Kepulauan Riau	19,80	28,84	18,14	23,30	20,66
DKI Jakarta	28,74	–	27,93	29,58	28,74
Jawa Barat	24,60	24,57	24,88	24,30	24,60
Jawa Tengah	36,04	33,64	34,40	35,43	34,91
DI Yogyakarta	40,90	53,21	45,55	41,90	43,80
Jawa Timur	39,34	35,67	37,69	37,84	37,76
Banten	24,46	17,84	22,10	23,73	22,90
Bali	23,71	17,68	21,51	22,73	22,12
Nusa Tenggara Barat	28,87	30,71	29,68	29,87	29,77
Nusa Tenggara Timur	24,61	27,24	26,53	26,74	26,63
Kalimantan Barat	15,98	17,56	18,13	15,84	17,00
Kalimantan Tengah	25,66	28,86	28,88	26,04	27,51
Kalimantan Selatan	30,45	33,24	31,04	32,72	31,87
Kalimantan Timur	20,41	24,88	20,64	23,04	21,82
Kalimantan Utara	21,37	24,30	22,17	22,64	22,41
Sulawesi Utara	22,94	28,33	25,71	25,32	25,52
Sulawesi Tengah	26,30	30,49	30,82	27,42	29,17
Sulawesi Selatan	23,14	23,77	23,75	23,19	23,48
Sulawesi Tenggara	25,75	26,41	25,83	26,51	26,17
Gorontalo	33,24	38,65	35,88	36,86	36,36
Sulawesi Barat	35,20	31,30	32,22	31,95	32,09
Maluku	20,56	27,76	24,44	25,39	24,90
Maluku Utara	23,33	30,36	27,67	29,26	28,47
Papua Barat	22,61	22,47	21,63	23,44	22,52
Papua	17,00	10,62	12,77	12,76	12,76
Indonesia	27,67	26,99	27,30	27,46	27,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.2 Angka Kesiapan Sekolah menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	81,37	73,38	75,68	76,47	76,08
Sumatera Utara	71,45	62,68	67,14	66,88	67,01
Sumatera Barat	75,71	77,47	77,56	75,41	76,59
Riau	73,09	77,71	74,90	76,77	75,79
Jambi	70,56	70,79	68,95	72,67	70,71
Sumatera Selatan	63,67	64,41	65,16	63,05	64,12
Bengkulu	83,00	74,41	78,60	76,86	77,72
Lampung	85,20	84,94	84,87	85,18	85,03
Kep. Bangka Belitung	82,32	88,85	84,02	87,18	85,45
Kepulauan Riau	85,43	63,17	81,52	83,38	82,57
DKI Jakarta	83,93	-	80,92	86,97	83,93
Jawa Barat	76,56	67,79	74,29	75,38	74,84
Jawa Tengah	89,52	90,70	89,70	90,43	90,08
DI Yogyakarta	100,0	99,28	99,66	100,0	99,82
Jawa Timur	92,23	90,80	91,57	91,65	91,61
Banten	70,49	44,74	67,24	61,02	64,52
Bali	86,01	70,72	77,70	85,67	82,12
Nusa Tenggara Barat	72,62	63,80	68,55	67,21	67,88
Nusa Tenggara Timur	55,09	54,43	51,16	58,10	54,59
Kalimantan Barat	39,90	36,73	32,81	42,63	37,87
Kalimantan Tengah	84,70	77,84	72,98	89,64	80,79
Kalimantan Selatan	92,19	90,16	90,36	91,89	91,10
Kalimantan Timur	78,13	85,08	85,16	73,95	80,42
Kalimantan Utara	82,46	64,99	75,95	74,46	75,30
Sulawesi Utara	83,79	78,21	80,55	82,22	81,35
Sulawesi Tengah	73,47	81,43	77,45	80,61	78,93
Sulawesi Selatan	68,54	67,24	64,80	71,64	67,80
Sulawesi Tenggara	83,15	75,67	79,81	76,81	78,47
Gorontalo	91,18	91,16	95,57	86,92	91,17
Sulawesi Barat	74,65	67,05	74,65	62,50	68,51
Maluku	57,76	54,04	58,45	51,39	55,36
Maluku Utara	48,84	51,14	55,00	47,18	50,63
Papua Barat	66,46	42,31	50,38	51,12	50,72
Papua	56,08	26,84	33,46	39,77	36,42
Indonesia	79,28	72,99	75,99	77,12	76,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.3 Persentase Anak Usia Dini yang Menonton TV menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	68,40	61,43	63,22	64,17	63,69
Sumatera Utara	67,84	65,05	64,24	68,96	66,51
Sumatera Barat	63,73	65,40	64,59	64,64	64,61
Riau	68,97	65,93	70,17	63,79	67,12
Jambi	72,95	67,94	67,80	71,33	69,54
Sumatera Selatan	68,18	68,59	68,98	67,88	68,45
Bengkulu	69,01	71,66	72,58	68,95	70,76
Lampung	75,41	70,70	71,02	73,38	72,19
Kep. Bangka Belitung	64,66	70,67	71,82	62,95	67,35
Kepulauan Riau	70,20	71,92	70,40	70,18	70,29
DKI Jakarta	74,93	–	75,77	74,10	74,93
Jawa Barat	69,33	71,27	68,82	70,78	69,75
Jawa Tengah	70,77	74,64	72,60	72,80	72,70
DI Yogyakarta	83,63	75,09	83,33	79,53	81,52
Jawa Timur	72,87	70,56	71,62	72,06	71,84
Banten	73,06	71,84	73,03	72,38	72,71
Bali	71,51	68,42	74,41	66,83	70,67
Nusa Tenggara Barat	64,85	64,47	61,92	67,40	64,66
Nusa Tenggara Timur	53,09	38,20	43,61	39,67	41,65
Kalimantan Barat	70,54	62,63	64,94	66,09	65,50
Kalimantan Tengah	72,30	63,74	68,77	65,50	67,20
Kalimantan Selatan	71,64	71,80	72,55	70,87	71,72
Kalimantan Timur	75,65	63,98	71,04	72,70	71,86
Kalimantan Utara	54,57	49,77	49,86	55,90	52,81
Sulawesi Utara	62,79	61,50	63,13	61,23	62,21
Sulawesi Tengah	46,86	63,69	61,85	55,53	58,72
Sulawesi Selatan	69,98	60,83	62,46	67,52	64,98
Sulawesi Tenggara	56,54	61,84	56,90	63,00	59,95
Gorontalo	68,81	64,88	65,57	67,65	66,56
Sulawesi Barat	64,81	66,97	68,04	64,99	66,56
Maluku	49,57	43,18	47,25	44,41	45,81
Maluku Utara	54,76	54,96	51,84	58,05	54,91
Papua Barat	44,78	27,35	38,56	30,33	34,45
Papua	64,12	17,97	31,92	31,40	31,66
Indonesia	70,02	65,47	67,83	68,20	68,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 5.4 Persentase Anak Usia Dini yang Membaca menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,92	8,11	8,05	8,05	8,05
Sumatera Utara	12,76	7,14	9,40	10,83	10,09
Sumatera Barat	10,56	7,74	10,00	8,10	9,07
Riau	9,53	7,76	7,11	9,91	8,45
Jambi	11,32	9,14	9,29	10,40	9,84
Sumatera Selatan	12,73	7,80	8,34	10,85	9,55
Bengkulu	10,78	8,80	8,98	9,96	9,47
Lampung	9,10	7,52	6,97	9,10	8,02
Kep. Bangka Belitung	9,56	11,52	8,98	11,87	10,44
Kepulauan Riau	14,41	15,26	14,73	14,17	14,46
DKI Jakarta	7,18	0,00	8,33	6,03	7,18
Jawa Barat	10,14	8,96	8,96	10,91	9,89
Jawa Tengah	10,78	9,39	9,59	10,60	10,09
DI Yogyakarta	14,88	12,90	15,35	13,32	14,39
Jawa Timur	7,68	9,05	7,56	9,06	8,30
Banten	9,07	7,22	9,38	7,66	8,53
Bali	8,26	7,55	7,30	8,86	8,07
Nusa Tenggara Barat	9,97	6,82	8,18	8,60	8,39
Nusa Tenggara Timur	8,77	4,86	5,18	6,35	5,77
Kalimantan Barat	12,05	8,16	10,50	8,61	9,57
Kalimantan Tengah	8,25	6,84	6,94	7,92	7,41
Kalimantan Selatan	9,95	8,59	7,70	10,84	9,25
Kalimantan Timur	12,58	10,13	11,83	11,74	11,79
Kalimantan Utara	9,60	3,33	6,88	7,74	7,30
Sulawesi Utara	9,00	7,74	8,73	8,11	8,43
Sulawesi Tengah	1,75	6,61	5,44	4,90	5,17
Sulawesi Selatan	7,78	8,14	6,28	9,68	7,98
Sulawesi Tenggara	9,00	8,37	8,68	8,51	8,59
Gorontalo	5,15	3,97	4,56	4,38	4,48
Sulawesi Barat	NA	6,39	4,94	6,28	5,59
Maluku	10,87	8,84	8,23	11,09	9,67
Maluku Utara	14,05	8,53	9,62	10,44	10,03
Papua Barat	5,33	4,38	4,84	4,69	4,77
Papua	4,54	3,18	3,06	4,09	3,58
Indonesia	9,74	8,04	8,51	9,49	8,99

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 5.5 Persentase Anak Usia Dini yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	40,39	31,72	34,56	34,79	34,67
Sumatera Utara	48,31	39,86	44,89	43,79	44,35
Sumatera Barat	44,50	44,73	44,04	45,23	44,62
Riau	46,68	40,79	44,93	41,22	43,13
Jambi	44,36	38,13	40,28	40,06	40,17
Sumatera Selatan	50,28	36,59	40,83	42,38	41,58
Bengkulu	50,89	32,86	38,51	38,83	38,67
Lampung	49,90	45,88	45,87	48,55	47,20
Kep. Bangka Belitung	54,14	46,73	51,50	50,27	50,91
Kepulauan Riau	61,79	32,89	59,52	58,53	59,04
DKI Jakarta	37,27	–	36,29	38,28	37,27
Jawa Barat	35,98	31,63	36,40	33,78	35,12
Jawa Tengah	43,82	43,41	43,44	43,82	43,63
DI Yogyakarta	40,60	45,93	40,91	42,89	41,86
Jawa Timur	40,50	38,60	39,81	39,56	39,69
Banten	28,68	26,13	27,56	28,61	28,08
Bali	38,86	34,04	37,34	37,83	37,59
Nusa Tenggara Barat	60,06	52,25	55,74	56,71	56,21
Nusa Tenggara Timur	47,92	34,36	38,12	36,87	37,51
Kalimantan Barat	38,44	27,77	30,76	32,40	31,57
Kalimantan Tengah	35,90	28,52	31,39	31,91	31,64
Kalimantan Selatan	43,57	44,44	42,62	45,44	44,01
Kalimantan Timur	36,08	30,18	32,99	35,46	34,21
Kalimantan Utara	40,19	28,61	36,40	35,76	36,08
Sulawesi Utara	37,36	33,61	36,52	34,56	35,56
Sulawesi Tengah	40,20	28,97	33,20	31,81	32,52
Sulawesi Selatan	41,07	38,08	39,15	39,81	39,47
Sulawesi Tenggara	32,87	35,41	34,38	34,57	34,47
Gorontalo	50,44	47,44	48,91	48,50	48,71
Sulawesi Barat	48,38	34,78	37,61	37,42	37,52
Maluku	46,40	25,88	34,49	33,55	34,03
Maluku Utara	31,27	19,80	20,98	24,80	22,89
Papua Barat	16,49	23,22	20,41	20,79	20,60
Papua	23,51	6,68	11,94	12,78	12,35
Indonesia	40,38	36,98	39,02	38,82	38,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.6 Persentase Anak Usia Dini yang Mengakses Internet menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	30,65	17,82	22,48	21,91	22,20
Sumatera Utara	32,94	30,24	33,42	29,87	31,67
Sumatera Barat	33,03	28,64	33,19	28,24	30,77
Riau	35,49	31,36	34,45	31,47	33,00
Jambi	37,55	33,39	33,96	35,59	34,75
Sumatera Selatan	42,03	27,56	32,26	33,45	32,84
Bengkulu	45,86	25,41	31,33	32,67	31,99
Lampung	41,02	39,14	39,84	39,67	39,76
Kep. Bangka Belitung	43,84	35,41	41,28	38,97	40,16
Kepulauan Riau	53,77	26,33	56,05	46,02	51,15
DKI Jakarta	29,83	-	30,69	28,95	29,83
Jawa Barat	31,99	26,03	31,77	29,82	30,82
Jawa Tengah	42,28	42,39	42,16	42,51	42,33
DI Yogyakarta	43,87	47,81	42,44	47,37	44,80
Jawa Timur	36,79	30,85	34,77	33,68	34,24
Banten	21,19	19,42	20,57	20,97	20,77
Bali	35,84	23,80	31,69	33,61	32,65
Nusa Tenggara Barat	50,10	38,71	44,23	44,76	44,49
Nusa Tenggara Timur	35,12	14,92	19,67	19,54	19,61
Kalimantan Barat	36,78	23,67	27,95	28,73	28,34
Kalimantan Tengah	34,67	25,41	29,73	28,89	29,33
Kalimantan Selatan	37,46	38,49	38,34	37,62	37,99
Kalimantan Timur	34,83	26,99	32,71	31,99	32,35
Kalimantan Utara	38,38	28,27	32,95	36,59	34,79
Sulawesi Utara	26,71	22,93	25,50	24,27	24,90
Sulawesi Tengah	35,79	16,95	22,30	23,55	22,91
Sulawesi Selatan	32,81	27,89	29,42	30,97	30,18
Sulawesi Tenggara	28,32	22,25	24,36	24,64	24,50
Gorontalo	41,32	31,80	34,19	37,46	35,82
Sulawesi Barat	36,23	22,87	25,19	25,94	25,56
Maluku	35,89	10,89	19,73	21,96	20,82
Maluku Utara	24,29	10,00	11,05	16,65	13,85
Papua Barat	16,16	14,35	16,10	13,97	15,05
Papua	17,83	3,87	8,51	8,62	8,57
Indonesia	34,63	28,87	32,54	31,77	32,17

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.7 *Sampling Error* Angka Kesiapan Sekolah menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	81,37	74,99	87,74	4,00	73,38	68,96	77,80	3,07	76,08	72,44	79,71	2,44
Sumatera Utara	71,45	66,39	76,50	3,61	62,68	58,41	66,94	3,47	67,01	63,68	70,33	2,53
Sumatera Barat	75,71	68,36	83,07	4,96	77,47	73,03	81,90	2,92	76,59	72,31	80,88	2,85
Riau	73,09	66,57	79,61	4,55	77,71	72,52	82,91	3,41	75,79	71,73	79,86	2,74
Jambi	70,56	61,27	79,86	6,72	70,79	64,50	77,07	4,53	70,71	65,51	75,92	3,76
Sumatera Selatan	63,67	54,95	72,39	6,99	64,41	59,17	69,64	4,15	64,12	59,43	68,80	3,73
Bengkulu	83,00	74,82	91,18	5,03	74,41	67,50	81,33	4,74	77,72	72,33	83,11	3,54
Lampung	85,20	79,00	91,40	3,71	84,94	81,52	88,36	2,05	85,03	81,96	88,09	1,84
Kep. Bangka Belitung	82,32	71,69	92,95	6,59	88,85	83,28	94,41	3,19	85,45	79,21	91,70	3,73
Kepulauan Riau	85,43	76,90	93,95	5,09	63,17	32,02	94,33	25,16	82,57	73,82	91,32	5,41
DKI Jakarta	83,93	78,63	89,24	3,22	-	-	-	-	83,93	78,63	89,24	3,22
Jawa Barat	76,56	72,95	80,18	2,41	67,79	62,91	72,67	3,67	74,84	71,78	77,90	2,08
Jawa Tengah	89,52	86,69	92,34	1,61	90,70	88,09	93,30	1,47	90,08	88,14	92,01	1,09
DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	0,00	99,28	97,85	100,71	0,73	99,82	99,48	100,17	0,18
Jawa Timur	92,23	90,06	94,41	1,20	90,80	88,34	93,27	1,38	91,61	89,98	93,24	0,91
Banten	70,49	63,66	77,33	4,95	44,74	36,09	53,40	9,87	64,52	58,80	70,24	4,52
Bali	86,01	80,02	92,00	3,55	70,72	58,96	82,48	8,49	82,12	76,57	87,67	3,45
Nusa Tenggara Barat	72,62	64,72	80,53	5,56	63,80	57,38	70,22	5,13	67,88	62,81	72,94	3,81
Nusa Tenggara Timur	55,09	47,26	62,92	7,25	54,43	50,31	58,55	3,86	54,59	50,94	58,24	3,41
Kalimantan Barat	39,90	30,50	49,29	12,02	36,73	31,35	42,11	7,48	37,87	33,04	42,69	6,50
Kalimantan Tengah	84,70	76,77	92,64	4,78	77,84	71,60	84,07	4,09	80,79	75,83	85,75	3,13
Kalimantan Selatan	92,19	87,48	96,90	2,61	90,16	86,30	94,02	2,19	91,10	88,09	94,12	1,69
Kalimantan Timur	78,13	71,11	85,15	4,58	85,08	76,77	93,39	4,98	80,42	75,00	85,84	3,44
Kalimantan Utara	82,46	72,42	92,49	6,21	64,99	50,67	79,31	11,24	75,30	66,77	83,82	5,78
Sulawesi Utara	83,79	76,59	90,99	4,38	78,21	71,81	84,61	4,17	81,35	76,43	86,26	3,08
Sulawesi Tengah	73,47	57,62	89,33	11,01	81,43	76,51	86,34	3,08	78,93	72,78	85,08	3,98
Sulawesi Selatan	68,54	61,26	75,81	5,41	67,24	62,34	72,14	3,72	67,80	63,60	72,00	3,16
Sulawesi Tenggara	83,15	76,17	90,14	4,29	75,67	70,26	81,07	3,65	78,47	74,14	82,79	2,81
Gorontalo	91,18	82,98	99,39	4,59	91,16	86,15	96,17	2,81	91,17	86,70	95,63	2,50
Sulawesi Barat	74,65	60,96	88,33	9,35	67,05	58,95	75,15	6,16	68,51	61,45	75,58	5,26
Maluku	57,76	45,75	69,76	10,61	54,04	45,09	63,00	8,45	55,36	48,12	62,59	6,67
Maluku Utara	48,84	34,21	63,47	15,28	51,14	44,93	57,36	6,20	50,63	44,79	56,47	5,89
Papua Barat	66,46	54,81	78,12	8,95	42,31	37,28	47,34	6,06	50,72	45,37	56,08	5,39
Papua	56,08	46,84	65,32	8,41	26,84	22,27	31,41	8,68	36,42	31,82	41,03	6,45
Indonesia	79,28	77,93	80,62	0,87	72,99	71,95	74,04	0,73	76,54	75,66	77,43	0,59

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Tabel 5.8 *Sampling Error* Persentase Anak Usia Dini yang Membaca menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2021

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error
		Kepercayaan				Kepercayaan				Kepercayaan		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	7,92	5,18	10,66	17,64	8,11	6,03	10,20	13,09	8,05	6,33	9,77	10,88
Sumatera Utara	12,76	9,92	15,59	11,34	7,14	5,37	8,91	12,66	10,09	8,28	11,90	9,15
Sumatera Barat	10,56	7,85	13,26	13,07	7,74	5,37	10,10	15,60	9,07	7,13	11,01	10,92
Riau	9,53	5,67	13,39	20,65	7,76	5,46	10,06	15,14	8,45	6,47	10,43	11,96
Jambi	11,32	7,29	15,36	18,15	9,14	6,57	11,70	14,33	9,84	7,64	12,03	11,39
Sumatera Selatan	12,73	8,68	16,78	16,22	7,80	5,64	9,96	14,10	9,55	7,62	11,49	10,33
Bengkulu	10,78	6,32	15,24	21,10	8,80	5,28	12,32	20,39	9,47	6,70	12,25	14,95
Lampung	9,10	4,03	14,17	28,42	7,52	5,40	9,65	14,40	8,02	5,82	10,23	14,01
Kep. Bangka Belitung	9,56	5,12	13,99	23,68	11,52	6,61	16,43	21,73	10,44	7,08	13,79	16,41
Kepulauan Riau	14,41	9,39	19,43	17,77	15,26	2,90	27,62	41,33	14,46	9,34	19,57	18,05
DKI Jakarta	7,18	4,49	9,86	19,07	-	-	-	-	7,18	4,39	9,96	19,78
Jawa Barat	10,14	8,51	11,78	8,21	8,96	6,62	11,31	13,35	9,89	8,51	11,27	7,13
Jawa Tengah	10,78	8,73	12,83	9,70	9,39	7,55	11,23	10,00	10,09	8,73	11,44	6,86
DI Yogyakarta	14,88	9,73	20,03	17,66	12,90	6,41	19,38	25,66	14,39	9,77	19,01	16,38
Jawa Timur	7,68	5,99	9,37	11,22	9,05	7,28	10,82	9,98	8,30	7,08	9,51	7,49
Banten	9,07	6,55	11,58	14,14	7,22	3,55	10,88	25,90	8,53	6,46	10,60	12,37
Bali	8,26	5,28	11,24	18,39	7,55	3,72	11,37	25,85	8,07	5,68	10,46	15,10
Nusa Tenggara Barat	9,97	4,48	15,45	28,06	6,82	4,47	9,18	17,62	8,39	5,42	11,36	18,06
Nusa Tenggara Timur	8,77	4,24	13,30	26,33	4,86	3,50	6,22	14,30	5,77	4,38	7,15	12,23
Kalimantan Barat	12,05	8,72	15,39	14,10	8,16	5,92	10,40	13,98	9,57	7,47	11,68	11,21
Kalimantan Tengah	8,25	3,39	13,11	30,03	6,84	4,58	9,10	16,83	7,41	5,00	9,82	16,57
Kalimantan Selatan	9,95	6,88	13,02	15,75	8,59	5,69	11,49	17,24	9,25	7,11	11,40	11,83
Kalimantan Timur	12,58	8,57	16,59	16,26	10,13	4,63	15,63	27,72	11,79	8,73	14,84	13,22
Kalimantan Utara	9,60	3,75	15,45	31,10	3,33	0,13	6,54	49,07	7,30	3,43	11,17	27,07
Sulawesi Utara	9,00	4,78	13,21	23,89	7,74	5,05	10,42	17,68	8,43	5,87	11,00	15,52
Sulawesi Tengah	1,75	0,19	3,30	45,56	6,61	4,37	8,85	17,29	5,17	3,44	6,91	17,12
Sulawesi Selatan	7,78	4,65	10,91	20,53	8,14	5,97	10,31	13,58	7,98	6,12	9,83	11,87
Sulawesi Tenggara	9,00	6,26	11,75	15,55	8,37	5,99	10,74	14,48	8,59	6,71	10,48	11,18
Gorontalo	5,15	1,55	8,76	35,68	3,97	0,61	7,33	43,19	4,48	2,02	6,93	27,94
Sulawesi Barat	NA	NA	NA	63,24	6,39	3,99	8,79	19,16	5,59	3,48	7,69	19,20
Maluku	10,87	7,63	14,10	15,20	8,84	5,71	11,96	18,02	9,67	7,14	12,21	13,38
Maluku Utara	14,05	9,47	18,62	16,62	8,53	5,54	11,51	17,86	10,03	7,35	12,70	13,63
Papua Barat	5,33	1,59	9,07	35,78	4,38	0,98	7,78	39,65	4,77	2,41	7,13	25,24
Papua	4,54	2,33	6,75	24,81	3,18	1,25	5,12	31,04	3,58	1,97	5,20	23,03
Indonesia	9,74	9,08	10,41	3,49	8,04	7,52	8,56	3,32	8,99	8,55	9,43	2,49

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah (■) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 5.9

Sampling Error Persentase Anak Usia Dini yang Membaca menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	8,05	5,86	10,23	13,84	8,05	5,55	10,56	15,87	8,05	6,33	9,77	10,88
Sumatera Utara	9,40	7,00	11,79	13,00	10,83	7,89	13,76	13,83	10,09	8,28	11,90	9,15
Sumatera Barat	10,00	7,05	12,94	15,02	8,10	5,70	10,49	15,08	9,07	7,13	11,01	10,92
Riau	7,11	4,72	9,51	17,17	9,91	6,93	12,90	15,37	8,45	6,47	10,43	11,96
Jambi	9,29	6,16	12,42	17,19	10,40	7,33	13,47	15,07	9,84	7,64	12,03	11,39
Sumatera Selatan	8,34	5,70	10,97	16,12	10,85	7,96	13,74	13,58	9,55	7,62	11,49	10,33
Bengkulu	8,98	5,36	12,61	20,59	9,96	6,00	13,93	20,29	9,47	6,70	12,25	14,95
Lampung	6,97	4,33	9,62	19,35	9,10	6,03	12,17	17,21	8,02	5,82	10,23	14,01
Kep. Bangka Belitung	8,98	4,63	13,33	24,73	11,87	6,34	17,40	23,77	10,44	7,08	13,79	16,41
Kepulauan Riau	14,73	6,83	22,63	27,35	14,17	7,14	21,21	25,32	14,46	9,34	19,57	18,05
DKI Jakarta	8,33	4,32	12,33	24,53	6,03	2,04	10,03	33,79	7,18	4,39	9,96	19,78
Jawa Barat	8,96	7,24	10,67	9,77	10,91	8,77	13,05	10,01	9,89	8,51	11,27	7,13
Jawa Tengah	9,59	7,70	11,48	10,07	10,60	8,66	12,53	9,32	10,09	8,73	11,44	6,86
DI Yogyakarta	15,35	8,21	22,50	23,73	13,32	7,83	18,82	21,04	14,39	9,77	19,01	16,38
Jawa Timur	7,56	5,87	9,24	11,38	9,06	7,27	10,85	10,07	8,30	7,08	9,51	7,49
Banten	9,38	6,46	12,30	15,87	7,66	4,77	10,55	19,22	8,53	6,46	10,60	12,37
Bali	7,30	4,03	10,56	22,82	8,86	5,02	12,70	22,12	8,07	5,68	10,46	15,10
Nusa Tenggara Barat	8,18	4,46	11,90	23,20	8,60	4,94	12,27	21,73	8,39	5,42	11,36	18,06
Nusa Tenggara Timur	5,18	3,53	6,83	16,22	6,35	4,25	8,46	16,87	5,77	4,38	7,15	12,23
Kalimantan Barat	10,50	7,97	13,02	12,29	8,61	5,82	11,39	16,52	9,57	7,47	11,68	11,21
Kalimantan Tengah	6,94	3,85	10,03	22,70	7,92	5,08	10,75	18,28	7,41	5,00	9,82	16,57
Kalimantan Selatan	7,70	4,58	10,83	20,70	10,84	7,45	14,23	15,95	9,25	7,11	11,40	11,83
Kalimantan Timur	11,83	7,73	15,93	17,67	11,74	7,47	16,01	18,56	11,79	8,73	14,84	13,22
Kalimantan Utara	6,88	1,35	12,42	41,03	7,74	1,42	14,06	41,65	7,30	3,43	11,17	27,07
Sulawesi Utara	8,73	5,06	12,40	21,43	8,11	5,11	11,11	18,88	8,43	5,87	11,00	15,52
Sulawesi Tengah	5,44	3,04	7,84	22,53	4,90	2,38	7,43	26,25	5,17	3,44	6,91	17,12
Sulawesi Selatan	6,28	4,30	8,27	16,09	9,68	6,65	12,72	15,98	7,98	6,12	9,83	11,87
Sulawesi Tenggara	8,68	6,26	11,11	14,26	8,51	5,83	11,18	16,04	8,59	6,71	10,48	11,18
Gorontalo	4,56	0,96	8,17	40,30	4,38	2,09	6,67	26,69	4,48	2,02	6,93	27,94
Sulawesi Barat	4,94	2,13	7,74	28,97	6,28	2,85	9,71	27,84	5,59	3,48	7,69	19,20
Maluku	8,23	4,83	11,63	21,06	11,09	7,43	14,74	16,81	9,67	7,14	12,21	13,38
Maluku Utara	9,62	6,04	13,19	18,95	10,44	6,59	14,30	18,81	10,03	7,35	12,70	13,63
Papua Barat	4,84	0,98	8,70	40,66	4,69	1,90	7,48	30,33	4,77	2,41	7,13	25,24
Papua	3,06	1,16	4,96	31,69	4,09	2,03	6,15	25,69	3,58	1,97	5,20	23,03
Indonesia	8,51	7,93	9,09	3,49	9,49	8,85	10,14	3,47	8,99	8,55	9,43	2,49

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 5.10 *Sampling Error* Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Mengakses Internet menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
		(2)	(3)			(4)	(5)			(6)	(7)	
Aceh	30,65	26,37	34,93	7,13	17,82	15,78	19,87	5,85	22,20	20,18	24,21	4,64
Sumatera Utara	32,94	29,07	36,81	6,00	30,24	27,61	32,86	4,43	31,67	29,28	34,06	3,85
Sumatera Barat	33,03	28,43	37,63	7,11	28,64	25,77	31,51	5,11	30,77	28,10	33,43	4,42
Riau	35,49	30,51	40,47	7,16	31,36	27,45	35,27	6,36	33,00	29,92	36,08	4,76
Jambi	37,55	30,23	44,87	9,95	33,39	29,72	37,06	5,61	34,75	31,31	38,20	5,06
Sumatera Selatan	42,03	36,66	47,40	6,52	27,56	24,87	30,25	4,97	32,84	30,25	35,42	4,01
Bengkulu	45,86	38,75	52,97	7,91	25,41	21,69	29,13	7,47	31,99	28,52	35,47	5,54
Lampung	41,02	35,02	47,02	7,46	39,14	36,06	42,22	4,02	39,76	36,90	42,61	3,67
Kep. Bangka Belitung	43,84	36,52	51,16	8,52	35,41	29,66	41,17	8,29	40,16	35,28	45,04	6,20
Kepulauan Riau	53,77	45,94	61,60	7,43	26,33	12,86	39,79	26,10	51,15	43,85	58,45	7,28
DKI Jakarta	29,83	25,93	33,73	6,67	-	-	-	-	29,83	25,93	33,73	6,67
Jawa Barat	31,99	29,71	34,28	3,65	26,03	23,14	28,92	5,67	30,82	28,89	32,75	3,19
Jawa Tengah	42,28	39,94	44,62	2,82	42,39	40,07	44,71	2,79	42,33	40,68	43,98	1,99
DI Yogyakarta	43,87	37,35	50,38	7,58	47,81	39,56	56,06	8,80	44,80	39,44	50,15	6,10
Jawa Timur	36,79	34,34	39,24	3,39	30,85	28,68	33,01	3,58	34,24	32,56	35,91	2,50
Banten	21,19	17,42	24,95	9,07	19,42	15,27	23,57	10,91	20,77	17,73	23,81	7,47
Bali	35,84	31,42	40,25	6,28	23,80	18,60	29,01	11,16	32,65	29,12	36,19	5,53
Nusa Tenggara Barat	50,10	45,71	54,49	4,47	38,71	34,61	42,82	5,41	44,49	41,45	47,53	3,48
Nusa Tenggara Timur	35,12	27,96	42,27	10,40	14,92	12,93	16,90	6,78	19,61	17,32	21,89	5,95
Kalimantan Barat	36,78	30,88	42,67	8,18	23,67	20,64	26,69	6,52	28,34	25,43	31,25	5,24
Kalimantan Tengah	34,67	29,16	40,17	8,10	25,41	21,72	29,10	7,41	29,33	26,16	32,49	5,51
Kalimantan Selatan	37,46	32,74	42,19	6,44	38,49	34,52	42,45	5,26	37,99	34,91	41,06	4,13
Kalimantan Timur	34,83	29,86	39,80	7,28	26,99	21,03	32,95	11,27	32,35	28,49	36,21	6,09
Kalimantan Utara	38,38	29,72	47,05	11,52	28,27	20,05	36,49	14,83	34,79	28,47	41,12	9,28
Sulawesi Utara	26,71	21,84	31,59	9,31	22,93	19,04	26,81	8,65	24,90	21,76	28,04	6,44
Sulawesi Tengah	35,79	29,36	42,23	9,17	16,95	13,95	19,95	9,02	22,91	19,94	25,89	6,62
Sulawesi Selatan	32,81	28,61	37,00	6,53	27,89	25,04	30,74	5,21	30,18	27,70	32,66	4,19
Sulawesi Tenggara	28,32	22,07	34,58	11,27	22,25	19,46	25,05	6,41	24,50	21,57	27,43	6,10
Gorontalo	41,32	33,39	49,25	9,79	31,80	25,87	37,72	9,51	35,82	31,01	40,63	6,85
Sulawesi Barat	36,23	26,84	45,61	13,22	22,87	18,54	27,19	9,65	25,56	21,58	29,54	7,94
Maluku	35,89	29,23	42,55	9,47	10,89	7,65	14,12	15,16	20,82	17,38	24,26	8,43
Maluku Utara	24,29	17,58	31,00	14,09	10,00	7,15	12,84	14,53	13,85	11,04	16,66	10,35
Papua Barat	16,16	11,30	21,02	15,33	14,35	10,72	17,98	12,90	15,05	12,16	17,95	9,80
Papua	17,83	13,80	21,86	11,52	3,87	2,71	5,02	15,25	8,57	6,98	10,15	9,44
Indonesia	34,63	33,72	35,54	1,34	28,87	28,21	29,53	1,17	32,17	31,57	32,76	0,94

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret



BAB 6
PERLINDUNGAN
DAN
KESEJAHTERAAN

<https://www.ips.go.id>



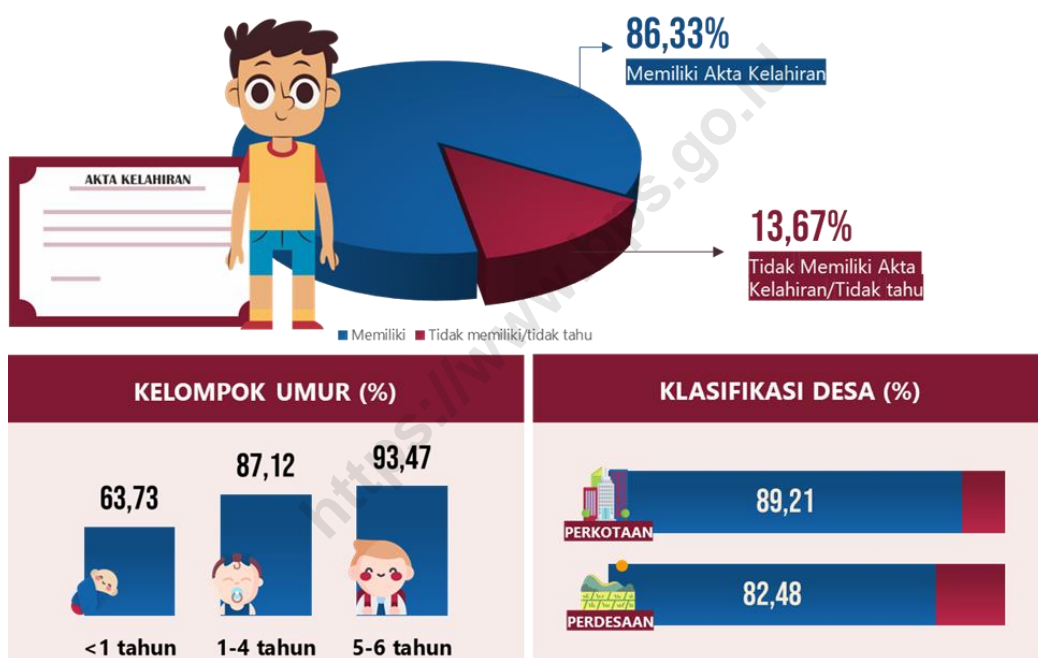
PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN

Rencana Aksi Nasional 2020-2024 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD HI) menegaskan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini sebagai salah satu fokus utama pengembangan anak usia dini. Anak usia dini sebagai investasi masa depan harus mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kesejahteraannya guna terpenuhi haknya, sehingga dapat mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 dan Generasi Emas Tahun 2045. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan beberapa bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak seperti kepemilikan akta kelahiran, upaya kesehatan yang komprehensif, dan perlindungan khusus anak.

6.1 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan hak sipil setiap anak sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Negara hadir memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak sipil dengan memberikan pelayanan pencatatan sipil termasuk di dalamnya pembuatan akta kelahiran secara gratis. Akta kelahiran menjadi dasar untuk mendapatkan pelayanan umum, sehingga anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan kesulitan untuk mengakses pelayanan umum (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Pemenuhan akta kelahiran bagi seluruh anak menjadi salah satu target pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pada tahun 2023, sebanyak 86,33 persen anak usia dini (0-6 tahun) di Indonesia telah memiliki akta kelahiran. Hal ini berarti minimal dalam satu tahun kedepan pemerintah harus bekerja lebih untuk dapat melakukan pemenuhan hak sipil bagi 13,67 persen anak usia dini yang belum terpenuhi hak sipilnya. Upaya tersebut demi terwujudnya target RPJMN akta kelahiran bagi seluruh anak Indonesia di tahun 2024.



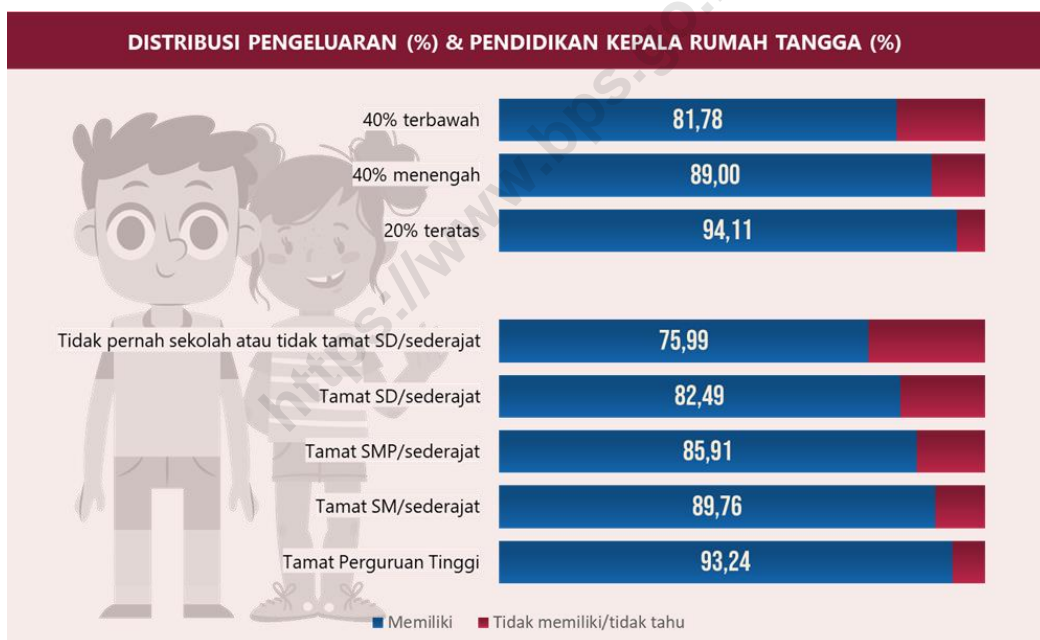
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.1 Persentase Anak Usia Dini yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Kelompok Umur dan Klasifikasi Desa, 2023

Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa seiring bertambahnya umur semakin besar persentase anak usia dini yang telah memiliki akta kelahiran. Namun, belum semua anak usia 5-6 tahun memiliki akta kelahiran. Dari seratus anak usia 5-6 tahun, terdapat sekitar 93 anak yang telah memiliki akta kelahiran, sisanya adalah anak yang belum mempunyai akta kelahiran. Pada rentang umur tersebut, anak sudah mulai memasuki bangku pendidikan prasekolah. Lebih lanjut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan menetapkan akta kelahiran sebagai bukti syarat usia pendaftaran sekolah.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran sangat berkaitan erat dengan bagaimana kemudahan akses masyarakat memperoleh pelayanan akta kelahiran. Klasifikasi desa dapat digunakan sebagai proksi untuk melihat karakteristik suatu wilayah terutama dari segi akses. Berdasarkan klasifikasi desa, persentase anak usia dini yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak yang memiliki akta kelahiran dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan (89,21 persen dibanding 82,48 persen).

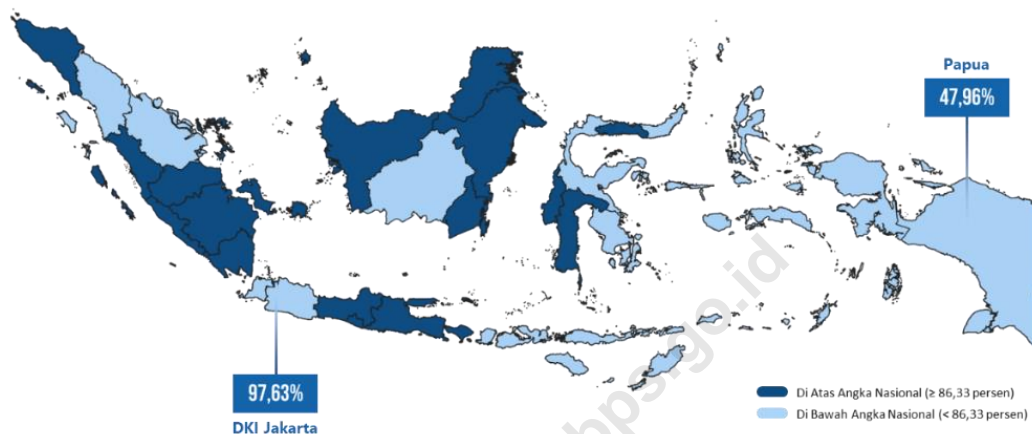


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.2 Persentase Anak Usia Dini yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Distribusi Pengeluaran dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga, 2023

Kesenjangan terhadap kepemilikan akta kelahiran terjadi pada kelompok rentan. Kepemilikan akta kelahiran pada anak usia dini di rumah tangga termiskin (40 persen terbawah) baru mencapai 81,78 persen pada tahun 2023. Sedangkan pada kelompok terkaya (20 persen teratas) cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia dini sudah mencapai 94,11 persen.

Pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran juga menjadi faktor penting apabila berbicara mengenai kepemilikan akta kelahiran. Hal tersebut tampak pada Gambar 6.2, dimana semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga semakin besar persentase anak usia dini yang memiliki akta kelahiran.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

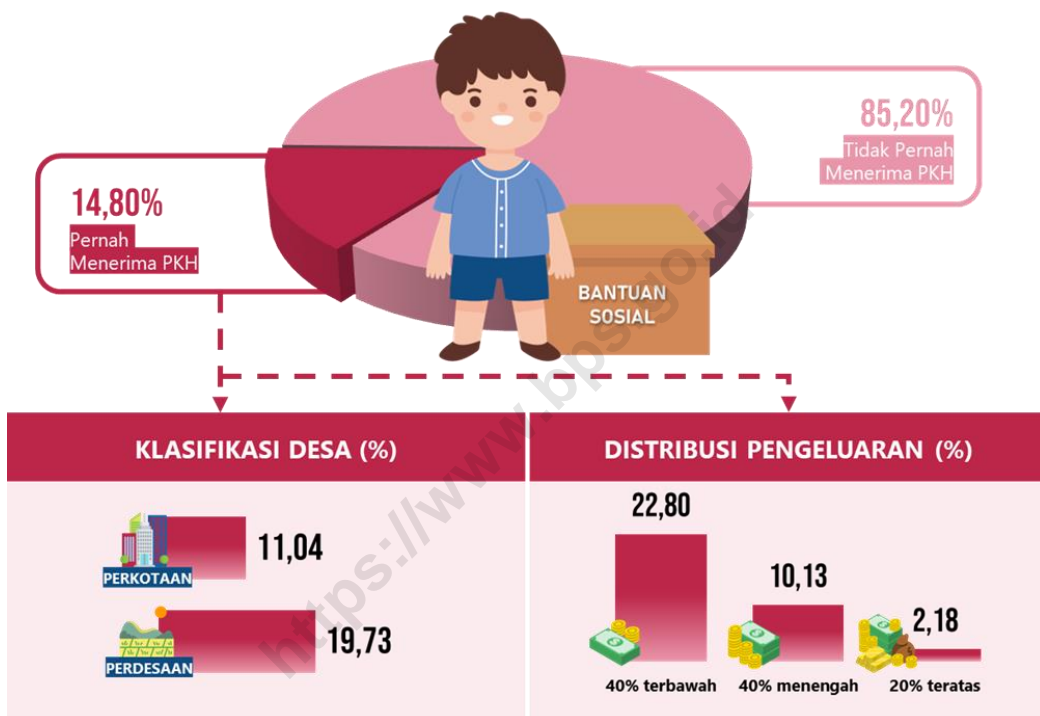
Gambar 6.3 Sebaran Persentase Anak Usia Dini yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Provinsi, 2023

Walaupun secara nasional persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia dini sudah lebih dari 85 persen, kesenjangan masih terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia. Provinsi dengan capaian terbaik adalah Provinsi DKI Jakarta, dimana 97,63 persen anak usia dini telah memiliki akta kelahiran. Kontras dengan wilayah Indonesia Timur terutama Provinsi Papua, dimana kurang dari setengah anak usia dini di Papua tidak memiliki akta kelahiran (47,96 persen). Selain itu, dua provinsi di Pulau Jawa yang memiliki capaian tidak lebih baik dari capaian nasional yaitu Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

6.2 Upaya Kesehatan Komprehensif

Anak usia dini berada di masa pertumbuhan yang memerlukan asupan nutrisi yang cukup. Mengingat hal tersebut, keberadaan anak usia dini dalam sebuah rumah tangga tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar guna memenuhi asupan nutrisi dan pemeriksaan rutin pada masa perkembangannya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Program Keluarga Harapan telah menetapkan anak usia 0-6 tahun sebagai sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam komponen kesehatan. Setiap tahun, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu keluarga miskin yang memiliki anak usia dini akan menerima 3 (tiga) juta rupiah dan pendampingan PKH untuk memastikan bahwa anak usia dini memiliki akses terhadap peningkatan dan pemeliharaan kesehatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

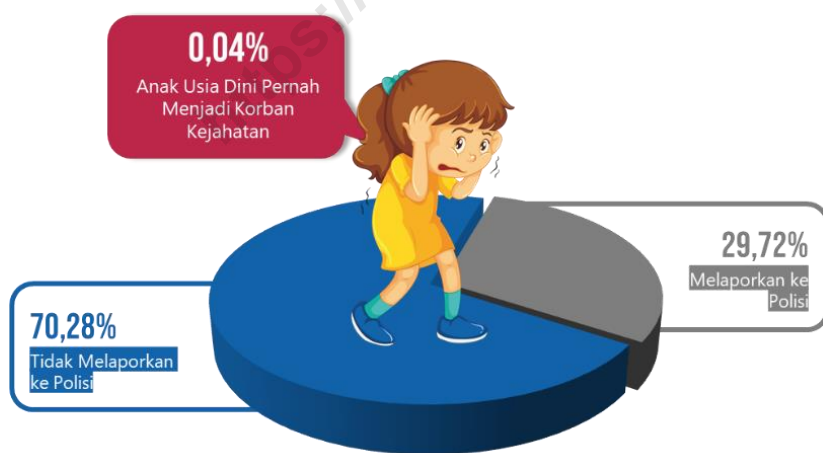
Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi Pengeluaran, 2023

Dalam setahun terakhir tercatat terdapat 14,80 persen rumah tangga dengan anak usia dini pernah menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Apabila dilihat lebih jauh menurut klasifikasi desa, persentase rumah tangga anak usia dini penerima PKH lebih banyak berada di perdesaan daripada di perkotaan. Di perdesaan, persentase rumah tangga anak usia dini yang pernah menerima PKH sebesar 19,73 persen. Sedangkan diantara rumah tangga anak usia dini di perkotaan, sebanyak 11,04 persen pernah menjadi penerima PKH dalam setahun terakhir. Menurut distribusi pengeluaran rumah tangga, sebanyak

22,80 persen rumah tangga termiskin (40 persen terbawah) yang memiliki anak usia dini pernah menjadi penerima PKH. Sementara itu, pada rumah tangga 20 persen teratas yang memiliki anak usia dini, sebanyak 2,18 persen rumah tangga pernah menerima program PKH. Keberadaan rumah tangga paling sejahtera (20 persen teratas) yang menerima PKH menjadi petunjuk adanya ketidaktepatsasaran dalam penyaluran PKH. Ketidaktepatan sasaran penerima program bantuan sudah sejak lama menjadi isu di Indonesia.

6.3 Perlindungan Khusus

Anak terutama anak usia dini, belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa sehingga termasuk dalam kelompok rentan dan memerlukan perlindungan. Terlebih lagi, tidak semua anak dilahirkan dalam kondisi lingkungan yang sama. Masih ada anak yang berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan sehingga perlu mendapat perhatian lebih dan perlindungan khusus.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

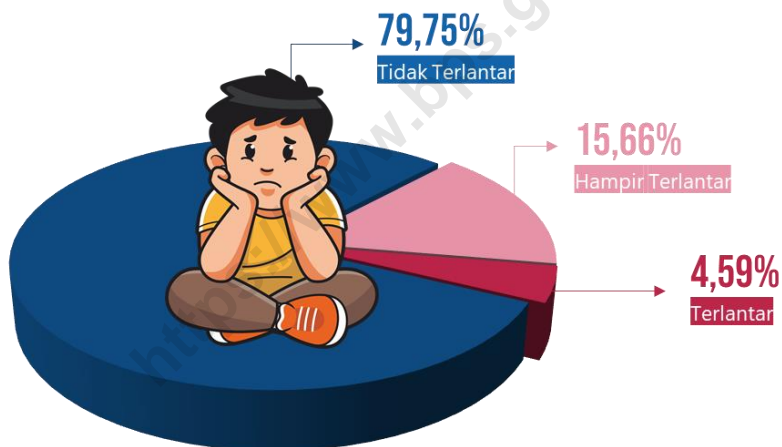
Gambar 6.5 Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Status Pelaporan ke Polisi, 2023

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh

kembangnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014). Perlindungan khusus pada anak usia dini diantaranya mencakup perlindungan anak dari tindak kekerasan/kejahatan, perlindungan anak korban penelantaran, dan perlindungan anak yang tereksplotasi secara ekonomi.

Hasil Susenas menunjukkan bahwa masih ada anak Indonesia yang memerlukan perlindungan khusus. Secara nasional, anak usia dini yang pernah menjadi korban kejahatan ada sebanyak 0,04 persen di tahun 2023 (Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

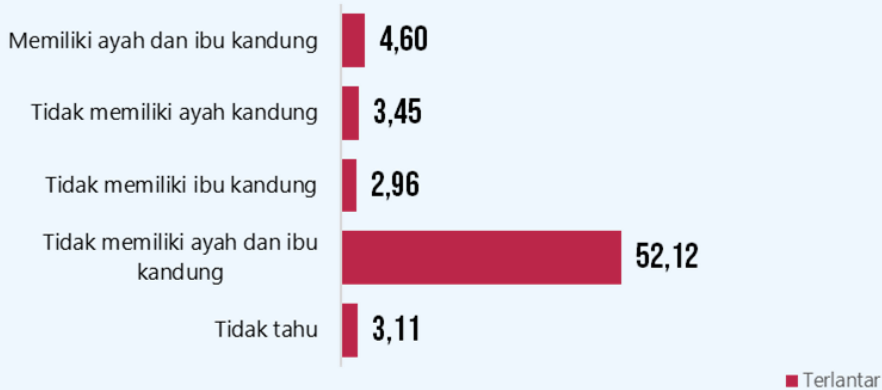
Gambar 6.5). Dari keseluruhan peristiwa kejahatan pada anak-anak tersebut, hanya sekitar 29,72 persen peristiwa yang dilaporkan ke polisi. Dalam hal ini, pelaporan kejadian kejahatan dapat dilakukan oleh orang tua, keluarga, tetangga, atau masyarakat umum.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021

Gambar 6.6 Persentase Balita Terlantar, 2021

Selain anak yang menjadi korban kejahatan, anak-anak di Indonesia juga masih ada yang terlantar. Hasil Susenas MSBP 2021 menunjukkan bahwa sekitar 4,59 persen balita berstatus terlantar. Mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

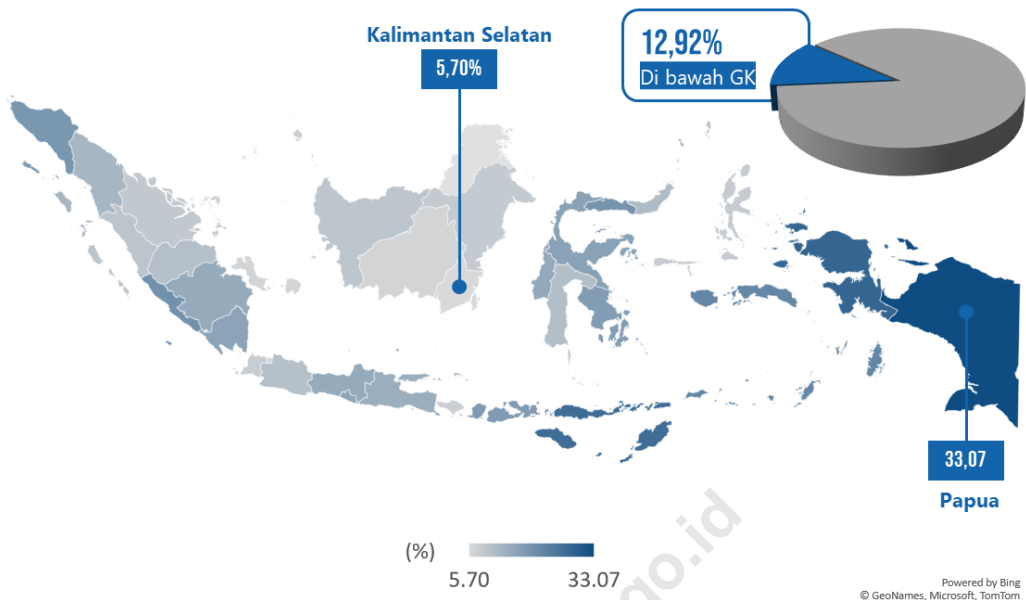


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021

Gambar 6.7 Persentase Balita Terlantar menurut Keberadaan Orangtua, 2021

Di antara balita yang tidak memiliki ayah dan ibu kandung sebanyak 52,12 persen diantaranya masuk kategori balita terlantar. Angka ini sangat besar jika dibandingkan balita yang memiliki minimal satu orang tua kandung. Hal lain yang menarik adalah keberadaan balita terlantar tidak hanya ditemui pada rumah tangga yang keberadaan orang tuanya tidak lengkap atau tidak memiliki ayah kandung dan ibu kandung, namun sebanyak 4,60 persen balita yang memiliki orang tua lengkap masuk dalam kategori terlantar.

Anak usia dini merupakan kelompok rentan, apalagi anak usia dini yang tinggal pada rumah tangga miskin. Mereka mengalami kerentanan ganda yang dapat membatasi balita dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi. Anak-anak akan terhambat pertumbuhannya apabila lahir di lingkungan yang kumuh (miskin) (Adioetomo, Kusumaryani, dan Kiting 2018, 89), Oleh karena itu, anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan penting untuk mendapatkan perlindungan khusus.

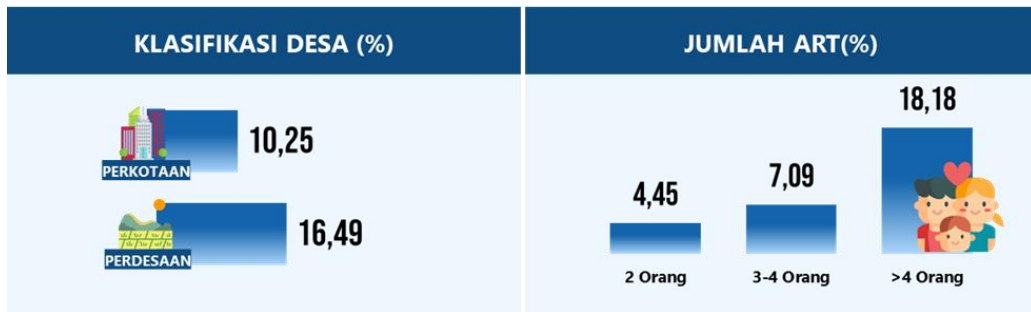


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.8 Persentase Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan menurut Provinsi, 2023

Secara nasional, sebanyak 12,92 persen anak usia dini di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Persebaran anak usia dini yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut provinsi tahun 2023 terlihat pada Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.8. Semakin gelap warna biru semakin besar persentase anak usia dini yang hidup di bawah garis kemiskinan. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan capaian terbaik dimana persentase anak usia dini yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 5,70 persen jauh dibawah angka nasional. Hal tersebut jauh berbeda dengan Provinsi Papua yang memiliki angka tertinggi diantara provinsi lainnya. Persentase anak usia dini yang hidup di bawah garis kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2023 sebesar 33,07 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.9 Persentase Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan menurut Klasifikasi Desa dan Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2023

Menurut klasifikasi desa, persentase anak usia dini yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih banyak di perdesaan dibandingkan anak usia dini yang hidup di daerah perkotaan (16,49 persen dibanding 10,25 persen). Jika digambarkan berdasarkan jumlah anggota rumah tangga, semakin banyak anggota rumah tangga semakin besar persentase anak usia dini yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebanyak 18,18 persen anak usia dini tinggal di dalam rumah tangga dengan jumlah ART lebih dari 4 orang dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Tabel 6.1 Persentase Anak Usia Dini menurut Karakteristik dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2023

Karakteristik	Kepemilikan Akta Kelahiran		Jumlah
	Memiliki	Tidak Memiliki/ Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	86,33	13,67	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	86,45	13,55	100,00
Perempuan	86,21	13,79	100,00
Kelompok Umur			
<1 tahun	63,73	36,27	100,00
1-4 tahun	87,12	12,88	100,00
5-6 tahun	93,47	6,53	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga			
Tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD/ sederajat	75,99	24,01	100,00
Tamat SD/ sederajat	82,49	17,51	100,00
Tamat SMP/ sederajat	85,91	14,09	100,00
Tamat SM/ sederajat	89,76	10,24	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	93,24	6,76	100,00
Distribusi Pengeluaran			
40% terbawah	81,78	18,22	100,00
40% menengah	89,00	11,00	100,00
20% teratas	94,11	5,89	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	89,21	10,79	100,00
Perdesaan	82,48	17,52	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini menurut Karakteristik dan Status Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH), 2023

Karakteristik	Status Penerimaan PKH		Jumlah
	Pernah Menerima	Tidak Pernah Menerima	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	14,80	85,20	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga			
Tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD/ sederajat	26,16	73,84	100,00
Tamat SD/ sederajat	22,99	77,01	100,00
Tamat SMP/ sederajat	15,63	84,37	100,00
Tamat SM/ sederajat	8,77	91,23	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	3,20	96,80	100,00
Distribusi Pengeluaran			
40% terbawah	22,80	77,20	100,00
40% menengah	10,13	89,87	100,00
20% teratas	2,18	97,82	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	11,04	88,96	100,00
Perdesaan	19,73	80,27	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.3 Persentase Balita menurut Karakteristik dan Status Ketelantaran, 2021

Karakteristik (1)	Status Ketelantaran Balita			Jumlah (5)
	Tidak Terlantar (2)	Hampir Terlantar (3)	Terlantar (4)	
Indonesia	79,75	15,66	4,59	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-laki	79,39	16,05	4,56	100,00
Perempuan	80,13	15,25	4,62	100,00
Jumlah Anggota Rumah Tangga				
2 orang	74,00	24,91	1,09	100,00
3-4 orang	81,47	14,80	3,73	100,00
>4 orang	77,84	16,55	5,61	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga				
Tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD/ sederajat	76,22	18,81	4,97	100,00
Tamat SD/ sederajat	79,19	16,08	4,73	100,00
Tamat SMP/ sederajat	80,44	15,72	3,84	100,00
Tamat SM/ sederajat	80,67	14,43	4,91	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	80,52	15,21	4,27	100,00
Distribusi Pengeluaran				
40% terbawah	79,01	16,37	4,62	100,00
40% menengah	80,76	14,87	4,37	100,00
20% teratas	79,64	15,35	5,02	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	80,65	14,81	4,54	100,00
Perdesaan	78,60	16,75	4,65	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 6.4 Persentase Anak Usia Dini menurut Karakteristik dan Status Kemiskinan Moneter, 2023

Karakteristik	Status Kemiskinan Moneter		Jumlah
	Di Atas Garis Kemiskinan	Di Bawah Garis Kemiskinan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	87,08	12,92	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	87,13	12,87	100,00
Perempuan	87,03	12,97	100,00
Jumlah Anggota Rumah Tangga			
2 orang	95,55	4,45	100,00
3-4 orang	92,91	7,09	100,00
>4 orang	81,82	18,18	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga			
Tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD/ sederajat	75,07	24,93	100,00
Tamat SD/ sederajat	80,92	19,08	100,00
Tamat SMP/ sederajat	87,05	12,95	100,00
Tamat SM/ sederajat	91,69	8,31	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	96,12	3,88	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	89,75	10,25	100,00
Perdesaan	83,51	16,49	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Menerima PKH menurut Karakteristik dan Status Kemiskinan Moneter, 2023

Karakteristik (1)	Status Kemiskinan Moneter		Jumlah (4)
	Di Atas Garis Kemiskinan (2)	Di Bawah Garis Kemiskinan (3)	
Indonesia	13,17	27,12	14,80
Jumlah Anggota Rumah Tangga			
2 orang	9,38	2,85	9,09
3-4 orang	9,33	18,09	9,94
>4 orang	17,67	31,03	19,92
Pendidikan Kepala Rumah Tangga			
Tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD/ sederajat	24,78	30,88	26,16
Tamat SD/ sederajat	21,15	31,78	22,99
Tamat SMP/ sederajat	14,49	24,37	15,63
Tamat SM/ sederajat	7,91	19,71	8,77
Tamat Perguruan Tinggi	2,76	15,61	3,20
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	9,72	23,82	11,04
Perdesaan	17,97	29,86	19,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.6 Persentase Anak Usia Dini di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2023

Provinsi	Kepemilikan Akta Kelahiran		Jumlah
	Memiliki	Tidak Memiliki/ Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	94,51	5,49	100,00
Sumatera Utara	79,95	20,05	100,00
Sumatera Barat	91,60	8,40	100,00
Riau	86,09	13,91	100,00
Jambi	91,39	8,61	100,00
Sumatera Selatan	88,74	11,26	100,00
Bengkulu	91,41	8,59	100,00
Lampung	91,79	8,21	100,00
Kep. Bangka Belitung	94,95	5,05	100,00
Kepulauan Riau	88,96	11,04	100,00
DKI Jakarta	97,63	2,37	100,00
Jawa Barat	85,22	14,78	100,00
Jawa Tengah	95,83	4,17	100,00
DI Yogyakarta	97,15	2,85	100,00
Jawa Timur	92,09	7,91	100,00
Banten	86,94	13,06	100,00
Bali	91,42	8,58	100,00
Nusa Tenggara Barat	87,79	12,21	100,00
Nusa Tenggara Timur	74,49	25,51	100,00
Kalimantan Barat	91,92	8,08	100,00
Kalimantan Tengah	88,15	11,85	100,00
Kalimantan Selatan	90,61	9,39	100,00
Kalimantan Timur	94,69	5,31	100,00
Kalimantan Utara	92,53	7,47	100,00
Sulawesi Utara	87,92	12,08	100,00
Sulawesi Tengah	86,78	13,22	100,00
Sulawesi Selatan	89,32	10,68	100,00
Sulawesi Tenggara	85,02	14,98	100,00
Gorontalo	92,94	7,06	100,00
Sulawesi Barat	93,84	6,16	100,00
Maluku	78,62	21,38	100,00
Maluku Utara	84,03	15,97	100,00
Papua Barat	77,09	22,91	100,00
Papua	78,07	21,93	100,00
Indonesia	89,21	10,79	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.7 Persentase Anak Usia Dini di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2023

Provinsi	Kepemilikan Akta Kelahiran		Jumlah
	Memiliki	Tidak Memiliki/ Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	92,60	7,40	100,00
Sumatera Utara	74,48	25,52	100,00
Sumatera Barat	85,82	14,18	100,00
Riau	81,70	18,30	100,00
Jambi	89,83	10,17	100,00
Sumatera Selatan	85,85	14,15	100,00
Bengkulu	87,86	12,14	100,00
Lampung	89,05	10,95	100,00
Kep. Bangka Belitung	92,69	7,31	100,00
Kepulauan Riau	93,82	6,18	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	81,63	18,37	100,00
Jawa Tengah	93,57	6,43	100,00
DI Yogyakarta	97,98	2,02	100,00
Jawa Timur	87,11	12,89	100,00
Banten	72,21	27,79	100,00
Bali	89,84	10,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	76,70	23,30	100,00
Nusa Tenggara Timur	52,20	47,80	100,00
Kalimantan Barat	85,59	14,41	100,00
Kalimantan Tengah	83,19	16,81	100,00
Kalimantan Selatan	88,05	11,95	100,00
Kalimantan Timur	89,38	10,62	100,00
Kalimantan Utara	81,97	18,03	100,00
Sulawesi Utara	79,56	20,44	100,00
Sulawesi Tengah	78,05	21,95	100,00
Sulawesi Selatan	86,21	13,79	100,00
Sulawesi Tenggara	82,59	17,41	100,00
Gorontalo	88,50	11,50	100,00
Sulawesi Barat	86,26	13,74	100,00
Maluku	69,33	30,67	100,00
Maluku Utara	70,56	29,44	100,00
Papua Barat	58,11	41,89	100,00
Papua	32,67	67,33	100,00
Indonesia	82,48	17,52	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.8 Persentase Anak Usia Dini menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2023

Provinsi	Kepemilikan Akta Kelahiran		Jumlah
	Memiliki	Tidak Memiliki/ Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	93,25	6,75	100,00
Sumatera Utara	77,38	22,62	100,00
Sumatera Barat	88,62	11,38	100,00
Riau	83,44	16,56	100,00
Jambi	90,34	9,66	100,00
Sumatera Selatan	86,90	13,10	100,00
Bengkulu	89,00	11,00	100,00
Lampung	89,95	10,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	93,96	6,04	100,00
Kepulauan Riau	89,42	10,58	100,00
DKI Jakarta	97,63	2,37	100,00
Jawa Barat	84,52	15,48	100,00
Jawa Tengah	94,76	5,24	100,00
DI Yogyakarta	97,34	2,66	100,00
Jawa Timur	89,95	10,05	100,00
Banten	83,46	16,54	100,00
Bali	91,00	9,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	82,33	17,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	57,38	42,62	100,00
Kalimantan Barat	87,84	12,16	100,00
Kalimantan Tengah	85,29	14,71	100,00
Kalimantan Selatan	89,30	10,70	100,00
Kalimantan Timur	93,01	6,99	100,00
Kalimantan Utara	88,78	11,22	100,00
Sulawesi Utara	83,91	16,09	100,00
Sulawesi Tengah	80,81	19,19	100,00
Sulawesi Selatan	87,66	12,34	100,00
Sulawesi Tenggara	83,49	16,51	100,00
Gorontalo	90,37	9,63	100,00
Sulawesi Barat	87,78	12,22	100,00
Maluku	73,02	26,98	100,00
Maluku Utara	74,19	25,81	100,00
Papua Barat	65,49	34,51	100,00
Papua	47,96	52,04	100,00
Indonesia	86,33	13,67	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.9 Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	13,14	24,08	20,39
Sumatera Utara	10,23	16,89	13,23
Sumatera Barat	9,90	18,43	14,38
Riau	9,51	14,49	12,55
Jambi	9,25	11,66	10,91
Sumatera Selatan	11,13	15,86	14,24
Bengkulu	9,31	17,37	14,90
Lampung	16,99	22,76	20,96
Kep. Bangka Belitung	6,71	7,89	7,23
Kepulauan Riau	4,47	31,88	7,28
DKI Jakarta	3,92	-	3,92
Jawa Barat	11,26	17,98	12,65
Jawa Tengah	15,50	21,59	18,45
DI Yogyakarta	16,43	28,20	19,40
Jawa Timur	11,56	19,86	15,26
Banten	8,76	18,34	11,08
Bali	3,71	13,72	6,48
Nusa Tenggara Barat	22,57	24,16	23,36
Nusa Tenggara Timur	13,09	33,86	28,98
Kalimantan Barat	8,51	16,59	13,81
Kalimantan Tengah	5,43	8,39	7,15
Kalimantan Selatan	6,84	10,94	8,97
Kalimantan Timur	4,77	10,73	6,71
Kalimantan Utara	7,61	11,95	9,16
Sulawesi Utara	10,83	21,63	16,03
Sulawesi Tengah	19,80	22,91	21,95
Sulawesi Selatan	12,70	22,23	17,88
Sulawesi Tenggara	15,44	28,63	23,83
Gorontalo	19,03	34,49	28,06
Sulawesi Barat	17,67	26,22	24,55
Maluku	12,67	25,03	20,09
Maluku Utara	5,85	18,11	14,90
Papua Barat	9,57	12,57	11,37
Papua	3,44	10,30	8,02
Indonesia	11,04	19,73	14,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.10 Persentase Balita menurut Provinsi dan Status Ketelantaran, 2021

Provinsi	Status Ketelantaran Balita			Jumlah
	Tidak Terlantar	Hampir Terlantar	Balita Terlantar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	78,90	17,63	3,47	100,00
Sumatera Utara	77,50	17,55	4,95	100,00
Sumatera Barat	77,10	15,54	7,35	100,00
Riau	77,20	18,28	4,51	100,00
Jambi	80,03	16,36	3,61	100,00
Sumatera Selatan	79,94	15,55	4,52	100,00
Bengkulu	83,65	12,12	4,23	100,00
Lampung	79,12	17,27	3,61	100,00
Kep. Bangka Belitung	80,58	13,33	6,08	100,00
Kepulauan Riau	83,04	11,44	5,52	100,00
DKI Jakarta	84,09	11,33	4,58	100,00
Jawa Barat	81,64	14,53	3,83	100,00
Jawa Tengah	82,64	12,73	4,64	100,00
DI Yogyakarta	85,91	10,33	3,75	100,00
Jawa Timur	82,14	13,73	4,13	100,00
Banten	76,39	19,11	4,49	100,00
Bali	84,19	12,08	3,74	100,00
Nusa Tenggara Barat	76,80	19,69	3,51	100,00
Nusa Tenggara Timur	70,14	24,64	5,22	100,00
Kalimantan Barat	76,67	19,88	3,45	100,00
Kalimantan Tengah	70,03	18,61	11,36	100,00
Kalimantan Selatan	78,44	16,03	5,52	100,00
Kalimantan Timur	83,65	13,33	3,03	100,00
Kalimantan Utara	69,37	18,47	12,16	100,00
Sulawesi Utara	73,43	19,80	6,77	100,00
Sulawesi Tengah	70,20	24,70	5,09	100,00
Sulawesi Selatan	78,14	16,43	5,43	100,00
Sulawesi Tenggara	73,45	19,96	6,59	100,00
Gorontalo	82,81	11,52	5,67	100,00
Sulawesi Barat	75,79	16,92	7,29	100,00
Maluku	73,67	17,93	8,41	100,00
Maluku Utara	76,61	16,64	6,75	100,00
Papua Barat	75,62	19,83	4,55	100,00
Papua	79,92	15,59	4,50	100,00
Indonesia	79,75	15,66	4,59	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 6.11 Persentase Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	13,28	21,31	18,57
Sumatera Utara	12,38	12,53	12,45
Sumatera Barat	7,73	11,33	9,59
Riau	8,82	9,08	8,97
Jambi	15,08	8,63	10,74
Sumatera Selatan	13,19	15,89	14,90
Bengkulu	17,93	20,58	19,73
Lampung	12,95	17,44	15,97
Kep. Bangka Belitung	6,15	7,35	6,68
Kepulauan Riau	6,87	15,05	7,65
DKI Jakarta	6,39	-	6,39
Jawa Barat	10,18	12,32	10,60
Jawa Tengah	13,70	16,23	14,89
DI Yogyakarta	15,67	15,74	15,69
Jawa Timur	10,27	19,17	14,09
Banten	7,48	10,04	8,08
Bali	7,13	8,77	7,56
Nusa Tenggara Barat	18,87	16,85	17,87
Nusa Tenggara Timur	14,31	30,30	26,59
Kalimantan Barat	7,44	10,71	9,54
Kalimantan Tengah	5,90	7,15	6,62
Kalimantan Selatan	5,15	6,22	5,70
Kalimantan Timur	6,73	12,75	8,64
Kalimantan Utara	9,20	13,36	10,68
Sulawesi Utara	7,64	15,40	11,36
Sulawesi Tengah	12,71	18,18	16,45
Sulawesi Selatan	5,38	15,74	10,92
Sulawesi Tenggara	12,67	20,45	17,57
Gorontalo	6,67	28,25	19,13
Sulawesi Barat	13,57	15,49	15,10
Maluku	7,17	31,06	21,57
Maluku Utara	7,46	8,72	8,38
Papua Barat	12,08	38,04	27,94
Papua	7,75	45,92	33,07
Indonesia	10,25	16,49	12,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.12 *Sampling Error* Persentase Anak Usia Dini yang Tidak/Tidak Tahu Memiliki Akta Kelahiran menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	5,49	3,60	7,38	17,56	7,40	6,24	8,57	8,03	6,75	5,75	7,75	7,56
Sumatera Utara	20,05	17,47	22,63	6,56	25,52	23,42	27,62	4,20	22,62	20,93	24,30	3,81
Sumatera Barat	8,40	6,63	10,17	10,73	14,18	12,48	15,87	6,10	11,38	10,14	12,62	5,56
Riau	13,91	11,16	16,66	10,07	18,30	15,64	20,97	7,43	16,56	14,61	18,51	6,01
Jambi	8,61	5,69	11,52	17,29	10,17	8,16	12,17	10,08	9,66	8,00	11,31	8,72
Sumatera Selatan	11,26	8,38	14,14	13,04	14,15	12,05	16,26	7,59	13,10	11,39	14,81	6,66
Bengkulu	8,59	6,07	11,11	14,97	12,14	9,76	14,53	10,03	11,00	9,18	12,82	8,44
Lampung	8,21	5,77	10,66	15,18	10,95	9,07	12,83	8,77	10,05	8,55	11,56	7,64
Kep. Bangka Belitung	5,05	2,80	7,29	22,68	7,31	4,84	9,78	17,25	6,04	4,37	7,70	14,07
Kepulauan Riau	11,04	7,59	14,50	15,96	6,18	1,70	10,66	36,95	10,58	7,42	13,74	15,25
DKI Jakarta	2,37	1,49	3,25	19,05	-	-	-	-	2,37	1,49	3,25	19,05
Jawa Barat	14,78	13,25	16,30	5,27	18,37	15,77	20,97	7,23	15,48	14,15	16,81	4,38
Jawa Tengah	4,17	3,33	5,02	10,33	6,43	5,48	7,38	7,54	5,24	4,61	5,87	6,16
DI Yogyakarta	2,85	1,14	4,56	30,60	2,02	0,16	3,88	46,94	2,66	1,28	4,04	26,49
Jawa Timur	7,91	6,77	9,05	7,32	12,89	11,50	14,29	5,53	10,05	9,17	10,94	4,49
Banten	13,06	10,41	15,70	10,33	27,79	23,27	32,31	8,29	16,54	14,27	18,80	6,98
Bali	8,58	6,14	11,02	14,49	10,16	7,20	13,12	14,87	9,00	7,04	10,95	11,08
Nusa Tenggara Barat	12,21	9,81	14,60	10,01	23,30	20,07	26,53	7,08	17,67	15,65	19,69	5,84
Nusa Tenggara Timur	25,51	20,96	30,06	9,10	47,80	45,70	49,90	2,24	42,62	40,67	44,58	2,34
Kalimantan Barat	8,08	5,70	10,46	15,04	14,41	12,65	16,18	6,26	12,16	10,73	13,59	6,01
Kalimantan Tengah	11,85	8,78	14,92	13,22	16,81	13,83	19,79	9,05	14,71	12,55	16,88	7,51
Kalimantan Selatan	9,39	6,97	11,81	13,16	11,95	9,54	14,37	10,31	10,70	8,98	12,41	8,18
Kalimantan Timur	5,31	2,95	7,67	22,68	10,62	7,16	14,09	16,63	6,99	5,04	8,93	14,20
Kalimantan Utara	7,47	4,22	10,71	22,17	18,03	11,68	24,39	17,98	11,22	8,04	14,39	14,44
Sulawesi Utara	12,08	9,00	15,16	13,00	20,44	17,42	23,46	7,53	16,09	13,93	18,24	6,83
Sulawesi Tengah	13,22	9,16	17,28	15,69	21,95	19,35	24,55	6,04	19,19	16,97	21,41	5,90
Sulawesi Selatan	10,68	8,36	12,99	11,06	13,79	12,17	15,41	5,99	12,34	10,95	13,73	5,74
Sulawesi Tenggara	14,98	11,51	18,45	11,83	17,41	15,03	19,79	6,96	16,51	14,53	18,50	6,13
Gorontalo	7,06	3,42	10,70	26,29	11,50	8,40	14,60	13,75	9,63	7,25	12,00	12,60
Sulawesi Barat	6,16	3,28	9,04	23,86	13,74	10,92	16,57	10,47	12,22	9,88	14,55	9,75
Maluku	21,38	16,72	26,04	11,12	30,67	27,00	34,34	6,10	26,98	24,04	29,92	5,56
Maluku Utara	15,97	10,46	21,49	17,62	29,44	26,32	32,56	5,41	25,81	23,06	28,56	5,44
Papua Barat	22,91	17,05	28,76	13,04	41,89	37,64	46,14	5,18	34,51	31,05	37,96	5,11
Papua	21,93	17,68	26,19	9,89	67,33	64,21	70,45	2,37	52,04	49,21	54,88	2,78
Indonesia	10,79	10,26	11,33	2,52	17,52	17,05	17,99	1,38	13,67	13,30	14,04	1,37

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.13 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	13,14	10,29	15,98	11,05	24,08	21,88	26,27	4,65	20,39	18,64	22,14	4,38
Sumatera Utara	10,23	8,18	12,28	10,21	16,89	15,18	18,60	5,16	13,23	11,88	14,58	5,21
Sumatera Barat	9,90	7,43	12,38	12,76	18,43	16,45	20,40	5,47	14,38	12,82	15,94	5,54
Riau	9,51	6,93	12,10	13,84	14,49	12,26	16,72	7,84	12,55	10,86	14,24	6,88
Jambi	9,25	6,23	12,27	16,65	11,66	9,52	13,80	9,36	10,91	9,17	12,66	8,17
Sumatera Selatan	11,13	8,02	14,24	14,26	15,86	14,04	17,69	5,87	14,24	12,62	15,86	5,81
Bengkulu	9,31	5,70	12,92	19,79	17,37	14,78	19,96	7,60	14,90	12,77	17,02	7,27
Lampung	16,99	13,39	20,59	10,81	22,76	20,56	24,96	4,92	20,96	19,08	22,84	4,57
Kep. Bangka Belitung	6,71	4,06	9,37	20,16	7,89	4,93	10,84	19,12	7,23	5,26	9,21	13,92
Kepulauan Riau	4,47	2,11	6,83	26,89	31,88	9,65	54,12	35,58	7,28	3,64	10,92	25,49
DKI Jakarta	3,92	2,74	5,09	15,29	-	-	-	-	3,92	2,74	5,09	15,29
Jawa Barat	11,26	9,96	12,56	5,89	17,98	16,04	19,92	5,51	12,65	11,54	13,75	4,47
Jawa Tengah	15,50	14,17	16,84	4,39	21,59	20,03	23,15	3,68	18,45	17,42	19,47	2,83
DI Yogyakarta	16,43	12,63	20,23	11,79	28,20	20,97	35,44	13,09	19,40	16,01	22,79	8,91
Jawa Timur	11,56	10,25	12,87	5,79	19,86	18,19	21,52	4,28	15,26	14,21	16,31	3,50
Banten	8,76	6,60	10,92	12,59	18,34	14,55	22,12	10,52	11,08	9,19	12,96	8,67
Bali	3,71	2,09	5,34	22,30	13,72	10,36	17,07	12,47	6,48	4,95	8,01	12,05
Nusa Tenggara Barat	22,57	19,05	26,09	7,95	24,16	21,27	27,06	6,11	23,36	21,07	25,64	5,00
Nusa Tenggara Timur	13,09	9,78	16,40	12,91	33,86	31,92	35,80	2,92	28,98	27,27	30,68	3,01
Kalimantan Barat	8,51	6,07	10,95	14,62	16,59	14,32	18,86	6,98	13,81	12,08	15,54	6,38
Kalimantan Tengah	5,43	3,28	7,58	20,22	8,39	6,27	10,51	12,88	7,15	5,63	8,67	10,86
Kalimantan Selatan	6,84	4,25	9,43	19,32	10,94	8,72	13,15	10,34	8,97	7,26	10,67	9,70
Kalimantan Timur	4,77	3,04	6,51	18,55	10,73	6,62	14,84	19,55	6,71	4,89	8,53	13,84
Kalimantan Utara	7,61	4,28	10,94	22,32	11,95	6,70	17,20	22,41	9,16	6,27	12,04	16,07
Sulawesi Utara	10,83	8,35	13,32	11,71	21,63	18,60	24,66	7,15	16,03	14,03	18,02	6,35
Sulawesi Tengah	19,80	13,46	26,15	16,35	22,91	19,96	25,87	6,58	21,95	19,13	24,77	6,56
Sulawesi Selatan	12,70	10,29	15,10	9,66	22,23	20,16	24,30	4,75	17,88	16,31	19,45	4,48
Sulawesi Tenggara	15,44	11,90	18,98	11,71	28,63	25,94	31,31	4,78	23,83	21,65	26,02	4,68
Gorontalo	19,03	13,91	24,16	13,75	34,49	29,42	39,57	7,51	28,06	24,36	31,77	6,74
Sulawesi Barat	17,67	11,97	23,36	16,43	26,22	22,27	30,16	7,68	24,55	21,15	27,94	7,06
Maluku	12,67	8,12	17,23	18,33	25,03	21,50	28,57	7,20	20,09	17,25	22,92	7,19
Maluku Utara	5,85	2,84	8,86	26,29	18,11	15,03	21,20	8,69	14,90	12,45	17,35	8,40
Papua Barat	9,57	5,63	13,50	21,01	12,57	10,38	14,76	8,89	11,37	9,33	13,42	9,18
Papua	3,44	1,68	5,21	26,20	10,30	7,96	12,65	11,62	8,02	6,33	9,71	10,74
Indonesia	11,04	10,54	11,54	2,31	19,73	19,24	20,23	1,27	14,80	14,45	15,16	1,23

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.14 *Sampling Error* Persentase Balita menurut Provinsi dan Status Ketelantaran, 2021

Provinsi	Tidak Terlantar				Hampir Terlantar				Balita Terlantar			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	78,90	74,81	82,99	2,64	17,63	13,90	21,36	10,79	3,47	2,22	4,72	18,33
Sumatera Utara	77,50	74,61	80,40	1,91	17,55	15,10	20,00	7,13	4,95	3,51	6,39	14,85
Sumatera Barat	77,10	72,53	81,67	3,02	15,54	11,90	19,18	11,95	7,35	4,94	9,76	16,72
Riau	77,20	72,34	82,06	3,21	18,28	13,52	23,04	13,28	4,51	2,78	6,25	19,58
Jambi	80,03	75,82	84,23	2,68	16,36	12,70	20,03	11,43	3,61	1,51	5,71	29,72
Sumatera Selatan	79,94	76,18	83,69	2,39	15,55	12,37	18,73	10,44	4,52	2,89	6,15	18,41
Bengkulu	83,65	78,70	88,59	3,02	12,12	8,49	15,75	15,28	4,23	1,76	6,70	29,75
Lampung	79,12	75,87	82,36	2,09	17,27	14,09	20,45	9,39	3,61	2,29	4,93	18,63
Kep. Bangka Belitung	80,58	75,10	86,07	3,47	13,33	8,97	17,70	16,70	6,08	3,13	9,04	24,79
Kepulauan Riau	83,04	78,22	87,85	2,96	11,44	6,56	16,31	21,74	5,52	2,10	8,94	31,57
DKI Jakarta	84,09	78,97	89,21	3,11	11,33	6,74	15,92	20,65	4,58	2,03	7,12	28,35
Jawa Barat	81,64	79,07	84,22	1,61	14,53	12,39	16,67	7,52	3,83	2,49	5,17	17,85
Jawa Tengah	82,64	80,59	84,68	1,26	12,73	11,02	14,43	6,85	4,64	3,37	5,91	13,99
DI Yogyakarta	85,91	79,49	92,34	3,81	10,33	4,72	15,95	27,72	3,75	0,23	7,27	47,85
Jawa Timur	82,14	80,02	84,26	1,32	13,73	11,88	15,58	6,87	4,13	3,02	5,25	13,80
Banten	76,39	71,75	81,04	3,10	19,11	14,83	23,40	11,44	4,49	2,46	6,53	23,13
Bali	84,19	79,44	88,93	2,88	12,08	8,10	16,05	16,78	3,74	1,75	5,73	27,18
Nusa Tenggara Barat	76,80	72,00	81,59	3,18	19,69	14,93	24,46	12,34	3,51	1,76	5,26	25,45
Nusa Tenggara Timur	70,14	66,28	74,00	2,81	24,64	21,29	27,98	6,92	5,22	3,64	6,81	15,46
Kalimantan Barat	76,67	72,89	80,45	2,52	19,88	16,64	23,13	8,33	3,45	1,54	5,35	28,27
Kalimantan Tengah	70,03	62,93	77,14	5,18	18,61	13,49	23,73	14,04	11,36	6,71	16,01	20,87
Kalimantan Selatan	78,44	74,20	82,69	2,76	16,03	12,35	19,71	11,72	5,52	3,21	7,84	21,34
Kalimantan Timur	83,65	78,68	88,62	3,03	13,33	8,93	17,72	16,83	3,03	1,32	4,73	28,70
Kalimantan Utara	69,37	60,54	78,21	6,50	18,47	10,42	26,53	22,24	12,16	6,67	17,64	23,01
Sulawesi Utara	73,43	66,92	79,93	4,52	19,80	13,77	25,84	15,54	6,77	3,75	9,79	22,75
Sulawesi Tengah	70,20	63,99	76,42	4,51	24,70	19,51	29,89	10,72	5,09	2,54	7,65	25,60
Sulawesi Selatan	78,14	74,83	81,46	2,16	16,43	13,66	19,20	8,60	5,43	3,52	7,33	17,93
Sulawesi Tenggara	73,45	69,12	77,78	3,01	19,96	16,35	23,58	9,23	6,59	3,97	9,21	20,28
Gorontalo	82,81	76,76	88,85	3,72	11,52	5,59	17,45	26,25	5,67	2,65	8,70	27,18
Sulawesi Barat	75,79	68,28	83,29	5,05	16,92	10,23	23,61	20,16	7,29	3,73	10,85	24,93
Maluku	73,67	69,10	78,24	3,16	17,93	14,24	21,62	10,50	8,41	5,15	11,67	19,79
Maluku Utara	76,61	71,38	81,83	3,48	16,64	11,93	21,35	14,44	6,75	3,74	9,76	22,78
Papua Barat	75,62	70,38	80,86	3,54	19,83	14,93	24,73	12,61	4,55	2,26	6,84	25,70
Papua	79,92	75,02	84,81	3,12	15,59	11,36	19,82	13,84	4,50	2,04	6,95	27,84
Indonesia	79,75	78,95	80,55	0,51	15,66	14,97	16,36	2,26	4,59	4,18	4,99	4,51

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 6.15 *Sampling Error* Persentase Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	13,28	9,52	17,04	14,43	21,31	18,46	24,16	6,82	18,57	16,30	20,85	6,25
Sumatera Utara	12,38	10,19	14,58	9,05	12,53	10,74	14,33	7,31	12,45	11,02	13,89	5,89
Sumatera Barat	7,73	4,53	10,92	21,09	11,33	9,25	13,42	9,38	9,59	7,70	11,47	10,02
Riau	8,82	6,07	11,56	15,87	9,08	6,77	11,39	12,98	8,97	7,21	10,74	10,05
Jambi	15,08	10,21	19,95	16,48	8,63	6,50	10,75	12,56	10,74	8,58	12,90	10,25
Sumatera Selatan	13,19	10,26	16,11	11,32	15,89	13,70	18,08	7,04	14,90	13,14	16,67	6,03
Bengkulu	17,93	13,20	22,66	13,46	20,58	17,33	23,82	8,05	19,73	17,04	22,41	6,95
Lampung	12,95	8,38	17,52	18,00	17,44	15,08	19,80	6,90	15,97	13,79	18,14	6,95
Kep. Bangka Belitung	6,15	3,21	9,10	24,41	7,35	3,54	11,17	26,45	6,68	4,32	9,03	18,00
Kepulauan Riau	6,87	3,11	10,62	27,89	15,05	6,64	23,46	28,52	7,65	4,13	11,16	23,44
DKI Jakarta	6,39	4,18	8,61	17,66	-	-	-	-	6,39	4,18	8,61	17,66
Jawa Barat	10,18	8,83	11,52	6,74	12,32	9,99	14,64	9,63	10,60	9,42	11,77	5,65
Jawa Tengah	13,70	12,15	15,24	5,77	16,23	14,59	17,86	5,14	14,89	13,76	16,01	3,86
DI Yogyakarta	15,67	11,07	20,28	15,00	15,74	10,61	20,86	16,61	15,69	11,97	19,41	12,10
Jawa Timur	10,27	8,89	11,65	6,86	19,17	17,26	21,09	5,09	14,09	12,94	15,24	4,17
Banten	7,48	4,84	10,11	17,98	10,04	6,80	13,29	16,47	8,08	5,93	10,24	13,60
Bali	7,13	4,43	9,83	19,34	8,77	5,35	12,20	19,91	7,56	5,38	9,75	14,72
Nusa Tenggara Barat	18,87	15,49	22,24	9,13	16,85	13,71	20,00	9,52	17,87	15,56	20,19	6,60
Nusa Tenggara Timur	14,31	9,83	18,80	15,99	30,30	27,74	32,86	4,31	26,59	24,34	28,83	4,31
Kalimantan Barat	7,44	4,62	10,26	19,33	10,71	8,40	13,01	10,97	9,54	7,75	11,33	9,57
Kalimantan Tengah	5,90	3,54	8,26	20,43	7,15	5,10	9,21	14,67	6,62	5,07	8,18	11,97
Kalimantan Selatan	5,15	3,00	7,30	21,33	6,22	3,65	8,79	21,08	5,70	4,01	7,38	15,10
Kalimantan Timur	6,73	4,57	8,90	16,42	12,75	8,72	16,79	16,14	8,64	6,68	10,60	11,58
Kalimantan Utara	9,20	4,47	13,93	26,24	13,36	7,54	19,18	22,21	10,68	6,97	14,38	17,72
Sulawesi Utara	7,64	4,57	10,72	20,50	15,40	11,73	19,07	12,16	11,36	8,95	13,77	10,83
Sulawesi Tengah	12,71	6,68	18,74	24,21	18,18	14,83	21,54	9,42	16,45	13,47	19,43	9,25
Sulawesi Selatan	5,38	3,58	7,19	17,13	15,74	13,23	18,26	8,16	10,92	9,29	12,54	7,60
Sulawesi Tenggara	12,67	9,24	16,10	13,80	20,45	17,79	23,11	6,63	17,57	15,43	19,72	6,23
Gorontalo	6,67	2,80	10,54	29,57	28,25	22,74	33,75	9,95	19,13	15,56	22,70	9,53
Sulawesi Barat	13,57	8,09	19,05	20,59	15,49	12,44	18,54	10,05	15,10	12,43	17,78	9,04
Maluku	7,17	4,44	9,91	19,44	31,06	26,58	35,54	7,36	21,57	18,48	24,67	7,32
Maluku Utara	7,46	2,41	12,51	34,53	8,72	6,32	11,12	14,03	8,38	6,17	10,60	13,50
Papua Barat	12,08	4,94	19,23	30,18	38,04	32,97	43,10	6,79	27,94	23,82	32,06	7,53
Papua	7,75	4,56	10,95	21,03	45,92	42,37	49,48	3,95	33,07	30,25	35,89	4,35
Indonesia	10,25	9,70	10,79	2,72	16,49	15,95	17,02	1,65	12,92	12,53	13,30	1,53

Catatan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



BAB 7
PROGRAM ANAK
USIA DINI



PROGRAM ANAK USIA DINI

Dalam memenuhi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di masa yang akan datang, diperlukan investasi sejak dini, salah satunya adalah meningkatkan kualitas anak usia dini. Usia anak yang teroptimalkan dengan baik akan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2030 dan Generasi Emas Tahun 2045. Pada bagian ini akan dirangkum berbagai kebijakan dan program pembangunan terkait anak usia dini di Indonesia.

7.1 Pengasuhan

Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak untuk mendukung tumbuh kembang anak sehingga diharapkan anak akan menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia (Kemendikbud 2020, 1). Dalam kaitan dengan pengasuhan anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menggaungkan pemahaman tentang *parenting* melalui Bina Keluarga Balita (BKB). Program BKB Holistik Integratif merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua mengenai pengasuhan anak yang holistik, yaitu pengasuhan yang menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak yang dimaksud meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2016, x). Keberadaan BKB melalui pendekatan holistik integratif telah menggabungkan peran BKB dengan posyandu dan PAUD (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2016, iii).

Program lain yang telah dilaksanakan oleh BKKBN terkait dengan pengasuhan adalah Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). SOTH merupakan program yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan anak. Dengan demikian,

diharapkan anak akan memiliki karakter positif dan tumbuh kembang yang optimal (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur 2023).

Menyadari pentingnya pengasuhan anak usia dini, Tanoto Foundation pun melalui program Siapkan Generasi Anak Berprestasi (SIGAP) mendirikan Rumah Anak SIGAP, yaitu pusat layanan pengasuhan dan pembelajaran dini yang berfokus untuk anak usia 0-3 tahun. Rumah anak SIGAP menyasar orang tua dan pengasuh utama sebagai penerima manfaat. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pola pengasuhan anak usia dini. Dalam pelaksanaannya, Tanoto Foundation bekerja sama dengan pemerintah, Universitas Katolik Atma Jaya, Universitas YARSI, dan UNICEF (Tanoto Foundation nd.).

7.2 Kesehatan dan Gizi

Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak. Beragam kebijakan disusun untuk melahirkan program-program yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan nutrisi anak. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan juga tidak luput dari perhatian guna menangani anak-anak yang rentan sakit.

Melalui pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah memberikan kemudahan akses bagi anak untuk masuk dalam JKN sejak anak tersebut lahir. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 10, bahwa bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, anak-anak usia dini seharusnya dapat memiliki jaminan kesehatan yang siap digunakan ketika pengobatan ke fasilitas kesehatan.

Sementara itu, sebagai bentuk pencegahan penyakit, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemkes) Republik Indonesia menyediakan layanan imunisasi gratis untuk melindungi anak-anak dari ancaman penyakit berbahaya. Beberapa tahun terakhir, Kemkes RI menambah jenis vaksin ke dalam program

imunisasi nasional. Vaksin PCV ditambahkan secara bertahap sejak tahun 2017 (Rokom Kemkes RI 2022), sedangkan vaksin rotavirus mulai diberikan secara gratis sejak pertengahan tahun 2023 (Rokom Kemkes RI 2023). Pemberian vaksin PCV diharapkan dapat melindungi anak-anak dari ancaman penyakit pneumonia, adapun rotavirus merupakan vaksin untuk mencegah diare pada bayi.

7.3 Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan apabila sebuah negara ingin mampu bersaing di era globalisasi. Upaya pengembangan PAUD terus dilakukan secara kontinu untuk meningkatkan mutu layanan yang diberikan PAUD. Dari segi hukum, hal tersebut diwujudkan melalui beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Layanan terhadap penyelenggaraan PAUD Prasekolah dasar (Pra-SD) bagi anak usia 5 dan 6 tahun sebagai salah satu layanan minimal pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan PAUD membutuhkan sinergi dari berbagai *stakeholder*. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam mendorong upaya menciptakan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif yakni “Bunda PAUD”. Adapun Bunda PAUD sendiri adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/kepala daerah perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya.

Bunda PAUD diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat agar penyediaan layanan PAUD menjadi optimal. Selain itu, Bunda PAUD juga dapat menjadi fasilitator sekaligus motivator dalam melibatkan peran serta berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif. Sebanyak 270 Bunda PAUD Kabupaten/Kota yang mengikuti Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2023 aktif berkontribusi dalam mendorong Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Edaran untuk mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2023).

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan tidak lagi dimulai setelah berusia sekolah namun akan dimulai sejak usia dini. Guna mendukung hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memperkenalkan program “Gerakan Satu Desa Satu PAUD” yang menargetkan bahwa setiap desa harus memiliki Lembaga PAUD. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi yakni masih banyak desa yang belum terlayani PAUD. Kondisi ini tentunya diperlukan solusi dalam rangka peningkatan dan pemerataan akses layanan PAUD. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan tahun 2020, masih terdapat 22.629 (26,85 persen) desa yang belum memiliki PAUD. Lebih jauh, keberadaan PAUD di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat belum mencapai 50 persen dari jumlah desa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020).

Selanjutnya, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Melalui kedua instrumen kebijakan tersebut, ditekankan mengenai pentingnya penyediaan akses pendidikan bagi anak usia dini dengan prioritas layanan penuntasan PAUD minimal satu tahun sebelum SD. Program ini berfokus untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota guna menerbitkan peraturan bupati/walikota mengenai implementasi SPM PAUD di kabupaten/kota yang diharapkan

nantinya memiliki komitmen tinggi terhadap penuntasan PAUD untuk anak usia 5-6 tahun. Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, beberapa kabupaten/kota di Indonesia telah menyusun Peraturan Walikota (Perwali) maupun Peraturan Bupati (Perbup) diantaranya: Kota Yogyakarta, Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, dan lainnya.

7.4 Perlindungan dan Kesejahteraan

Perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini erat kaitannya dengan pemenuhan hak dasar anak. Dalam pembahasan sebelumnya terlihat bahwa pada saat ini belum semua anak usia dini memiliki akta kelahiran, masih ada anak usia dini yang menjadi korban kejahatan, masih terdapat balita yang telantar, dan masih ada anak usia dini yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, anak usia dini harus mendapatkan perlindungan khusus untuk menjamin terpenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemerintah telah membuat beberapa program dan kebijakan dengan tujuan meningkatkan *output* dan *outcome* di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini.

Dalam Naskah Rencana Aksi Nasional 2020-2024 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dijelaskan beberapa program terkait Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar dan Miskin yaitu:

- a. Taman Anak Sejahtera (TAS) memfasilitasi anak-anak usia dini yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik saat orang tua bekerja dan memperoleh akta kelahiran
- b. Pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga
- c. Rehabilitasi Sosial: Bantu Anak yaitu berupa pengasuhan, *Family Support* dan *Therapy* melalui kegiatan TEPAK (Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga)
- d. Penguatan Kapabilitas Anak melalui Pengasuhan Anak dalam Lembaga TAS
- e. Pengasuhan Alternatif/*foster care* bagi anak dalam situasi darurat
- f. Penguatan SDM Pengasuhan Lembaga TAS

- g. Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial TAS melalui Akreditasi Lembaga
- h. Penyusunan dan Sosialisasi Modul Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga (PKA dan PKK)

Program Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini lainnya yaitu penyelenggaraan ATENSI Anak yang digawangi oleh Kementerian Sosial. Tujuan umum ATENSI Anak adalah untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, dan mengatasi masalah dalam kehidupan, serta mampu mengembangkan potensi diri. ATENSI Anak ditujukan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, balita, anak jalanan yang ditelantarkan dan anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial. Bentuk layanan langsung dari Program ATENSI Anak meliputi:

- a. Dukungan pemenuhan kebutuhan anak hidup layak secara fisik, mental dan psikososial
- b. Pengasuhan anak untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan
- c. Dukungan keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan anak dan/atau pengasuhan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi, dalam keluarga sendiri maupun keluarga pengganti
- d. Terapi fisik, mental spiritual dan psikososial
- e. Bantuan sosial dan asistensi sosial
- f. Dukungan aksesibilitas untuk membantu anak memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan nonfisik.

Untuk mengetahui dan mengukur capaian upaya perlindungan anak yang telah dilakukan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA),

dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sejak tahun 2019. Capaian IPA tahun 2021 yaitu sebesar 61,38 dan hasil tersebut belum dapat mencapai target yang diinginkan dalam RPJMN sebesar 68,10. Sejalan dengan capaian IPA, capaian IPHA tahun 2021 sebesar 58,34 dan hasil tersebut juga belum dapat mencapai target RPJMN sebesar 65,79. Sedangkan capaian IPKA tahun 2021 agak lebih tinggi dibandingkan capaian IPA dan IPHA yaitu sebesar 73,59, namun hasil tersebut juga belum melampaui target RPJMN sebesar 76,13 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2022, 13, 37, 72).

Capaian IPA, IPHA, dan IPKA yang diperoleh saat ini tidak terlepas dari keberadaan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak sebagai salah satu program prioritas KemenPPPA yaitu perwujudan Kabupassten/Kota Layak Anak (KLA) yang dicanangkan sejak tahun 2006, demi terwujudnya "INDONESIA LAYAK ANAK (IDOLA)". Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. KLA dikembangkan mulai dari kabupaten/kota. Sebuah kabupaten/kota dapat dikatakan KLA apabila seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut memiliki kriteria layak anak. Kecamatan dapat dikatakan layak anak apabila seluruh desa/kelurahannya layak anak. Desa/kelurahan dikatakan layak anak apabila semua RW/RT dan keluarga layak anak. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Indonesia dari mulai desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai provinsi sudah masuk kategori layak anak pada tahun 2030.



DAFTAR PUSTAKA

<https://www.pbs.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Aboud, Frances E. dan Yousafzai, Aisha K.. 2015. "Global Health and Development in Early Childhood". *Annual Review of Psychology*, 66: 433-457. Diunduh dari www.annualreviews.org.
- Adioetomo, Sri M., dan Elda Luciana Pardede. 2018. *Memetik Bonus Demografi, Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Adioetomo, Sri M., Kusumaryani, Merry S.W., & Kiting, Ayke S. 2018. 'Perkembangan Anak Usia Dini' dalam Adioetomo, Sri M. & Pardede, Elda L (ed.). *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2016. *Buku Panduan Penyuluhan BKB Holistik Integratif bagi Kader*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia*. Vol. 8. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050: Hasil Sensus Penduduk 2020*. Edited by Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Biro Pusat Statistik dan Kabinet Menteri Pertama. 1962. *Sensus Penduduk 1961, Population Census 1961 Republik Indonesia*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Blessing, dkk. 2016. *Health and Health-Related Indicators in Slum, Rural, and Urban Communities: a Comparative Analysis*. *Global Health Action*, 9:1. DOI: 10.3402/gha.v9.33163.
- Charlesworth R. 2009. *Understanding Child Development 5th Edition*. Delmar: Thomson Learning Gardner.
- Cusick, Sarah, and Michael K. Georgieff. 2013. "The First 1000 Days of Life: The Brain's Window of Opportunity." 2013. <https://www.unicef-irc.org/article/958-the-first-1000-days-of-life-the-brains-window-of-opportunity.html>.
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. 2023. *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jatim: Program SOTH Mampu Bentuk Generasi Sehat Berkualitas*. Last modified October 2023. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bkkbn-jatim-program-soth-mampu-bentuk-generasi-sehat-berkualitas>.
- Duarte, Fernando. 2019. "Why the World Now Has More Grandparents than Grandchildren." *BBC World Service*. 2019.

<https://www.bbc.com/worklife/article/20190405-why-the-world-now-has-more-grandparents-than-grandchildren>.

Early Childhood Peace Consortium. 2023. "2030 Sustainable Development Goals."

<https://ecdpeace.org/work-content/2030-sustainable-development-goals>.

Fadlurrohimi, Ishak, Asmar Husein, Liya Yulia, Hery Wibowo, dan Santoso Tri Raharjo. 2020. *Memahami Perkembangan Anak Generasi Alfa Di Era Industri 4.0. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2 (2): 178. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26235>.

FAO. 2023. "The State of Food Security and Nutrition in the World 2023." <https://www.fao.org/3/cc3017en/online/state-food-security-and-nutrition-2023/global-nutrition-targets-trends.html>.

Handayani, Rani. 2021. *Karakteristik Pola-Pola Pengasuhan Anak Usia Dini dalam Keluarga*. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2 (2). <https://doi.org/10.19105/kiddo.v2i2.4797>.

Heckman, James J. 2015. "Four Big Benefits of Investing in Early Childhood Development." Heckman. https://heckmanequation.org/wp-content/uploads/2017/01/F_Heckman_FourBenefitsInvestingECDevelopment_022615.pdf.

Herminaju, Ketjuk & Kholidati, Ratna. 2019. *Hubungan Pola Asuh Tua dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah di TK Cut Nyak Dien*. *Pedimaternal Nursing Journal*, 5 (1). <https://doi.org/10.20473/pmnj.v5i1.12382>.

Hong Liu, Hai Fang, dan Zhong Zhao. 2013. "Urban-rural disparities of child health and nutritional status in China from 1989 to 2006". *Economics & Human Biology* 11(3): 294-309. ISSN 1570-677X. <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2012.04.010>.
Diunduh dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570677X12000664> pada 27 Oktober 2023.

Ilmiah, Widia Shofa., Azizah, Fifin Maulidatul., & Amelia, Nina Sukma. 2019. *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Anak Pra Sekolah di TK Mentari Desa Sambi Rampak Lor Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo*. *Jl-KES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2 (2). <https://doi.org/10.33006/ji-kes.v2i2.116>.

Jha, Amrit Kumar. 2020. *Understanding Generation Alpha*. OSF Preprints, no. June 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/d2e8g>.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia/Kemkes RI. 2023. *Bayi Sehat*. Jakarta: Kemkes RI. <https://ayosehat.kemkes.go.id/1000-hari-pertama-kehidupan/category/bayi#syaratmpasi> diakses pada 26 Oktober 2023.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia/Kemkes RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kemkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia/Kemkes RI. 2023. *Siklus Hidup Kelompok Usia Bayi dan Balita < 5 Tahun*. Jakarta: Kemkes RI. <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/bayi-dan-balita> diakses pada 26 Oktober 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. *Kemenpppa Ingatkan Pentingnya Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak*. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3805/kemenpppa-ingatkan-pentingnya-kepemilikan-akta-kelahiran-bagi-anak>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2022. *Indeks Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Pengasuhan Positif*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah). 2020. *Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2020-2024*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini). 2023. "Apresiasi 270 Bunda PAUD Kabupaten/Kota Dorong Dinas Pendidikan Terbitkan Surat Edaran dan Advokasi Gerakan Transisi PAUD ke SD Yang Menyenangkan". <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/apresiasi-270-bunda-paud-kabupatenkota-dorong-dinas-pendidikan-terbitkan-surat-edaran-dan-advokasi-gerakan-transisi-paud-ke-sd-yang-menyenangkan?do=MTg0NS0xOTkxYjg4YQ==&ix=MTETmJkNjQ3YzA=>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, <http://dapo.kemdikbud.go.id>, Semester Genap 2022/2023.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI. 2017. *Metadata TPB Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Bappenas RI.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2020. *Metadata Indikator, Pilar Pembangunan Sosial, Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals TPB/SDGs*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. 2015. *Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indonesia 2015*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kompas. 2023. "Kepadatan Penduduk Masih Terkonsentrasi Di Pulau Jawa." https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/63b4fe7b04e2abb88cf0e443.

Likhar, Akanksha, dan MS Patil. 2022. *Importance of Maternal Nutrition in the First 1,000 Days of Life and Its Effects on Child Development: A Narrative Review*. *Cureus* 14 (10). <https://doi.org/10.7759/cureus.30083>.

Makarim, Chodidjah. 2015. *Peran Media Televisi Dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*. *Electronic Journals of UIKA Bogor (Universitas Ibn Khaldun)*.

McCrindle, Mark, dan Ashley Fell. 2020. *Understanding Generation Alpha*. Norwest: McCrindle Research Pty Ltd.

Meriem, Chkirate, Mammad Khaoula, Chtabou Ghizlane, Mdaghri Alaoui Asmaa, dan Ahami O. T. Ahmed. 2020. *Early Childhood Development (0 - 6 Years Old) from Healthy to Pathologic: A Review of the Literature*. *Open Journal of Medical Psychology* 09 (03): 100–122. <https://doi.org/10.4236/ojmp.2020.93009>.

Mistry dkk. 2012. *Framing Health Matters*. *American Journal of Public Health* 102 (09):1688–1696. <https://doi:10.2105/AJPH.2012.300687>.

Naudeau, Sophie, Naoko Kataoka, Alexandria Valerio, Michelle J. Neuman, dan Leslie Kennedy Elder. 2011. *Investing in Young Children: An Early Childhood Development Guide for Policy Dialogue and Project Preparation*. Washington, D.C.: The World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/16283743/investing-young-children-early-childhood-development-guide-policy-dialogue-project-preparation>.

NC Department of Health dan Human Services. 2019. "Why Early Childhood Matters." <https://www.ncdhhs.gov/about/department-initiatives/early-childhood/why-early-childhood-matters>.

Niryawan, Hari. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Paiman. 2009. *Olahraga dan Kebugaran Jasmani (Physical Fitness) pada Anak Usia Dini*. Cakrawala Pendidikan, November 2009, Th. XXVIII, No. 3.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Pujiatun. 2013. *Dampak Migrasi Bagi Pendidikan Anak Di Desa Manisharjo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo*. *Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologianak*, 1–15.
- Putrihapsari, Raras. & Fauziah, Puji Yanti. 2020. *Manajemen Pengasuhan Anak Usia Dini pada Ibu yang Bekerja: Sebuah Studi Literatur*. *VISI: Jurnal Ilmiah PTK PNF*, 15 (2). <https://doi.org/10.21009/JIV.1502.4>.
- Rencana Aksi Nasional 2020-2024: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Rokom Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 12 September 2022. *Pemerintah Berikan Imunisasi PCV bagi Seluruh Anak Indonesia untuk Melindungi dari Bahaya Radang Paru (Pneumonia)*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220912/4941060/pemerintah-berikan-imunisasi-pcv-bagi-seluruh-anak-indonesia-untuk-melindungi-dari-bahaya-radang-paru-pneumonia/> diakses pada 26 Oktober 2023.

- Rokom Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 15 Agustus 2023. *Cegah Diare pada Anak dengan Imunisasi Rotavirus (RV) secara Gratis*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230815/0243654/cegah-diare-pada-anak-dengan-imunisasi-rotavirus-rv-secara-gratis/>.
- Saavedra, J. M., dan A. M. Dattilo. 2022. "Chapter 1-Nutrition in the First 1000 Days of Life: Society's Greatest Opportunity." In *Early Nutrition and Long-Term Health (Second Edition)*, 3–25. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824389-3.00023-4>.
- Schultz, Theodore W. 1961. *Investment in Human Capital*. The American Economic Review, Vol. 51, No. 1 (Mar., 1961), pp. 1-17.
- Schwarz, Eleanor B. dan Nothnagle, Melissa. 2015. *The Maternal Health Benefits of Breastfeeding*. American Family Physician, 91 (09): 603-604. Diunduh dari www.aafp.org/afp.
- Suarta dan Rahayu. 2018. *Model Pembelajaran Holistik Integratif di PAUD Untuk Mengembangkan Potensi Dasar Anak Usia Dini*. Jurnal Ilmiah Provesi Pendidikan, Vol 3 No 1.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. "Presiden Jokowi: Data Valid Kunci Utama Kesuksesan Pembangunan Sebuah Negara". <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-data-valid-kunci-utama-kesuksesan-pembangunan-sebuah-negara/>.
- Syamsulanjari, Sujanatun., Muarifah, Alif., & Mujidin. 2019. *Peran Taman Penitipan Anak (TPA) terhadap Orang Tua (Ibu) yang Bekerja*. Prosiding Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/snmpuad/article/viewFile/3427/753>.
- Tanoto Foundation. n.d. "Pengasuhan Anak Usia Dini (0-3 Tahun)". <https://sigap.tanotofoundation.org/p/pengasuhan-anak-0-3-tahun/>.
- The United Nations Educational Scientific dan Cultural Organization. 2023. "Why Is Early Childhood Care and Education Important?" The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 2023. <https://www.unesco.org/en/articles/why-early-childhood-care-and-education-matters>.
- The World Bank. 2023. "The World Bank and Nutrition". <https://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/overview#1>.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2015. *Economic Development 12th Edition*. New Jearsey: Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- The United Nations Children's Fund. 2022. "The Formative Early Years of a Child's Life Demand a Nurturing Environment and Attentive Care". Last modified May 2023. <https://data.unicef.org/topic/early-childhood-development/overview/>.
- Walden University. 2023. "What's the Importance of Early Childhood Education?" 2023. <https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-early-childhood-studies/resource/what-is-the-importance-of-early-childhood-education>.
- Wargadinata dan Rusmana. 2019. *Perbandingan Kondisi Kebugaran Jasmani MuridMurid Sekolah Dasar di Kota dan Desa*. Juara: Jurnal Olahraga 4 (1) (2019).
- World Health Organization (WHO). 2020. *Improving Early Childhood Development: WHO Guideline*. Switzerland: WHO.
- Wulandari, Catur. 2016. *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan pada Anak Usia Dini (3-4 Tahun) di PAUD Dharma Wanita Desa Pojoksari Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan*. Jurnal Delima Harapan, 3 (1). <https://doi.org/10.31935/delima.v3i1.30>.



LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

PETUNJUK PENGISIAN

Dalam pengisian kuesioner, perlu diperhatikan tata tertib sebagai berikut:

1. Kuasai konsep, definisi, maksud, dan tujuan survei.
2. Tulis isian sejas-jelasnya dengan pensil hitam pada tempat yang disediakan, agar mudah dibaca.
3. Gunakan blok catalan untuk mencatat hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pengawas dan pengisi. Bagian kosong dari kuesioner juga dapat digunakan untuk mencatat hal-hal yang ditemui saat wawancara berlangsung.
4. Pencacah harus meneliti/meriksa seluruh isian kuesioner dan memperbaiki setiap kesalahan, sebelum kuesioner diserahkan ke pengawas.
5. Perlihatkan dan patuhi tanda-tanda atau alur pertanyaan yang tertera pada kuesioner.
6. Pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak dengan huruf kapital harus dibaca, sedangkan pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak menggunakan huruf kecil tidak perlu dibaca.
7. Kode pilihan jawaban yang menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, boleh dilingkari lebih dari satu pilihan jawaban. Kode pilihan jawaban yang menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, hanya boleh dilingkari salah satu.
8. Blok I tentang keterangan tempat diisi **sebelum ke lapangan**.
9. Isikan Blok IV terlebih dahulu sampai selesai sebagai panduan untuk mengisi pertanyaan dalam format roster. Lipat bagian kertas yang ada tanda **garis putus-putus dan tulisan lipat disini** pada Blok IV halaman 2 sebagai panduan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada halaman genap. Sementara itu, untuk panduan mengisi pada halaman ganjil, kertas pada halaman 2 tidak perlu dilipat (dibarkan saja).
10. Pertanyaan dalam format roster (nama anggota rumah tangga (ART) per baris) seperti pada Blok IV sampai dengan Blok XII diselesaikan dahulu dalam satu roster kemudian lanjut ke roster berikutnya.
11. Tanda garis tebal pada pertanyaan roster menunjukkan batas pertanyaan untuk ART, isikan jawaban pertanyaan di dalam tanda garis tebal untuk seluruh ART, lalu berpindah ke pertanyaan selanjutnya.
12. Tanda garis dua pada pertanyaan roster menunjukkan perbedaan tema pertanyaan dari setiap blok.
13. Contoh cara penulisan informasi penerimaan Bantuan Pangan adalah menggunakan format rata kanan:

E. BERAPA JUMLAH KONCILO YANG DIBELI/MENGGUNAKAN [E] BERAS
 BAHAN PAKAN TERSEBUT?
 (i) BERAPA TOTAL BUNYAH YANG DIBELI/MENYUMBUK (i) Rp. **55.000,-**
 (ii) MASING-MASING KOMCILO? (ii) -- **50 Kg**
 (iii) BERAPA KUANTITAS KOMCILO YANG DIBELI? (iii)

14. Tabulasi umur responden yang sudah berulang tahun pada bulan Maret 2023:

Tahun lahir	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	
Umur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Umur	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tahun lahir	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978
Umur	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Tahun lahir	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963
Umur	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Waktu mulai wawancara: [] : [] : []

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI

(Disisi oleh pengawas)	No. urut ART	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) YANG SEBUTKAN SAMA SAMA DENGAN BIASA TINGGAL DI RUMAH TANGGA DAN KEPENGURUSAN MAKANNYA DIKELOLA DARI SATU DAPUR, MULAI DARI KEPALA RUMAH TANGGA, PASANGANNYA, ANAK YANG BELUM MENIKAH, MENANTU, CUCU, ANAK YANG SUDAH MENIKAH, ORANG TUAMERTUA, PEMBANTU/SOPIR, FAMILI LAIN, DAN LAINNYA.	402	403 (Kode)	404	405	406	407	408	409	410
				APAKAH HUBUNGAN (nama) DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA?	APAKAH STATUS PERKAWINAN (nama) LAKI-KAWINAN ATAU PERBEKAWIN?	APAKAH LAKI-LAKI ATAU PERBEKAWIN?	KAPAN (nama) DILAHIRKAN?	BERAPAKAH UMUR (nama)?	Jika berstatus kawin (404= 2) APAKAH PASANGAN (nama) harus diisi.	Jika berstatus pernah kawin (404= 2, 3 atau 4) PADA UMUR BERAPA (nama) MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PERTAMA?	No. urut ART
				1. Belum kawin? 2. Kawin? 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	1. Belum kawin? 2. Kawin? 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	1. Laki-laki 2. Perempuan	Tg./Bln./Thn (DD/MM/YYYY)	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak		
	400										
				1			/ /				
							/ /				
							/ /				
							/ /				
							/ /				
							/ /				
							/ /				
							/ /				
							/ /				

Pastikan seluruh anggota rumah tangga tercatat dan tidak ada yang terlewat. Cek sekali lagi, apakah kepengurusan makan seluruh anggota rumah tangga di kolom 402 dikelola dari satu dapur.
 Jika terdapat ART yang kepengurusan makannya tidak dari satu dapur, maka keluarkan dari daftar.
 Kode 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)
 1. KRT 3. Anak kandung/iri 5. Menantu 7. Orang tua/mertua 9. Lainnya (amil lain orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT)
 2. Istri/suami 4. Anak angkat 6. Cucu 8. Pembantu/sopir

KONSEP DAN DEFINISI

- **Pertanyaan 203: Hasil Pencacahan Rumah Tangga**
- Terisi lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih dan memperoleh informasi secara lengkap.
- Terisi tidak lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, tetapi tidak dapat memperoleh informasi secara lengkap. Misalnya sampai batas akhir waktu pencacahan, informasi mengenai rumah tangga tersebut tidak diperoleh secara lengkap karena responden pergi keluar kota.
- Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampai akhir masa pencacahan.
- Responden menolak, apabila responden menolak untuk diwawancarai.
- Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada, apabila petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga/bangunan sensus terpilih sampai batas akhir masa pencacahan. Misalnya, rumah tangga pindah keluar blok sensus, bangunan digusur, dan bangunan terbakar/runtuh karena gempa/banjir/bencana lain.
- **Pertanyaan 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga**
- Kejala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT.
- **Pertanyaan 408: Apakah Pasangan Biasanya Tinggal di Rumah Tangga Ini?**
- Yang dimaksud dengan pasangan biasanya tinggal di rumah lebih dari 6 bulan, meskipun tidak berturut-turut.
- **Pertanyaan 605: Apakah Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah?**
- Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
- **Pertanyaan 607, 608, dan 609: Apakah Dapat Membaca dan Menulis Kalimat Sederhana dalam Bahasa Sehari-Hari?**
- Dapat membaca dan menulis yang dimaksud adalah jika seseorang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya.
- Kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan selidiknya mengandung subjek dan predikat, misalnya "saya membaca".
- **Pertanyaan 610: Apakah Bersekolah (Termasuk Mengikuti Program Paket ABC)?**
- Bersekolah, apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program kesetaraan (Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya.
- **Pertanyaan 612: Apa Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Sedang/Pernah Didikuti?**
- Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah didikuti: jenjang pendidikan tertinggi yang sedang didikuti oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang pernah didikuti oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket A/B/C).
- **Pertanyaan 613: Apa Tingkat/Kelas Tertinggi yang Sedang/Pernah Diduduki?**
- Tingkat/kelas tertinggi adalah tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta.

KONSEP DAN DEFINISI

- Tamat sekolah/satuan pendidikan adalah menyelesaikan pelajaran yang diandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang baik pendidikan formal maupun nonformal (Paket ABC) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan.
- **Pertanyaan 614: Apa Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki?**
 - Ijazah/STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.
 - **Pertanyaan 701: Apakah (nama) memiliki rekening tabungan baik atas nama sendiri atau bersama-sama di Lembaga keuangan (perbankan, koperasi)?**
 - a. Responden dikatakan memiliki rekening tabungan di bank jika memiliki nomor rekening meskipun rekening tabungan tersebut kosong.
 - b. Keikutsertaan tabungan tidak harus sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, yang penting responden masih dapat mengakses tabungannya.
 - **Pertanyaan 703: Selama Seminggu Terakhir, Apa Saja Kegiatan yang Dilakukan (nama)?**
 - Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu terakhir.
 - Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal maupun sekolah non formal (Paket ABC), baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur/cuti.
 - Mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga/membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Anggota rumah tangga yang melakukan kegiatan kerumah tanggaaan, seperti memasak, mencuci, dsb. digolongkan sebagai pengurus rumah tangga.
 - Lainnya selain kegiatan pribadi adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga.
 - **Pertanyaan 905: Sejak 1 Januari – 31 Desember 2022, Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan Puncutan, Penganiayaan, Puncuran dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya?**
 - Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/perobaan tindak kejahatan.
 - **Pertanyaan 1101: Jaminan Kesehatan Apa Saja yang Dimiliki (nama)?**
 - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan: Peserta penerima Bantuan turan (PBI) Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong takir miskin dan orang tidak mampu yang uangnya dibayar oleh pemerintah.
 - **Pertanyaan PBI terdiri atas:**
 - a. **Pekerja Penerima Upan dan anggota keluarganya**, yaitu: a) Pegawai Negeri Sipil; b) Anggota TNI; c) Anggota Polri; d) Pejabat negara; e) Pegawai pemerintah nonpegawai negeri; f) Pegawai swasta; dan g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima upah.
 - b. **Pekerja Bukan Penerima Upan dan anggota keluarganya**, yaitu: a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah; dan c) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
 - c. **Bukan Pekerja dan anggota keluarganya** terdiri atas: a) Investor; b) Pemberi kerja; c) Penerima pensiun; d) Veteran; e) Permis kemerdekaan; dan f) Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar turan.

BLOK V. KETERANGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

No. Urut ART	Jika berstatus pernah kawin (404 = 2, 3, atau 4) APAKAH (nama) MEMILIKI/PERNAH MEMILIKI BUKU/AKTA NIKAH DARI KUJA KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA? (untuk perkawinan yang terakhir) (Kode)	No. Urut Keluarga	No. Urut Ibu Kandung Lihat Blok IV (Isikan 00 bila ibu mengandung tidak tinggal di rumah tangga ini)	APAKAH (nama) MEMPUNYAI NOMOR INDIK KENDUDUKAN (NIK)? 1. Ya 5. Tidak 508 ←	Nomor Induk Kependudukan (Tuliskan Nomor Induk Kependudukan setiap ART) 1. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak sesuai format → pada empat digit terakhir 505 tuliskan 9998 dan pada 506 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXVIII. Catatan. 2. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak ingat/tidak memiliki catatan → pada empat digit terakhir 505 tuliskan 9998 pada empat digit terakhir dan pada 506 dan 507 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXVIII. Catatan.	Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK (Cek digit ke-7 NIK pada 505) (Kode)	Sumber Data Nomor Induk Kependudukan 1. KK 2. KTP 3. Lainnya	APAKAH (nama) MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DARI KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA? (Kode)	Diisi oleh pengawas) Apakah isian 506 sama dengan isian 405? (Cek isian 405) 1. Sama 2. Berbeda 3. Tidak relevan
401	501	502	503	504	505	506	507	508	509
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Kode 501: Kepemilikan Buku/ Akta Nikah
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
5. Tidak memiliki
8. Tidak tahu

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU Nomor 52 Tahun 2009).
Penentuan keluarga didasarkan pada ikatan perkawinan. Termasuk keluarga apabila seseorang yang berstatus pernah kawin dan tinggal sendiri (tanpa pasangan atau anak), sedangkan yang berstatus belum kawin tidak dianggap keluarga (Supas, 2015).

Kode 506: Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK
1. Laki-laki
2. Perempuan
Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 0, 1, 2, atau 3
Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 4, 5, 6, atau 7
5. Tidak dapat ditentukan
Jika tidak termasuk kode 1 atau 2

Kode 508: Kepemilikan Akta Kelahiran
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
5. Tidak memiliki
8. Tidak tahu

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN

No. Urut ART	Untuk ART Semua Umur		Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas		Untuk ART Berumur 0-10 Tahun		Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas				
	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA Jika lahir di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA Jika di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	APAKAH (nama) SEDANG/ PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH?	APAKAH (nama) SEMASIH (605= 1,2, atau 3), APA JENIS PENDIDIKAN PRASEKOLAH-NYA? (Kode)	605	606	607	608	609
401	601	602	603	604							
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Kode 605: Partisipasi Prasekolah

- Masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2022/2023)
- Pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2022/2023)
- Pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebelum tahun ajaran 2022/2023
- Tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah

Kode 606: Jenis Prasekolah

- Taman Kanak-kanak
- Bustanul Athfal
- Raudatul Athfal
- Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.)
- Kelompok Bermain
- Taman Penitipan Anak

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN

No. Urut ART	Untuk ART berumur 5 tahun ke atas			Untuk ART berumur 5-30 tahun			Untuk ART berumur 5-24 tahun					
	APAKAH (nama) BERSEKOLAH? (termasuk mengikuti program paket A/B/C)	APAKAH BERSEKOLAH DI SEKOLAH NEGERI ATAU SWASTA?	APAKAH BERSEKOLAH TERTINGGI YANG DIMILIKI (nama)?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIKI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMPEROLEH PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)?	SELAMA BULAN AGUSTUS 2022-FEBRUARI 2023 BERAPA JUMLAH UANG PIP YANG DITERIMA?	(Jika P.617 ≠ 0) UNTUK PENERIMAAN BERAPA SEMESTER?	APAKAH (nama) BERSEKOLAH PADA TAHUN AJARAN SEBELUMNYA (2021/2022)?	UNTUK ART yang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (610 = 2 atau 3)			
	(Kode) Kode = 1 ke ART berikutnya/ Blok VII Kode=3→612	(Kode) Kode = 1 Negeri 2.Swasta	(Kode)	1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak → 619	(Rupiah)	(Semester)	(Kode) Kode = 1 atau 3 ke ART berikutnya/ Blok VII	(Kode)			
401	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kode 610 dan 619:	Kode 612 dan 620:	Kode 614: Ijazah/STTB	Kode 613 dan 621: Tingkat/Kelas
Partisipasi Sekolah 1. Tidak/belum pernah bersekolah 2. Masih bersekolah 3. Tidak bersekolah lagi	01. Paket A 02. SDLB 03. SD 04. MI 05. SPM/PDF Ula 06. Paket B	07. SMP LB 08. SMP 09. MTS 10. SPM/PDF Wusitna 11. Paket C 12. SMLB	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 (Tamam & Lulus) • Jika pernah/ sedang kuliah Profesi, kode 1 • Jika pernah/ sedang kuliah S2, kode 6 • Jika pernah/ sedang kuliah S3, kode 7

BLOK IX. KETERANGAN BEPERGIAN DAN KORBAN KEJAHATAN

No Urut ART	SEJAK 1 JANUARI- 31 DESEMBER 2022, APAKAH (nama) PERNAH BERPERGIAN KELUAR DARI LINGKUNGAN KESEHARIAN, BUKAN BEPERGIAN RUTIN, MINIMAL 3 JAM DI TEMPAT TUJUAN, TIDAK UNTUK SEKOLAH ATAU BEKERJA? 1. Ya 5. Tidak → 905	Jika pernah bepergian (907=1)		SEJAK 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2022, PERNAH MENADI KORBAN KEJAHATAN PENCURIAN, PENGANIAYAAN, KECERASAN, PELECEHAN SEKSUAL, ATAU LAINNYA? 1. Ya 5. Tidak ART berikutnya ← Blok X	BERAPA KALI (nama) MENADI KORBAN KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI? (Jika ≥ 7 kejaian, Tulis 7)		PENCURIAN		PENGANIAYAAN		PENCURIAN DENGAN KEKERASAN		PELECEHAN SEKSUAL		LAINNYA		(Jika 907, 909, 911, 913, atau 915=0) KETIKA KEJAHAN TERSEBUT DALAM PROSES LAPORAN KE POLISI, APAKAH (nama) MENYAPAKAN/ DITEMANI BANTUAN HUKUM? 1. Ya 5. Tidak
		BERAPA KALI (nama) BERPERGIAN SELAMA PERIODE: 1. JANUARI 2022 SAMPAI 30 JUNI 2022? (Kali) 2022? (Kali)	PADA KONDISI BEPERGIAN YANG TERAKHIR, APA MAKSUD UTAMA (nama) MELAKUKAN BEPERGIAN?		JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI	
401	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kode 904: Maksud Utama Bepergian

02. Beribur/rekreasi
03. Profesi/bisnis
04. Misi/pertemuan/kongres/seminar
05. Training/pendidikan/pelatihan
06. Kesehatan/berobat
07. Berziarah/keagamaan
08. Mengunjungi teman/keluarga
09. Mudik/pulang kampung hari raya
10. Olahraga/kesenian
11. Belanja/shopping
12. Lainnya

• **Lingkungan keseharian** didefinisikan sebagai wilayah geografis (tidak harus berdekatan) bagi seseorang melakukan untuk rutinitas kehidupnya/pekerjaannya. Misalnya rumah, kantor atau tempat kerja, pasar yang rutin dikunjungi, sekolah, taman yang rutin dikunjungi, fasilitas olahraga yang rutin dikunjungi, dan sebagainya.

• **Bepergian rutin** adalah bepergian ke tempat/tujuan utama dengan frekuensi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

Suatu peristiwa kejahatan dianggap telah dilaporkan ke polisi apabila:

- a. Korban kejahatan telah melaporkannya ke polisi.
- b. Orang lain melaporkan peristiwa kejahatan tersebut ke polisi.
- c. Polisi mengetahuinya sendiri atau terungkap tangan. Pelaporan kepada polisi tidak harus dilakukan di kantor polisi

BLOK XI. KETERANGAN KELUHAN KESEHATAN DAN RAWAT JALAN

No. Urut ART	JAMINAN KESEHATAN APA SAJA YANG DIMILIKI (nama)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILYAI KESEHATAN KELUHAN (PANAS, BATUK, PILEK, DIARE, PUSING, PENYAKIT KRONIS, DSB.)?	1.Ya 5.Tidak	1103	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH MENGOBATI SENDIRI?	1.Ya 5.Tidak	1104	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH MENGOBATI SENDIRI?	1.Ya 5.Tidak	1105	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH MENGOBATI SENDIRI?	1.Ya 5.Tidak	1106	APA ALASAN UTAMA (nama) TIDAK RAWAT JALAN?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, BERAPA KALI (nama) RAWAT JALAN?	1107	DALAM SEBULAN TERAKHIR, DI MANA SAJA TEMPAT (nama) RAWAT JALAN?	1108	JAMINAN KESEHATAN (nama) YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT JALAN?	1109	Jika 1109 pilihan A, B, dan C tidak dilingkari APA SAJA ALASAN (nama) TIDAK MENGGUNAKAN JKN/JAMKESDA UNTUK RAWAT JALAN?	1110
401	A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) B. BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri C. Jamkesda D. Asuransi swasta kantor E. Tidak punya																					
1	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Tidak punya biaya berobat 2. Tidak ada biaya transport 3. Tidak ada sarana transportasi 4. Waktu tunggu pelayanan lama 5. Mengobati sendiri 6. Tidak ada yang mendampingi 7. Merasa tidak perlu 8. Lainnya	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I			
2	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I			
3	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I			
4	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I			
5	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I			
6	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I			
7	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I			
8	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I			
9	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I			
10	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I			

- **Jaminan kesehatan yang dimiliki** adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan seperti: ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya.
- **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.
- **Terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari** adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya.
- **Rawat jalan** adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.
- **Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan** adalah bila biaya berobat jalan anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibiayai oleh penjamin kesehatan.

BLOK XII. KETERANGAN RAWAT INAP DAN MEROKOK

No. urut ART	Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas									
	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH PERNAH DIRAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak 1206	DALAM SETAHUN TERAKHIR, BERAPA HARI DIRAWAT INAP? (Hari)	JAMINAN KESEHATAN APA SAJA YANG DIGUNAKAN (nama) UNTUK RAWAT INAP? A. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) B. BPJS Kesehatan Non-PBI/ Mandiri C. Jamkesda D. Asuransi swasta E. Perusahaan/Kantor X. Tidak menggunakan G.Lainnya	Jika 1204 pilihan A,B, dan C tidak dilingkari APA SAJA ALASAN (nama) TIDAK MENGGUNAKAN JKN/JAMKESDA UNTUK RAWAT INAP? A.Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan B.Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi C.Kartu JKN tidak aktif D.Tidak ada faskes yang mudah dijangkau dari rumah responden E.Tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan F.Tidak ada biaya (transportasi, akomodasi, dll.) G.Waktu tunggu pelayanan lamalantre panjang H.Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda I. Lainnya	1205	1206	1207	1208	1209	
401										
1	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I							
2	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I							
3	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I							
4	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I							
5	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I							
6	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I							
7	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I							
8	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I							
9	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I							
10	A B C D E F G	A B C D E X	A B C D E F G H I							

- **Rawat inap** adalah upaya penyembuhan keluhan kesehatan dengan menginap semalam atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan.
- **Responden yang pernah rawat inap adalah** responden yang telah selesai menjalani rawat inap, tidak termasuk bila pada saat pencacahan sedang menjalani rawat inap.
- **Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap** adalah bila biaya rawat inap anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibiayai oleh penjamin kesehatan.
- **Jumlah hari** adalah jumlah hari rawat inap dalam satu tahun terakhir.
- **Merokok** merupakan aktivitas membarak tembakau kemudian menghisapnya baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebulan terakhir sampai saat pencacahan.
- **Rokok tembakau** meliputi rokok putih, rokok kretek cerutu, lisong, pipa cangklong/linging/kawung yang diisi tembakau. Termasuk juga orang yang menghisap shisha/waterpipe.
- **Penghitungan jumlah batang rokok rata-rata per minggu** selama sebulan terakhir adalah jumlah rokok yang dihisap selama sebulan dikali 7 dibagi 30.

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401): Nama & No. Urut Pemberi Informasi			
BLOK XIV. KETERANGAN IMUNISASI, ASI, DAN MP-ASI (DITANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-59 BULAN)			
1401. Umur (nama balita) dalam bulan (Hitung dari Blok IV 406)	<input type="text"/> bulan	<input type="text"/> bulan	<input type="text"/> bulan
IMUNISASI BALITA			
SAYA AKAN MENYANYAKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI IMUNISASI			
1402. APAKAH BAPAK/IBU MEMPUNYAI BUKU KIA/KMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)? BOLEHKAH SAYA MELIHATNYA?	Ya, dapat ditunjukkan 1 → 1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan 2 → 1406 Tidak ada kartu/buku 5	Ya, dapat ditunjukkan 1 → 1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan 2 → 1406 Tidak ada kartu/buku 5	Ya, dapat ditunjukkan 1 → 1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan 2 → 1406 Tidak ada kartu/buku 5
1403. APAKAH BAPAK/IBU PERNAH MEMPUNYAI BUKU KIA/KMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)?	Ya 1 → 1406 Tidak 5 → 1406	Ya 1 → 1406 Tidak 5 → 1406	Ya 1 → 1406 Tidak 5 → 1406
1404. Salin dari kartu, tanggal, bulan, dan tahun imunisasi untuk setiap jenis imunisasi. Tulis '44' di kolom tanggal, bulan, dan tahun, jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada. Tulis '00' jika imunisasi tidak diberikan.			
a. HEPATITIS B (<24 JAM)	Tanggal	Bulan	Tahun
b. BCG	Tanggal	Bulan	Tahun
c. POLIO TETES 1	Tanggal	Bulan	Tahun
d. DPT-HB-Hib 1	Tanggal	Bulan	Tahun
e. POLIO TETES 2	Tanggal	Bulan	Tahun
f. DPT-HB-Hib 2	Tanggal	Bulan	Tahun
g. POLIO TETES 3	Tanggal	Bulan	Tahun
h. DPT-HB-Hib 3	Tanggal	Bulan	Tahun
i. POLIO TETES 4	Tanggal	Bulan	Tahun
j. POLIO SUNTIK (IPV)	Tanggal	Bulan	Tahun
k. CAMPYAK-RUBELLA (MR)	Tanggal	Bulan	Tahun

PERTANYAAN	BALITA 1			BALITA 2			BALITA 3			
	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun	
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):										
i. DPT-HB-Hib LANJUTAN										
m. CAMPAK-RUBELLA (MR) LANJUTAN										
n. MMR										
1405. APAKAH (nama balita) MENERIMA IMUNISASI DASAR, YANG TIDAK TERCATAT DALAM KARTU, TERMASUK IMUNISASI YANG DITERIMA SAAT PERAN IMUNISASI NASIONAL? Lingkari kode 1 jika responden menyebutkan jenis imunisasi dasar (lihat pertanyaan 1404).	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Tidak 5 → 1417	Tidak 5 → 1417	Tidak 5 → 1417	Tidak 5 → 1417	Tidak 5 → 1417	Tidak 5 → 1417	
UNTUK BALITA YANG TIDAK MEMPUNYAI ATAU TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KARTU IMUNISASI										
1406. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT IMUNISASI UNTUK MELINDUNGINYA DARI BERBAGAI PENYAKIT?	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417
1407. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN BCG UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TBC – BIASANYA DISUNTIKKAN PADA LENGAN ATAU BAHU DAN MENIBULKAN BEKAS LUKA-?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
1408. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN UNTUK MENCEGAH PENYAKIT POLIO – YANG "DITETESKAN KE MULUT ATAU DISUNTIKKAN PADA LENGAN/PAHA" –?	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411
1409. KAPAN VAKSIN POLIO PERTAMA DITERIMA (nama balita), APAKAH PADA SEBULAN PERTAMA KELAHIRAN ATAU SETELAHNYA?	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	
1410. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN POLIO?	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	
1411. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN DPT – YAITU SUNTIKAN DI PAHA ATAU BOKONG – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TETANUS, BATUK REJAN, ATAU DIPTERI? (Probing dengan menyatakan bahwa pemberian vaksin DPT kadang-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan Hepatitis B)	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):
1412. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN DPT? kali kali kali
1413. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN HEPATITIS B – YAITU SUNTIKAN DI PAHA ATAU BOKONG – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT HEPATITIS B? (Probing dengan menyatakan bahwa pemberian vaksin Hepatitis B Kadang-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan DPT)	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416
1414. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN HEPATITIS B? kali kali kali
1415. KAPAN VAKSINASI HEPATITIS B PERTAMA DITERIMA (nama balita), APAKAH PADA SEMINGGU PERTAMA SETELAH KELAHIRAN ATAU SETELAHNYA?	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2
1416. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT SUNTIKAN CAMPAK – RUBELLA (MR) ATAU MMR – YAITU PADA UMUR 9 BULAN ATAU LEBIH – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT CAMPAK? i. CAMPAK – RUBELLA (MR) ii. MMR	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
A S I DAN MP-ASI DITANYAKAN UNTUK BADUTA (ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-23 BULAN)			
Cek umur balita dari 1401, berikan tanda centang (✓)			
Balita berumur 0-23 bulan Balita berumur ≥ 24 bulan	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV
1417. A. APAKAH (nama baduta) PERNAH DISUSUI/DIBERI AIR SUSU IBU (ASI)?	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419 B. _____ bulan I. _____ bulan II. _____ bulan	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419 B. _____ bulan I. _____ bulan II. _____ bulan	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419 B. _____ bulan I. _____ bulan II. _____ bulan
B. LAMANYA PEMBERIAN ASI: I. TANPA MAKANAN PENDAMPING II. DENGAN MAKANAN PENDAMPING	B. _____ bulan I. _____ bulan II. _____ bulan	B. _____ bulan I. _____ bulan II. _____ bulan	B. _____ bulan I. _____ bulan II. _____ bulan

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
1418. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DISUSU/DIBERI ASI? 1419. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MENEMPAH CAIRAN, TERMASUK CAIRAN YANG DIKOMBINASIKAN DENGAN MAKANAN LAIN DAN CAIRAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH? a. SUSU SELAIN ASI (SUSU FORMULA, SUSU BUBUK, SUSU SEGAR, UHT)? Jika "Ya", isikan berapa kali susu selain ASI dikonsumsi baduta. b. MINUMAN LAIN (AIR PUTIH, JUJ TANPA GULA, SUP/KALDU, TEH/KOPI TANPA GULA, AIR TAJIN, DLL.)? c. MINUMAN BERPEMANIS GULA (MINUMAN RINGAN, SODA, TEH MANIS, SUSU KENTAL MANIS, DLL.)?	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali b) 1 5 8 c) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali b) 1 5 8 c) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali b) 1 5 8 c) 1 5 8
1420. SAYA INGIN MENANYAKAN TENTANG SEMUA YANG DIKONSUMSI OLEH (nama baduta) SEHARIAN KEMARIN, TERMASUK MAKANAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH ATAU JAJAN. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MAKAN/MINUM? a. SEREAL, AKAR, DAN LUMBI (NASI, JAGUNG, GANDUM, PASTA, ROTIPANEKUK, UBI, KENTANG, SORGUM, DLL.)? b. MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN (KACANG TANAH, KEDELA, TAHU, TEMPE, ATAU KACANG LAINNYA)? c. PRODUK TURUNAN SUSU (YOGURT, KEJU, DLL.)? d. DAGING, IKAN (SAPI, AYAM, KAMBING, IKAN, MAKANAN LAUT, DAGING/IKAN DALAM KALENG, DLL.)? e. TELUR (AYAM, ITK, PUYUH, DLL.)? f. BUAH DAN SAYUR SUMBER VITAMIN A (TERMASUK SAYURAN BERDAUN GELAP)? g. BUAH ATAU SAYURAN LAINNYA (LABU SIAM, GAMBAS, ALPUKAT, JERUK, DLL.)? h. MAKANAN RINGAN YANG GURIH, GORENGAN, MAKANAN MANIS (ES KRIM, PERMEN, KUE KERING, CAKE, DLL.)?	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8
1421. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DIBERI MAKANAN PADAT, SETENGAH PADAT, ATAU LUNAK? Jika "Ya", isikan berapa kali baduta diberi makanan padat, setengah padat, atau lunak.	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 <input type="checkbox"/> kali	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 <input type="checkbox"/> kali	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 <input type="checkbox"/> kali

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401): tahun tahun tahun
KETERANGAN TENTANG PENOLONG PERSALINAN DAN KELUARGA BERENCANA (DITANYAKAN KEPADA SEMUA PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN)			
BLOK XV. PENOLONG PERSALINAN			
1501. A. APAKAH (nama) PERNAH HAMIL? B. UMUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT HAMIL PERTAMA?	A) Ya.....1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun	A) Ya.....1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun	A) Ya... 1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun
1502. A. APAKAH (nama) PERNAH MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP? B. UMUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG PERTAMA KALI?	A) Ya.....1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun	A) Ya.....1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun	A) Ya... 1 Tidak.... 5→ PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun
1503. KAPAN MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR?	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu.....2 PPK berikutnya/Blok XVI ←	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu.....2 PPK berikutnya/Blok XVI ←	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu.....2 PPK berikutnya/Blok XVI ←
1504. A. DI MANA (nama) MELAHIRKAN (nama anak lahir hidup yang terakhir)?	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas..... 3 Pustu..... 4 Praktik nakes..... 5 Polindes/Poskesdes..... 6 Rumah..... 7 Lainnya, tuliskan:..... 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas..... 3 Pustu..... 4 Praktik nakes..... 5 Polindes/Poskesdes..... 6 Rumah..... 7 Lainnya, tuliskan:..... 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas..... 3 Pustu..... 4 Praktik nakes..... 5 Polindes/Poskesdes..... 6 Rumah..... 7 Lainnya, tuliskan:..... 8

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 407): tahun tahun tahun tahun tahun tahun
B. SIAPA YANG MENOLONG PROSES KELAHIRAN TERAKHIR?	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8
C. BERAPA BERAT (nama anak lahir hidup yang terakhir) KETIKA DILAHIRKAN?	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8
1505. BERAPA LAMA SETELAH KELAHIRAN (nama anak lahir hidup yang terakhir) PERTAMA KALI DILETAKKAN DI ATAS DADA IBU DENGAN BERSENTUHAN KULIT SECARA LANGSUNG?	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401): tahun tahun tahun tahun tahun tahun
BLOK XVI. KELUARGA BERENCANA			
1601. APAKAH (nama/pasangan) PERNAH/SEDANG MENGGUNAKAN ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL UNTUK MENUNDA ATAU MENCEGAH KEHAMILAN?	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII
1602. ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL APA YANG SEDANG DIGUNAKAN? Jika (nama) menyebutkan lebih dari satu, lingkari kode terkecil.	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susuk KB/implan 5 Pil 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafragma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susuk KB/implan 5 Pil 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafragma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susuk KB/implan 5 Pil 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafragma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11
1603. JIKA MENGGUNAKAN ALAT KB MODERN (1602 = 1-8), DI MANA (nama/pasangan) MEMPEROLEH (ALAT KB) TERAKHIR KALI?	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MIJUAN 3 Polindes/Poskesdes 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MIJUAN 3 Polindes/Poskesdes 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MIJUAN 3 Polindes/Poskesdes 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10

**BLOK XVII. AKSES TERHADAP MAKANAN
(DITANYAKAN PADA KRT/PASANGAN/ART 15 TAHUN KE ATAS)**

Nama dan No. Urut pemberi informasi:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEKARANG SAYA AKAN MENGAJUKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI AKSES TERHADAP MAKANAN. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA:			
1701. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA KHAWATIR TIDAK AKAN MEMILIKI CUKUP MAKANAN UNTUK DISANTAP KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1702. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK DAPAT MENYANTAP MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1703. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA HANYA MENYANTAP SEDIKIT JENIS MAKANAN KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1704. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA PERNAH MELEWATKAN SATU WAKTU MAKAN PADA SUATU HARI TERTENTU KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAIN YANG CUKUP UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1705. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA MAKAN LEBIH SEDIKIT DARIPADA SEHARUSNYA KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1706. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA KEHABISAN MAKANAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1707. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA MERASA LAPAR TAPI TIDAK MAKAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1708. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA TIDAK MAKAN SEHARIAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN

Nama dan No. Urut pemberi informasi:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1801. BERAPA JUMLAH KELUARGA YANG TINGGAL DI DALAM BANGUNAN SENSUS/RUMAH INI? (iskan 7, jika terdapat 7 keluarga atau lebih)			
1802. APA STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG DITEMPATI? (Pilihan jawaban boleh dibaca)		<input type="checkbox"/>	keluarga
		1	2
		3	4
		5	1804
		Lainnya, tuliskan:	
1803. APA JENIS BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI? (Pilihan jawaban boleh dibaca)		Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART ... 1 SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis. 2 SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis. 3 Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS) 4 Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll) 5 Tidak punya 6	
1804. BERAPA LUAS LANTAI RUMAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1805. APAKAH KEPALA RUMAH TANGGA/PASANGAN-NYANAKNYA MEMILIKI RUMAH/LAIN, SELAIN RUMAH YANG DITEMPATI SAAT INI?		Ya 1 Tidak 5	
1806. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA ATAP RUMAH TERLUAS? (Pilihan jawaban boleh dibaca)		Beton 1 Genteng 2 Seng 3 Asbes 4 Bambu 5 Kayu/Sirap 6 Jerami/juk/daun-daunan/rumbia 7 Lainnya 8	
1807. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA DINDING RUMAH TERLUAS?		Tembok 1 Plesteran anyaman bambu/kawat 2 Kayu/papan 3 Anyaman bambu 4 Batang kayu 5 Bambu 6 Lainnya 7	

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
1808. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA LANTAI RUMAH TERLUAS?	<p>Marmor/granit.....1 Keramik.....2 Parket/vinil/karpet.....3 Ubin/tegal/teraso.....4 Kayu/papan.....5 Semen/bata merah.....6 Bambu.....7 Tanah.....8 Lainnya.....9</p> <p>Ada, digunakan hanya ART sendiri.....1 Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu.....2 Ada, di MCK komunal.....3 Ada, di MCK umum/sepapun menggunakan.....4 Ada, ART tidak menggunakan.....5 Tidak ada fasilitas.....6</p> <p>Leher angka.....1 Plengsengan dengan tutup.....2 Plengsengan tanpa tutup.....3 Cemplung/cubuk.....4</p> <p>Tangki septik IPAL.....1 2 Kolam/sawah/sungai/danau/laut.....3 Lubang tanah.....4 Pantai/tanah lapang/kebun.....5 Lainnya.....6</p> <p>Tidak tahu.....<input type="checkbox"/> tahun.....98</p> <p><input type="checkbox"/> kali (isikan 6, jika 6 kali atau lebih) Tidak pernah.....7 Tidak tahu.....8</p> <p>Air kemasan bermerek.....1 Air isi ulang.....2 Leding.....3 Sumur bor/pompa.....4 Sumur terlindung.....5 Sumur tak terlindung.....6 Mata air terlindung.....7 Mata air tak terlindung.....8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).....9 Lainnya.....10 } 1811.A</p>
1809. A. APAKAH MEMILIKI FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DAN SIAPA SAJA YANG MENGGUNAKAN?	<p>B. (Jika 1809.A = 1, 2, atau 3) APAKAH JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN?</p> <p>C. DI MANAKAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TINJAU?</p> <p>D. SUDAH BERAPA LAMA TANGKI SEPTIK INI DIBUAT/DIBANGUN?</p> <p>E. DALAM 5 TAHUN TERAKHIR, BERAPA KALI TANGKI SEPTIK INI DIROSKAN/DILAKUKAN PENYEDOTAN?</p>
1810. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM?	<p>Air kemasan bermerek.....1 Air isi ulang.....2 Leding.....3 Sumur bor/pompa.....4 Sumur terlindung.....5 Sumur tak terlindung.....6 Mata air terlindung.....7 Mata air tak terlindung.....8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).....9 Lainnya.....10 } 1811.A</p>
BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
B. (Jika 1810.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)). BERAPA JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TINJAU TERDEKAT?	<p>< 10 m.....1 ≥ 10 m.....2 Tidak tahu.....8</p>
1811. A. DI MANAKAH LOKASI SUMBER/FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?	<p>Di rumah/kawasan dalam pagar rumah.....1 → 1812 Di luar kawasan pagar rumah.....2</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> menit</p> <p>Tidak tahu.....998</p> <p>Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8</p> <p>A. KERUH.....1 B. BERWARNA.....1 C. BERASA.....1 D. BERBAU.....1 E. BERBAU.....1 Ya Tidak Air kemasan bermerek.....1 } Air isi ulang.....2 } 1815.A Leding.....3 } Sumur bor/pompa.....4 } Sumur terlindung.....5 } Sumur tak terlindung.....6 } Mata air terlindung.....7 } Mata air tak terlindung.....8 } Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).....9 } Lainnya.....10 } 1815.A</p>
B. BERAPA LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAMBIL AIR KE SUMBER/FASILITAS AIR SAMPAI KEBALIK LAGI KE RUMAH?	<p>DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA PERUBAH MENGALAMI KEKURANGAN AIR MINUM UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SELAMA MINIMAL 24 JAM?</p> <p>1813. BAGAMANA KONDISI FISIK SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM MENURUT ANDA?</p> <p>1814. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MANDI/CUCI DULU?</p>
1815. A. BOLEHKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGGOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENCUCI TANGAN?	<p>B. (Jika 1814.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)) BERAPA JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TINJAU TERDEKAT?</p> <p>Ya, di dalam rumah.....1 Ya, di luar rumah.....2 Tidak ada tempat cuci tangan.....3 } 1816.A Tidak diizinkan melihat.....4 }</p>

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
B. Amati ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa kran/pompa atau bascom, ember, wadah air atau sejenisnya.	Tersedia air..... 1 Tidak tersedia air..... 5
C. Cek ketersediaan sabun atau deterjen di tempat mencuci tangan!	Tersedia sabun/deterjen 1 Tidak tersedia sabun/deterjen..... 5
1816. A. APAKAH SUMBER UTAMA PENERANGAN RUMAH TANGGA INI?	Listrik PLN dengan meteran..... 1 Listrik PLN tanpa meteran..... 2 Listrik non-PLN 3 } -1817 Bukan listrik 4
B. BERAPA HARGA TERPASANG DI RUMAH INI?	Meteran 1 Meteran 2 Meteran 3 450 Watt 1 900 Watt 2 1.300 Watt atau lebih 3
1817. APAKAH JENIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK?	(Isikan daya untuk setiap meteran yang terpasang) Listrik..... 1 Elpiji 5,5 kg/blue gaz 2 Elpiji 12 kg 3 Elpiji 3 kg..... 4 Gas kota..... 5 Biogas 6 Minyak tanah 7 Briket..... 8 Arang 9 Kayu bakar..... 10 Lainnya 11 Tidak memasak di rumah..... 0

BLOK XIX. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN	
1901. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENEMUKAN KREDIT? (Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)	Ya Tidak A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 1 5 B. KREDIT DARI BANK UNJUM SELAIN KUR 1 5 C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 1 5 D. KREDIT DARI KOPERASI..... 1 5 E. PERORANGAN DENGAN BUNGA..... 1 5 F. PEGADAPAN 1 5 G. PERUSAHAAN LEASING..... 1 5 H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMIDES) 1 5 I. PINJAMAN ONLINE 1 5 J. LAINNYA 1 5

BLOK XIX. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN	
1902. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI E-WALLET? (Lingkari kode 1 jika memiliki, kode 5 bila tidak memiliki)	Ya Tidak A. GOPAY 1 5 B. OVO 1 5 C. LINK AJA 1 5 D. DANA..... 1 5 E. SHOPEEPAY 1 5 F. LAINNYA, tuliskan: 1 5

BLOK XX. KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG	
2001. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI BARANG-BARANG SEBAGAI BERIKUT? (Lingkari kode 1 jika memiliki, kode 5 bila tidak)	Ya Tidak A. TABUNG GAS 5,5 KG ATAU LEBIH 1 5 B. LEMARI ES/KULKAS 1 5 C. AC 1 5 D. PENANAS AIR (WATER HEATER) 1 5 E. TELEPON RUMAH (PSTN) 1 5 F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET 1 5 G. EMAS/PERHIASAN (MINIMAL 10 GRAM) 1 5 H. SEPEDA MOTOR 1 5 I. PERAHU 1 5 J. PERAHU MOTOR 1 5 K. MOBIL 1 5 L. TELEVISI LAYAR DATAR (MINIMAL 30 INCH) 1 5 M. TANAH/LAHAN 1 5
2002. (Jika 2001.M = 1), JIKA MEMILIKI TANAH/LAHAN, SIAPA PEMILIK TANAH/LAHAN TERSEBUT?	KRT A Pasangan KRT B Anak C ART lainnya D

BLOK XXI. KETERANGAN SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA	
2101. A. APAKAH SUMBER TERBESAR PENBIAYAAN DI RUMAH TANGGA INI?	ART YANG BEKERJA..... 1 → 2101.B KIRIMAN UANG/BARANG 2 → 2101.C INVESTASI (DEPOSITO, ROYALTI, SAHAM, BUNGA BANK, DAN SEJENISNYA)..... 3 → Blok XXII PENSUNAN 4 → Blok XXII
B. (Jika 2101.A = 1) SIAPAKAH ART YANG MENGANGGUNG PENBIAYAAN TERBESAR?	Nama ART : <input type="text"/> No. Urut ART : <input type="text"/>
C. (Jika 2101.A = 2) APABILA MENEMUKAN KIRIMAN UANG/BARANG DARI MANAKAH SUMBER UTAMANYA?	ORANG TUA 1 ANAK..... 2 FAMILI LAIN 3 LAINNYA 4

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

		BERAPA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI/ATAU MENERIMA JAMINAN SOSIAL TERSEBUT?	
		(ii)	(iii)
		Ya	Tidak
2201.	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI/ATAU MENERIMA JAMINAN SOSIAL BERUPA: (i)		
	A. JAMINAN PENSUNJI/VETERAN	1 → 2201.iii.A 5 → 2201.B	A. _____ orang
	B. JAMINAN HARI TUA	1 → 2201.iii.B 5 → 2201.C	B. _____ orang
	C. JAMINAN/SURANSI/KECELAKAN KERJA	1 → 2201.iii.C 5 → 2201.D	C. _____ orang
	D. JAMINAN/SURANSI/KEMATIAN	1 → 2201.iii.D 5 → 2201.E	D. _____ orang
	E. JAMINAN KEHLANGAN PEKERJAAN (JKP)	1 → 2201.iii.E 5 → 2201.F	E. _____ orang
	F. PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	1 → 2201.iii.F 5 → 2202	F. _____ orang
2202.	APAKAH RUMAH TANGGA INI MENERIMA KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)?	Ya, dapat menunjukkan kartu 1 Ya, tidak dapat menunjukkan kartu 2 Tidak 5	
2203.	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)?	Ya 1 Tidak 5 → 2205	
2204.	A. APAKAH SAAT INI RUMAH TANGGA ANDA MASIH TERCATAT/MENJADI PENERIMA PKH?	Ya 1 Tidak 8 5 } 2205 Tidak tahu 5	
	B. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN PKH?	Kantor Pos 1 ATM 2 Kantor Bank 3 Agen Bank 4 Pendamping, ketua kelompok 5	
C.	DALAM SETAHUN TERAKHIR, UNTUK APA SAJA BANTUAN PKH DIPERGUNAKAN? ADA LAGI? <i>(Pilihan jawaban boleh lebih dari satu yang dipilih)</i>	Belanja Pangan A Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga (sewa rumah/kontrak, listrik, air, telepon, bahan bakar, dll.) B Biaya Pengobatan C Biaya Perawatan Ibu Hamil D Biaya Sekolah E Pembayaran Hutang/Kredit F Lainnya, <i>tuliskan:</i> G	
2205.	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA LANSIA (60 TAHUN KE ATAS) YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL DARI PROGRAM ATENSI LANSIA?	Ya 1 Tidak 5	Tuliskan No. Urut ART Lansia 1) [] [] [] ; 2) [] [] [] ; 3) [] [] [] ; 4) [] [] []
2206.	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ART BERUSAHA 15 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH MENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH/BSU?	Ya 1 Tidak 5	Tuliskan No. Urut ART 1) [] [] [] ; 2) [] [] [] ; 3) [] [] [] ; 4) [] [] []

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

	Ya.....1 Tidak.....5 → 2209	Bulan Februari 2023 A) Ya.....1 Tidak.....5 → Januari'23	Bulan Januari 2023 A) Ya.....1 Tidak.....5 → Desember'22	Bulan Desember 2022 A) Ya.....1 Tidak.....5 → November'22	Bulan November 2022 A) Ya.....1 Tidak.....5 → 2209
2207. APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA BANTUAN PANGAN (BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)/PROGRAM SEMBAKO)?					
2208. DALAM 4 BULAN TERAKHIR, SEBUTKAN INFORMASI PEMBELIAN/ PENGGUNAAN BANTUAN PANGAN: A. APAKAH RUMAH TANGGA MENERIMA BANTUAN PANGAN PADA 4 BULAN TERAKHIR?		B) Ya, tuliskan.....1 Rp.-..... Tidak.....5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan.....1 Rp.-..... Tidak.....5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan.....1 Rp.-..... Tidak.....5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan.....1 Rp.-..... Tidak.....5 → 2208.D
B. APAKAH ANDA MENGETAHUI BERAPA NILAI BANTUAN YANG DITERIMA?		C) ___ Bulan	C) ___ Bulan	C) ___ Bulan	C) ___ Bulan
C. UNTUK PENERIMAAN BERAPA BULAN?		D) Ya.....1 Tidak.....5 → Januari'23	D) Ya.....1 Tidak.....5 → Desember'22	D) Ya.....1 Tidak.....5 → November'22	D) Ya.....1 Tidak.....5 → 2209
D. APAKAH RUMAH TANGGA MEMANFAATKAN BANTUAN PANGAN TERSEBUT?		E) BERAS (i) Rp.-..... (ii)-..... Kg TELUR AYAM RAS (i) Rp.-..... (ii) ___ Butir LAINNYA, tuliskan: _____ No. Urut di VSEN23.KP: ___-___-___ (i) Rp.-..... (ii)-..... (kuantitas)	E) BERAS (i) Rp.-..... (ii)-..... Kg TELUR AYAM RAS (i) Rp.-..... (ii) ___ Butir LAINNYA, tuliskan: _____ No. Urut di VSEN23.KP: ___-___-___ (i) Rp.-..... (ii)-..... (kuantitas)	E) BERAS (i) Rp.-..... (ii)-..... Kg TELUR AYAM RAS (i) Rp.-..... (ii) ___ Butir LAINNYA, tuliskan: _____ No. Urut di VSEN23.KP: ___-___-___ (i) Rp.-..... (ii)-..... (kuantitas)	E) BERAS (i) Rp.-..... (ii)-..... Kg TELUR AYAM RAS (i) Rp.-..... (ii) ___ Butir LAINNYA, tuliskan: _____ No. Urut di VSEN23.KP: ___-___-___ (i) Rp.-..... (ii)-..... (kuantitas)
E. BERAPA NILAI/JUMLAH KOMODITAS YANG DIBELI MENGGUNAKAN BANTUAN PANGAN TERSEBUT? (i) BERAPA TOTAL RUPIAH YANG DIBELANJAKAN UNTUK MASING-MASING KOMODITAS? (ii) BERAPA KUANTITAS KOMODITAS YANG DIBELI? Nomor urut bahan pangan lainnya , misalnya: Komoditas No. Urut di VSEN23.KP Tepung terigu 006 Daging ayam ras 059 Tempe 107 Pepaya 120 Nomor urut untuk komoditas lainnya lihat VSEN23.KP		F) BAK.....1 CUKUP.....2 BURUK.....3 G) Ya.....1 Tidak.....5	F) BAK.....1 CUKUP.....2 BURUK.....3 G) Ya.....1 Tidak.....5	F) BAK.....1 CUKUP.....2 BURUK.....3 G) Ya.....1 Tidak.....5	F) BAK.....1 CUKUP.....2 BURUK.....3 G) Ya.....1 Tidak.....5
F. JIKA MEMBELI BERAS [2208.E nilai (Rp) dan kuantitas (Kg) beras ≠ 0], BAGAIMANA KUALITAS BERAS YANG DIBELI?		H) Kios/warung/toko.....1 Rumah Pangan Kita.....2 Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan.....3 Kantor bank.....4 Lainnya.....5	H) Kios/warung/toko.....1 Rumah Pangan Kita.....2 Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan.....3 Kantor bank.....4 Lainnya.....5	H) Kios/warung/toko.....1 Rumah Pangan Kita.....2 Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan.....3 Kantor bank.....4 Lainnya.....5	H) Kios/warung/toko.....1 Rumah Pangan Kita.....2 Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan.....3 Kantor bank.....4 Lainnya.....5
G. APAKAH ANDA DAPAT MENENTUKAN SENDIRI JENIS DAN KUANTITAS KOMODITAS YANG DIBELI?					
H. DI MANA TEMPAT MEMBELI KOMODITAS TERSEBUT?					

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL																			
<p>2209. DALAM SETAHUN TERKAHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI BERIKUT: <i>(Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)</i></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Ya</td> <td style="text-align: center;">Tidak</td> </tr> <tr> <td>A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK (BLT BBM).....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>B. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA).....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>C. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD).....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p>Ya 1 Tuliskan No. Urut ART 1) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ; 2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ; 3) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ; 4) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Tidak.....5</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar. 		Ya	Tidak	A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK (BLT BBM).....	1	5	B. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA).....	1	5	C. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD).....	1	5						
	Ya	Tidak																	
A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK (BLT BBM).....	1	5																	
B. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA).....	1	5																	
C. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD).....	1	5																	
<p>2210. A. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI USAHA MIKRO ATAU KECIL?</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Ya</td> <td style="text-align: center;">Tidak</td> </tr> <tr> <td>(i) PEMBIAYAAN KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL).....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>(ii) PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO (UMI).....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>(iii) PROGRAM MEMBINA EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA (PNM MEKKAER).....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>(iv) BANK WAKAF MIKRO (BWM).....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>(v) DANA BERGULIR OLEH LEMBAGA PENGELOLA DANA.....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>		Ya	Tidak	(i) PEMBIAYAAN KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL).....	1	5	(ii) PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO (UMI).....	1	5	(iii) PROGRAM MEMBINA EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA (PNM MEKKAER).....	1	5	(iv) BANK WAKAF MIKRO (BWM).....	1	5	(v) DANA BERGULIR OLEH LEMBAGA PENGELOLA DANA.....	1	5
	Ya	Tidak																	
(i) PEMBIAYAAN KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL).....	1	5																	
(ii) PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO (UMI).....	1	5																	
(iii) PROGRAM MEMBINA EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA (PNM MEKKAER).....	1	5																	
(iv) BANK WAKAF MIKRO (BWM).....	1	5																	
(v) DANA BERGULIR OLEH LEMBAGA PENGELOLA DANA.....	1	5																	
<p>B. DALAM SETAHUN TERKAHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN USAHA SEBAGAI BERIKUT: <i>(Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)</i></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>(i) BANTUAN RUTIN UNTUK PANGAN</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>(ii) BANTUAN RUTIN UNTUK ANAK</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>(iii) BANTUAN RUTIN UNTUK LANSIA</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>(iv) BANTUAN RUTIN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>(v) BANTUAN RUTIN LAINNYA</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> </table>	Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir			Rp.	(i) BANTUAN RUTIN UNTUK PANGAN	Rp.	(ii) BANTUAN RUTIN UNTUK ANAK	Rp.	(iii) BANTUAN RUTIN UNTUK LANSIA	Rp.	(iv) BANTUAN RUTIN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS	Rp.	(v) BANTUAN RUTIN LAINNYA	Rp.	Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir			Rp.
Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir																			
	Rp.																		
(i) BANTUAN RUTIN UNTUK PANGAN	Rp.																		
(ii) BANTUAN RUTIN UNTUK ANAK	Rp.																		
(iii) BANTUAN RUTIN UNTUK LANSIA	Rp.																		
(iv) BANTUAN RUTIN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS	Rp.																		
(v) BANTUAN RUTIN LAINNYA	Rp.																		
Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir																			
	Rp.																		
<p>2211. A. DALAM SETAHUN TERKAHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN RUTIN?</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Ya</td> <td style="text-align: center;">Tidak</td> </tr> <tr> <td>Ya 1 → 2211.A. / s.d. v</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak.....5 → 2211.B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Ya	Tidak	Ya 1 → 2211.A. / s.d. v			Tidak.....5 → 2211.B											
	Ya	Tidak																	
Ya 1 → 2211.A. / s.d. v																			
Tidak.....5 → 2211.B																			
<p>B. DALAM SETAHUN TERKAHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN TIDAK RUTIN?</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Ya</td> <td style="text-align: center;">Tidak</td> </tr> <tr> <td>Ya 1 → 2211.B. i</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak.....5 → Blok XXIII</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Ya	Tidak	Ya 1 → 2211.B. i			Tidak.....5 → Blok XXIII											
	Ya	Tidak																	
Ya 1 → 2211.B. i																			
Tidak.....5 → Blok XXIII																			

BLOK XXIII. CATATAN

Kunjungan I : Tanggal:

Kunjungan II : Tanggal:

Mulai: : : :

Mulai: : : :

Selesai: : : :

Selesai: : : :

Kode 706: Lapangan Usaha (disi oleh pengawas)

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 01. Pertanian tanaman padi dan palawija | 09. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin | 15. Informasi dan komunikasi | 22. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial |
| 02. Hortikultura | 10. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi | 16. Aktivitas keuangan dan asuransi | 23. Kesenian, hiburan, dan rekreasi |
| 03. Perkebunan | 11. Konstruksi | 17. Real estat | 24. Aktivitas jasa lainnya |
| 04. Perikanan | 12. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 18. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis | 25. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja |
| 05. Peternakan | 13. Pengangkutan dan pergudangan | 19. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, kelenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya | 26. Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya |
| 06. Kehutanan dan pertanian lainnya | 14. Penyediaan dan pengendalian | 20. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib | |
| 07. Pertambangan dan penggalian | | 21. Pendidikan | |
| 08. Industri pengolahan | | | |

Waktu selesai wawancara: : :



METADATA

<https://www.bps.go.id>

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Anak Usia Dini	Perbandingan antara penduduk usia 0-6 tahun terhadap seluruh penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Susenas Maret
2	Persentase Anak Usia Dini Menurut Status Tinggal Bersama	Persentase anak usia 0-6 tahun yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga: (a) Ayah kandung dan ibu kandung (b) Ayah kandung namun tidak ada ibu kandung atau ibu kandung namun tidak ada ayah kandung (c) Tidak ada ayah kandung dan tidak ada ibu kandung	Persentase anak usia dini tinggal bersama orang tua lengkap: $\frac{\text{Jumlah anak usia dini kategori (a)}}{\text{Jumlah anak usia dini}} \times 100\%$ Persentase anak usia dini tinggal bersama orang tua tunggal: $\frac{\text{Jumlah anak usia dini kategori (b)}}{\text{Jumlah anak usia dini}} \times 100\%$ Persentase anak usia dini tidak tinggal bersama orang tua: $\frac{\text{Jumlah anak usia dini kategori (c)}}{\text{Jumlah anak usia dini}} \times 100\%$	Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP)
3	Persentase Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak	Persentase anak usia 0-4 tahun yang memenuhi minimal salah satu kondisi berikut: (1) pernah dititipkan/diasuh oleh anak usia di bawah 10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa dalam seminggu terakhir selama >1 jam; (2) pernah ditinggalkan sendiri dalam seminggu terakhir selama >1 jam	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapat pengasuhan tidak layak}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP)
4	Persentase Anak Usia Dini yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir	Persentase anak usia 0-6 tahun yang dalam setahun terakhir melakukan upaya penyembuhan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional.	$\frac{\text{Jumlah anak usia dini yang rawat inap}}{\text{Jumlah anak usia dini}} \times 100$	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Persentase Anak Usia Dini yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dan Rawat Inap	Persentase anak usia 0-6 tahun yang menggunakan minimal salah satu jaminan kesehatan sebagai berikut: (1) BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI); (2) BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri; (3) Jamkesda; (4) Asuransi Swasta; (5) Perusahaan/kantor	<p>Persentase anak usia 0-6 tahun yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan:</p> $\frac{\text{Jumlah anak usia dini yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan}}{\text{Jumlah anak usia dini yang berobat jalan}} \times 100\%$ <p>Persentase anak 0-6 tahun yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap:</p> $\frac{\text{Jumlah anak usia dini yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap}}{\text{Jumlah anak usia dini yang rawat inap}} \times 100\%$	Susenas Maret
6	Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif	Persentase anak usia 0-5 bulan yang hanya memperoleh air susu ibu sejak lahir sampai berumur 5 bulan dan tidak diberi makanan atau minuman lain (termasuk air putih), kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes.	<p>Persentase anak usia 0-5 bulan yang memperoleh ASI eksklusif:</p> $\frac{\text{Jumlah anak usia 0-5 bulan yang memperoleh ASI eksklusif}}{\text{Jumlah anak usia 0-5 bulan}} \times 100\%$	Susenas Maret
7	Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap	Persentase anak usia 12-23 bulan yang memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR.	<p>Persentase anak usia 12-23 bulan yang memperoleh imunisasi dasar lengkap:</p> $\frac{\text{Jumlah anak usia 12-23 bulan yang memperoleh imunisasi dasar lengkap}}{\text{Jumlah anak usia 12-23 bulan}} \times 100\%$	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Memiliki Akses pada Kelayakan Rumah Tinggal, Layanan Sumber Air Minum, dan Sanitasi	Persentase rumah tangga anak 0-6 tahun yang memiliki akses pada: (a) Rumah layak huni (b) Layanan sumber air minum layak Layanan sanitasi layak	Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki akses pada rumah tinggal layak: $\frac{\text{Jumlah rumah tangga anak 0 - 6 tahun yang tinggal di rumah layak}}{\text{Jumlah rumah tangga anak usia 0 - 6 tahun}} \times 100\%$ Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki akses pada layanan sumber air minum layak: $\frac{\text{Jumlah rumah tangga anak 0 - 6 tahun yang memiliki sumber air minum layak}}{\text{Jumlah rumah tangga anak usia 0 - 6 tahun}} \times 100\%$ Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki akses pada sanitasi layak: $\frac{\text{Jumlah rumah tangga anak 0 - 6 tahun yang memiliki sanitasi layak}}{\text{Jumlah rumah tangga anak usia 0 - 6 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret
9	Persentase Anak Usia Dini yang Tinggal dengan ART Perokok	Persentase anak usia dini yang tinggal dengan minimal satu anggota rumah tangga (ART) yang merokok	$\frac{\text{Jumlah anak 0 - 6 tahun yang tinggal dengan ART perokok}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 6 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Persentase Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Prasekolah	Persentase anak usia 0-6 tahun yang Masih/pernah mengikuti prasekolah tahun ajaran ini; (2) Pernah mengikuti prasekolah tahun ajaran ini; (3) Pernah mengikuti prasekolah tahun ajaran sebelumnya terhadap seluruh penduduk usia 0-6 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 6 tahun yang pernah atau sedang prasekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 6 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret
11	Angka Kesiapan Sekolah	Persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD, terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD	$\frac{\text{Jumlah siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD}}{\text{Jumlah siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD}} \times 100\%$	Susenas Maret
12	Persentase Berumur 5-6 Tahun yang pernah/sedang Mengikuti Kursus	Persentase penduduk berumur 5-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti kursus terhadap penduduk berumur 5-6 tahun.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti kursus}}{\text{Jumlah penduduk berumur 5 - 6 tahun}} \times 100\%$	Susenas MSBP
13	Persentase Berumur 5-6 Tahun yang Berolahraga Terakhir	Persentase penduduk berumur 5-6 tahun yang berolahraga seminggu terakhir terhadap penduduk berumur 5-6 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang berolahraga seminggu terakhir}}{\text{Jumlah penduduk berumur 5 - 6 tahun}} \times 100\%$	Susenas MSBP
14	Persentase Berumur 5-6 Tahun yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni Selama Tiga Bulan Terakhir	Persentase penduduk berumur 5-6 tahun yang selama tiga bulan terakhir menonton pertunjukan/pameran seni secara (1) langsung, (2) tidak langsung, (3) langsung dan tidak langsung, terhadap penduduk berumur 5-6 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang menonton pertunjukan atau pameran seni}}{\text{Jumlah penduduk berumur 5 - 6 tahun}} \times 100\%$	Susenas MSBP

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Persentase Berumur 0-6 Tahun yang Menonton TV Seminggu Terakhir	Persentase penduduk 0-6 tahun yang seminggu terakhir menonton TV terhadap penduduk berumur 0-6 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 6 tahun yang menonton TV}}{\text{Jumlah penduduk berumur 0 - 6 tahun}}$	Susenas MSBP
16	Persentase Berumur 0-6 Tahun yang Mendengarkan Radio Seminggu Terakhir	Persentase penduduk 0-6 tahun yang seminggu terakhir mendengarkan radio terhadap penduduk berumur 0-6 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 6 tahun yang mendengarkan radio}}{\text{Jumlah penduduk berumur 0 - 6 tahun}}$	Susenas MSBP
17	Persentase Berumur 0-6 Tahun yang Membaca Seminggu Terakhir	Persentase penduduk 0-6 tahun yang seminggu terakhir membaca (koran/surat kabar, majalah/tabloid, buku cerita, buku pelajaran, buku pengetahuan, dan lainnya) terhadap penduduk berumur 0-6 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 6 tahun yang membaca}}{\text{Jumlah penduduk berumur 0 - 6 tahun}}$	Susenas MSBP
18	Persentase Berumur 0-6 Tahun yang pernah menggunakan internet	Persentase penduduk 0-6 tahun yang pernah menggunakan/mengakses internet (termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, WhatsApp, dll) selama tiga bulan terakhir terhadap penduduk berumur 0-6 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 6 tahun yang menggunakan internet}}{\text{Jumlah penduduk berumur 0 - 6 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret
19	Persentase Anak Usia Dini yang Memiliki Akta Kelahiran	Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 6 tahun yang memiliki Akta Kelahiran baik ditunjukkan atau tidak}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 6 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Persentase Rumah Tangga Anak Usia Dini yang Menjadi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase rumah tangga dengan anak usia 0-6 tahun yang pernah menjadi penerima Program Keluarga Harapan dalam setahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan anak usia 0 – 6 tahun yang pernah menjadi penerima PKH dalam setahun terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga dengan anak usia 0 – 6 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret
21	Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan	Persentase Anak Usia Dini yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Sejak 1 Januari-31 Desember 2022. Jenis Kejahatan meliputi pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya (misalnya penculikan, pemerasan, penipuan, pengrusakan barang, dan sebagainya).	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 6 tahun yang pernah menjadi korban kejahatan sejak 1 Januari – 31 Desember 2022}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 6 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret
22	Persentase Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan	Persentase anak berumur 0-6 tahun yang tinggal di rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan.	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 6 tahun yang tinggal di rumah tangga miskin}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 6 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Persentase Balita Telantar	<p>Kriteria ketelantaran balita sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah diberi Air Susu Ibu (ASI); 2. Tidak mempunyai bapak/ibu kandung; 3. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu; 4. Makan lauk pauk berprotein tinggi, protein nabati kurang dari empat kali dan protein hewani kurang dari tiga kali dalam seminggu; 5. Ibu yang bertanggung jawab terhadap anak bekerja selama seminggu terakhir; 6. Bila anak sakit tidak diobati; dan 7. Anak ditinggalkan atau diasuh oleh orang lain (tetangga, lainnya atau ditinggal sendiri) selama seminggu terakhir. <p>Balita dikatakan telantar jika memenuhi setidaknya 3 dari 7 kriteria ketelantaran. Balita dikatakan hampir telantar jika memenuhi 2 dari 7 kriteria ketelantaran. Balita dikatakan tidak telantar jika tidak ada atau maksimal 1 dari 7 kriteria ketelantaran terpenuhi.</p>	<p>Persentase Balita Terlantar:</p> $\frac{\text{Jumlah balita usia 0 – 4 tahun yang memenuhi setidaknya 3 kriteria ketelantaran}}{\text{Jumlah balita usia 0 – 4 tahun}} \times 100\%$ <p>Persentase Balita Hampir Terlantar:</p> $\frac{\text{Jumlah balita usia 0 – 4 tahun yang memenuhi 2 kriteria ketelantaran}}{\text{Jumlah balita usia 0 – 4 tahun}} \times 100\%$ <p>Persentase Balita Tidak Terlantar:</p> $\frac{\text{Jumlah balita usia 0 – 4 tahun yang tidak ada atau maksimal 1 kriteria ketelantaran terpenuhi}}{\text{Jumlah balita usia 0 – 4 tahun}} \times 100\%$	Susenas MSBP

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo no. 6-8, Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4; fax: (021) 3857046

Homepage: <https://www.bps.go.id>; email: bpsHQ@bps.go.id